

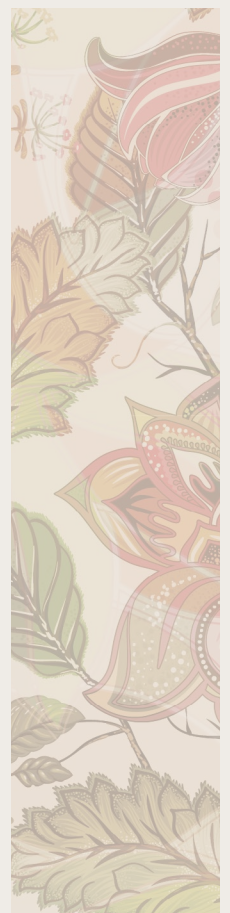


LAPORAN **TRIWULANAN**

III-2019

LAPORAN **TRIWULANAN**

Triwulan III - 2019



Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan OJK,
kami mohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk dapat
melakukan pengisian survei dengan link di bawah ini:



<http://tinyurl.com/SurveiLaporanOJK>

Laporan Triwulanan ini diterbitkan oleh
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
Versi digital (PDF) dapat diunduh melalui www.ojk.go.id

Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lantai 4
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710
Phone. (021) 296 00000
Fax. (021) 386 6032

Kata Pengantar

Wimboh Santoso

Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan



Seraya memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkah dan rahmat-Nya, OJK mampu mengemban amanat undang-undang sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan serta melindungi konsumen keuangan dan masyarakat di Indonesia.

Secara umum, pada triwulan III-2019 kinerja ekonomi global masih cukup dinamis. Pertumbuhan perekonomian global kembali direvisi turun oleh IMF dan Bank Dunia sebagai dampak dari masih tingginya ketidakpastian perang dagang Amerika Serikat (AS)-Tiongkok. *Leading indicators* perekonomian global triwulan III-2019 juga masih menunjukkan tren melambat. Sejalan hal tersebut, beberapa bank sentral dunia merespon dengan menjalankan kebijakan akomodatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih agresif.

Sebagian besar pasar saham global terkoreksi di triwulan III-2019 terutama terkait sentimen negatif dari perang dagang AS-Tiongkok. Namun demikian, indeks saham negara maju utama seperti AS, Zona Eropa, Jepang, dan Tiongkok relatif membaik karena pasar menyambut baik relaksasi kebijakan moneter yang dilakukan masing-masing bank sentral. Koreksi terdalem terjadi di bursa saham Hongkong yang lebih disebabkan sentimen negatif dari aksi unjuk rasa terhadap RUU Ekstradisi yang telah berlangsung

sejak Juni 2019. Ke depan risiko dari dinamika pasar keuangan global tetap perlu diwaspadai mengingat masih belum solidnya kesepakatan perang tarif dagang AS-Tiongkok.

Dampak perlambatan ekonomi global sudah mulai dirasakan pada perekonomian domestik, meskipun tetap dapat tumbuh cukup stabil yang ditopang oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi swasta. Tingkat inflasi masih terjaga pada rentang target yang ditetapkan. Hal yang perlu mendapat perhatian khusus adalah kinerja eksternal, di mana pertumbuhan ekspor dan impor turun dengan cukup signifikan.

Di tengah dinamika ekonomi dan pasar keuangan global, kondisi sektor jasa keuangan nasional terjaga dengan baik. Kinerja intermediasi perbankan walaupun termoderasi namun secara umum masih dalam keadaan solid dengan kredit yang tumbuh sehat dan tingkat risiko yang terjaga. Sejalan dengan kinerja perbankan, pembiayaan non-bank dapat tumbuh secara gradual dengan risiko yang cukup stabil. Sementara itu, industri pasar modal mengalami koreksi tipis ditandai dengan melemahnya IHSG. Namun demikian, aliran dana asing ke pasar saham masih mencatatkan *net inflow*, bahkan untuk pasar SBN terus mengalami kenaikan *net buy* asing secara *year to date*. Di tengah kondisi perekonomian global yang melambat, patut disyukuri pasar obligasi

Indonesia cukup menggembirakan yang ditandai dengan tren *yield* yang menurun. Pertumbuhan Nilai Aset Bersih Reksa Dana juga mengalami pertumbuhan cukup solid.

Dalam upaya peningkatan efektifitas pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, selama triwulan III-2019 OJK menerbitkan 8 (delapan) Peraturan OJK (POJK) dan 4 (empat) Surat Edaran OJK (SEOJK). POJK yang diterbitkan terdiri dari 2 (dua) POJK yang mengatur sektor Perbankan, 4 (empat) yang mengatur sektor Pasar Modal, 1 (satu) POJK yang mengatur sektor IKNB dan 1 (satu) yang mengatur Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Salah satu peraturan yang diterbitkan ditujukan untuk memperkuat permodalan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah.

Sebagai upaya dalam mendorong perkembangan industri teknologi keuangan di tanah air agar semakin berperan dalam peningkatan inklusi keuangan masyarakat, berbagai upaya telah dilakukan OJK, antara lain berkolaborasi dengan Bank Indonesia dan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) menyelenggarakan *Indonesia Fintech Summit & Expo* (IFSE) tahun 2019. Selain itu, untuk mendorong anak muda meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, OJK menginisiasi Aksi Mahasiswa dan Pemuda Indonesia Menabung. Upaya meningkatkan inklusi keuangan sejak usia dini juga terus digalakkan melalui

kerja sama dengan beberapa pemerintah daerah untuk mewajibkan pelajar memiliki tabungan atau yang disebut dengan Simpanan Pelajar (SimPel) di wilayahnya. Sosialisasi juga terus digencarkan melalui Sinergi Edukasi OJK dengan Kementerian/Lembaga lain serta melibatkan berbagai lapisan masyarakat di antaranya Guru, Hakim/Panitera Pengadilan Agama, Buruh Migran, Pelajar, Karyawan, dan Pengusaha Muda dan Pelaku UMKM.

Dalam rangka pengembangan kapasitas manajemen internal, OJK terus meningkatkan kapasitas pengawas secara berkelanjutan melalui kerja sama dengan otoritas keuangan negara lain/lembaga internasional. Selanjutnya, OJK kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Audited OJK Tahun 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) untuk yang ke-enam kalinya. Hal ini tentunya didukung oleh tata kelola yang semakin baik dan memadai di usia OJK yang akan menginjak 8 tahun.

Akhir kata, saya mewakili Dewan Komisiner OJK menyampaikan terima kasih atas dukungan seluruh pemangku kepentingan serta mengapresiasi upaya terbaik seluruh insan OJK dalam mengemban tugas pokok dan fungsi OJK. Perjalanan menempuh perbaikan berkelanjutan dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan OJK masih panjang dan perlu komitmen kuat seluruh insan OJK untuk mewujudkan sektor jasa keuangan yang stabil, kontributif dan inklusif.

Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan

Wimboh Santoso



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GRAFIK	xv
RINGKASAN EKSEKUTIF	xviii
DUKUNGAN OJK TERHADAP PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH	xxii
INDIKATOR UMUM SEKTOR JASA KEUANGAN	xxiv

BAB 1

TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN

1.1 PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA DAN DUNIA	29
1.1.1 Perkembangan Ekonomi Global	29
1.1.2 Perkembangan Ekonomi Domestik	31
1.1.3 Perkembangan Pasar Keuangan	34
1.2 PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN	36
1.2.1 Perkembangan Bank Umum Konvensional	36
1.2.2 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	39
1.2.3 Profil Risiko Perusahaan	41
1.2.4 Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	42
1.2.5 Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif	44
1.3 PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL	45
1.3.1 Perkembangan Perdagangan Efek	45
1.3.2 Perkembangan Jumlah SID	49
1.3.3 Perkembangan Perusahaan Efek	48
1.3.4 Perkembangan Pengelolaan Investasi	50
1.3.5 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik	53
1.4 PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK	58
1.4.1 Perkembangan Perasuransian Konvensional dan BPJS	58
1.4.2 Perkembangan Industri Dana Pensiun	61
1.4.3 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan	63
1.4.4 Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura Konvensional	67
1.4.5 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	68
1.4.6 Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus	69
1.4.7 Perkembangan Industri Jasa Penunjang IKNB	72
1.4.8 Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro Konvensional	73
1.4.9 Perkembangan Industri <i>Fintech</i> (<i>Financial Technology</i>)	73
1.5 PERKEMBANGAN PROGRAM FLAGSHIP OJK	74
1.5.1 Bank Wakaf Mikro (BWM)	74
1.5.2 Layanan Keuangan Tanpa Kantor (LAKU PANDAI)	74
1.5.3 Jangkau, Sinergi, dan <i>Guideline</i> (JARING)	75

BAB 2
TINJAUAN
OPERASIONAL
SEKTOR
JASA
KEUANGAN

1.5.4	Simpanan Pelajar (SIMPEL)	75
1.5.5	Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pasar Modal	76
1.5.6	Program 1.000 Aktuaris	76
1.5.7	Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	77
1.5.8	Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)	77
1.5.9	Asuransi Nelayan	77
1.5.10	Asuransi Usaha untuk Pembudidaya Ikan Kecil	77
1.5.11	Pembiayaan Ekonomi Kreatif	77
1.5.12	Asuransi pada Sektor Pariwisata	78

2.1	AKTIVITAS PENGATURAN	81
2.1.1	Pengaturan Bank	81
2.1.2	Pengaturan Pasar Modal	81
2.1.3	Pengaturan IKNB	81
2.2	AKTIVITAS PENGAWASAN	81
2.2.1	Pengawasan Perbankan	81
2.2.2	Pengawasan Pasar Modal	84
2.2.3	Pengawasan IKNB	88
2.3	AKTIVITAS PENGEMBANGAN	103
2.3.1	Pengembangan Industri Perbankan	103
2.3.2	Pengembangan Industri Pasar Modal	103
2.3.3	Pengembangan IKNB	105
2.3.4	Inovasi Keuangan Digital	106
2.4	STABILITAS SISTEM KEUANGAN	108
2.4.1	Pasar Keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan	108
2.4.2	Arah Kebijakan dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan	109
2.4.3	Koordinasi Antar Lembaga dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan	110
2.5	KEBIJAKAN SEKTOR JASA KEUANGAN TERINTEGRASI	110
2.5.1	Kebijakan dalam Rangka Mendorong Pengembangan Sektor Prioritas	110
2.5.2	Perizinan Terintegrasi	113
2.5.3	Layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)	113
2.6	EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	114
2.6.1	Penelitian dan Pengaturan	114
2.6.2	Inklusi Keuangan	115
2.6.3	Literasi dan Edukasi Keuangan	121
2.6.4	Perlindungan Konsumen	121
2.6.5	Pembelaan Hukum Perlindungan Konsumen	125
2.6.6	Market Conduct	126
2.7	PENYIDIKAN SEKTOR JASA KEUANGAN	127
2.7.1	Penanganan Perkara	127
2.7.2	Kebijakan dan Dukungan Penyidikan	127

2.7.3	Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi)	128
2.7.4	Penanganan Perkara Investasi oleh Satgas Waspada Investasi	128
2.8	PENANGANAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME	129
2.8.1	Persiapan Pelaksanaan MER FATF 2019-2020	131
2.8.2	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia	131
2.8.3	Koordinasi Kelembagaan	132
2.9	HUBUNGAN KELEMBAGAAN	132
2.9.1	Kerja Sama Domestik	132
2.9.2	Kerja Sama Internasional	133

BAB 3

TINJAUAN

INDUSTRI DAN

OPERASIONAL

SEKTOR JASA

KEUANGAN

SYARIAH

3.1	TINJAUAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH	139
3.1.1	Perkembangan Perbankan Syariah	139
3.1.2	Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah	144
3.1.3	Perkembangan IKNB Syariah	148
3.2	PENGATURAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH	151
3.2.1	Pengaturan Perbankan Syariah	151
3.2.2	Pengaturan IKNB Syariah	151
3.3	PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH	151
3.3.1	Pengawasan Perbankan Syariah	151
3.3.2	Pengawasan Pasar Modal Syariah	153
3.3.3	Pengawasan IKNB Syariah	153
3.4	PENGEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH	154
3.4.1	Pengembangan Perbankan Syariah	154
3.4.2	Pengembangan Pasar Modal Syariah	155
3.4.3	Pengembangan IKNB Syariah	156

BAB 4

MANAJEMEN

STRATEGIS

DAN TATA

KELOLA

ORGANISASI

4.1	MANAJEMEN STRATEGI DAN KINERJA OJK	159
4.1.1	Pelaksanaan Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja	159
4.1.2	Pelaksanaan Sasaran Strategis OJK	159
4.1.3	Pelaksanaan Inisiatif Strategis dan Program Khusus OJK	159
4.2	AUDIT INTERNAL, MANAJEMEN RISIKO, DAN PENGENDALIAN KUALITAS	161
4.2.1	Audit Internal	161
4.2.2	Pengelolaan Risiko	161
4.2.3	Indeks Integritas	162
4.2.4	Sistem Pengendalian Kualitas	162

4.2.5	Program Pengendalian Gratifikasi	162
4.2.7	<i>Whistle Blowing System</i>	162
4.3	RAPAT DEWAN KOMISIONER	162
4.4	KOMUNIKASI	164
4.4.1	Komunikasi Terintegrasi	164
4.4.2	OJK TV	166
4.5	KEUANGAN	167
4.5.1	Realisasi Anggaran	167
4.5.2	International Organization for Standardization (ISO) 9001:2015	167
4.6	SISTEM INFORMASI	169
4.6.1	Rancang Bangun Sistem Informasi (RBSI) 2018-2022	169
4.6.2	Penguatan Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi	169
4.6.3	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi	169
4.7	LOGISTIK	174
4.7.1	Penyediaan Gedung Kantor Pusat	174
4.7.2	Penyediaan Gedung Kantor Regional/OJK	174
4.7.3	Pengembangan Pengaturan dan Sistem Logistik	175
4.8	SDM DAN TATA KELOLA ORGANISASI	175
4.8.1	Pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM)	175
4.8.2	Peningkatan Kompetensi Pegawai	175
4.8.3	Program Asesmen	176
4.8.4	<i>Learning Management System</i>	176
4.9	OJK INSTITUTE	177
4.9.1	Pengembangan SDM SJK	177
4.9.2	Kaji Ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	177
4.9.3	Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian di OJK	177
4.9.4	Program <i>Visit OJK</i>	178
4.9.5	OJK Mengajar	178
4.9.6	Penelitian <i>OJK Institute</i> dan <i>e-library</i>	178
4.10	MANAJEMEN PERUBAHAN	178
4.10.1	Program Manajemen Perubahan	179
4.10.2	Media Komunikasi Budaya dan Perubahan	179

SINGKATAN DAN AKRONIM

180

Daftar Tabel

Tabel I - 1	<i>World Economic Outlook IMF</i>	29
Tabel I - 2	Perkembangan Yield 10Y Pasar Surat Utang Global	34
Tabel I - 3	Perkembangan Indikator Risiko Jangka Menengah dan Volatilitas	35
Tabel I - 4	Kondisi Bank Umum	36
Tabel I - 5	Kondisi Bank Umum Konvensional	36
Tabel I - 6	Perkembangan Aset BUK per Kelompok Bank	37
Tabel I - 7	Tingkat Konsentrasi Aset BUK	37
Tabel I - 8	Kondisi Umum BPR	39
Tabel I - 9	Konsentrasi Penyaluran UMKM	42
Tabel I - 10	Kredit UMKM Berdasarkan Kelompok Bank	43
Tabel I - 11	Konsentrasi Kredit Perbankan Berdasarkan Sektor Ekonomi (%)	44
Tabel I - 12	Perkembangan Transaksi Perdagangan Saham	47
Tabel I - 13	Perkembangan IHSG dan Net Asing	48
Tabel I - 14	Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Utang	49
Tabel I - 15	Jenis Reksa Dana yang Mendapat Surat Efektif	49
Tabel I - 16	Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat	50
Tabel I - 17	Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek	50
Tabel I - 18	Proses Perpanjangan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek	50
	Proses Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan Wakil Perantara	50
Tabel I - 19	Pedagang Efek Pemasaran Terbatas	
Tabel I - 20	Perkembangan Pengelolaan Investasi	51
Tabel I - 21	Perkembangan Reksa Dana dan Produk Investasi Lainnya	51
Tabel I - 22	Jenis Reksa Dana yang Mendapat Surat Efektif	52
Tabel I - 23	Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin	53
Tabel I - 24	Perusahaan Penawaran Umum (Emisi)	54
Tabel I - 25	Perkembangan Nilai Emisi Berdasarkan Sektor Industri	54
Tabel I - 26	Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham	55
Tabel I - 27	Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Terbatas	55
Tabel I - 28	Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Efek PUB Obligasi dan/atau Sukuk	55
Tabel I - 29	Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Efek PUB Obligasi Tahap II dst	56
Tabel I - 30	Rencana Penggunaan Dana Atas Aksi Korporasi Berdasarkan Sektor Industri	57
Tabel I - 31	Total Aset IKNB	58
Tabel I - 32	Indikator Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS	59
Tabel I - 33	Portofolio Investasi Perasuransian Konvensional dan BPJS	59
Tabel I - 34	Jumlah Industri Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS	60
Tabel I - 35	Densitas dan Penetrasi Industri Perasuransian Konvensional dan BPJS	61
Tabel I - 36	RBC Industri Asuransi	61
Tabel I - 37	Distribusi Aset Industri Dana Pensiun	61
Tabel I - 38	Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun	62
Tabel I - 39	Portofolio Investasi Dana Pensiun	62
Tabel I - 40	Jumlah Dana Pensiun	63
Tabel I - 41	Piutang Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi	64
Tabel I - 42	Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan	65
Tabel I - 43	NPF Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi	66
Tabel I - 44	Pembiayaan atau Penyertaan Berdasarkan Sektor Ekonomi	67
Tabel I - 45	Pembiayaan Berdasarkan Jenis Infrastruktur	68
Tabel I - 46	Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang IKNB	72
Tabel I - 47	Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang IKNB	72

Tabel I - 48	Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	73
Tabel I - 49	Indikator Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Konvensional	73
Tabel I - 50	Perkembangan Industri <i>Fintech</i> (<i>Peer To Peer Lending</i>)	73
Tabel I - 51	LKM Syariah BWM (Bank Wakaf Mikro)	74
Tabel I - 52	Jumlah Agen dan Nasabah Laku Pandai	74
Tabel I - 53	NPL Kegiatan Usaha Kredit Maritim	75
Tabel I - 54	Penyaluran Pembiayaan Ekonomi Kreatif	77
Tabel II - 1	Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan	82
Tabel II - 2	Pemberian Keterangan Ahli/Saksi	82
Tabel II - 3	Perizinan Perubahan Jaringan Kantor Bank Umum	82
Tabel II - 4	Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional	83
Tabel II - 5	FPT Calon Pengurus dan PSP Bank Umum Konvensional	84
Tabel II - 6	Jaringan Kantor BPR	84
Tabel II - 7	Pengawasan Transaksi Efek	85
Tabel II - 8	Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik	86
Tabel II - 9	Laporan Berkala	87
Tabel II - 10	Sanksi Administratif Pasar Modal	88
Tabel II - 11	Penyampaian Laporan Bulanan Dana Pensiun	89
Tabel II - 12	Penyampaian Laporan Bulanan Lembaga Pembiayaan	89
Tabel II - 13	Pemeriksaan (<i>On-site Supervision</i>) Lembaga Pembiayaan	90
Tabel II - 14	Penerbitan LHP Lembaga Pembiayaan	90
Tabel II - 15	Daftar LKM yang Mendapatkan Izin Usaha	91
Tabel II - 16	Pelaksanaan Pendampingan LKM	91
Tabel II - 17	Pemeriksaan Langsung Lembaga Keuangan Khusus	92
Tabel II - 18	Penyelenggara <i>Fintech</i> P2P <i>Lending</i> Terdaftar dan Berizin Usaha	92
Tabel II - 19	Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Kelembagaan IKNB	91
Tabel II - 20	Pencabutan Izin IKNB	94
Tabel II - 21	Jumlah IKNB Konvensional	95
Tabel II - 22	Persetujuan Pengambilalihan IKNB	96
Tabel II - 23	Rekapitulasi Perubahan Kepemilikan Perusahaan/Perubahan Anggaran Dasar/ Perubahan Pemegang Saham/Perubahan PDP IKNB	96
Tabel II - 24	Rekapitulasi Pelaporan Kantor di Luar Kantor Pusat IKNB	97
Tabel II - 25	Rekapitulasi Pelaporan Kantor Pemasaran Perusahaan Asuransi dan Kantor Selain Cabang IKNB	98
Tabel II - 26	Rekapitulasi Pelaporan Perubahan Pengurus IKNB	99
Tabel II - 27	Rekapitulasi Pelaporan Syarat Keberlanjutan Pengurus IKNB	100
Tabel II - 28	Rekapitulasi Pelaporan Aktuaris dan Auditor Internal	100
Tabel II - 29	Rekapitulasi Pelaporan Tenaga Kerja Asing IKNB	101
Tabel II - 30	Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Kelembagaan Jasa Penunjang IKNB	101
Tabel II - 31	Pendaftaran Profesi	102
Tabel II - 32	Pendaftaran Agen Asuransi dan Agen Penjamin	102
Tabel II - 33	Jumlah Penetapan Hasil Pengujian Kemampuan dan Kepatutan (PKK)	102
Tabel II - 34	Jumlah Perusahaan Penunjang Berdasarkan Jenis Usaha	102
Tabel II - 35	Perbandingan Kinerja Perbankan Negara Berkembang	109
Tabel II - 36	Materi Kegiatan Sosialisasi Ketentuan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK)	115
Tabel II - 37	Fitur Tabungan Mahasiswa dan SiMUDA	119
Tabel II - 38	Penerimaan Layanan OJK	125
Tabel II - 39	Permohonan Penyelesaian Sengketa yang Diterima oleh LAPS pada Semester II-2018	125
Tabel II - 40	Penyidikan	127
Tabel II - 41	Pemberkasan Kejaksan	127
Tabel II - 42	Tingkat Pemahaman	128
Tabel III - 1	Indikator Perbankan Syariah	139
Tabel III - 2	Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Penggunaan	141

Tabel III - 3	Pembiayaan BUS dan UUS Berdasarkan Sektor Ekonomi	142
Tabel III - 4	Rata-rata Indikator Likuiditas Harian BUS	144
Tabel III - 5	Penambahan Emiten pada DES	144
Tabel III - 6	Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah	145
Tabel III - 7	Perkembangan Indeks Saham Syariah	145
Tabel III - 8	Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi	146
Tabel III - 9	Perkembangan Reksa Dana Syariah	146
Tabel III - 10	Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara <i>Outstanding</i>	147
Tabel III - 11	Jasa Layanan Syariah	147
Tabel III - 12	Aset IKNB Syariah	148
Tabel III - 13	Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah	148
Tabel III - 14	Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah	149
Tabel III - 15	Komponen Aset Perusahaan Modal Ventura Syariah	150
Tabel III - 16	Perkembangan Aset Pada Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah	150
Tabel III - 17	Permohonan Perizinan	152
Tabel IV - 1	Judul Siaran Pers	165
Tabel IV - 2	Jumpa Pers dan <i>Media Briefing</i>	166
Tabel IV - 3	Tema <i>Decision Maker</i> - OJK <i>Update</i>	166
Tabel IV - 4	Daftar Pembangunan/Pengembangan Aplikasi Tahun 2019	173
Tabel IV - 5	Pemberian Izin Definitif Pegawai OJK	175
Tabel IV - 6	Modul <i>E-learning</i> yang Tersedia	176
Tabel IV - 7	Program Pengembangan SDM SJK	177

Daftar Grafik

Grafik I - 1	Kondisi Ketenagakerjaan AS	29
Grafik I - 2	Dot Plot Target Fed Fund Rate	30
Grafik I - 3	Tingkat Pertumbuhan PDB Beberapa Negara	30
Grafik I - 4	Tingkat Inflasi IHK Beberapa Negara	30
Grafik I - 5	<i>Headline Manufacturing PMI</i>	31
Grafik I - 6	Perkembangan Harga Minyak Dunia dan Komoditas Lainnya	31
Grafik I - 7	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	31
Grafik I - 8	Indeks Penjualan Riil dan Indeks Kondisi Ekonomi Terkini	32
Grafik I - 9	Tingkat Inflasi Indonesia	32
Grafik I - 10	Realisasi Penerimaan Pajak terhadap APBN	32
Grafik I - 11	Realisasi Penerbitan SBN Bruto terhadap Target	33
Grafik I - 12	Neraca Pembayaran Indonesia	33
Grafik I - 13	Neraca Perdagangan Indonesia	33
Grafik I - 14	Perkembangan Pasar Saham Global	34
Grafik I - 15	Perkembangan Pasar Nilai Tukar Global	35
Grafik I - 16	Aliran Dana Non Residen di Pasar Keuangan Kawasan ASEAN-5	37
Grafik I - 17	Perkembangan Aset BUK	37
Grafik I - 18	Tren Pertumbuhan DPK	37
Grafik I - 19	Tren Pertumbuhan Kredit Tahunan (yoy)	37
Grafik I - 20	Tren Pertumbuhan Kredit Triwulanan (qtq)	38
Grafik I - 21	Tren NPL (%)	38
Grafik I - 22	Tren Rentabilitas dan Efisiensi	39
Grafik I - 23	Tren Aset BPR	40
Grafik I - 24	Kredit BPR Berdasarkan Jenis Penggunaan	40
Grafik I - 25	Tren Pertumbuhan DPK (yoy)	40
Grafik I - 26	Tren ROA dan BOPO BPR	40
Grafik I - 27	Perkembangan Risiko Kredit	41
Grafik I - 28	Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Kualitas	41
Grafik I - 29	Perkembangan PDN	41
Grafik I - 30	Perubahan Nilai Wajar dan Keuntungan Penjualan Surat Berharga	41
Grafik I - 31	Perkembangan LDR	42
Grafik I - 32	Rasio AL/NCD dan AL/DPK	42
Grafik I - 33	Penyebaran UMKM Berdasarkan Wilayah	43
Grafik I - 34	Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (qtq)	46
Grafik I - 35	Perkembangan Indeks Industri (qtq)	46
Grafik I - 36	Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-rata Perdagangan Saham Harian	47
Grafik I - 37	Perkembangan IHSG dan Net Asing	47
Grafik I - 38	Indonesia Government Securities Yield Curve (IBPA-IGSYC)	48
Grafik I - 39	Perkembangan Jumlah SID	49
Grafik I - 40	Rencana Penggunaan Dana	57
Grafik I - 41	Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun	62
Grafik I - 42	Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan	63
Grafik I - 43	Piutang Perusahaan Pembiayaan	64
Grafik I - 44	Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas	67
Grafik I - 45	Pembiayaan/Penyertaan Modal	67
Grafik I - 46	Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura	68
Grafik I - 47	Tren Aset, Liabilitas, dan Ekuitas	68
Grafik I - 48	Pertumbuhan Aset LJKK	69

Grafik I - 49	Pertumbuhan Aset Perusahaan Penjaminan	69
Grafik I - 50	<i>Outstanding</i> Penjaminan	70
Grafik I - 51	Pertumbuhan Aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	70
Grafik I - 52	Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Ekspor Indonesia	70
Grafik I - 53	Aset dan <i>Outstanding</i> Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero)	70
Grafik I - 54	Aset dan <i>Outstanding</i> Penyaluran Pinjaman Pegadaian	71
Grafik I - 55	Pertumbuhan Aset PT PNM (Persero)	71
Grafik I - 56	Pertumbuhan Pemberian Pinjaman dan Pembiayaan Modal PT PNM (Persero)	71
Grafik I - 57	Pertumbuhan Aset PT Danareksa (Persero)	71
Grafik I - 58	Pertumbuhan Portofolio PT Danareksa (Persero)	72
Grafik I - 59	Wilayah Persebaran Agen	74
Grafik I - 60	Kredit dan NPL Sektor Maritim terkait JARING	75
Grafik II - 1	Penyebaran Jaringan Kantor BUK	83
Grafik II - 2	Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	99
Grafik II - 3	Kinerja Intermediasi IJK	108
Grafik II - 4	CAR Perbankan	108
Grafik II - 5	RBC Industri Perasuransian	108
Grafik II - 6	<i>Gearing Ratio</i> Perusahaan Pembiayaan	109
Grafik II - 7	Rasio NPL Perbankan dan NPF Perusahaan Pembiayaan	109
Grafik II - 8	Kredit Perbankan ke Sektor Perumahan	110
Grafik II - 9	Porsi Kredit Kepemilikan Rumah	110
Grafik II - 10	Kredit ke Sektor Pariwisata	111
Grafik II - 11	Kredit Sektor Berorientasi Ekspor	112
Grafik II - 12	Perkembangan Jumlah Permintaan Informasi Debitur oleh Pelapor SLIK	113
Grafik II - 13	Jumlah Layanan SLIK kepada Masyarakat Periode	114
Grafik II - 14	Jumlah Permintaan Informasi Debitur oleh Pelapor SLIK	114
Grafik II - 15	Manfaat SLIK	114
Grafik II - 16	Penerimaan Layanan	121
Grafik II - 17	Layanan Pertanyaan	121
Grafik II - 18	Layanan Informasi	122
Grafik II - 19	Layanan Pengaduan	122
Grafik II - 20	Jenis Produk Terpopuler pada Sektor Perbankan	122
Grafik II - 21	Jenis Produk Terpopuler pada Industri Dana Pensiun	122
Grafik II - 22	Jenis Produk Terpopuler pada Industri Perasuransian	122
Grafik II - 23	Jenis Produk Terpopuler pada IKNB Lainnya	122
Grafik II - 24	Jenis Produk Terpopuler pada Industri Pembiayaan	123
Grafik II - 25	Jenis Produk Terpopuler pada Industri Sektor Pasar Modal	123
Grafik II - 26	Jenis Permasalahan Terbanyak pada Sektor Perbankan	123
Grafik II - 27	Jenis Produk Terbanyak pada Industri Dana Pensiun	123
Grafik II - 28	Jenis Produk Terbanyak pada Industri Perasuransian	123
Grafik II - 29	Jenis Produk Terbanyak pada IKNB Lainnya	123
Grafik II - 30	Jenis Produk Terbanyak pada Industri Pembiayaan	123
Grafik II - 31	Jenis Produk Terbanyak pada Sektor Pasar Modal	123
Grafik II - 32	Tingkat Penyelesaian Layanan	124
Grafik II - 33	Kanal Layanan	124
Grafik II - 34	Perbandingan Penerimaan Layanan Berdasarkan Satuan Kerja	124
Grafik II - 35	Tingkat Penyampaian Laporan PUJK pada SIPEDULI	124
Grafik II - 36	Pelanggaran Iklan	127
Grafik II - 37	Tren Pelanggaran Iklan	127
Grafik II - 38	Penghentian Entitas Investasi Ilegal oleh Satgas Waspada Investasi	128
Grafik III - 1	Tren Aset Perbankan Syariah	140
Grafik III - 2	Komposisi Sumber Dana Perbankan Syariah (selain Modal)	141
Grafik III - 3	Pertumbuhan DPK Bank Syariah (<i>qta</i>)	141

Grafik III - 4	Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Lokasi Bank Penyalur	143
Grafik III - 5	Indikator Likuiditas Harian BUS	144
Grafik III - 6	Laba dan ROA Perbankan Syariah	144
Grafik III - 7	Saham Syariah Berdasarkan Sektor Industri	145
Grafik III - 8	Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah	146
Grafik III - 9	Perkembangan Sukuk Negara <i>Outstanding</i>	147
Grafik III - 10	Jumlah Entitas IKNB Syariah	148
Grafik IV - 1	Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)	159
Grafik IV - 2	Pelaksanaan Audit per Triwulan	161
Grafik IV - 3	Jumlah Publikasi di <i>Website</i> OJK	164
Grafik IV - 4	Statistik Pengunjung <i>Website</i> OJK	164
Grafik IV - 5	Topik Siaran Pers	165
Grafik IV - 6	Statistik OJK TV	167
Grafik IV - 7	Realisasi Anggaran	167
Grafik IV - 8	Sebaran Kelompok Aplikasi di OJK (Fungsi Utama)	169
Grafik IV - 9	Sebaran Kelompok Aplikasi di OJK (Fungsi Pendukung)	169
Grafik IV - 10	Lokasi KR/KOJK	175
Grafik IV - 11	Peserta Praktek Kerja Lapangan	178

Ringkasan Eksekutif

Tinjauan Perekonomian Global dan Domestik

Pada triwulan III-2019 International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia kembali merevisi turun pertumbuhan perekonomian global 2019 dan 2020 terutama disebabkan karena semakin meningkatnya ketidakpastian perang dagang Amerika Serikat (AS)-Tiongkok yang telah berdampak pada turunnya tingkat investasi. Perlambatan pada tingkat investasi ini juga terlihat pada melambatnya tingkat produksi industri dan volume perdagangan dunia. PDB Amerika Serikat tumbuh sedikit melambat pada triwulan III-2019 ke 2,03% (yoy). Tingkat konsumsi rumah tangga dan tingkat investasi AS yang menjadi pendorong pertumbuhan kembali tumbuh melambat. Tingkat optimisme rumah tangga AS terhadap perekonomian cenderung turun diindikasikan oleh *consumer confidence index* (CCI) yang melanjutkan tren penurunan. Di sisi lain, pertumbuhan perekonomian Zona Eropa relatif stabil. Pada triwulan III-2019, PDB Zona Eropa tumbuh stabil di 1,15% (yoy) (triwulan II-19: 1,16% yoy), dengan inflasi 0,8% (yoy) di September 2019 (Juni 19: 1,3% yoy). Dalam rangka mendorong pemulihan perekonomian lebih lanjut, European Central Bank (ECB) menurunkan tingkat suku bunga kebijakannya sebesar 10 bps ke -0,50%.

Pada region Asia, sama halnya dengan perekonomian AS, perekonomian Tiongkok menunjukkan tren melambat yaitu sebesar 6,0% (yoy). Pelemahan tersebut antara lain disebabkan oleh kinerja eksternal yang masih berkontraksi dengan ekspor dan impor yang semakin menurun dibandingkan periode sebelumnya. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi Jepang tumbuh menguat 1,3% (yoy) dengan inflasi rendah. Kenaikan PDB ini terutama didorong oleh naiknya pengeluaran rumah tangga. Peningkatan pengeluaran rumah tangga pada kuartal ini lebih pada mengantisipasi kenaikan pajak penjualan yang akan segera berlaku di bulan Oktober, sehingga sifatnya tidak *sustainable*. Merespon hal tersebut Bank of Japan berencana mempertahankan kebijakan ekspansifnya guna mendorong inflasi untuk mencapai target 2,0%.

Perekonomian global ke depan secara umum diperkirakan masih dalam tren melambat. Hal ini diindikasikan dari pergerakan data indikator *headline*

manufacturing dari *Purchasing Manager Index* (PMI) Zona Eropa dan Jepang yang masih berada di bawah angka 50. Selain itu, PMI AS dan Tiongkok juga bergerak di sekitar ambang batas 50. Oleh karena itu, kegiatan manufaktur maupun sektor riil ke depan diperkirakan masih akan stagnan.

Dampak perlambatan ekonomi global juga terasa tercermin dari perekonomian domestik pada triwulan III-2019 tercatat tumbuh moderat di 5,02% (yoy) dengan tingkat inflasi tetap terjaga. Akan tetapi, kinerja eksternal perlu menjadi perhatian khusus karena pertumbuhan ekspor dan impor turun dengan cukup signifikan. Indikator sektor riil menunjukkan terjadinya perlambatan perekonomian. Indikator Markit PMI manufaktur menunjukkan perusahaan domestik masih berada dalam zona kontraksi di level 49,1 sedangkan pertumbuhan Indeks Penjualan Riil dari Survei Penjualan Eceran (SPE) melambat ke level 2,05% (yoy). Pergerakan indeks tersebut sejalan dengan Indeks Kondisi Ekonomi Terkini dari Survei Konsumen yang berkontraksi -2,50% (yoy).

Di sisi fiskal, penerimaan pajak baru mencapai 58,3% dari target APBN Sejalan dengan realisasi penerimaan negara yang di bawah rata-rata historis. Untuk membiayai defisit anggaran, Pemerintah menerbitkan SBN sebesar Rp693 triliun.

Defisit neraca transaksi berjalan triwulan III-2019 relatif membaik, yaitu tercatat sebesar USD7,7 miliar (2,66% terhadap PDB), lebih rendah dibandingkan dengan defisit triwulan sebelumnya sebesar USD8,2 miliar (2,94% terhadap PDB). Perbaikan kinerja neraca transaksi berjalan terutama ditopang oleh meningkatnya surplus neraca perdagangan barang dan menurunnya defisit neraca perdagangan migas. Sejalan dengan hal tersebut, cadangan devisa Indonesia terpantau stabil. Cadangan devisa September 2019 tercatat di USD124,3 miliar (Juni 19: USD123,8 miliar). Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 7,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka tersebut berada di atas standar kecukupan internasional sebesar tiga bulan impor.



Tinjauan Operasional Sektor Jasa Keuangan

Dalam rangka mewujudkan sektor jasa keuangan yang teratur, adil dan transparan dan dapat tumbuh secara berkelanjutan, stabil dan melindungi kepentingan konsumen, OJK melakukan beberapa inisiatif, antara lain:

1. Penyelenggaraan Indonesia *Fintech Summit & Expo* (IFSE) 2019

OJK berkolaborasi dengan Bank Indonesia dan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) telah menyelenggarakan Indonesia *Fintech Summit & Expo* (IFSE) 2019 yang merupakan *event Fintech* terbesar di Indonesia. Penyelenggaraan IFSE 2019 ini merupakan upaya untuk lebih mendorong industri Fintech berkembang di Tanah Air dan semakin berperan dalam peningkatan inklusi keuangan masyarakat. Acara dibuka Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia yang dilanjutkan *visionary talk* oleh Menteri Keuangan, Gubernur BI dan Ketua OJK dengan topik melanjutkan "*Fintech Bali Agenda*" yang disampaikan Presiden RI pada acara IMF. Kegiatan seminar dan *conference summit* pada IFSE 2019 dihadiri lebih dari 2.000 peserta *summit* serta 105 narasumber. *Expo* pada IFSE 2019 dikunjungi lebih dari 11.000 pengunjung. IFSE 2019 diliput lebih dari 20 media lokal dan internasional. Selain pameran yang menyajikan perusahaan-perusahaan *fintech* yang merupakan anggota dari AFTECH, AFPI dan AFSI, di IFSE 2019 publik juga bisa menikmati sajian program literasi keuangan menarik. Untuk memberikan edukasi dan pemahaman mengenai produk dan layanan *fintech* kepada masyarakat dari berbagai lapisan, mahasiswa, media dan segmen lainnya, program literasi keuangan dikemas ke dalam berbagai format dan membahas berbagai topik penting, seperti: i) *Payment System*: Solusi Pembayaran dan Perlindungan Konsumen, Solusi *Fintech* UMKM; ii) Pemahaman Dasar Mengenai *Fintech* P2P Lending; iii) Peran Agen *Fintech* dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan; iv) Peluncuran AFTECH *Handbook for Personal Finance: Tips and Tricks on Smart Financial Planning*.

2. Penanganan Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

OJK telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Perubahan tersebut dilatarbelakangi oleh: (i) Komitmen Indonesia untuk memenuhi standar internasional terkait APU PPT; (ii) Persiapan menghadapi MER Indonesia oleh *Financial Action Task Force* (FATF) tahun 2019/2020 sebagai syarat keanggotaan penuh Indonesia pada FATF, dan (iii) Penerbitan Peraturan Bersama Menlu RI, Kapolri, Kepala PPATK, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pemblokiran Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Adapun pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam POJK perubahan tersebut antara lain (i) kewajiban bagi Penyedia Jasa Keuangan untuk melakukan langkah-langkah tindak lanjut atas Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal antara lain pemeliharaan data, identifikasi dan pemeriksaan kesesuaian identitas, dan pemblokiran secara serta merta; (ii) penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang mengacu pada *National Risk Assessment* dan *Sectoral Risk Assessment*; dan (iii) penyempurnaan ketentuan verifikasi dan penatausahaan dokumen pada kegiatan transfer dana.

3. Program 1.000 Aktuaris

Program 1.000 Aktuaris merupakan program yang dicanangkan OJK pada pertengahan 2013. Program ini bertujuan untuk mempercepat jumlah aktuaris sehingga perkiraan kebutuhan profesional aktuaris untuk IKNB dapat terpenuhi. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah sosialisasi dan promosi, perkuliahan singkat sertifikasi aktuaris yang bekerja sama dengan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), serta pendidikan dan pelatihan aktuarial keahlian khusus asuransi umum. OJK



melakukan rekapitulasi atas laporan kegiatan Program 1.000 Aktuaris dari Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), Jasindo Insurance Academy (JIA), dan Tim READI dalam rangka penyusunan laporan kegiatan Program 1.000 Aktuaris tahun 2018. Jumlah aktuaris mengalami kenaikan sejumlah 18 orang, sehingga sampai dengan triwulan III-2019 terdapat 620 aktuaris yang terdiri dari 319 FSAI (*Fellow of the Society of Actuaries of Indonesia*) dan 301 ASAI (*Associate of the Society of Actuaries of Indonesia*).

Pada lingkup peningkatan literasi dan inklusi keuangan, OJK melaksanakan Sinergi Edukasi OJK dengan Kemendikbud dan Kemenag bagi Guru SD/MI di wilayah Kota Bengkulu dan Kupang. OJK juga melaksanakan sejumlah kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada komunitas dalam bentuk *Training of Trainers* bagi Hakim/ Panitera Pengadilan Agama, iB Vaganza di Kota Medan dan Palembang, Edukasi Keuangan bagi buruh migran, Pelajar, Karyawan, dan Pengusaha Muda dan UMKM, dan peluncuran Galeri Investasi Mobile (GIM) di Universitas Pembangunan Jaya (UPJ) Bintaro, Tangerang Selatan. Selain itu, OJK juga senantiasa mempercepat perluasan jangkauan akses keuangan daerah antara lain dengan pengukuhan TPAKD dan fasilitasi BUMDesa Center.

Manajemen Strategis dan Tata Kelola

Pada aspek manajemen strategis, OJK memasuki tahap pertama siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK) tahun 2020, yaitu penyusunan dan penyesuaian strategi OJK. Tahapan yang telah dilaksanakan antara lain penerjemahan misi dan visi, eksternal dan internal *environmental scanning*, serta

penggalan masukan pemangku kepentingan dan ahli. Selanjutnya, OJK melaksanakan penyusunan dan penyesuaian arah strategi organisasi dalam *Board Retreat* 2019.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur gedung kantor baik di kantor pusat maupun kantor OJK regional dan daerah, OJK melaksanakan sejumlah kegiatan, antara lain untuk gedung kantor pusat OJK menandatangani *Memorandum of Understanding* (MOU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Keuangan tentang Penggunaan Barang Milik Kementerian Keuangan. Di samping itu, OJK telah melakukan *pilot project* perihal penggunaan Sistem Naskah Dinas dan Arsip (SIPENA) ke beberapa Satuan Kerja. Selanjutnya, terkait Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2018, OJK kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) untuk ke enam kalinya.

OJK secara aktif menginisiasi program manfaat balik terhadap pemangku kepentingan khususnya masyarakat melalui 11 kunjungan Visit OJK dari instansi maupun pelajar dan mahasiswa, dengan total peserta sebanyak 745 dan melaksanakan OJK mengajar di Kendari dengan jumlah peserta sebanyak 250 orang. Selain itu, OJK melaksanakan pengembangan bagi sumber daya manusia di industri keuangan melalui rangkaian *workshop* yang dihadiri lebih dari 1.500 peserta.

Pembahasan lengkap mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OJK selama triwulan III-2019 dijabarkan dalam buku Laporan Triwulanan III-2019.



Dukungan OJK terhadap Program Prioritas Pemerintah



Bank Wakaf Mikro (LKM Syariah)

Hingga triwulan III-2019 OJK telah memberikan tambahan lima izin usaha LKM Syariah Bank Wakaf Mikro sehingga total BWM berjumlah **53**. Pembiayaan yang disalurkan sebanyak **Rp29,32 miliar** kepada **22.668 nasabah** yang terbentuk ke dalam **2.875 Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI)**.



Program JARING

Pembiayaan Sektor Kelautan dan Perikanan melibatkan 15 bank partner dan Konsorsium lembaga pembiayaan. Penyaluran kredit sebesar **Rp31,90 triliun** atau tumbuh **2,71% (yoy)** dan **NPL gross 3,34%**.



Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Program perlindungan dan pemberdayaan petani untuk meminimalkan dampak negatif perubahan iklim dan gangguan serangan organisme yang menyebabkan gagal panen. Sampai dengan triwulan III-2019, jumlah lahan pertanian yang terdaftar adalah **520.153 ha** dengan jumlah petani **825.767 orang**. Nilai premi tercatat adalah **Rp37,16 miliar**.



Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)

Program AUTS adalah program pemberian ganti rugi kepada peternak apabila terjadi kematian pada sapi ternak. Jumlah sapi yang terlindungi adalah **104.320 ekor** dan jumlah peternak yang ikut serta adalah **57.026 peternak** dengan total premi **Rp20,86 miliar** dan realisasi klaim **Rp6,26 miliar**.



Asuransi Nelayan

Asuransi yang mewajibkan nelayan memberikan perlindungan bagi nelayan dari risiko saat melaut. Sampai triwulan III-2019 klaim berjalan untuk asuransi nelayan mencapai **122.318 nelayan** dari **27 provinsi** dengan realisasi premi **Rp17,49 miliar**.



Asuransi Usaha Budidaya Ikan Kecil

Asuransi Usaha Budidaya Ikan Kecil memberikan proteksi terhadap kegagalan usaha budidaya komoditas Ikan kecil seperti udang, ikan bandeng, nila, patin dan polikultur karena penyakit/bencana alam. Luas lahan Asuransi Usaha Budidaya ikan kecil yang terdaftar sampai dengan triwulan III-2019 adalah sebesar **10.220 ha** dengan premi sebesar **Rp2,9 miliar**. Nilai klaim adalah sebesar **Rp2,6 miliar**.

SimPel Simpanan Pelajar

Simpanan Pelajar (SimPel)

Program Tabungan untuk Pelajar dalam rangka peningkatan akses masyarakat kepada layanan keuangan.



Jumlah Bank
350 Bank



Jumlah Rekening
21.584.281



Total Saldo
Rp8,76 triliun



Perjanjian Kerja Sama
347.447



Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pasar Modal

- Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP) tetap berjumlah lima dengan dana kelolaan sebesar **Rp2,89 triliun**.
- Dana kelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) meningkat sebesar **15,98%** menjadi **Rp27,36 triliun** dan jumlah kontrak RDPT meningkat menjadi **71 RDPT**.
- Kontrak KIK EBA berjumlah delapan dengan dana kelolaan sebesar **Rp6,99 triliun**.
- KIK-DIRE berjumlah tujuh KIK dengan dana kelolaan **Rp11,34 triliun**.
- KIK-DINFRA mengalami kenaikan sehingga berjumlah **enam** dengan dana kelolaan sebesar **Rp2,96 triliun**.



Pembiayaan Ekonomi Kreatif

Dalam rangka meningkatkan penyaluran pembiayaan pada Sektor Produktif khususnya di sektor industri kreatif berorientasi ekspor dan UMKM serta mendukung Program Pemerintah dalam rangka meningkatkan pembiayaan ekspor pada ekonomi kreatif dan UMKM. Selama triwulan III-2019, total penyaluran pembiayaan di sektor ekonomi kreatif sebesar **Rp43,28 triliun**.

LAKU PANDAI Sahabat Masyarakat

Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)

Laku Pandai merupakan Program penyediaan layanan keuangan melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank), dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Produk-produk yang disediakan antara lain tabungan dengan karakteristik *Basic Saving Account* (BSA), kredit atau pembiayaan kepada nasabah mikro, dan produk keuangan lainnya seperti Asuransi Mikro.



Jumlah Bank Penyelenggara
31 Bank



Jumlah Agen
1.146.131 Agen



Jumlah Nasabah
25.777.824 Nasabah



Jumlah Provinsi Tempat Agen
34 Provinsi

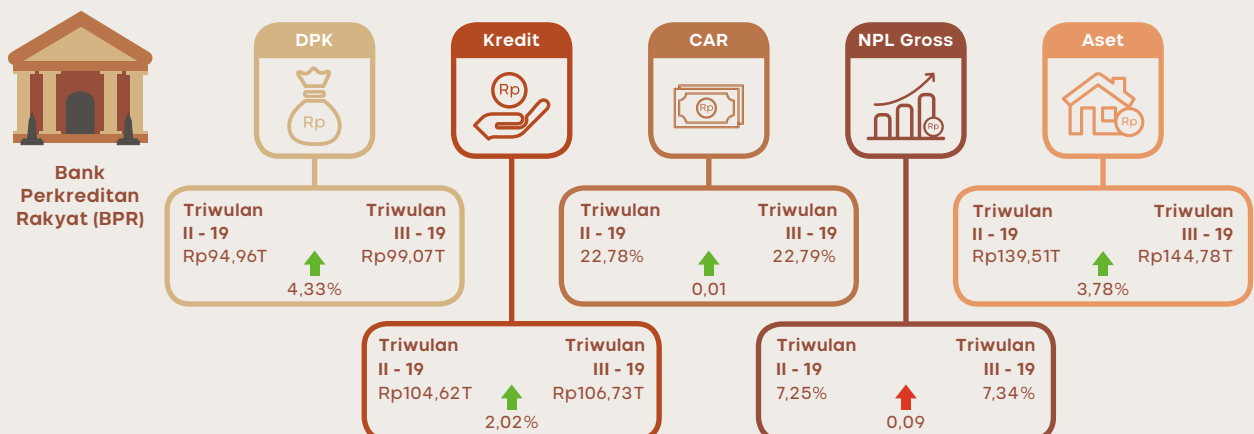
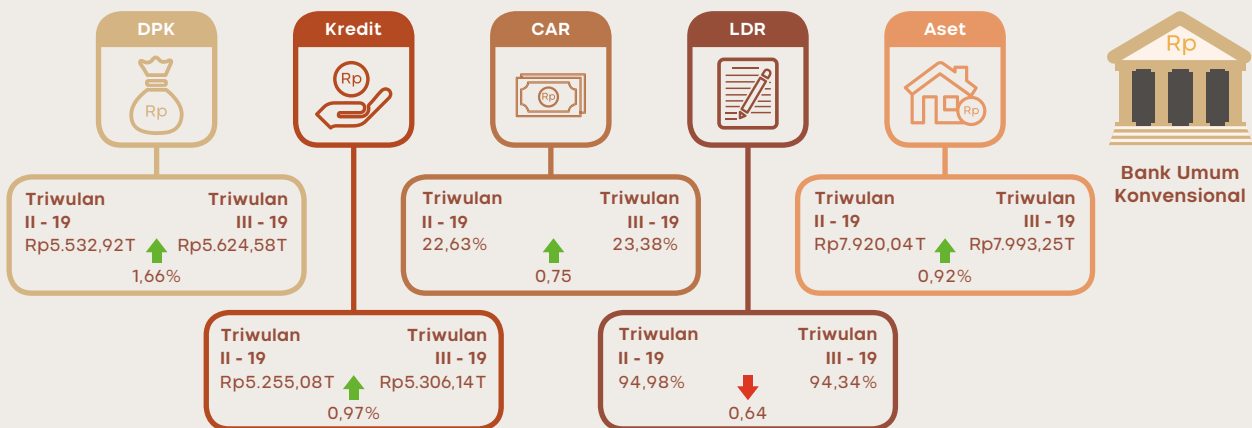
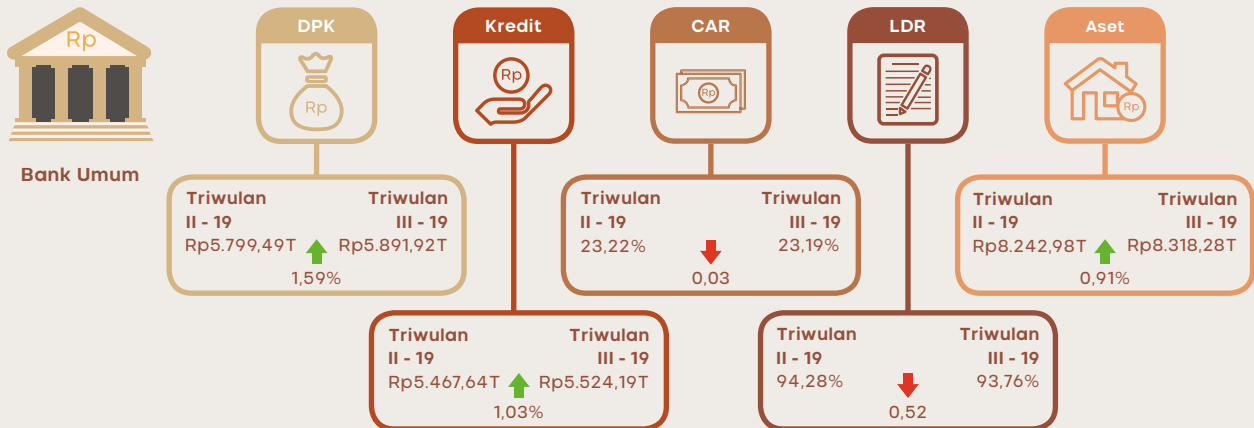


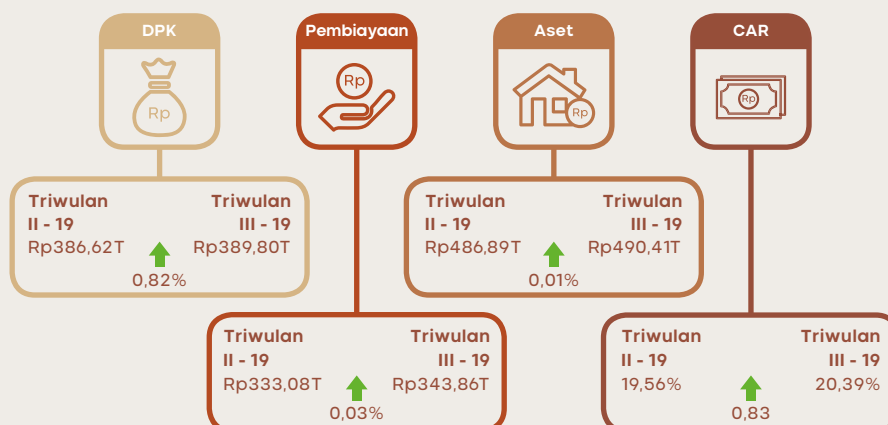
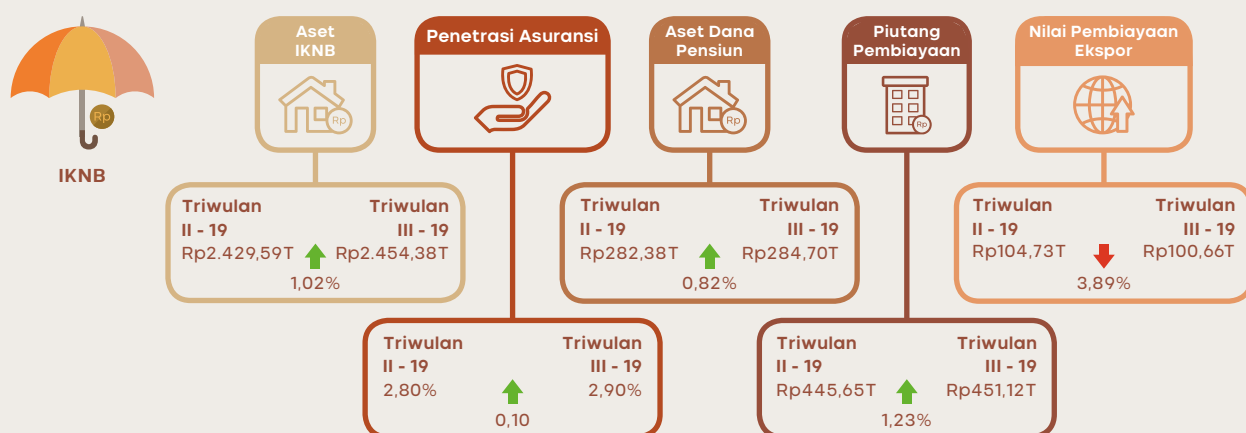
Jumlah Kab/Kota
511 Kab/Kota

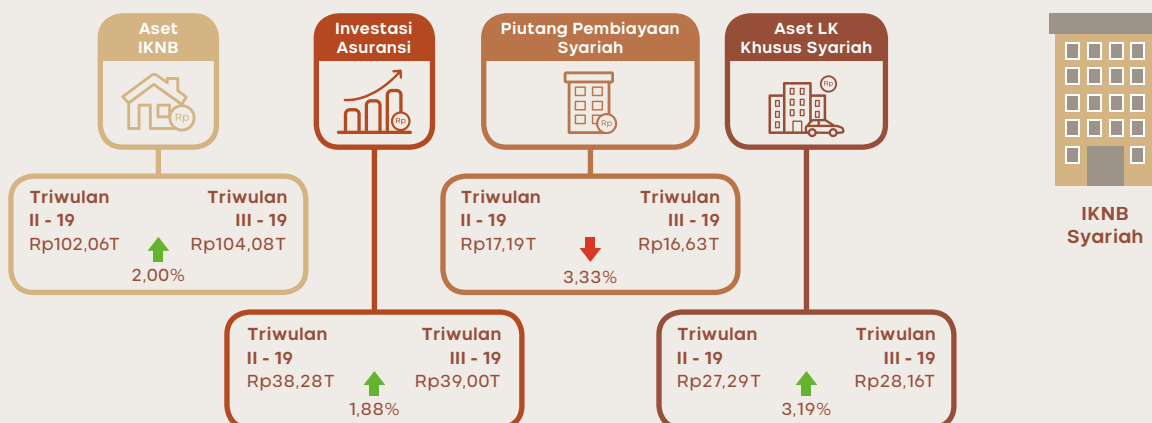
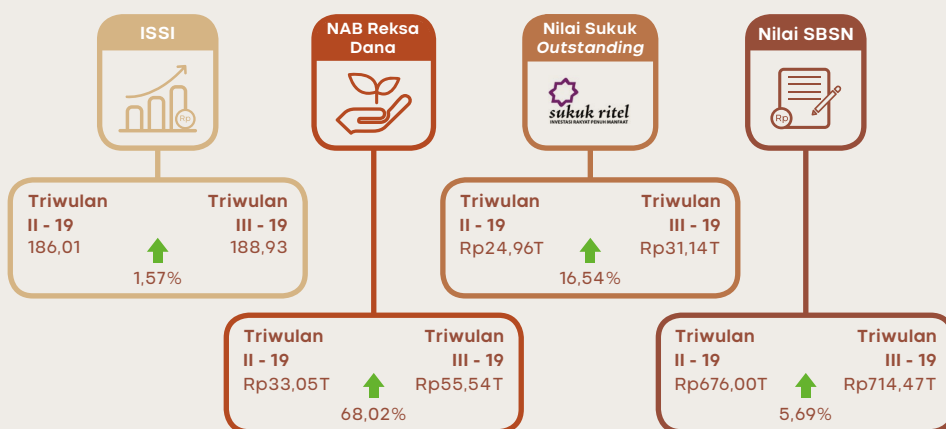
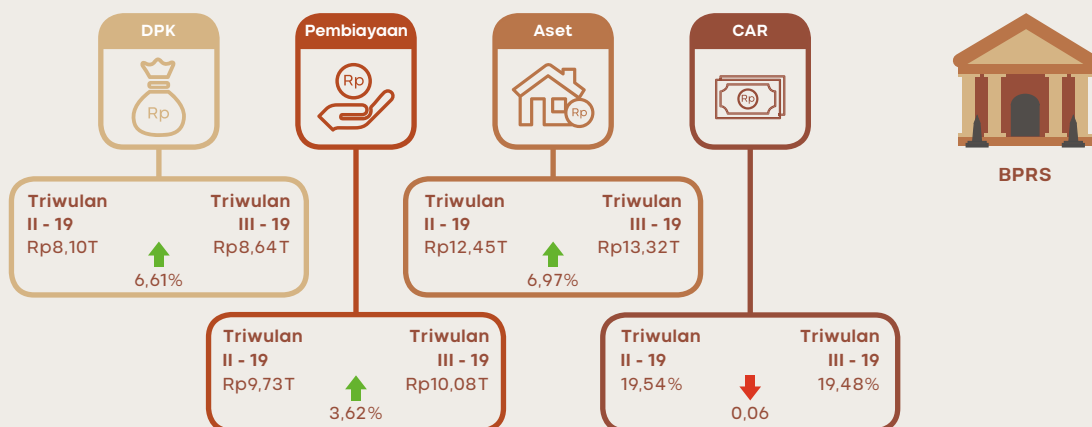


Jumlah Outstanding Tabungan
Rp2,22 triliun

Indikator Umum Sektor Jasa Keuangan









01

Tinjauan Industri
Sektor Jasa Keuangan



1.1 PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA DAN DUNIA

1.1.1 Perkembangan Ekonomi Global

IMF dan Bank Dunia kembali merevisi turun pertumbuhan perekonomian global 2019, sebagai dampak dari ketidakpastian perang dagang AS-Tiongkok. Hal ini terkonfirmasi dengan *leading indicator* perekonomian global triwulan III-2019 yang masih dalam tren melambat. Sejalan dengan hal tersebut, The Fed dan European Central Bank (ECB) masing-masing menurunkan suku bunga kebijakannya di bulan September 2019. Sedangkan Bank of Japan (BoJ) meskipun tidak menurunkan suku bunga acuannya, menyatakan tetap mempertahankan kebijakan moneter yang akomodatif.

Pada World Economic Outlook (WEO) International Monetary Fund (IMF) Oktober 2019, pertumbuhan perekonomian global di 2019 dan 2020 kembali direvisi turun. Revisi tersebut terutama disebabkan karena semakin tingginya ketidakpastian perang dagang AS-Tiongkok yang telah berdampak pada turunnya tingkat investasi. Hal ini ditandai dengan menurunnya impor mesin dan alat produksi khususnya di Tiongkok dan Asia Timur. Perlambatan pada tingkat investasi ini juga telah terlihat pada melambatnya tingkat produksi industri dan volume perdagangan dunia hingga Agustus 2019. Dengan demikian, perekonomian global secara umum kehilangan momentum dan tidak sesuai dengan yang diekspektasikan sebelumnya.

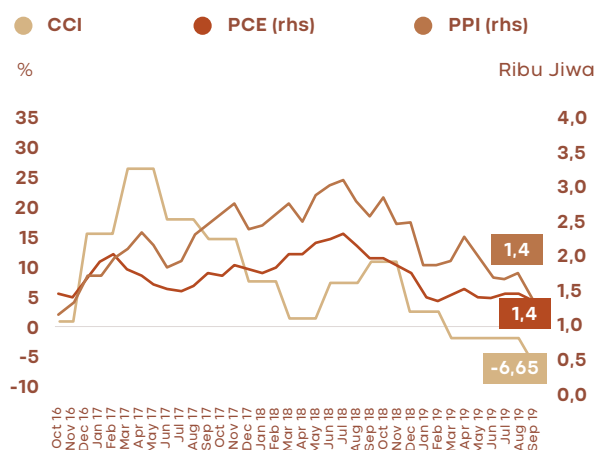
Tabel I - 1 ◇ World Economic Outlook IMF

% yoy	2019f			2020f		
	April 2019	Juli 2019	Oktober 2019	April 2019	Juli 2019	Oktober 2019
Global	3,3	3,2	3,0	3,6	3,5	3,4
Negara Maju	1,8	1,9	1,7	1,7	1,7	1,7
AS	2,3	2,6	2,4	1,9	1,9	2,1
Jepang	1,0	0,9	0,9	0,5	0,4	0,5
Zona Eropa	1,3	1,3	1,2	1,5	1,6	1,4
Negara Berkembang	4,4	4,1	3,9	4,8	4,7	4,6
Tiongkok	6,3	6,2	6,1	6,1	6,0	5,8
Harga Minyak	-13,4	-4,1	-9,6	-0,2	-2,5	-6,2
Harga Komoditas Non Migas	-0,2	-0,6	0,9	1,1	0,5	1,7

PDB Amerika Serikat tumbuh sedikit melambat pada triwulan III-2019 ke 2,03% yoy (triwulan II-19: 2,28% yoy). Penopang perekonomian domestik AS masih berasal dari tingkat konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 2,49% yoy (triwulan II-19: 2,64% yoy). Namun, tingkat investasi AS yang menjadi salah satu pendorong pertumbuhan kembali tumbuh melambat 0,77% yoy (triwulan II-2019: 1,27% yoy) karena ketidakpastian perang dagang AS-Tiongkok. Oleh karena itu, IMF merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi AS di 2019 menjadi 2,4% yoy (WEO Juli 2019: 2,6% yoy).

Indikator sektor riil AS masih bergerak *mixed*. Tingkat pengangguran triwulan III-2019 turun ke 3,5% (triwulan II-2019: 3,7%). Turunnya tingkat pengangguran ini sejalan dengan pergerakan *initial jobless claims* yang turun ke 220 ribu di akhir Juni 2019 (akhir Juni 2019: 222 ribu). Angka tingkat inflasi yang menggambarkan peningkatan permintaan dalam negeri AS tercatat meningkat. Inflasi IHK pada September 2019 tercatat naik ke 1,73% yoy (Juni 19: 1,66% yoy) walaupun masih berada di bawah target 2,0% yang telah ditetapkan. Namun demikian, tingkat optimisme rumah tangga AS terhadap perekonomian domestik cenderung turun diindikasikan oleh *consumer confidence index* (CCI) yang melanjutkan tren penurunan ke -6,65% yoy (Juni 2019: -2,20% yoy). Hal ini diperkuat oleh data *personal consumption expenditure* (PCE) yang stagnan di 1,33% yoy (Juni 2019: 1,36% yoy) dan *producer price index* (PPI) untuk mengukur harga barang domestik yang masih dalam tren turun ke 1,37% yoy (Juni 2019: 1,72% yoy).

Grafik I - 1 ◇ Kondisi Ketenagakerjaan AS



Sumber: CEIC

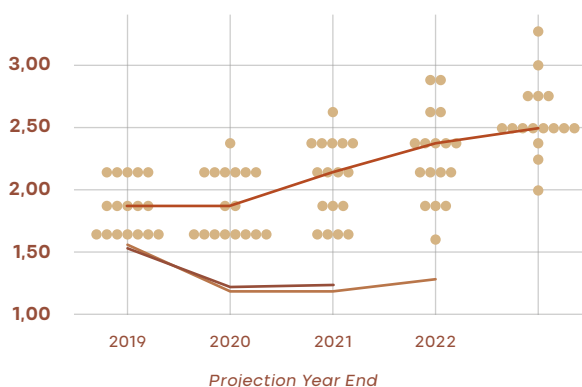
Pada Federal Open Market Committee (FOMC) tanggal 17-18 September 2019, The Fed mengumumkan penurunan *federal funds rate* sebesar 25 bps ke rentang 1,75% - 2,0 % walaupun perekonomian Amerika Serikat masih tetap tumbuh moderat dengan tingkat pengangguran yang masih rendah. Kebijakan ini diambil dengan pertimbangan mengantisipasi tren perlambatan perekonomian global dan domestik serta inflasi AS yang masih bergerak di bawah ambang batas

2,0% yoy. Namun demikian, arah pergerakan FFR masih belum dapat diperkirakan secara pasti. Jumlah anggota Komite cukup berimbang terkait kenaikan, penurunan, ataupun mempertahankan tingkat FFR di 2019 dan 2020. Namun demikian, pasar mengekspektasikan The Fed masih akan melakukan penurunan suku bunga kebijakan lebih lanjut. Hal ini tercermin dari nilai instrumen *overnight indexed swap* (OIS) dan *futures* terhadap FFR yang berada di bawah median hasil voting anggota FOMC.

Grafik I - 2 ◇ Dot Plot Target Fed Fund Rate

● FOMC Members' Dot Projections for Meeting Date 09/18/2019
● FOMC Dots Median ● OIS - Latest Value
● Fed Funds Futures - Latest Value

Implied Fed Funds
Target Rate



Sumber: Federal Reserve

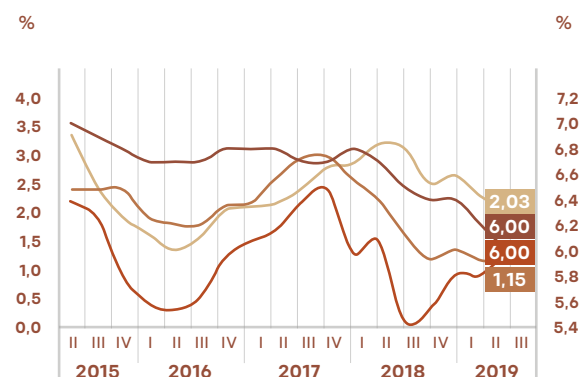
Sama halnya dengan AS, data pertumbuhan Tiongkok terkini menunjukkan berlanjutnya tren melambat pada triwulan III-2019 di level 6,0% (triwulan II-2019: 6,2% yoy). Kinerja eksternal Tiongkok juga semakin terkontraksi dengan ekspor turun -3,23% yoy (triwulan II-19: -1,34% yoy) dan impor turun -8,54% yoy (triwulan II-19: -7,18% yoy).

Sebaliknya perekonomian Jepang tumbuh menguat 1,3% yoy di triwulan III-2019 (triwulan II-19: 0,9% yoy) dengan inflasi tetap rendah di level 0,2% yoy (Juni 19: 0,7% yoy). Kenaikan PDB ini terutama didorong oleh naiknya pengeluaran rumah tangga. Naiknya pengeluaran rumah tangga pada kuartal ini lebih pada mengantisipasi kenaikan pajak penjualan yang akan segera berlaku di bulan Oktober, sehingga sifatnya tidak *sustainable*. Monetary Policy Meeting Bank of Japan (BoJ) pada 19 September 2019 menyatakan BoJ akan mempertahankan posisi kebijakan moneter ekspansifnya guna mendorong inflasi secara bertahap dapat mencapai target 2,0%. BoJ berencana untuk tetap mempertahankan kebijakan suku bunganya paling tidak hingga musim semi 2020 dengan tetap memperhatikan pergerakan perekonomian global dan dampak kenaikan pajak konsumsi di Jepang.

PDB Zona Eropa tumbuh stabil di 1,15% yoy (triwulan II-19: 1,16% yoy), dengan inflasi 0,8% yoy di September 2019 (Juni 19: 1,3% yoy). Untuk mendorong pemulihan perekonomian lebih lanjut, European Central Bank (ECB) mengumumkan penurunan tingkat suku bunga kebijakannya sebesar 10 bps ke -0,50% sesuai dengan siaran pers hasil rapat *Governing Council* 12 September 2019. Selain itu, ECB memberlakukan kembali program pembelian obligasi sebesar EUR20 miliar per bulan mulai November 2019 mendatang.

Grafik I - 3 ◇ Tingkat Pertumbuhan PDB Beberapa Negara

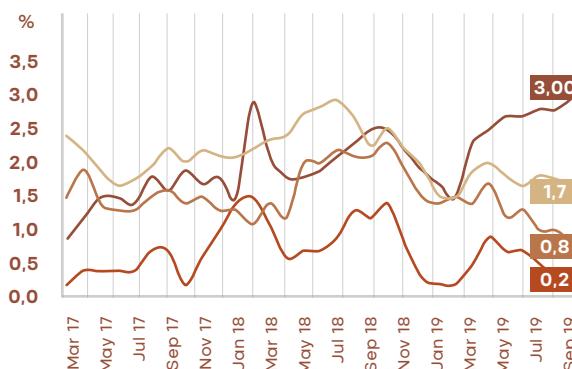
● AS ● Jepang ● Zona Eropa ● Tiongkok (rhs)



Sumber: CEIC

Grafik I - 4 ◇ Tingkat Inflasi IHK Beberapa Negara

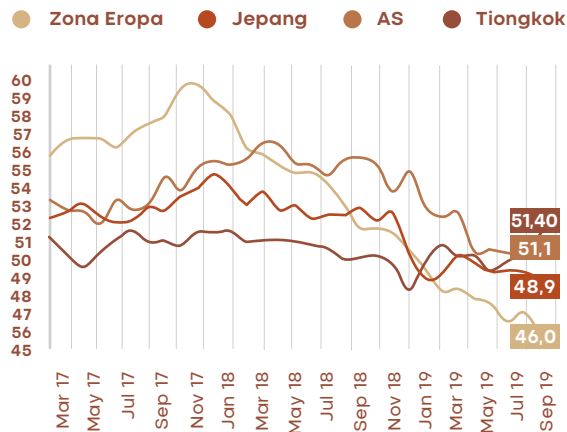
● AS ● Jepang ● Zona Eropa ● Tiongkok



Sumber: CEIC

Perekonomian global ke depan secara umum diperkirakan masih dalam tren melambat. Hal ini diindikasikan dari pergerakan data indikator *headline manufacturing* dari *Purchasing Manager Index* (PMI) Zona Eropa dan Jepang yang masih berada di bawah angka 50. Selain itu, PMI AS dan Tiongkok juga bergerak di sekitar ambang batas 50. Oleh karena itu, kegiatan manufaktur maupun sektor riil ke depan diperkirakan masih akan stagnan.

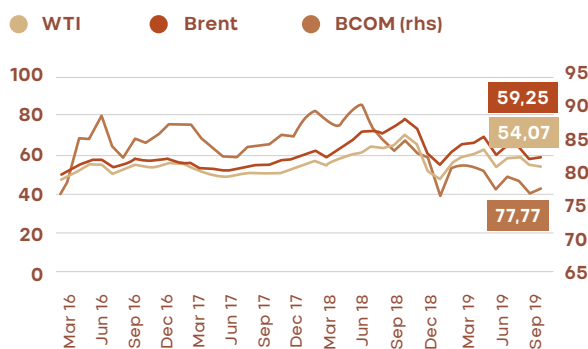
Grafik I - 5 ◇ *Headline Manufacturing PMI*



Sumber: CEIC

Harga minyak dunia West Texas Intermediate (WTI) dan Brent triwulan III-2019 masing-masing berada di level USD54,1/brl (-7,13% qta) dan USD59,3/brl (-7,13% qta). Indeks harga komoditas Bloomberg (BCOM) juga turun -2,35% qta. Penurunan ini terutama didorong oleh perlambatan perekonomian global yang pada akhirnya menekan permintaan terhadap harga komoditas secara keseluruhan.

Grafik I - 6 ◇ *Perkembangan Harga Minyak Dunia dan Komoditas Lainnya*



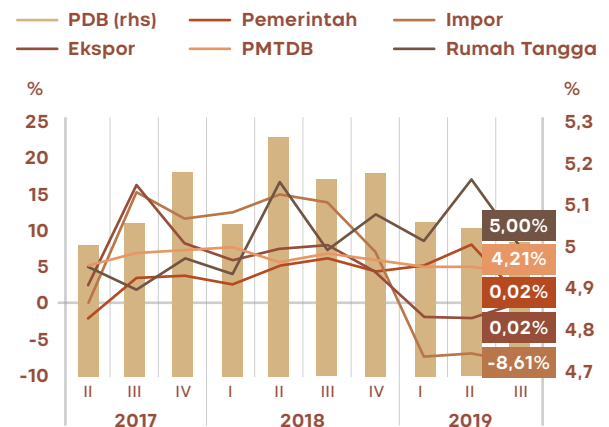
Sumber: Bloomberg

1.1.2 Perkembangan Ekonomi Domestik

Dampak perlambatan ekonomi global juga terasa pada perekonomian domestik. Pada triwulan III-2019, perekonomian domestik tumbuh moderat dengan tingkat inflasi tetap terjaga. Namun demikian, kinerja eksternal perlu mendapatkan perhatian khusus karena pertumbuhan ekspor dan impor turun dengan cukup signifikan.

Pertumbuhan ekonomi domestik triwulan III-2019 tercatat tumbuh moderat di 5,02% yoy (triwulan-II 19: 5,05% yoy) didorong perlambatan pertumbuhan tingkat konsumsi rumah tangga dan investasi swasta. Tingkat konsumsi rumah tangga tumbuh 5,01% yoy (triwulan II-2019: 5,17% yoy) dan investasi tumbuh 4,21% yoy (triwulan II-2019: 5,01% yoy). Meskipun kinerja eksternal tetap mencatatkan surplus namun surplus ini lebih didorong perlambatan pertumbuhan impor. Pada triwulan berjalan, ekspor tumbuh hanya 0,02% yoy (triwulan II-2019: -1,88% yoy), dengan impor berkontraksi cukup dalam sebesar -8,61% yoy (triwulan II-2019: -6,78% yoy)

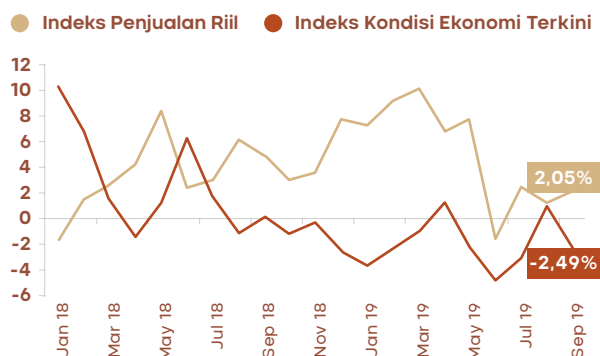
Grafik I - 7 ◇ *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*



Sumber: BPS

Indikator sektor riil menunjukkan terjadinya perlambatan perekonomian. Indikator Markit PMI manufaktur menunjukkan perusahaan domestik masih berada dalam zona kontraksi di level 49,1 (triwulan III-19: 50,6). Nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) triwulan II-2019 tercatat sebesar 13,39% (triwulan II-2019: 19,17%). Hal ini mengindikasikan kegiatan dunia usaha pada triwulan III-2019 tetap tumbuh positif walaupun melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Penjualan semen dan kendaraan bermotor juga tumbuh berkontraksi masing-masing sebesar 0,65% yoy (Juni 2019: 2,69% yoy) dan -0,39% yoy (Juni 2019: 1,12% yoy). Pertumbuhan Indeks Penjualan Riil dari Survei Penjualan Eceran (SPE) September 2019 melambat ke level 2,05% yoy. Pergerakan indeks tersebut sejalan dengan Indeks Kondisi Ekonomi Terkini dari Survei Konsumen September 2019 yang berkontraksi -2,49% yoy.

Grafik I - 8 ◇ Indeks Penjualan Riil dan Indeks Kondisi Ekonomi Terkini

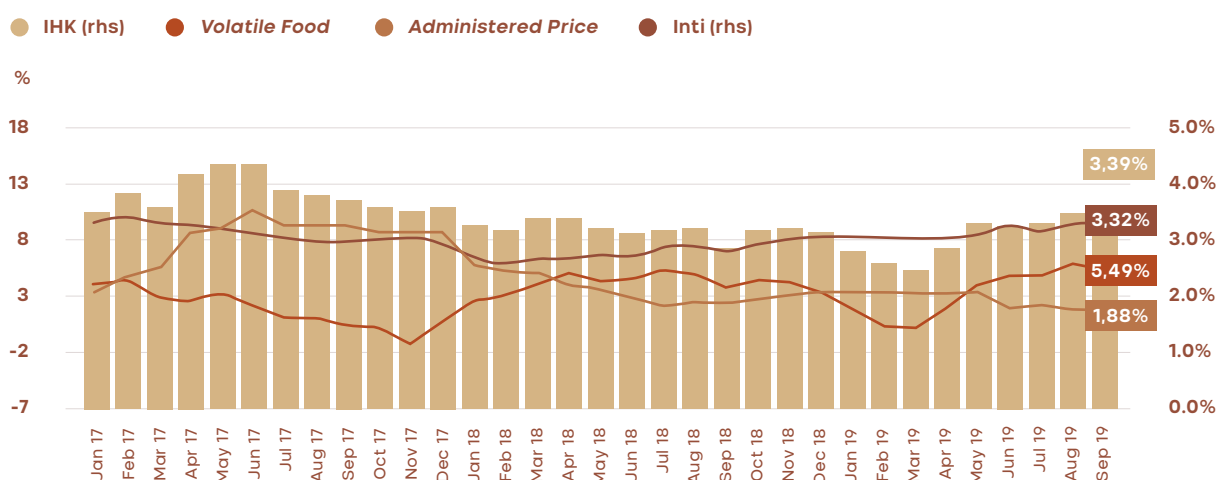


Sumber: Bank Indonesia

Tingkat Inflasi

Inflasi triwulan III-2019 masih berada pada kisaran rentang target inflasi yaitu pada level 3,39% yoy (Juni 2019: 3,28% yoy). Inflasi inti triwulan III-2019 tercatat stabil sebesar 3,32% yoy (Juni 2019: 3,25% yoy). Naiknya inflasi triwulan III-2019 terutama disebabkan oleh kenaikan harga pangan 5,49% yoy (Juni 2019: 4,90% yoy). Kenaikan harga pangan ini lebih disebabkan berkepanjangan musim kemarau di tahun 2019 yang menyebabkan beberapa daerah mengalami kegagalan panen, sedangkan harga barang yang diatur pemerintah stabil di 1,88% yoy (Juni 2019: 1,89% yoy).

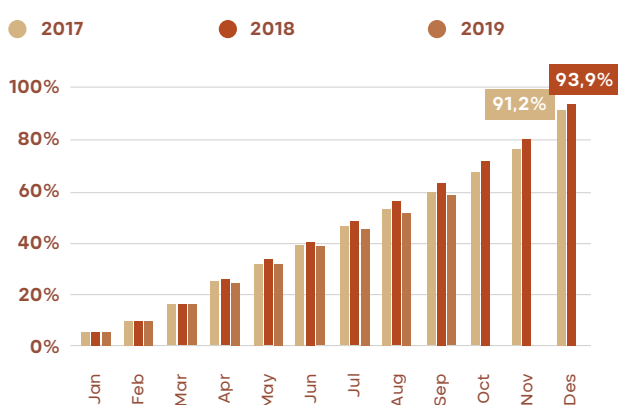
Grafik I - 9 ◇ Tingkat Inflasi Indonesia



Sumber: BPS

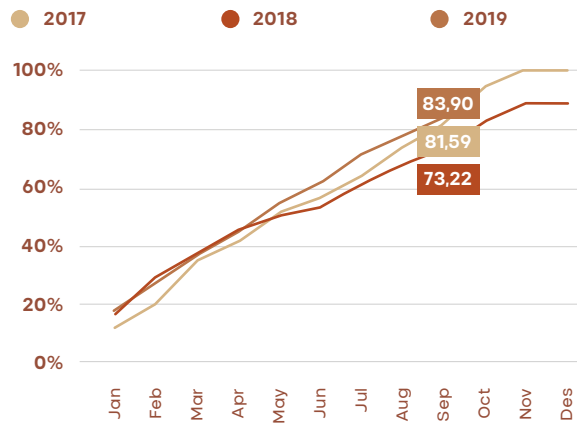
Dari sisi fiskal, data per September 2019 menunjukkan bahwa penerimaan pajak mencapai Rp1.040 triliun atau 58,3% dari target APBN (September 2018: 63,3%). Sejalan dengan hal tersebut, total penerimaan negara baru mencapai Rp1.342 triliun atau 62,0% (September 2018: 69,3%). Sejalan dengan realisasi penerimaan negara yang di bawah rata-rata historis, pengeluaran negara tercatat melambat ke sebesar Rp1.549 triliun atau sebesar 63,0% dari target APBN (September 2018: 68,1%). Untuk membiayai defisit anggaran, Pemerintah telah menerbitkan SBN sebesar Rp693 triliun atau 83,9% dari target hingga bulan September 2019. Laju penerbitan SBN ini relatif lebih tinggi dari pada bulan yang sama di tahun sebelumnya, yaitu sebesar 73,2% di 2018 dan 81,6% di 2017.

Grafik I - 10 ◇ Realisasi Penerimaan Pajak terhadap APBN



Sumber: Kementerian Keuangan

Grafik I - 11 ◇ Realisasi Penerbitan SBN Bruto terhadap Target



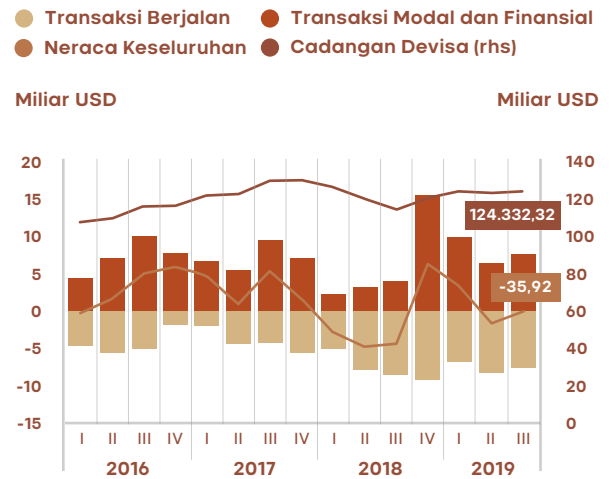
Sumber: Kementerian Keuangan

Defisit neraca transaksi berjalan triwulan III-2019 relatif membaik, yaitu tercatat sebesar USD7,7 miliar (2,66% terhadap PDB), lebih rendah dibandingkan dengan defisit triwulan sebelumnya sebesar USD8,2 miliar (2,94% terhadap PDB). Perbaikan kinerja neraca transaksi berjalan terutama ditopang oleh meningkatnya surplus neraca perdagangan barang dan menurunnya defisit neraca perdagangan migas.

Grafik I - 12 ◇ Neraca Pembayaran Indonesia

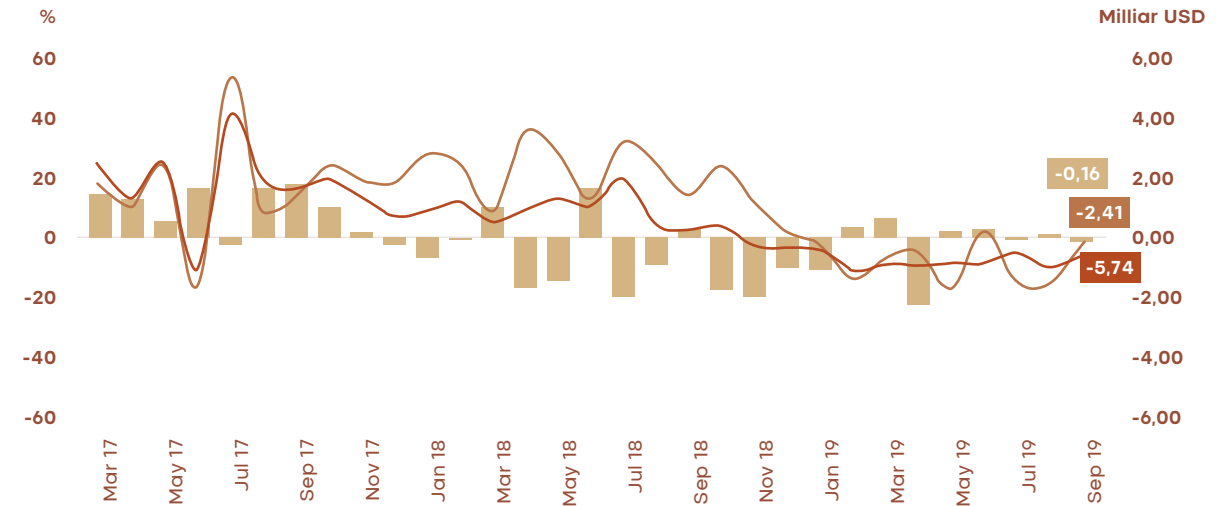
Sejalan dengan hal tersebut, cadangan devisa Indonesia terpantau stabil. Cadangan devisa September 2019 tercatat di USD124,3 miliar (Juni 19: USD123,8 miliar). Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 7,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka tersebut berada di atas standar kecukupan internasional sebesar tiga bulan impor.

Grafik I - 13 ◇ Neraca Perdagangan Indonesia



Sumber: Bank Indonesia

Grafik I - 13 ◇ Neraca Perdagangan Indonesia



Sumber: BPS

1.1.3 Perkembangan Pasar Keuangan

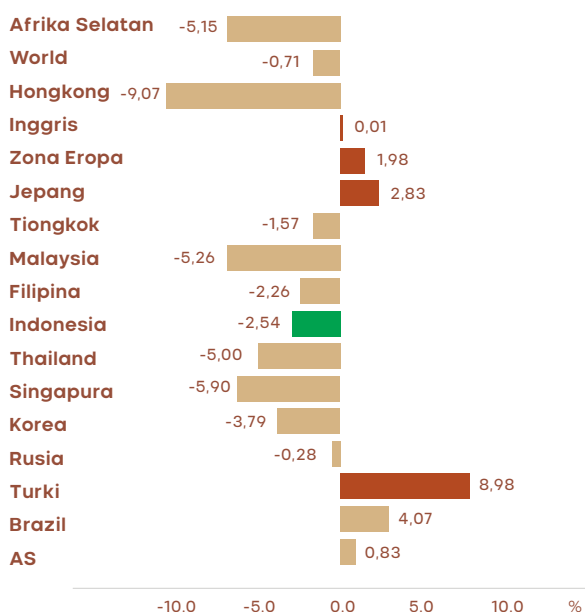
Pasar saham dan nilai tukar secara umum tertekan di triwulan III-2019, sementara itu, *yield* surat utang global turun menyesuaikan dengan relaksasi kebijakan moneter yang dilakukan seluruh bank sentral dunia terutama AS dan Zona Eropa. Ke depan risiko pasar keuangan tetap perlu diwaspadai mengingat masih tingginya ketidakpastian terkait kesepakatan perang tarif dagang AS-Tiongkok.

A. Pasar Saham

Sebagian besar pasar saham global terkoreksi di triwulan III-2019 terutama terkait sentimen perang dagang AS-Tiongkok. Namun demikian, indeks saham negara maju utama seperti AS, Zona Eropa, Jepang, dan Tiongkok relatif membaik karena pasar menyambut baik relaksasi kebijakan moneter yang dilakukan masing-masing bank sentral. Koreksi terdalam terjadi di bursa saham Hongkong yang lebih disebabkan sentimen negatif dari aksi unjuk rasa terhadap RUU Ekstradisi yang telah berlangsung sejak bulan Juni. Pada pasar saham domestik, IHSG terkoreksi -2,54% *qta* ke level 6169,1. Sejalan dengan hal tersebut, investor non residen mencatatkan *net sell* sebesar Rp16,84 triliun di triwulan III-2019. Sampai dengan akhir September, investor non residen mencatatkan *net sell* sebesar Rp17,80 triliun.

Grafik I - 14 ◇ Perkembangan Pasar Saham Global

27 September 2019 vs 28 Juni 2019



Sumber: Bloomberg

B. Pasar Surat Utang Global

Pasar surat utang global triwulan III-2019 secara umum bergerak membaik. *Yield* surat utang tenor 10 tahun di berbagai negara bergerak turun sejalan dengan pelonggaran kebijakan moneter oleh seluruh bank sentral dunia terutama AS dan ECB. Di domestik, *yield* surat utang pemerintah Indonesia (SBN) turun 8 bps. Performa SBN Indonesia meskipun menguat namun tidak sebesar negara di kawasan. Hal ini disebabkan pertumbuhan PDB triwulan II-2019 yang berada di bawah ekspektasi yang diikuti oleh *net sell* investor non residen sebesar total Rp14,19 triliun selama seminggu pasca rilis data PDB. Sampai dengan September, investor non residen masih mencatatkan *net buy* sebesar Rp136,14 triliun.

Tabel I - 2 ◇ Perkembangan *Yield* 10Y Pasar Surat Utang Global

	Mar '19	Jun '19	Ags '19	Δ <i>qta</i> (bps)
Indonesia	7.63	7.37	7.29	-8.0
Filipina	5.61	5.07	4.80	-27.3
Malaysia	3.77	3.63	3.32	-31.6
Thailand	2.48	2.43	2.12	-31.4
Tiongkok	3.07	3.24	3.14	-9.5
Jepang	-0.08	-0.16	-0.21	-5.5
Inggris	1.00	0.83	0.49	-34.5
AS	2.57	2.07	1.70	-37.0

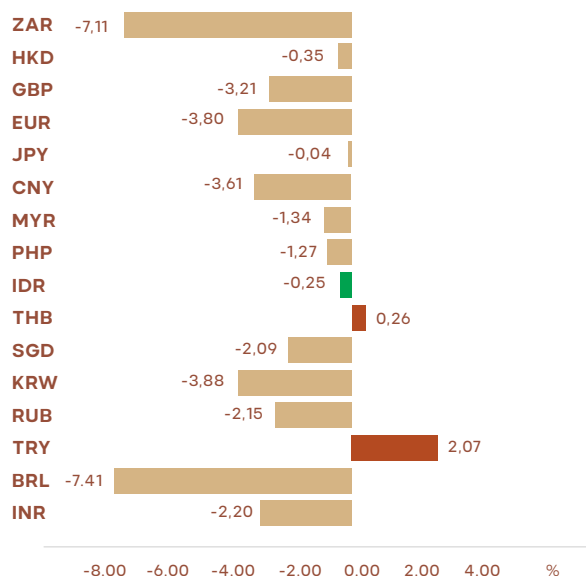
Sumber: Bloomberg

C. Pasar Nilai Tukar

Nilai tukar global sepanjang triwulan III-2019 secara umum bergerak melemah. Thailand menjadi satu-satunya negara kawasan ASEAN yang mata uangnya menguat terutama ditopang oleh kinerja sektor eksternalnya yang solid. Rupiah terdepresiasi tipis 0,25% *qta* ke Rp14.228/USD. Meskipun secara *qta* pelemahan yang terjadi relatif kecil namun volatilitas pergerakan Rupiah cukup tinggi. Angka terlemah Rupiah berada pada level Rp14.315/USD dan terkuat pada Rp13.915/USD. Nilai tukar Rupiah tidak terdepresiasi secara signifikan meskipun kinerja eksternalnya memburuk, ditopang oleh masuknya aliran dana investor non residen pada investasi portofolio khususnya pada SBN Indonesia.

Grafik I - 15 ◇ Perkembangan Pasar Nilai Tukar Global

27 September 2019 vs 28 Juni 2019



Sumber: Reuters

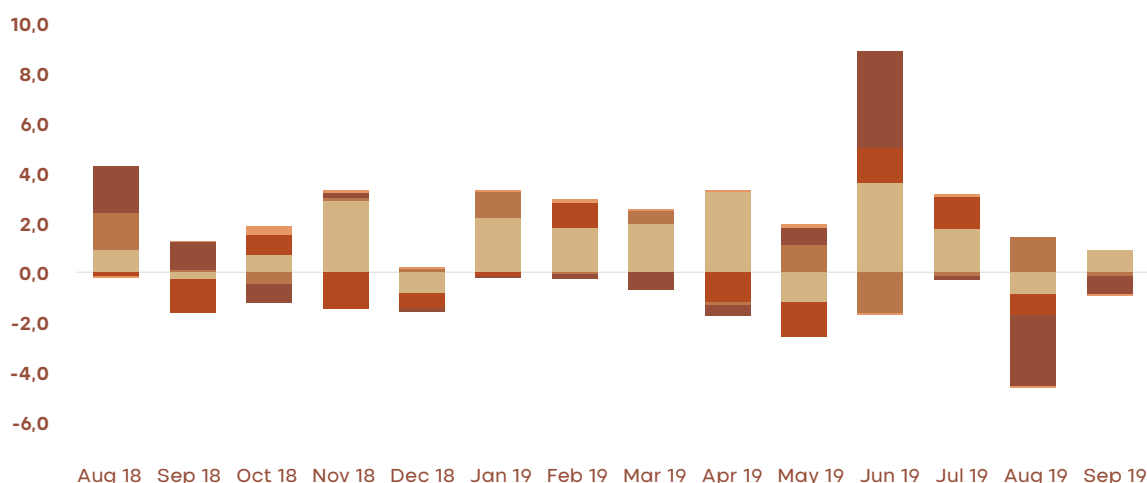
D. Aliran Dana Non Residen ASEAN

Sepanjang triwulan III-2019, investor non residen secara umum mencatatkan *net buy* di pasar saham dan SBN negara ASEAN-5. *Net buy* tertinggi terjadi di negara Indonesia sebesar USD1.708 miliar (Rp23,5 triliun). Aliran dana masuk tersebut terjadi karena relaksasi kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral negara maju sepanjang triwulan berjalan mendorong investor untuk mencari tingkat *return* investasi yang lebih menguntungkan di negara berkembang. Namun demikian, investor non residen mencatatkan *net sell* di Thailand pada triwulan berjalan sebesar USD3.686 miliar. Hal ini disebabkan karena perlambatan perekonomian Thailand yang berlanjut meskipun memiliki kinerja eksternal yang baik. Data terkini menunjukkan PDB Thailand tumbuh 2,3% yoy yang merupakan pertumbuhan terendah dalam 5 tahun terakhir.

Grafik I - 16 ◇ Aliran Dana Non Residen di Pasar Keuangan Kawasan ASEAN-5

● Indonesia ● Malaysia ● Filipina ● Thailand ● Vietnam

Milliar USD



Sumber: Bloomberg

E. Volatilitas dan Risiko ASEAN

Pasar keuangan global triwulan III-2019 bergerak relatif stabil dengan risiko yang relatif lebih rendah. Indeks VIX pada akhir Triwulan III-2019 turun ke level 16,2 (Juni 2019: 15,1). Di kawasan ASEAN-5, risiko jangka menengah selama triwulan III-2019 terpantau turun. *Credit default swap* (CDS) tenor 5 tahun rata-rata turun sebesar 8,1 bps dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini relatif sejalan dengan masuknya aliran dana non residen ke kawasan ASEAN-5 selama triwulan III-2019 ini.

Tabel I - 3 ◇ Perkembangan Indikator Risiko Jangka Menengah dan Volatilitas

		Mar 19	Jun 19	Sep 19	Δ qtq
Indikator Risiko Jangka Menengah (dalam bps)	Indonesia	91,8	102,3	77,0	-25,3
	Filipina	58,4	49,0	48,1	-0,9
	Malaysia	65,9	54,8	52,0	-2,8
	Vietnam	131,1	113,5	107,6	-5,9
	Thailand	42,6	35,7	30,3	-5,4
Indikator Volatilitas	Vix Index	13,7	15,1	16,2	1,1

Sumber: Bloomberg

1.2 PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN

Kondisi ketahanan perbankan secara umum pada triwulan III-2019 masih terjaga, tercermin dari kondisi permodalan bank yang cukup solid dengan CAR sebesar 23,19%. Hal tersebut menunjukkan kemampuan bank yang memadai dalam menyerap

risiko didukung oleh laba yang masih tumbuh dan kualitas kredit perbankan yang masih terjaga. Fungsi intermediasi perbankan juga relatif cukup baik dilihat dari kredit yang tumbuh sebesar 7,89% (yoy) dan DPK sebesar 7,47% (yoy).

Tabel I - 4 ◇ Kondisi Bank Umum

Indikator	2018		2019		qta		yoy	
	Sep	Des	Jun	Sep	Juni '19	Sep '19	Sep '18	Sep '19
Total Aset (Rp Miliar)	7.768.873	8.068.346	8.242.987	8.318.280	+1,38%	+0,91%	+8,65%	+7,07%
Kredit (Rp Miliar)	5.120.099	5.294.882	5.467.646	5.524.190	+3,33%	+1,03%	+12,69%	+7,89%
DPK (Rp Miliar)	5.482.493	5.630.448	5.799.494	5.891.918	+2,23%	+1,59%	+6,60%	+7,47%
- Giro (Rp Miliar)	1.314.411	1.315.034	1.406.536	1.425.445	+6,83%	+1,34%	+9,59%	+8,45%
- Tabungan (Rp Miliar)	1.724.208	1.825.259	1.826.202	1.836.786	+4,39%	+0,58%	+9,49%	+6,53%
- Deposito (Rp Miliar)	2.443.874	2.490.155	2.566.756	2.629.687	-1,54%	+2,45%	+3,17%	+7,60%
CAR (%)	22,85	23,42	23,22	23,19	(61)	(3)	(16)	34
ROA (%)	2,46	2,50	2,47	2,45	(9)	(3)	4	(1)
NIM / NOM (%)	5,01	5,00	4,79	4,79	5	0	(18)	(22)
BOPO (%)	79,50	78,33	80,43	80,66	(265)	23	28	116
NPL / NPF Gross (%)	2,66	2,37	2,50	2,66	(1)	15	(28)	(0)
NPL / NPF Net (%)	1,22	1,04	1,18	1,18	3	0	(8)	(4)
LDR / LFR (%)	93,39	94,04	94,28	93,76	101	(52)	504	37

1.2.1 Perkembangan Bank Umum Konvensional

Pada triwulan III-2019, sejalan dengan kinerja bank umum, kondisi ketahanan BUK masih solid, tercermin dari CAR sebesar 23,38% yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Fungsi intermediasi BUK juga cukup baik tercermin dari pertumbuhan kredit sebesar 7,81% (yoy)

dan pertumbuhan DPK sebesar 7,52% (yoy). Pertumbuhan kredit masih tercatat lebih tinggi dibandingkan DPK yang mengakibatkan LDR naik menjadi 94,34%. Namun demikian, pertumbuhan DPK mulai tercatat meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel I - 5 ◇ Kondisi Bank Umum Konvensional

Indikator	Nominal			qta		yoy	
	Sep '18	Jun '19	Sep '19	Jun '19	Sep '19	Sep '18	Sep '19
Total Aset (Rp Miliar)	7.462.753	7.920.038	7.993.250	+1,38%	+0,92%	+8,56%	+7,11%
Kredit (Rp Miliar)	4.921.564	5.255.085	5.306.141	+3,34%	+0,97%	+12,95%	+7,81%
DPK (Rp Miliar)	5.231.010	5.532.926	5.624.575	+2,27%	+1,66%	+6,53%	+7,52%
- Giro (Rp Miliar)	1.283.502	1.367.355	1.393.013	+6,69%	+1,88%	+9,56%	+8,53%
- Tabungan (Rp Miliar)	1.643.352	1.736.841	1.744.253	+4,43%	+0,43%	+9,03%	+6,14%
- Deposito (Rp Miliar)	2.304.155	2.428.731	2.487.308	-1,49%	+2,41%	+3,24%	+7,95%
CAR (%)	22,91	22,63	23,38	(79)	75	(34)	47
ROA (%)	2,50	2,51	2,48	(10)	(3)	3	(2)
NIM (%)	5,14	4,90	4,90	4	(0)	(20)	(23)
BOPO (%)	79,13	80,24	91,24	(269)	1100	42	1211
NPL Gross (%)	2,61	2,47	2,63	(1)	16	(26)	2
NPL Net (%)	1,17	1,14	1,15	3	0	(6)	(3)
LDR (%)	94,08	94,98	94,34	98	(64)	535	25

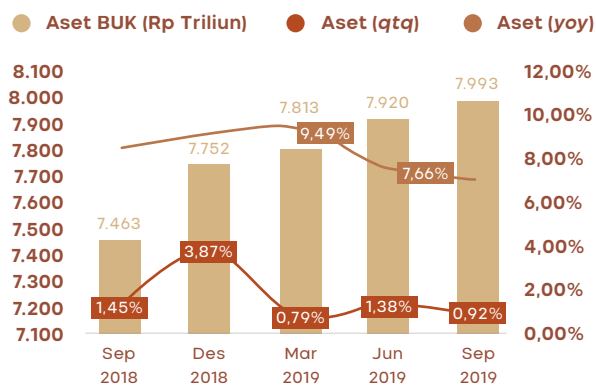
Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI) dan LBU, September 2019

A. Aset

Total aset BUK pada triwulan III-2019 tumbuh 7,11% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 8,56% (yoy). Perlambatan aset seiring dengan melambatnya pertumbuhan kredit. Secara kepemilikan, aset kelompok BUMN dan BUSN Devisa yang memiliki porsi aset terbesar melambat, sehingga menarik ke bawah pertumbuhan aset. Di sisi lain, BPD dan BUSN Non Devisa justru mencatatkan peningkatan pertumbuhan, meskipun dalam porsi yang cukup kecil sebesar 9,54% dari total aset perbankan.

Secara triwulanan, aset BUK tumbuh 0,92% (qtq) melambat dibandingkan triwulan sebelumnya 1,38% (qtq). Hal tersebut disebabkan oleh perlambatan aset pada semua kelompok bank, kecuali KCBA yang mencatat pertumbuhan sebesar 0,78% (qtq) setelah triwulan sebelumnya berkontraksi -5,57% (qtq).

Grafik I - 17 ◇ Perkembangan Aset BUK



Sumber: SPI, September 2019

Secara umum, aset perbankan Indonesia masih terkonsentrasi pada beberapa bank. Total aset 4 BUK terbesar mencapai 49,70% atau hampir setengah dari aset perbankan Indonesia, dan total aset 20 BUK terbesar mencapai 80,46% dari aset perbankan.

Tabel I - 6 ◇ Perkembangan Aset BUK per Kelompok Bank

Kelompok Bank	Nominal (Rp Miliar)			Porsi	Δ qtt		Δ yoy	
	Sep '18	Jun '19	Sep '19		Jun '19	Sep '19	Sep '18	Sep '19
BUMN	3.130.413	3.380.283	3.413.715	42,71%	2,28%	0,99%	12,12%	9,05%
BUSN Devisa	3.201.931	3.345.150	3.359.953	42,03%	0,76%	0,44%	6,24%	4,94%
BUSN Non Devisa	62.418	73.344	75.117	0,94%	7,70%	2,42%	15,56%	20,35%
BPD	619.901	667.400	687.060	8,60%	4,47%	2,95%	1,19%	10,83%
KCBA	448.090	453.861	457.404	5,72%	-5,57%	0,78%	11,52%	2,08%
Total	7.462.753	7.920.038	7.993.250	100%	1,38%	0,92%	8,56%	7,11%

Sumber: SPI, September 2019

Tabel I - 7 ◇ Tingkat Konsentrasi Aset BUK

Tahun	Aset	
	CR4%	CR20%
2015	46,24	79,47
2016	48,18	80,14
2017	48,81	79,87
2018	49,65	79,93
Mar 2019	48,88	80,83
Jun 2019	49,54	80,78
Sep 2019	49,70	80,46

Sumber: OJK, olah

kelompok Bank BUKU 1, 2 dan 3, utamanya dari kelompok BPD seiring dengan adanya dropping dana dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan pembayaran kepada mitra kerja Pemerintah Pusat. Namun demikian, pertumbuhan DPK di beberapa Bank besar justru tercatat melambat.

Secara umum, peningkatan pertumbuhan DPK utamanya didorong oleh peningkatan DPK Rupiah, utamanya deposito rupiah pada nasabah perorangan, seiring dengan kenaikan suku bunga deposito.

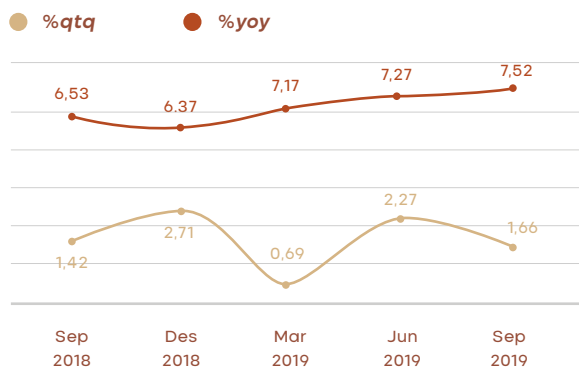
Pengumpulan DPK masih terpusat di pulau Jawa dengan porsi 77,78% dari total DPK BUK perbankan Indonesia, dengan 50,00% di antaranya berpusat di DKI Jakarta.

B. Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga (DPK) BUK tumbuh 7,52% (yoy) meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,53% (yoy). Peningkatan DPK tersebut didorong oleh peningkatan DPK pada

Secara triwulanan DPK BUK tumbuh 1,66% (qtq), melambat dibandingkan posisi Juni 2019 yang tumbuh 2,27% (qtq). Perlambatan DPK triwulanan terjadi pada hampir semua kelompok bank, kecuali kelompok BUMN dan KCBA.

Grafik I - 18 ◇ Tren Pertumbuhan DPK



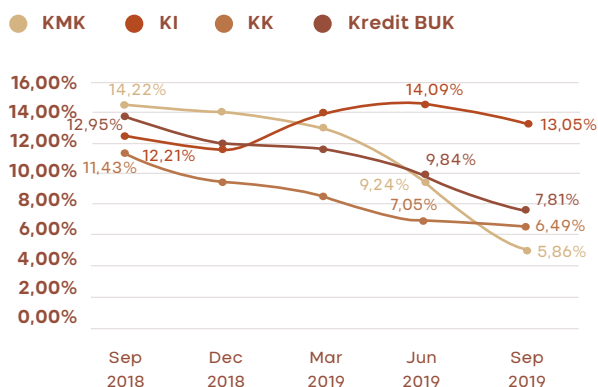
Sumber: SPI, September 2019

C. Kredit

Pada triwulan III-2019, kredit BUK tumbuh 7,81% (yoy), melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 12,95% (yoy). Kredit produktif masih tumbuh walaupun melambat menjadi sebesar 8,32% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 13,53% (yoy). Perlambatan didorong oleh melambatnya Kredit Modal Kerja (KMK) sebagai kredit dengan porsi terbesar yang tumbuh 5,86% (yoy) dibandingkan 14,22% (yoy) pada tahun sebelumnya. Perlambatan kredit produktif ini mengindikasikan pelaku usaha yang cenderung menahan ekspansi usaha di tengah ketidakpastian perekonomian global.

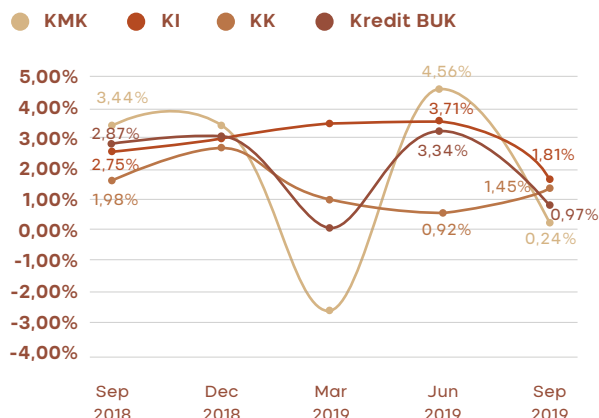
Secara triwulanan kredit tumbuh 0,97% (qtq), melambat dibandingkan Juni 2019 yang tumbuh 3,34% (qtq). Perlambatan utamanya terjadi pada semua hamper kelompok Bank, kecuali BPD yang justru tumbuh meningkat 5,29% (qtq).

Grafik I - 19 ◇ Tren Pertumbuhan Kredit Tahunan (yoy)



Sumber: SPI, September 2019

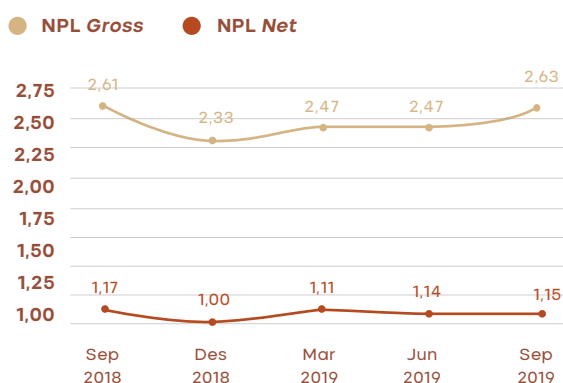
Grafik I - 20 ◇ Tren Pertumbuhan Kredit Triwulanan (qtq)



Sumber: SPI, September 2019

Kualitas kredit BUK menunjukkan tren penurunan sejak awal tahun, namun masih terjaga di bawah *threshold* 5%. Rasio NPL *gross* dan net BUK tercatat meningkat masing-masing menjadi 2,63% dan 1,15%. Berdasarkan jenis penggunaan, rasio NPL KMK dan KK secara tahunan masing-masing meningkat 6 bps dan 1 bps menjadi 3,23% dan 1,74%. Di sisi lain, NPL KI tercatat turun 4 bps menjadi 2,46%.

Grafik I - 21 ◇ Tren NPL (%)



Sumber: SPI, September 2019

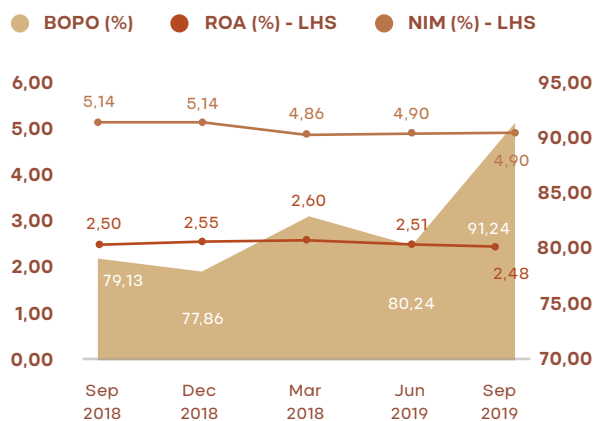
D. Rentabilitas

Rentabilitas BUK pada periode laporan menurun, terlihat dari turunnya ROA dari tahun sebelumnya sebesar 2,50% menjadi 2,48%. Penurunan tersebut disebabkan oleh laba yang melambat pada periode laporan. Perlambatan laba BUK pada periode ini dipicu oleh pertumbuhan beban operasional dibandingkan tahun sebelumnya.

Sehubungan dengan itu, rasio BOPO perbankan tercatat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 79,13% menjadi 80,50%. Peningkatan BOPO terutama disebabkan oleh meningkatnya beban operasional selain bunga dari kerugian transaksi spot dan derivatif.

Selain itu, kenaikan suku bunga deposito mendorong pertumbuhan beban bunga DPK yang berdampak kepada menurunnya pendapatan bunga bersih yang dikarenakan peningkatan *cost of fund*. Hal tersebut berdampak kepada penurunan NIM perbankan menjadi 4,90% dari 5,14% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Grafik I - 22 ◇ Tren Rentabilitas dan Efisiensi



Sumber: SPI, September 2019

Tabel I - 8 ◇ Kondisi Umum BPR

Indikator	Nominal			qta		yoy	
	Sep '18	Jun '19	Sep '19	Jun '19	Sep '19	Sep '18	Sep '19
Total Aset (Rp Miliar)	131.508	139.512	144.779	+1,57%	+3,78%	+8,16%	+10,09%
Kredit (Rp Miliar)	95.800	104.616	106.733	+3,16%	+2,02%	+8,94%	+11,41%
DPK (Rp Miliar)	88.744	94.962	99.071	+1,30%	+4,33%	+8,76%	+11,64%
- Tabungan (Rp Miliar)	27.935	29.138	30.800	-1,57%	+5,70%	+12,22%	+10,26%
- Deposito (Rp Miliar)	60.810	65.824	68.271	+2,62%	+3,72%	+7,24%	+12,27%
CAR (%)	22,75	22,78	22,79	(139)	1	6	4
ROA (%)	2,49	2,37	2,29	(6)	(8)	(7)	(20)
BOPO (%)	81,24	82,34	82,39	49	6	17	115
NPL Gross (%)	7,16	7,25	7,34	31	9	16	18
NPL Net (%)	5,38	5,58	5,55	30	(4)	21	17
LDR (%)	76,94	78,91	77,81	155	(110)	35	87
CR (%)	16,17	15,17	15,67	16	51	(96)	(50)

A. Aset

Aset BPR pada triwulan III-2019 tumbuh 10,99% (yoy), meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 8,16% (yoy). Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan pertumbuhan DPK. Selain itu, modal BPR juga masih tercatat tumbuh meskipun melambat.

Berdasarkan lokasi, aset BPR mayoritas berada di Pulau Jawa (57,65%) dengan Jawa Tengah memiliki porsi terbesar yaitu 23,69%. Dilihat dari

F. Permodalan

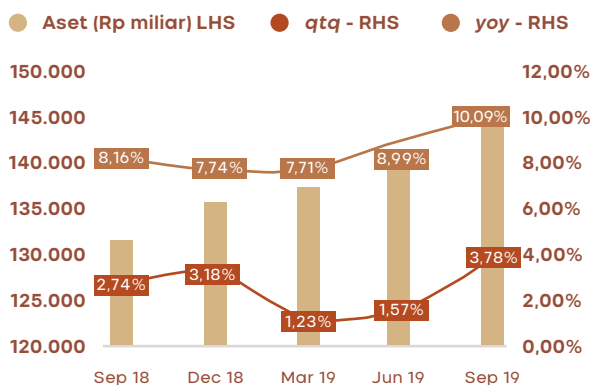
Pada triwulan III-2019 kondisi permodalan BUK masih solid, tercermin dari meningkatnya rasio CAR menjadi 23,38% (September 2018: 22,91%). Peningkatan CAR dipengaruhi oleh peningkatan pertumbuhan modal yang didorong oleh peningkatan cadangan modal dan tambahan modal disetor yang masing-masing tumbuh 10,02% (yoy) dan 31,18% (yoy). Pertumbuhan modal terjadi pada semua kelompok bank, kecuali kelompok KCBA yang mencatatkan perlambatan menjadi 5,33% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 11,08% (yoy).

1.2.2 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Pada triwulan III-2019, industri BPR menunjukkan kondisi yang cukup baik ditandai oleh intermediasi yang baik, dengan pertumbuhan aset, kredit dan DPK tercatat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Ketahanan BPR juga cukup solid didukung dengan permodalan yang cukup tinggi meskipun masih dibayangi dengan kenaikan risiko kredit (NPL) dan rentabilitas yang menurun.

pertumbuhannya, aset BPR di Maluku Utara tumbuh tertinggi sebesar 39,33% (yoy), meskipun memiliki porsi yang rendah yaitu 0,14% dari total aset BPR. Selain itu, aset BPR di Banten juga tumbuh tinggi sebesar 24,61% (yoy) dengan porsi sebesar 3,47% dari total aset BPR. Sementara peningkatan nominal aset BPR tertinggi berada di Jawa Tengah yang tumbuh 12,95% (yoy).

Grafik I - 23 ◇ Tren Aset BPR



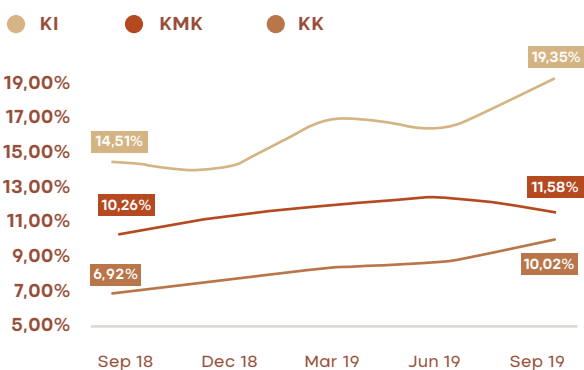
Sumber: SPI BPR, September 2019

B. Kredit

Penyaluran kredit BPR pada triwulan III-2019 tumbuh 11,41% (yoy), meningkat signifikan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 8,94% (yoy). Penyaluran kredit BPR sebagian besar disalurkan untuk kredit produktif, yaitu sebesar 53,00%. Sedangkan porsi kredit untuk tujuan konsumsi tercatat sebesar 47,00%. Pertumbuhan kredit BPR utamanya didorong oleh pertumbuhan KMK sebesar 12,43% (yoy), meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 8,71% (yoy). Penyaluran KMK BPR utamanya disalurkan pada sektor perdagangan besar dan eceran (49,13% dari total penyaluran KMK) yang tumbuh 7,23% (yoy).

Secara spasial, mayoritas kredit BPR berada di wilayah Jawa (57,39%), sementara kredit yang terendah di wilayah Kalimantan (1,76%) dari total kredit BPR. Hal tersebut sejalan dengan jumlah BPR yang mayoritas (4.726 BPR*) berada di wilayah Jawa (75,17%) sedangkan BPR yang beroperasi di wilayah Kalimantan hanya sekitar 2,13% dari total BPR Nasional (134 BPR).

Grafik I - 24 ◇ Kredit BPR Berdasarkan Jenis Penggunaan



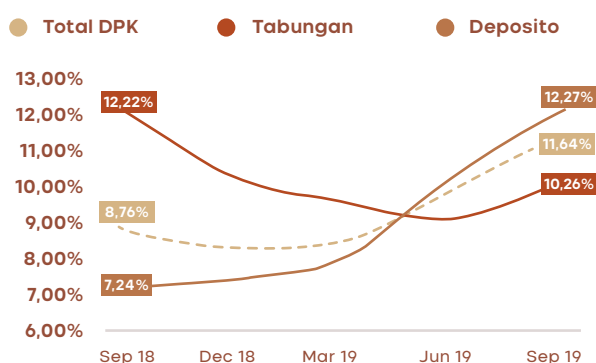
Sumber: SPI BPR, September 2019

C. Dana Pihak Ketiga (DPK)

DPK BPR pada triwulan III-2019 tumbuh 11,64% (yoy) menjadi Rp99,07 triliun, meningkat dibandingkan pertumbuhan September 2018 sebesar 8,76% (yoy). Peningkatan tersebut didorong oleh pertumbuhan deposito sebagai komponen DPK terbesar yang tumbuh 12,27% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7,24% (yoy).

Peningkatan didorong oleh pertumbuhan deposito yang cukup tinggi dari 7,24% (yoy) menjadi 12,27% (yoy), dengan porsi 68,91% dari total DPK BPR. Di sisi lain, tabungan masih mencatat perlambatan dari 12,22% (yoy) menjadi 10,26% (yoy).

Grafik I - 25 ◇ Tren Pertumbuhan DPK (yoy)

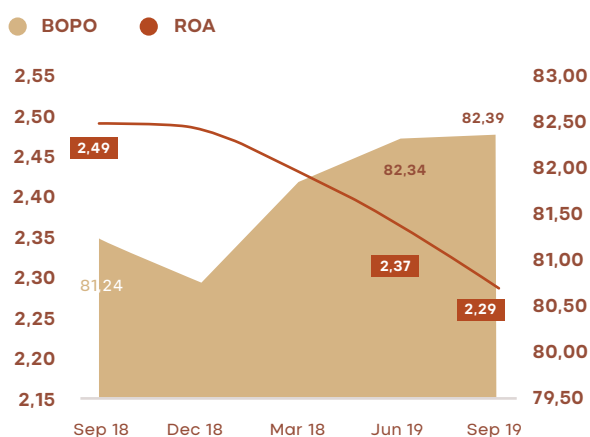


Sumber: SPI BPR, September 2019

D. Rentabilitas

Rentabilitas BPR pada triwulan III-2019 menurun dibandingkan tahun sebelumnya, tercermin dari turunnya ROA menjadi 2,29% yang disebabkan utamanya oleh melambatnya laba yang hanya tumbuh 1,05% (yoy), menurun dibanding tahun sebelumnya sebesar 5,16% (yoy). Di samping itu, efisiensi BPR juga menurun tercermin dari naiknya rasio BOPO sebesar 115 bps menjadi 82,39%.

Grafik I - 26 ◇ Tren ROA dan BOPO BPR



Sumber: SPI, September 2019

E. Permodalan

Di tengah laba yang tumbuh melambat, permodalan BPR relatif cukup solid dan memadai untuk menyerap potensi risiko yang dihadapi. Hal tersebut terlihat dari rasio CAR BPR tercatat meningkat dari 22,75% pada September 2018 menjadi 22,79%. Hal tersebut seiring dengan upaya BPR untuk memperkuat permodalan antara lain melalui merger dan konsolidasi, yang ditandai dengan berkurangnya jumlah BPR dari 1.598 menjadi 1.578.

1.2.3 Profil Risiko Perbankan

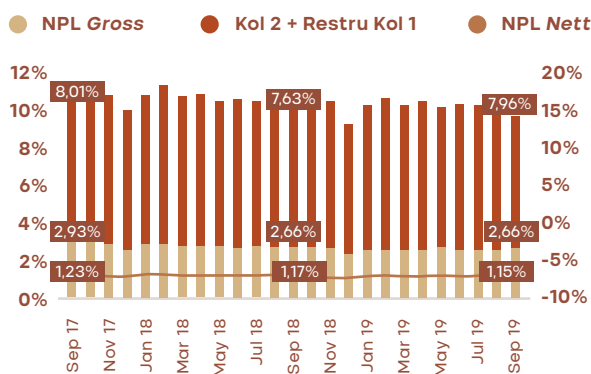
Secara umum, profil risiko perbankan pada triwulan III-2019 masih terjaga tercermin dari rasio NPL yang stabil disertai dengan risiko pasar dan likuiditas yang masih terjaga. Namun demikian, perlu diwaspadai adanya potensi kenaikan risiko kredit yang diindikasikan oleh naiknya pertumbuhan nominal NPL dan rasio *loan at risk*.

A. Risiko Kredit

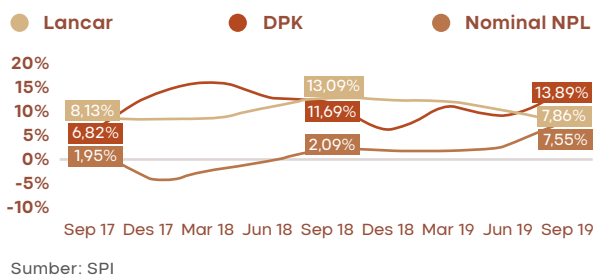
Pada September 2019, rasio NPL gross bank umum tercatat sebesar 2,66%, stabil dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan masih terjaga dibawah threshold 5%. Namun demikian, perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan risiko kredit kedepan sebagaimana terindikasi oleh naiknya pertumbuhan nominal NPL ditengah kredit yang tumbuh melambat, serta naiknya rasio *loan at risk*¹. Rasio *loan at risk* per September 2019 sebesar 7,96% meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar 7,63%.

Loan at risk merupakan kualitas kredit yang berpotensi untuk menjadi NPL (Non Performing Loan), terdiri dari kredit kualitas Dalam Perhatian Khusus (Kolektabilitas 2) dan restrukturisasi kredit kualitas Lancar (restru Kolektabilitas 1).

Grafik I - 27 ◇ Perkembangan Risiko Kredit



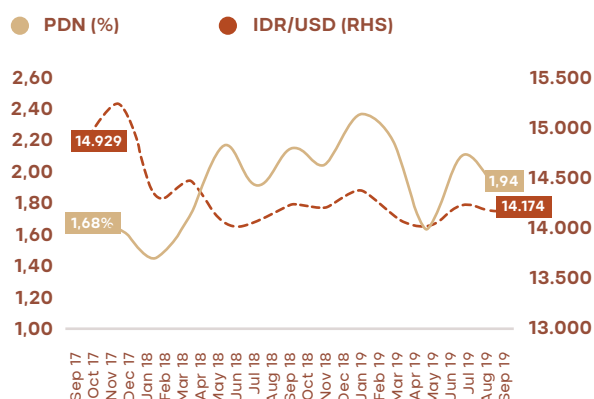
Grafik I - 28 ◇ Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Kualitas



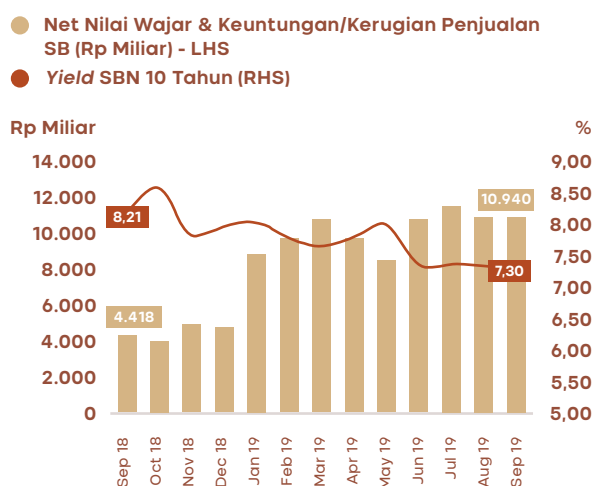
B. Risiko Pasar

Risiko pasar perbankan pada periode laporan masih terjaga. Risiko pasar terkait nilai tukar tercermin pada Posisi Devisa Netto (PDN) pada periode laporan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya namun masih jauh di bawah threshold 20%, yaitu sebesar 1,94%. Selain itu, risiko pasar terkait suku bunga menurun sejalan dengan penurunan yield akibat turunnya suku bunga acuan yang berdampak pada peningkatan nilai wajar surat berharga.

Grafik I - 29 ◇ Perkembangan PDN



Grafik I - 30 ◇ Perubahan Nilai Wajar dan Keuntungan Penjualan Surat Berharga



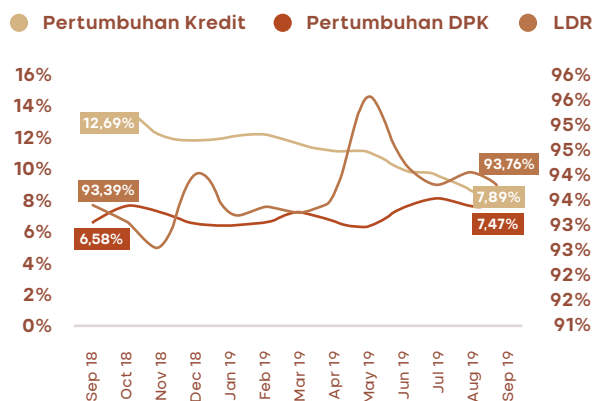
Sumber: LBU, SPI, IBPA, Reuters

C. Risiko Likuiditas

Pada triwulan berjalan, kondisi likuiditas perbankan masih terjaga dan memadai, tercermin dari LDR yang meskipun berada pada level yang tinggi namun *funding gap* mulai menyempit. Selain itu, terjaganya

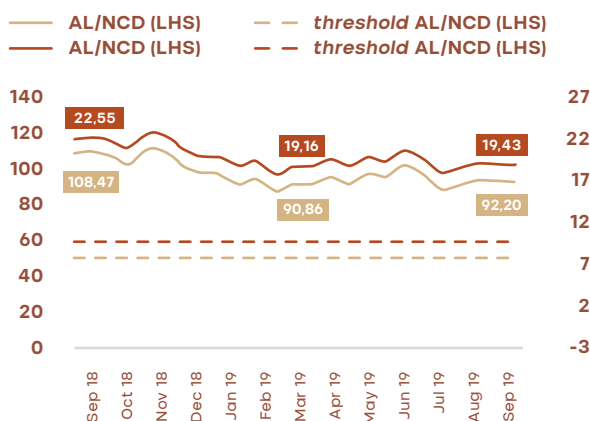
likuiditas perbankan juga tercermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang masih jauh di atas threshold masing-masing sebesar 92,20% dan 19,43%.

Grafik I - 31 ◇ Perkembangan LDR



Sumber: SPI

Grafik I - 32 ◇ Rasio AL/NCD dan AL/DPK



1.2.4 Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pada triwulan III-2019, kredit UMKM tumbuh 12,34% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 9,35% (yoy). Peningkatan kredit UMKM masih ditopang oleh penyaluran ke sektor perdagangan besar dan eceran, diikuti sektor pengolahan dan pertanian seiring dengan porsi penyaluran ke sektor tersebut yang cukup besar. Apabila dilihat dari pertumbuhannya, penyaluran UMKM ke sektor listrik, gas dan air tumbuh tertinggi yaitu sebesar 115,50%

(yoy), meskipun dengan porsi yang sangat kecil yaitu 0,60% dari total penyaluran kredit UMKM.

Kualitas kredit UMKM tercatat membaik dari periode yang sama tahun sebelumnya yaitu dari 3,85% menjadi 3,76%. Perbaikan NPL tersebut terjadi pada sebagian besar sektor ekonomi, utamanya pada sektor listrik, air, dan gas dengan penurunan NPL UMKM menjadi 2,39% (September 2018=4,25%).

Tabel I - 9 ◇ Konsentrasi Penyaluran UMKM

● Rasio NPL

Indikator	Nominal (Rp M)			Porsi	qta		yoy	
	Jun '18	Des '18	Sep '19	Sep '19	Jun '19	Sep '19	Sep '18	Sep '19
Perdagangan Besar dan Eceran								
Baki Debet	480.540	499.248	528.042	50,79%	2,63%	1,16%	8,85%	8,41%
NPL	19.896	17.170	20.024	3,79%	6,92%	0,95%	0,34%	5,61%
Industri Pengolahan								
Baki Debet	93.234	99.028	104.160	10,02%	3,11%	3,11%	3,72%	9,63%
NPL	3.811	3.292	3.822	3,76%	7,63%	2,46%	11,04%	7,58%
Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan								
Baki Debet	83.439	89.560	103.315	9,94%	9,62%	1,62%	11,87%	23,17%
NPL	2.519	2.073	2.632	2,55%	1,02%	10,68%	-13,00%	18,08%
Listrik, Gas, dan Air								
Baki Debet	3.497	4.307	6.230	0,60%	11,21%	24,13%	-4,78%	115,50%
NPL	698	135	149	2,39%	-1,33%	0,68%	-26,79%	21,14%

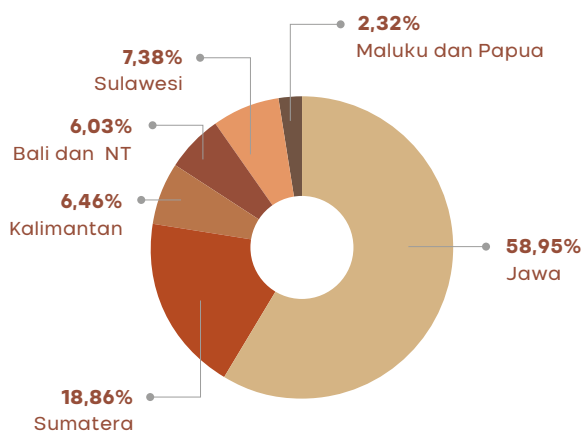
Lainnya								
Baki Debet	253.367	277.829	297.873	28,65%	5,48%	3,12%	11,26%	15,93%
NPL	13.459	9.751	12.396	4,16%	11,96%	6,22%	-10,69%	15,61%
Baki Debet UMKM	914.077	969.972	1.039.620		4,18%	1,95%	9,35%	12,34%
NPL UMKM	40.383	32.421	39.117	3,76%	8,06%	3,34%	-3,34%	9,65%

Sumber: SPI, September 2019

Secara spasial, sebagian besar kredit UMKM masih terpusat di pulau Jawa dengan porsi sebesar 58,95%, terutama terpusat di wilayah Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Sementara itu, kredit UMKM di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku,

dan Papua) masih relatif kecil yaitu hanya sebesar 22,19%. Dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan kredit UMKM tertinggi terdapat di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat yang tumbuh masing-masing 24,12% (yoy) dan 20,01% (yoy).

Grafik I - 33 ◇ Penyebaran UMKM Berdasarkan Wilayah



Sumber: SPI, September 2019

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit UMKM disalurkan oleh BUMN (58,54%) dan BUSN (33,08%). Secara umum, penyaluran kredit UMKM dari seluruh kelompok bank meningkat dibandingkan

tahun sebelumnya, dengan pertumbuhan tertinggi pada kelompok bank KCBA dan bank Campuran tumbuh tertinggi sebesar 16,57% (yoy) setelah tahun sebelumnya berkontraksi -7,63% (yoy).

Tabel I - 10 ◇ Kredit UMKM Berdasarkan Kelompok Bank

Indikator	Baki Debet (Rp M)			Porsi	qta		yoy	
	Sep '18	Des '18	Sep '19		Jun '19	Sep '19	Sep '18	Sep '19
BUMN	532.987	551.935	608.595	58,54%	4,85%	2,71%	11,95%	14,19%
BUSN	313.857	338.455	343.860	33,08%	2,94%	-0,49%	6,22%	9,56%
BPD	70.952	70.089	78.242	7,53%	5,57%	7,71%	6,78%	10,27%
KCBA dan Campuran	7.654	9.493	8.922	0,86%	-2,36%	-1,13%	-7,63%	16,57%
Total UMKM	925.451	969.972	1.039.620	100%	4,18%	1,95%	9,35%	12,34%

Sumber: SPI, September 2019

1.2.5 Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif

Penyaluran kredit berdasarkan lapangan usaha, sebagian besar disalurkan ke sektor perdagangan besar dan eceran serta sektor industri pengolahan, dengan porsi masing-masing sebesar 18,14% dan

16,61%. Sementara itu, untuk sektor ekonomi bukan lapangan usaha porsi terbesar disalurkan ke sektor rumah tangga yaitu 23,40% terhadap total kredit.

Tabel I - 11 ◇ Konsentrasi Kredit Perbankan Berdasarkan Sektor Ekonomi (%)

No.	Sektor Ekonomi	Kredit (Rp Triliun)			qtq		yoy		Porsi
		Sep' 18	Jun '19	Sep '19	Jun '19	Sep '19	Jun '18	Jun '19	
Lapangan Usaha									
1.	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	338,57	362,56	370,14	2,40%	2,09%	11,35%	9,33%	6,70%
2.	Perikanan	11,52	13,02	13,78	5,51%	5,79%	10,54%	19,60%	0,25%
3.	Pertambangan dan Penggalian	137,18	136,55	129,72	-0,87%	-5,00%	24,58%	-5,44%	2,35%
4.	Industri Pengolahan	868,92	902,05	917,46	3,82%	1,71%	9,73%	5,59%	16,61%
5.	Listrik, Gas, dan Air	173,48	208,93	197,44	11,81%	-5,50%	33,34%	13,81%	3,57%
6.	Konstruksi	290,87	348,34	367,27	7,59%	5,43%	17,24%	26,72%	6,65%
7.	Perdagangan Besar dan Eceran	961,47	999,85	1.002,34	2,79%	0,25%	12,31%	4,25%	18,14%
8.	Penyediaan Akomodasi dan PMM	97,80	104,20	106,87	3,82%	2,56%	2,02%	9,27%	1,93%
9.	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	210,08	232,46	232,24	8,64%	-0,10%	20,37%	10,55%	4,20%
10.	Perantara Keuangan	225,95	250,02	243,99	7,65%	-2,41%	8,27%	7,99%	4,42%
11.	Real Estate	238,36	258,47	262,48	1,83%	1,55%	10,53%	10,12%	4,75%
12.	Administrasi Pemerintahan	24,60	25,41	26,62	-2,30%	4,76%	6,95%	8,21%	0,48%
13.	Jasa Pendidikan	11,23	13,32	13,44	5,14%	0,97%	17,81%	19,75%	0,24%
14.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	20,28	25,19	27,99	8,98%	11,12%	14,97%	38,03%	0,51%
15.	Jasa Kemasyarakatan	75,22	79,18	80,22	-2,58%	1,32%	21,00%	6,65%	1,45%
16.	Jasa Perorangan	2,69	3,37	3,41	23,43%	1,09%	1,72%	26,73%	0,06%
17.	Badan Internasional	0,13	0,17	0,27	0,39%	53,70%	-14,92%	97,80%	0,00%
18.	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	2,54	1,93	1,76	21,30%	-9,08%	-17,14%	-33,15%	0,03%
Bukan Lapangan Usaha									
19.	Rumah Tangga	1.193,83	1.270,17	1.292,70	1,26%	1,77%	13,59%	8,28%	23,40%
20.	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	235,38	232,45	234,06	0,01%	0,69%	0,69%	-0,56%	4,24%
Industri		5.120	5.468	5.524	3,33%	1,03%	12,69%	7,89%	100%

Sumber: SPI, September 2019

Penyaluran kredit bank umum triwulan III-2019 tumbuh 7,89% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 12,69% (yoy). Hal tersebut dipengaruhi oleh lesunya harga komoditas dan pelemahan daya beli masyarakat.

Ditinjau dari porsinya, hingga saat ini penyaluran kredit perbankan Indonesia masih disalurkan ke sektor rumah tangga (23,40%) yang tumbuh 8,28% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 13,59% (yoy). Kredit sektor ini utamanya

disalurkan untuk subsektor pemilikan rumah tinggal yang pada periode ini melambat 8,28% (yoy) dari 13,59% (yoy). Kredit untuk pemilikan rumah tinggal utamanya disalurkan untuk pemilikan rumah tinggal tipe 22 s.d 70 (KPR tipe menengah), yang tumbuh melambat menjadi 15,93% (yoy) dari 18,05% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, untuk kredit produktif, sebagian besar kredit perbankan disalurkan ke sektor perdagangan besar dan eceran (18,14%). Kredit di sektor ini

tumbuh 4,25% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 12,31% (yoy). Penyaluran kredit terbesar pada sektor ini adalah perdagangan eceran kecuali mobil dan sepeda motor (7,54%) dan perdagangan besar dalam negeri selain ekspor dan impor kecuali perdagangan mobil dan sepeda motor (7,49%) yang masing-masing tumbuh menjadi 5,60% (yoy) dan 5,10% (yoy).

Sektor industri pengolahan juga masih merupakan salah satu sektor dengan penyaluran kredit terbesar pada periode ini, yaitu sebesar 16,61% dengan porsi terbesar disalurkan kepada industri makanan dan minuman serta industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia, yang keduanya tercatat tumbuh melambat. Secara umum, kredit sektor industri pengolahan tercatat tumbuh 5,59% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 9,73% (yoy). Meskipun secara umum mengalami perlambatan, beberapa sektor industri menunjukkan pertumbuhan yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, diantaranya industri barang galian bukan logam dan industri logam dasar.

Kredit yang disalurkan ke sektor pertanian, perburuan dan kehutanan juga masih cukup besar, 6,70% dari total penyaluran kredit perbankan, utamanya untuk sektor perkebunan kelapa sawit. Namun demikian, laju pertumbuhan kredit perkebunan kelapa sawit tercatat semakin melambat. Sebelumnya pada September 2018, pertumbuhan kredit perkebunan kelapa sawit tumbuh sebesar 11,66% (yoy), sedangkan tahun ini hanya tumbuh sebesar 2,55% (yoy). Melambatnya pertumbuhan kredit di sub sektor perkebunan kelapa sawit ini seiring dengan melambatnya ekspor kelapa sawit Indonesia dan menurunnya harga CPO di pasar global.

Meskipun secara industri, pertumbuhan kredit tercatat melambat, pada periode laporan, terdapat beberapa sektor kredit yang mencatat peningkatan pertumbuhan, salah satunya adalah kredit ke sektor konstruksi. Sektor ini memiliki porsi cukup besar, yaitu 6,65% dari total penyaluran kredit dan mencatat pertumbuhan yang tinggi 26,27% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 17,24% (yoy). Porsi dan pertumbuhan yang tinggi tersebut seiring dengan maraknya pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Pertumbuhan kredit pada sektor itu utamanya didorong oleh pertumbuhan yang tinggi pada sub sektor konstruksi gedung dan bangunan sipil utamanya dipicu oleh penyaluran kredit untuk bangunan jalan tol yang tumbuh 86,46% (yoy). Hal ini sesuai dengan target Pemerintah untuk membangun jalan tol 1.070 km pada 2019, dengan tujuan meningkatkan konektivitas antar daerah serta efisiensi waktu tempuh transportasi dan jaringan logistik. Lokasi proyek untuk penyaluran kredit pembangunan jalan tol masih berpusat di Pulau Jawa,

namun mulai terlihat peningkatan pertumbuhan penyaluran kredit di beberapa provinsi di luar Pulau Jawa, diantaranya Riau, Sumatera Utara dan Kalimantan Timur.

Selain itu, sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum juga tumbuh meningkat dibanding tahun sebelumnya, dari 2,02% (yoy) menjadi 9,27% (yoy), dengan penyaluran utama ke subsektor penyediaan akomodasi hotel bintang. Peningkatan kredit di sektor ini sejalan dengan dijadikannya sektor pariwisata sebagai salah satu kredit sektor prioritas yang digalakan oleh Pemerintah pada tahun ini. Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial juga mencatat pertumbuhan kredit yang meningkat sebesar 38,03 % (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 14,97% (yoy). Namun demikian, porsi penyaluran kredit pada sektor ini sangat kecil (0,51% dari total penyaluran kredit bank umum). Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial juga tumbuh meningkat dibanding tahun sebelumnya, dari 6,95% (yoy) menjadi 8,21% (yoy). Penyaluran kredit di sektor ini sangat kecil, yaitu sebesar 0,48% dari total penyaluran kredit bank umum, dengan sub-sektor utama administrasi pemerintahan, dan kebijakan ekonomi dan sosial.

1.3 PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL

1.3.1 Perkembangan Perdagangan Efek

Perdagangan efek selama triwulan III-2019 dipengaruhi oleh sentimen global dan domestik. Sentimen yang memberikan pengaruh di Pasar Saham di antaranya masih berlanjutnya tensi perang dagang antara China dan Amerika Serikat, penurunan harga komoditas serta turunnya proyeksi pertumbuhan ekonomi global oleh IMF tahun ini sebanyak 0,1% ke level 3,2%. Selain itu tensi perang dagang yang diikuti pelemahan mata uang Yuan semakin meningkatkan ketidakpastian perekonomian global. Pada sisi lainnya yaitu pasar obligasi, tren suku bunga negatif di beberapa negara maju serta kebijakan the Fed menurunkan suku bunga acuan AS sebesar 25 bps di level 1,75% - 2,00% memberikan katalis positif.

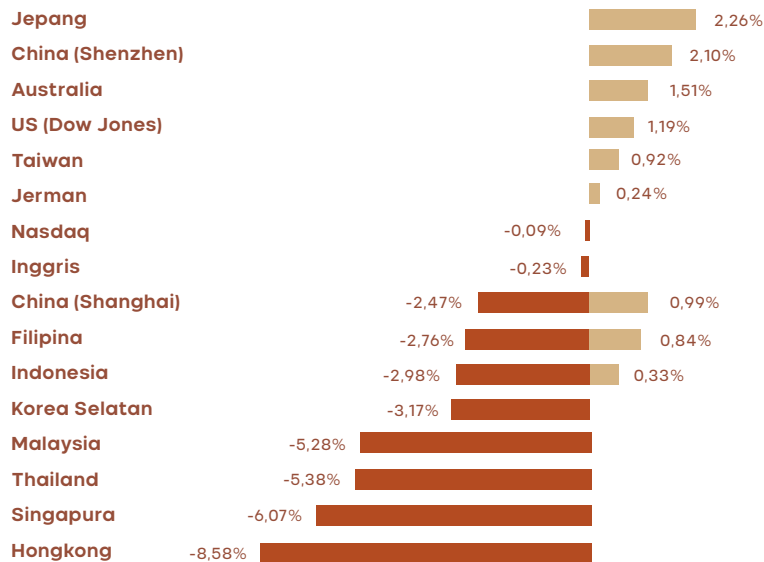
Sentimen domestik yang mempengaruhi kinerja Pasar Modal di antaranya kebijakan Bank Indonesia kembali menurunkan BI 7-days *Repo Rate* untuk ketiga kalinya selama triwulan III-2019 di level 5,25%, dengan suku bunga *Deposit Facility* di level 4,50% dan *Lending Facility* turun di 6,00% serta tingkat inflasi yang terkendali yaitu di level 2,2% (yoy) atau 3,39% (ytd).

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan akhir triwulan III-2019 berada pada posisi 6.169,10 atau

mengalami penurunan sebesar 2,98% jika dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya. Perdagangan Efek pada triwulan III-2019, berdasarkan nilai dan volume transaksi didominasi oleh investor lokal. Adapun perilaku investor asing pada periode ini menunjukkan adanya

capital outflow (net sell) di pasar saham. Adapun nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS menunjukkan pelemahan sebesar Rp33,- atau -0,23% menjadi Rp14.174,-/USD dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 34 ◇ Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (qtq)



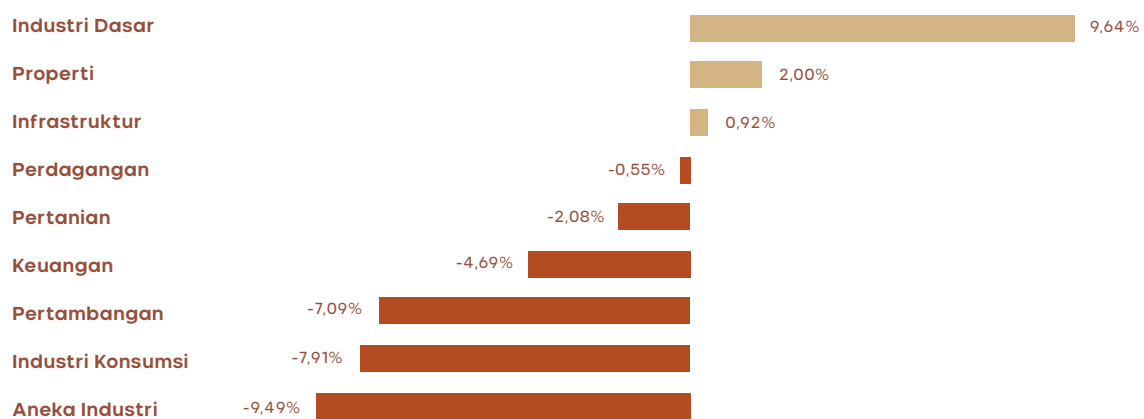
Sumber: Bloomberg

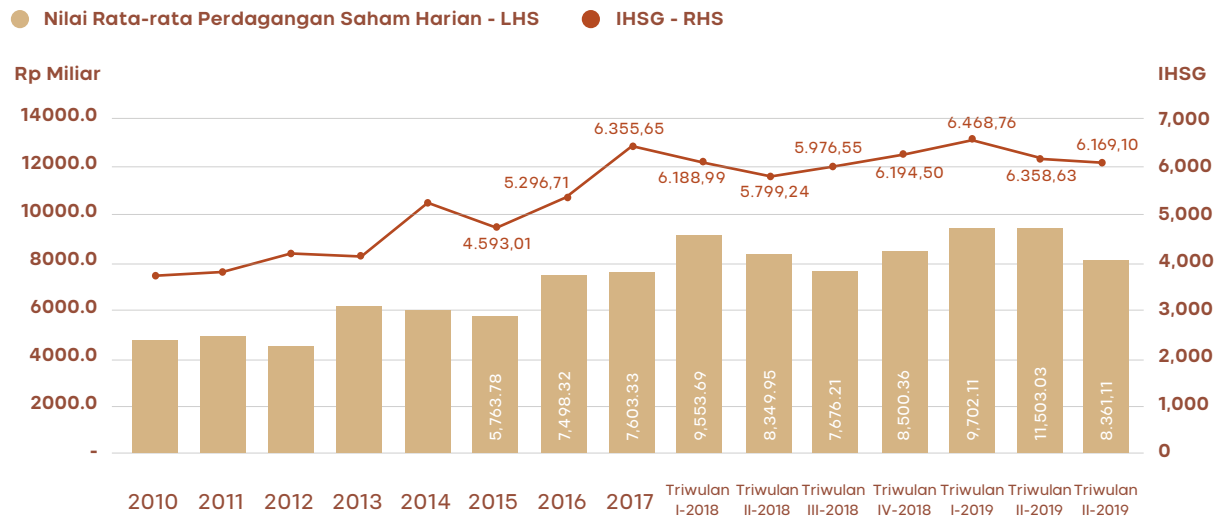
Nilai kapitalisasi pasar saham mengalami penurunan sebesar 2,11% dibandingkan posisi triwulan sebelumnya menjadi Rp7.090,42 triliun. Rata-rata nilai perdagangan per hari mengalami penurunan sebesar Rp2.083,51 miliar (-19,95%) menjadi sebesar Rp8.361,11 miliar. Sedangkan untuk rata-rata volume dan frekuensi mengalami peningkatan masing-masing sebesar Rp1.309,67 juta (9%) untuk volume dan kenaikan sebesar 62 ribu kali (14,40%) menjadi 493 ribu kali transaksi.

Secara regional IHSG menempati peringkat kelima setelah Amerika Serikat (Nasdaq), Inggris,

China, dan Filipina yang mencatatkan kinerja yang negatif. Indeks sektor industri dasar pada triwulan ini mencatatkan kenaikan tertinggi yaitu sebesar 9,64%. Hal ini disebabkan karena imbas dari insentif yang diberikan pemerintah kepada sektor properti sehingga berdampak pada kinerja industri dasar khususnya pada sub sektor emiten semen. Sedangkan sektor yang mengalami penurunan terdapat yaitu sektor aneka industri. Penurunan sektor ini masih disebabkan oleh sentimen global yaitu perang dagang.

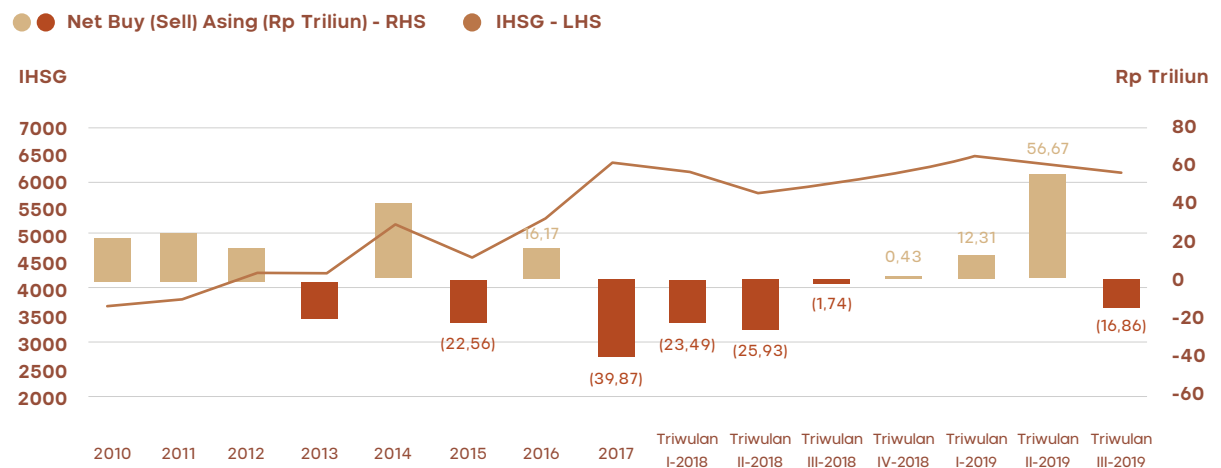
Grafik I - 35 ◇ Perkembangan Indeks Industri (qtq)



Grafik I - 36 ◇ Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-rata Perdagangan Saham Harian**Tabel I - 12** ◇ Perkembangan Transaksi Perdagangan Saham

(dalam miliar Rupiah)

Indikator (Rata-rata harian)	2018				2019		
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
Nilai perdagangan saham harian (Rp miliar)	9,553.69	8,349.94	7,676.20	8,402.19	9,702.11	11,503.03	8,361.11
Investor Asing (Rp miliar)							
Beli	3,516.68	3,120.26	2,791.47	2,731.24	6,363.62	6,933.65	6,067.51
Jual	3,895.62	3,600.51	2,819.62	2,724.36	6,562.49	7,985.64	5,811.99
Investor Domestik (Rp miliar)							
Beli	6,037.01	5,224.68	4,884.73	5,670.95	3,338.48	4,569.37	2,293.59
Jual	5,658.07	4,749.44	4,856.59	5,677.83	3,139.61	3,517.38	2,549.11
Frekuensi Perdagangan Saham Harian	384,845	409,065	369,900	386,281	442,245	479,310	493,118

Grafik I - 37 ◇ Perkembangan IHSG dan Net Asing

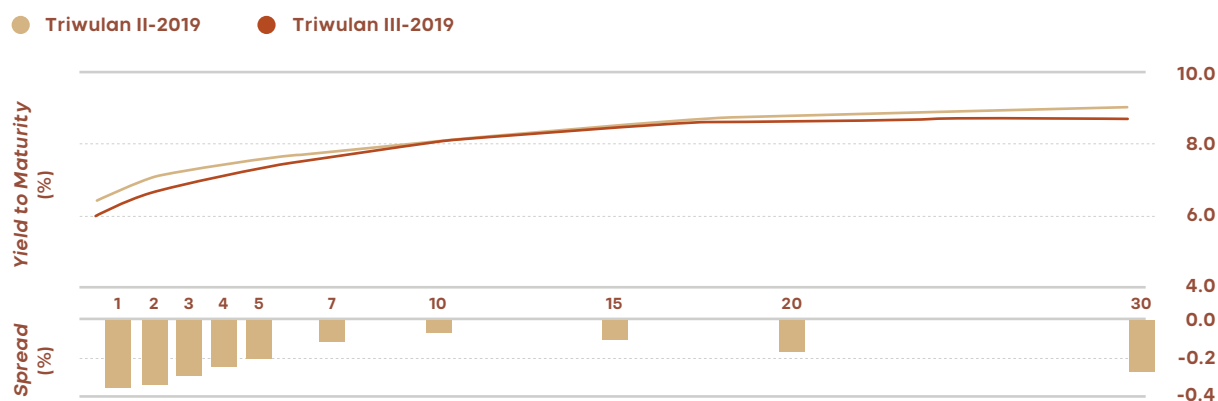
Tabel I - 13 ◇ Perkembangan IHSG dan Net Asing

Periode	IHSG	Net Sell/Buy (Rp Miliar)
2015	4.593,01	(22.589,03)
2016	5.296,71	16.169,49
2017	6.355,65	(39.896,15)
Triwulan I-2018	6.188,98	(23.494,31)
Triwulan II-2018	5.799,24	(25.933,08)
Triwulan III-2018	5.976,55	(1.744,96)
Triwulan IV-2018	6.194,50	426,51
Total		(50.745,84)
Triwulan I-2019	6.488,75	12.131,14
Triwulan II-2019	6.359,63	56.666,2
Triwulan III-2019	6.169,10	(16.864,40)
Total		68.797,42

Selama triwulan III-2019 transaksi investor asing membukukan *net sell* sejumlah Rp16,86 triliun meskipun

secara *year-to-date* masih mencatatkan net buy sebesar Rp 51.93 triliun.

Grafik I - 38 ◇ Indonesia Government Securities Yield Curve (IBPA-IGSYC)



Secara umum kinerja pasar Obligasi pada triwulan III-2019 mengalami kenaikan dibanding periode sebelumnya. Hal ini terlihat dari *yield* Obligasi Pemerintah yang menunjukkan tren penurunan

dengan rata-rata untuk seluruh tenor turun sebesar -17,4 bps. Rata-rata *yield* tenor pendek, menengah, dan panjang mengalami penurunan masing-masing sebesar -30,9 bps, -15,6 bps, dan -15,3 bps.

Tabel I - 14 ◇ Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Utang

Jenis Transaksi	Triwulan III-2018			Triwulan II-2019			Triwulan III-2019		
	Volume (Rp Triliun)	Nilai (Rp Triliun)	Frek. (Kali)	Volume (Rp Triliun)	Nilai (Rp Triliun)	Frek. (Kali)	Volume (Rp Triliun)	Nilai (Rp Triliun)	Frek. (Kali)
Obligasi:									
Korporasi	103,87	103,30	8,371	88,12	87,97	8.057	110,47	109,06	9.855
SBN	1.084,00	1.036,43	51,470	1.620,91	1.609,84	66.602	1.743,38	1.766,56	78.424
Total	1.187,87	1.139,73	59,841	1.709,03	1.697,81	74.659	1.853,85	1.875,61	88.279
Repo	116,48	108,92	335	503,84	481,32	701	331,30	324,18	725

Secara total, aktivitas perdagangan Obligasi Pemerintah pada triwulan III-2019 mengalami peningkatan dibandingkan dengan pada triwulan II-2019. Volume perdagangan Obligasi Pemerintah pada triwulan III-2019

meningkat sebesar +7,56% menjadi Rp1.743,38 triliun, nilai perdagangan meningkat sebesar +9,73% menjadi Rp1.766,56 triliun dan frekuensi perdagangan juga meningkat sebesar 17,75% menjadi 78.424 kali.

Peningkatan aktivitas perdagangan juga dialami oleh Obligasi Korporasi. Volume perdagangan meningkat sebesar +25,36% menjadi Rp110,47 triliun, nilai

perdagangan meningkat sebesar +23,97% menjadi Rp109,06 triliun dan frekuensi perdagangan juga meningkat sebesar +22,32% menjadi 9.855 kali.

1.3.2 Perkembangan Jumlah SID

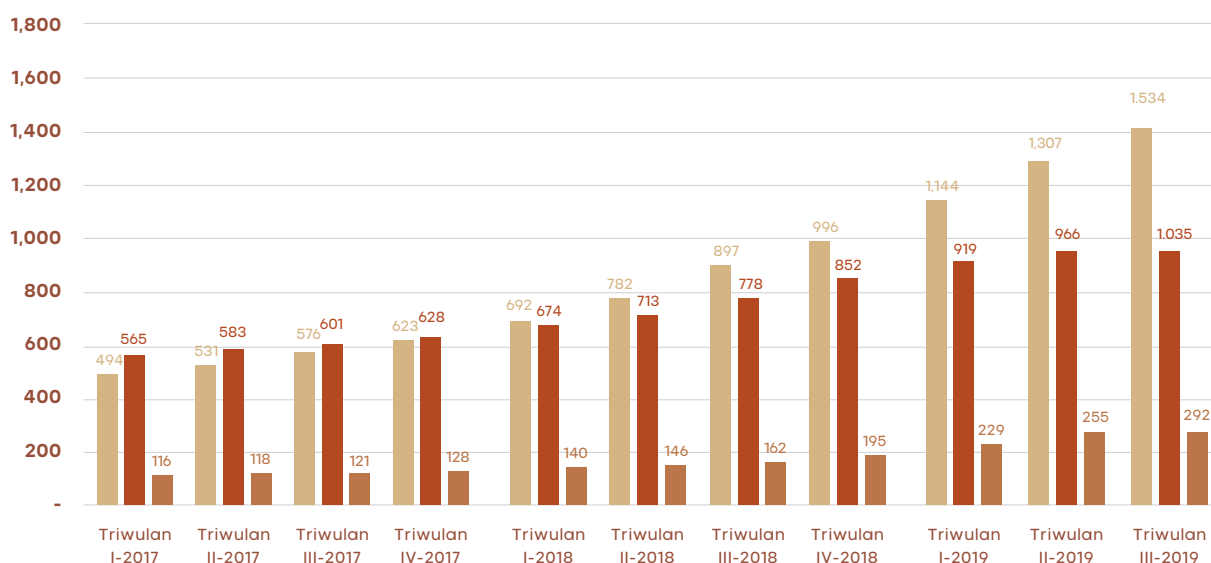
Pada triwulan III-2019, jumlah SID C-BEST, SID S-INVEST dan SID SBN mengalami peningkatan. Jumlah SID C-BEST mencapai 1.035.384 atau mengalami peningkatan sebanyak 69.305 (7,17%) jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berjumlah 966.079. Jumlah SID S-INVEST mencapai 1.534.155 atau

mengalami peningkatan sebanyak 227.265 (17,39%) jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berjumlah 1.306.890. Jumlah SID SBN mencapai 291.931 atau mengalami peningkatan sebanyak 36.901 (14,47%) jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berjumlah 255.030.

Grafik I - 39 ◇ Perkembangan Jumlah SID

● SID S - INVEST ● SID C - BEST ● SID SBN

Ribuan



1.3.3 Perkembangan Perusahaan Efek

Tabel I - 15 ◇ Jumlah Perusahaan Efek

No.	Jenis Izin Usaha	Jumlah
1.	Perantara Pedagang Efek	33
2.	Penjamin Emisi Efek *)	3
3.	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek	84
4.	Perantara Pedagang Efek + Manajer Investasi	1
5.	Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	-
6.	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	3
Total		124

*) Khusus izin Penjamin Emisi Efek yang tidak melakukan aktivitas sebagai Perantara Pedagang Efek

Pada triwulan ini tidak terdapat penerbitan izin maupun pencabutan izin usaha Perusahaan Efek sebagai izin Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek, sehingga jumlah PE yang terdaftar di OJK sebanyak 124 PE. Terkait dengan kegiatan PE

di berbagai lokasi selain Kantor Pusat, OJK mencatat pelaporan pembukaan sejumlah enam lokasi selain Kantor Pusat dan penutupan sejumlah tiga lokasi selain Kantor Pusat selama triwulan III-2019.

Tabel I - 16 ◇ Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat

Periode	2019	2019
	s.d. Triwulan II	s.d. Triwulan III
Jumlah Lokasi Selain Kantor Pusat	702	705

Terkait izin Wakil Perusahaan Efek, pada periode laporan OJK telah menerbitkan izin orang perorangan sebanyak 156 izin dengan rincian 143 izin Wakil

Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan sebanyak 13 Izin Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) sehingga jumlah pemegang izin mencapai 10.351 WPPE dan 2.236 WPEE.

Tabel I - 17 ◇ Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek

Jenis Izin	Triwulan I-2019		Triwulan II-2019		Izin Total s.d. Triwulan II	Total
	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin		
WPPE	177	170	280	143	463	10.351
WPEE	16	15	13	13	92	2.236
Total	177	170	280	156	463	10.351

Selama periode laporan, OJK menerbitkan 31 perpanjangan izin dengan rincian 26 perpanjangan izin WPPE dan 5 perpanjangan WPEE.

Tabel I - 18 ◇ Proses Perpanjangan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek

Jenis Izin	Triwulan I-2019		Triwulan II-2019		Izin Total s.d. Triwulan II	Total
	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin		
WPPE	1	1	52	24	26	26
WPEE	0	0	5	5	5	5
Total	1	1	57	29	31	31

Pada periode laporan, OJK menerima 483 dokumen perizinan dengan rincian 476 dokumen permohonan izin WPPEP dan 7 permohonan WPPEPT. OJK juga

menerbitkan 431 izin WPPEP dan 7 untuk izin WPPEPT. Sehingga sampai periode laporan total izin WPPEP sebanyak 1.286 dan WPPEPT sebanyak 101.

Tabel I - 19 ◇ Proses Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas

Jenis Izin	Triwulan II-2019		Triwulan III-2019		Izin Total s.d. Triwulan II	Total
	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin		
WPPE	123	83	476	431	635	1.286
WPEE	7	6	7	7	19	101
Total	130	89	483	438	654	1.387

1.3.4 Perkembangan Pengelolaan Investasi

Pertumbuhan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana pada triwulan III-2019 mengalami kenaikan sebesar Rp28,33 triliun (5,53%) menjadi Rp540,91 triliun

dibandingkan dengan triwulan II-2019 sebesar Rp512,58 triliun. NAB Reksa Dana Syariah menunjukkan kenaikan jumlah NAB terbesar yaitu Rp22,48 triliun (68,00%),

diikuti oleh Reksa Dana Pasar Uang sebesar Rp3,64 triliun (6,77%), Reksa Dana Pendapatan Tetap sebesar Rp3,09 triliun (2,90%), Reksa Dana Indeks sebesar Rp1,02 triliun (19,43%), Reksa Dana Campuran sebesar Rp0,54 triliun

(2,01%), dan ETF sebesar Rp0,25 triliun (1,77%). Namun demikian, Reksa Dana Saham menjadi satu-satunya jenis Reksa Dana yang mengalami penurunan jumlah NAB sebesar Rp5,07 triliun (-3,56%).

Tabel I - 20 ◇ Perkembangan Pengelolaan Investasi

NAB Per Jenis Reksa Dana	2018 (Rp triliun)		2019 (Rp triliun)		
	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
RD Pasar Uang	45,22	42,79	49,71	53,75	57,39
RD Pendapatan Tetap	102,66	101,60	105,02	106,58	109,67
RD Saham	136,94	143,80	142,60	142,39	137,32
RD Campuran	23,64	24,40	25,49	26,90	27,44
RD Terproteksi	139,20	141,41	137,63	130,53	132,91
RD Indeks	5,02	5,33	4,80	5,25	6,27
ETF	10,62	11,56	12,75	14,12	14,37
RD Syariah*	31,80	34,49	37,08	33,06	55,54
Total	495,09	505,39	515,09	512,58	540,91

*) termasuk ETF Saham Syariah

Dana kelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) meningkat sebesar 15,98% menjadi Rp27,36 triliun pada triwulan III-2019. Selain itu, jumlah kontrak RDPT juga

mengalami peningkatan sebesar 18,33% menjadi 71 RDPT dari sebelumnya 60 RDPT. Seluruh RDPT pada triwulan III-2019 merupakan RDPT yang berbasis proyek.

Tabel I - 21 ◇ Perkembangan Reksa Dana dan Produk Investasi Lainnya

(dalam triliun Rupiah)

Jenis Investasi	2018		2019		
	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
Reksa Dana					
Jumlah	2.035	2.098	2.089	2.094	2.188
Total NAB	495,09	505,39	515,09	512,58	540,91
RDPT					
Jumlah	59	62	64	60	71
Total NAB	26,58	26,65	23,96	23,59	27,36
EBA					
Jumlah	8	8	7	7	8
Nilai Sekuritisasi	7,49	7,21	6,98	6,72	6,99
EBA-SP					
Jumlah	5	5	5	5	5
Nilai Sekuritisasi	3,66	3,46	3,26	3,13	2,89
DIRE					
Jumlah	4	7	7	7	7
Total Nilai	0,62	0,72	0,92	11,34	11,34
KPD					
Jumlah	478	494	502	514	531
Total Nilai	196,72	204,77	214,00	217,18	214,10
DINFRA					
Jumlah	2	4	4	6	6
Total Nilai	0,33	0,34	0,64	2,65	2,96

Selama periode laporan OJK menerbitkan satu izin baru Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA), sehingga jumlah KIK-EBA menjadi delapan KIK dengan dana kelolaan sebesar Rp6,99 triliun.

Jumlah Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estat (KIK-DIRE) pada triwulan III-2019 tetap sebanyak tujuh KIK dengan dana kelolaan sebesar Rp11,34 triliun.

Selama periode laporan OJK tidak menerbitkan izin baru ataupun pembubaran Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP), sehingga jumlah EBA-SP tetap sebanyak lima EBA-SP dengan dana kelolaan sebesar Rp2,89 triliun.

Pada triwulan III-2019, nilai Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) mengalami kenaikan sebesar 3,31% menjadi 531 KPD dengan dana kelolaan sebesar Rp214,10 triliun atau menurun sebesar 1,42% dibanding dengan triwulan sebelumnya.

Selama periode laporan OJK tidak menerbitkan izin baru ataupun pembubaran Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur (KIK-DINFRA), sehingga jumlah KIK-DINFRA sebanyak enam KIK-DINFRA dengan dana kelolaan sebesar Rp2,96 triliun.

OJK sampai dengan triwulan III-2019 telah menerbitkan 318 Surat Efektif pernyataan pendaftaran Reksa Dana yang unit penyertaannya ditawarkan melalui penawaran umum.

Tabel I - 22 ◇ Jenis Reksa Dana yang Mendapat Surat Efektif

Jenis Reksa Dana	Jumlah Surat Efektif
Reksa Dana Saham	20
Reksa Dana Campuran	10
Reksa Dana Pendapatan Tetap	19
Reksa Dana Pasar Uang	31
Reksa Dana Terproteksi	163
Reksa Dana Indeks	4
ETF-Indeks	8
ETF-Indeks Syariah	1
Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap	1
Reksa Dana Syariah Campuran	3
Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Luar Negeri	3
Reksa Dana Syariah Saham	8
Reksa Dana Syariah Pasar Uang	15
Reksa Dana Syariah Terproteksi	29
Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk	1
Total	318

Di samping itu, OJK juga telah menerbitkan 228 surat pembubaran Reksa Dana yang terdiri dari 206 Reksa Dana Konvensional dan 22 Reksa Dana Syariah. Adapun rincian pembubaran Reksa Dana tersebut terdiri dari :

- 174 Reksa Dana Terproteksi terdiri dari 128 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK, 44 Reksa Dana dibubarkan karena tidak terpenuhinya minimum dana kelolaan, dan dua Reksa Dana dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut;
- Lima Reksa Dana Campuran terdiri dari tiga Reksa Dana dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut, satu Reksa Dana dibubarkan karena tidak dapat memenuhi minimum dana kelolaan, dan satu Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK;
- 15 Reksa Dana Saham terdiri dari lima Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK, empat Reksa Dana dibubarkan karena tidak dapat

- memenuhi minimum dana kelolaan, lima Reksa Dana dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut, dan satu Reksa Dana dibubarkan karena diperintahkan OJK;
- Satu Reksa Dana Pasar Uang dibubarkan karena tidak dapat memenuhi minimum dana kelolaan;
- 10 Reksa Dana Pendapatan tetap terdiri dari enam dibubarkan karena kesepakatan MI & BK, tiga Reksa Dana yang dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut dan satu Reksa Dana dibubarkan karena tidak dapat memenuhi minimum dana kelolaan;
- Satu Reksa Dana Indeks dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK;
- 15 Reksa Dana Syariah Terproteksi terdiri dari 10 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK dan lima Reksa Dana dibubarkan karena tidak dapat memenuhi minimum dana kelolaan;

- Satu Reksa Dana Syariah Campuran dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut.
- Dua Reksa Dana Syariah Saham terdiri dari satu Reksa Dana dibubarkan karena tidak dapat memenuhi minimum dana kelolaan dan satu Reksa Dana dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut.
- Satu Reksa Dana Syariah Pasar Uang dibubarkan karena tidak dapat memenuhi minimum dana kelolaan.
- Dua Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Luar Negeri terdiri dari satu Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK dan satu Reksa Dana dibubarkan karena tidak dapat memenuhi minimum dana kelolaan.
- Satu Reksa Dana Syariah Indeks dibubarkan karena tidak dapat memenuhi minimum dana kelolaan.

Tabel I - 23 ◇ Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin

(dalam triliun Rupiah)

Jenis Investasi	2018			2019		
	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
Individu						
Wakil Manajer Investasi (WMI)	2.165	2.215	2.332	2.430	2.550	2.637
Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD)	26.450	26.958	27.466	27.970	28.525	22.330
Penasehat Investasi (PI)	4	5	6	4	4	5
Institusi						
Manajer Investasi (MI)	90	90	92	93	93	98
Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) *Bank & PPE Khusus	37	37	37	41	41	42
Penasehat Investasi (PI)	17	18	21	21	21	21
MI sebagai PI	4	4	5	5	5	5
APERD sebagai PI	3	5	6	7	12	12
PE sebagai APERD	-	-	1	1	2	2

Selama triwulan III-2019, OJK memberikan lima izin baru kepada Manajer Investasi (MI) dan satu Surat Tanda Terdaftar (STTD) kepada PPE Khusus sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD), sehingga jumlah MI dan PPE Khusus sebagai APERD masing-masing meningkat sebesar 5,38% dan 2,44%.

OJK tidak memberikan izin kepada Penasihat Investasi (PI) Institusi, MI sebagai PI, dan APERD sebagai PI, sehingga jumlah PI Institusi, MI sebagai PI dan APERD sebagai PI tetap berjumlah 5 PI Institusi, 12 MI sebagai PI, dan 2 APERD sebagai PI.

Adapun untuk pelaku individu industri Pengelolaan investasi, pada periode ini OJK menerbitkan satu izin PI Individu dan 87 izin Wakil Manajer Investasi (WMI), sehingga jumlah PI Individu dan WMI masing-masing meningkat sebesar 25% dan 3,41%. Selain itu, OJK menerbitkan 1.155 izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD) dan mencabut 6.411 izin WAPERD sehingga jumlah WAPERD mengalami penurunan sebesar 21,72%. Pencabutan izin WAPERD tersebut dikarenakan tidak melakukan Program Pendidikan Lanjutan (PPL) sebagaimana diwajibkan dalam POJK nomor 50/POJK.04/2015 tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.

1.3.5 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik

Selama triwulan III-2019, jumlah emisi Penawaran Umum mengalami penurunan sebesar 6% dan nilai emisi Penawaran Umum mengalami kenaikan sebesar 16% dibanding dengan triwulan III-2018. Nilai emisi dan jumlah emisi Penawaran Umum Perdana Saham mengalami penurunan menjadi Rp2,11 triliun atau sebesar 40% dengan jumlah emisi sebanyak 9 (sembilan) Perusahaan. Nilai emisi dan jumlah emisi Penawaran Umum Terbatas mengalami penurunan menjadi Rp634miliar dengan jumlah emisi sebanyak 3 (tiga) Perusahaan. Untuk jumlah emisi dan nilai emisi Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang mengalami kenaikan masing-masing sebesar 50% dan 47% dengan jumlah emisinya sebanyak 18 (delapan belas) Perusahaan dan nilai emisinya menjadi Rp31,18 triliun.

Selama triwulan III-2019, jumlah Penawaran Umum sebanyak 30, terdiri dari 9 Penawaran Umum Perdana Saham, 3 Penawaran Umum Terbatas dan 18 Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang.

Tabel I - 24 ◇ Perkembangan Penawaran Umum (Emisi)

Jenis Penawaran Efek	Triwulan III-2018		Triwulan III-2019		Δ (%) Jumlah Emisi	Δ (%) Nilai Emisi
	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (Rp miliar)	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (Rp miliar)		
Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	15	2.342	9	2.114	-40%	-10%
Penawaran Umum Terbatas (PUT/ <i>Rights Issue</i>)	5	5.748	3	634	-40%	-89%
Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang	12	21.234	18	31.178	50%	47%
a. Obligasi/ Sukuk + Subordinasi	3	4.603	1	800	-67%	-83%
b. PUB Obligasi/ Sukuk Tahap I	-	-	-	-	-	-
c. PUB Obligasi/ Sukuk Tahap II dst	9	16.631	17	30.378	89%	83%
Total Emisi	32	29.324	30	33.926	-6%	16%

Tabel I - 25 ◇ Perkembangan Nilai Emisi Berdasarkan Sektor Industri

No.	Sektor Industri	Penawaran Umum Perdana	Penawaran Umum Terbatas	Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang
1.	Perbankan	-	-	2.000.000
2.	Asuransi dan Pembiayaan	-	-	16.048.500
3.	Sekuritas dan Investasi	-	-	-
4.	Perdagangan	261.100	-	7.414.020
5.	Perhubungan dan Telekomunikasi	-	-	3.381.000
6.	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata dan Perusahaan Jasa Lainnya	365.372	262.443	-
7.	Properti dan Perhotelan	-	-	-
8.	Real Estate dan Konstruksi	353.167	-	534.500
9.	Tekstil, Garmen, dan Alas Kaki	-	-	-
10.	Barang Konsumsi	-	117.000	-
11.	Aneka Industri Lainnya	-	-	-
12.	Industri Dasar	-	-	-
13.	Industri Logam	1.133.947	255.000	-
14.	Industri Kimia	-	-	-
15.	Agrobisnis	-	-	-
16.	Pertambangan dan Kehutanan	-	-	1.800.000
Total		2.113.585	634.443	31.178.020

*) Khusus izin Penjamin Emisi Efek yang tidak melakukan aktivitas sebagai Perantara Pedagang Efek

A. Penawaran Umum Perdana Saham

Selama triwulan III-2019, terdapat 37 perusahaan yang mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, di mana sebanyak

sembilan Perusahaan telah mendapat surat efektif dan 28 Perusahaan masih dalam proses. Nilai emisi dari sembilan Emiten tersebut sebesar Rp2,1triliun.

Tabel I - 26 ◇ Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Nilai Emisi (Rp)
1.	PT Kencana Energi Lestari Tbk	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata dan Perusahaan Jasa Lainnya	290.371.950.000
2.	PT Bhakti Agung Propertindo Tbk	Real Estate dan Konstruksi	251.628.300.000
3.	PT Telefast Indonesia Tbk	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata dan Perusahaan Jasa Lainnya	74.999.970.000
4.	PT Gunung Raja Paksi Tbk	Industri Logam	1.033.946.592.000
5.	PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk	Perdagangan	54.000.000.000
6.	PT Nusantara Almazia Tbk	Real Estate dan Konstruksi	101.538.360.000
7.	PT Trinitan Metals dan Minerals Tbk	Industri Logam	100.000.050.000
8.	PT Gaya Abadi Sempurna Tbk	Perdagangan	57.500.000.000
9.	PT Itama Ranoraya Tbk	Perdagangan	149.600.000.000
Total			2.113.585.222.000

B. Penawaran Umum Terbatas (Right Issue)

Selama triwulan III-2019, terdapat 9 (sembilan) perusahaan yang menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas dan 3 (tiga) perusahaan telah mendapatkan

Pernyataan Efektif. Nilai emisi Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") atau right issue dari perusahaan tersebut sebesar Rp634,4miliar.

Tabel I - 27 ◇ Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Terbatas

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Nilai Emisi (Rp)
1.	PT Anabatic Technologies Tbk	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata dan Perusahaan Jasa Lainnya	262.443.078.900
2.	PT Wahana Pronatural Tbk	Barang Konsumsi	117.000.000.000
3.	PT Sumber Energi Andalan Tbk	Industri Logam	255.000.000.000
Total			634.443.078.900

C. Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang

Selama triwulan III-2019 terdapat 1 (satu) Perusahaan telah melakukan Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk dan 17 (tujuh belas) Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan ("PUB")

Obligasi/Sukuk Tahap II dan seterusnya. Total nilai emisi Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang tersebut sebesar Rp31,18triliun.

Tabel I - 28 ◇ Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Efek PUB Obligasi dan/atau Sukuk

PUB Obligasi Tahap I				
No.	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis PU	Nilai Emisi (Rp)
1.	PT Mitra Pinasthika Mustika Finance	Asuransi dan Pembiayaan	Obligasi	800.000.000.000
Total				800.000.000.000

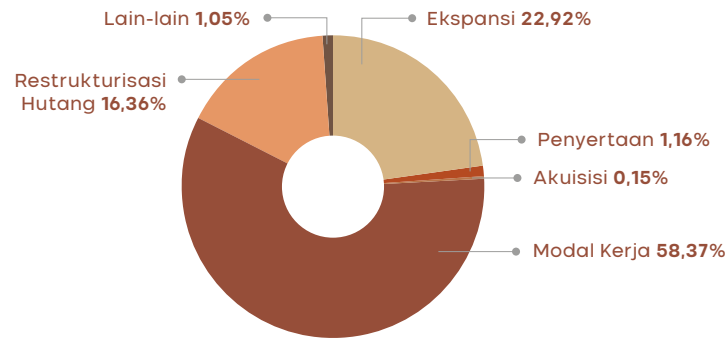
Tabel I - 29 ◇ Perusahaan yang Telah Melakukan Penawaran Umum Efek PUB Obligasi Tahap II dst

PUB Obligasi Tahap I				
No.	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis PU	Nilai Emisi (Rp)
1.	PT Mandala Multifinance Tbk	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi III Tahap II	321.000.000.000
2.	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi IV Tahap V	2.000.000.000.000
3.	PT PP Properti Tbk	Real Estate dan Konstruksi	PUB Obligasi I Tahap III	534.500.000.000
4.	PT Indosat Tbk	Perhubungan dan Telekomunikasi	PUB Obligasi III Tahap II	2.587.000.000.000
			PUB Sukuk Ijarah III Tahap II	794.000.000.000
5.	PT Mandiri Tunas Finance	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi IV Tahap II	2.000.000.000.000
6.	PT Sinar Mas Multifinance	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi I Tahap III	800.000.000.000
7.	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Perdagangan	PUB Obligasi III Tahap IV	2.953.620.000.000
			PUB Sukuk Ijarah III Tahap IV	1.250.000.000.000
8.	PT Timah (Persero)	Pertambangan dan Kehutanan	PUB Obligasi I Tahap II	900.000.000.000
			PUB Sukuk I tahap II	400.000.000.000
9.	PT Bank CIMB Niaga Tbk	Perbankan	PUB Sukuk Mudharabah I Tahap II	2.000.000.000.000
10.	PT Mandala Multifinance Tbk	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi III Tahap III	171.000.000.000
11.	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi II Tahap II	4.096.000.000.000
			PUB Sukuk Mudharabah I Tahap III	1.000.000.000.000
12.	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi V Tahap II	2.500.000.000.000
13.	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi IV Tahap VI	1.018.500.000.000
			PUB Sukuk Mudharabah I Tahap IV	150.000.000.000
14.	PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk	Perdagangan	PUB Obligasi II Tahap II	500.000.000.000
15.	PT J Resources Asia Pasifik Tbk	Pertambangan dan Kehutanan	PUB Obligasi I Tahap II	500.000.000.000
16.	PT Bank QNB Indonesia Tbk d.h. PT QNB BANK KESAWAN Tbk	Perdagangan	PUB Obligasi III Tahap V	1.912.900.000.000
			PUB Sukuk Ijarah III Tahap V	797.500.000.000
17.	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	Asuransi dan Pembiayaan	PUB Obligasi IV Tahap VI	1.192.000.000.000
Total				30.378.020.000.000

D. Rencana Penggunaan Dana

Persentase terbesar penggunaan dana Penawaran Umum yang dilakukan selama triwulan III-2019 adalah untuk modal kerja yaitu sebanyak 58,37% atau sekitar Rp18,88 triliun. Rincian porsi penggunaan dana lainnya adalah 22,92% atau sekitar Rp7,41triliun

untuk ekspansi; 0,15% atau sekitar Rp48,27 miliar untuk akuisisi; 1,16% atau sekitar Rp374,47triliun untuk penyertaan; 16,36% atau sekitar Rp5,29triliun untuk restrukturisasi hutang; dan 1,05% atau sekitar Rp338,8 triliun untuk lain-lain.

Grafik I - 40 ◇ Rencana Penggunaan Dana**Tabel I - 30** ◇ Rencana Penggunaan Dana Atas Aksi Korporasi Berdasarkan Sektor Industri

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Sektor Industri	Ekspansi	Penyertaan	Akuisisi	Modal Kerja	Restrukturisasi Hutang	Lain-Lain
1.	Perbankan	-	-	-	1.998.800	-	-
2.	Asuransi dan Pembiayaan	-	-	-	15.629.504	320.840	-
3.	Sekuritas dan Investasi	-	-	-	-	-	-
4.	Perdagangan	6.991.356	67.042	-	127.193	256.000	273.772
5.	Perhubungan dan Telekomunikasi	-	-	-	-	3.370.745	-
6.	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata dan Perusahaan Jasa Lainnya	171.825	374.473	-	55.986	-	3.603
7.	Properti dan Perhotelan	-	-	-	-	-	-
8.	Real Estate dan Konstruksi	-	-	48.271	478.996	348.605	-
9.	Tekstil, Garmen, dan Alas Kaki	-	-	-	-	-	-
10.	Barang Konsumsi	-	-	-	47.266	69.513	-
11.	Aneka Industri Lainnya	-	-	-	-	-	-
12.	Industri Dasar	-	-	-	-	-	-
13.	Industri Logam	248.740	-	-	42.605	923.446	61.425
14.	Industri Kimia	-	-	-	-	-	-
15.	Agrobisnis	-	-	-	-	-	-
16.	Pertambangan dan Kehutanan	-	-	-	496.490	-	-
Total		7.411.922	374.473	48.271	18.876.840	5.289.149	338.800

*) Data berdasarkan penggunaan dana setelah dikurangi oleh biaya Emisi

E. Equity Crowdfunding

Pada triwulan III-2019, terdapat satu Penyelenggara, PT Santara Daya Inspiratama telah mendapatkan

perizinan *Equity Crowdfunding* dan 10 Penyelenggara yang mengajukan permohonan dan masih dalam proses.

1.4 PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK

Sepanjang triwulan III-2019, kinerja Industri Keuangan Non Bank (IKNB) menunjukkan perkembangan positif. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya total aset IKNB sebesar 1,02% menjadi Rp2.454,38 triliun. Adapun

industri yang mengalami peningkatan aset terbesar yaitu dari industri Lembaga Pembiayaan serta Asuransi Konvensional.

Tabel I - 31 ◇ Total Aset IKNB

(dalam triliun Rupiah)

No.	Industi	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019
1.	Asuransi Konvensional dan BPJS	1.175,11	1.209,63	1.249,17	1.282,39	1.289,27
2.	Dana Pensiun Konvensional	263,54	269,51	276,91	282,38	284,7
3.	Lembaga Pembiayaan*)	593,69	589,57	596,31	607,43	617,16
4.	Lembaga Jasa Keuangan Khusus*)	224,14	228,50	234,90	242,01	248,13
5.	Industri Jasa Penunjang IKNB **)	8,98	9,61	9,61	9,61	12,02
6.	Lembaga Keuangan Mikro Konvensional ***)	0,40	0,47	0,47	0,48	0,52
7.	Fintech Konvensional	1,61	1,55	2,72	2,88	2,58
Total Aset		2.267,47	2.308,84	2.372,10	2.429,59	2.454,38

*) Aset Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Khusus termasuk data syariah

**) Aset Industri Jasa Penunjang IKNB Triwulan II 2019 menggunakan data per Semester II 2018

***) Aset Lembaga Keuangan Mikro disajikan per kuartalan (4 bulanan) sesuai periode pelaporannya, sehingga Triwulan II 2019 menggunakan data kuartal I 2019

1.4.1 Perkembangan Perasuransian Konvensional dan BPJS

Sampai periode triwulan III-2019, aset industri Asuransi dan BPJS tumbuh 0,54% menjadi Rp1.289,27 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan aset ini diiringi dengan peningkatan jumlah investasi yang naik sebesar 0,58% menjadi Rp1.103,04 triliun. Portofolio investasi yang mengalami peningkatan terbesar adalah Surat Berharga Negara (SBN) yang tumbuh Rp11,55 triliun dan Obligasi yang naik Rp5,45 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kenaikan SBN tersebut seiring dengan meningkatnya performa pasar *government* dan *corporate bonds* (ICBI* Sep'19: 266,52; ICBI Jun'19: 260,39). Sementara itu, bila dilihat dari jenis industri asuransi, BPJS dan asuransi jiwa menjadi penggerak utama meningkatnya

jumlah investasi dengan pertumbuhan masing-masing sebesar Rp11,7 triliun dan Rp2,3 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya.

Dari sisi kinerja industri asuransi secara agregat, pendapatan premi masih menunjukkan tren yang positif dengan nilai yang lebih baik dari triwulan yang sama di tahun sebelumnya. Pendapatan premi asuransi meningkat sebesar 7,1% (yoy) menjadi Rp342,51 triliun. Komposisi pendapatan premi masih didominasi oleh Asuransi Jiwa dengan porsi sebesar 39,93%, diikuti oleh BPJS sebesar 35,45%, Asuransi Umum dan Reasuransi sebesar 22,01%, serta Asuransi Wajib sebesar 2,61%.

Tabel I - 32 ◇ Indikator Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS

(dalam triliun Rupiah)

No.	Jenis Indikator	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019
1.	Total Aset					
	Asuransi Jiwa	516,34	520,64	534,75	544,83	539,32
	Asuransi Umum dan Reasuransi	161,65	166,46	171,83	175,87	178,96
	Asuransi Wajib	129,07	133,73	134,94	134,03	132,59
	BPJS	368,05	388,80	407,65	427,66	438,40
	Jumlah	1.175,11	1.209,63	1.249,17	1.282,39	1.289,27
2.	Total Investasi					
	Asuransi Jiwa	458,88	463,96	474,05	477,27	471,69
	Asuransi Umum dan Reasuransi	82,21	83,20	86,84	87,60	90,38
	Asuransi Wajib	114,33	117,19	124,01	122,68	121,73
	BPJS	351,02	372,29	390,02	409,16	419,23
	Jumlah	1.006,44	1.036,64	1.074,92	1.096,72	1.103,04
3.	Total Pendapatan Premi					
	Asuransi Jiwa	141,14	186,05	44,28	85,65	136,78
	Asuransi Umum dan Reasuransi	62,74	88,28	24,99	50,93	75,37
	Asuransi Wajib	8,87	12,07	3,00	5,98	8,95
	BPJS	107,18	146,90	37,98	78,59	121,41
	Jumlah	319,93	433,30	110,25	221,14	342,51
4.	Total Klaim Bruto					
	Asuransi Jiwa	108,88	142,36	36,39	73,06	113,29
	Asuransi Umum dan Reasuransi	25,20	37,02	10,24	20,38	32,43
	Asuransi Wajib	10,18	13,74	3,67	7,16	11,17
	BPJS	88,80	123,01	33,34	67,88	105,04
	Jumlah	233,06	316,13	83,64	168,48	261,93
5.	Total Liabilitas					
	Asuransi Jiwa	435,42	445,65	459,66	468,96	465,81
	Asuransi Umum dan Reasuransi	100,06	102,63	106,08	109,12	110,11
	Asuransi Wajib	109,02	112,46	113,61	113,67	114,78
	BPJS	64,61	67,27	74,49	81,21	92,21
	Jumlah	709,11	728,02	753,83	772,95	782,91

Tabel I - 33 ◇ Portofolio Investasi Perasuransian Konvensional dan BPJS

(dalam triliun Rupiah)

No.	Jenis Aset Investasi	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019
1.	Deposito Berjangka	108,24	124,93	127,61	129,86	117,75
2.	Sertifikat Deposito	0,34	0,25	0,27	0,26	0,26
3.	Saham	221,64	227,75	233,36	239,44	236,51
4.	Obligasi	114,57	109,13	113,36	119,61	125,05
5.	MTN	2,16	2,74	3,08	3,36	3,98
6.	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI	277,71	280,29	298,95	308,16	319,71
7.	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI	0,90	0,90	0,53	0,25	0,26

8.	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-	-	-	-
9.	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Reksa Dana	238,29	245,45	252,39	250,06	250,81
11.	Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset	3,54	3,42	3,34	3,23	3,40
12.	Dana Investasi Real Estat	0,21	0,08	0,24	0,24	0,25
13.	REPO	-	-	-	-	-
14.	Penyertaan Langsung	18,64	18,51	18,58	18,82	21,34
15.	Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Investasi	16,07	19,42	19,38	19,35	19,48
16.	Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank	0,53	0,54	0,55	0,55	0,55
17.	Emas Murni	0,00	-	0,00	0,00	0,00
18.	Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan	0,30	0,20	0,21	0,20	0,21
19.	Pinjaman Polis	2,13	2,15	2,14	2,15	2,17
20.	Investasi Lain	1,18	0,89	0,95	1,19	1,31
Jumlah		1.006,44	1.036,64	1.074,92	1.096,72	1.103,04

Di antara jenis investasi industri sebagaimana tabel di atas, terdapat empat jenis investasi yang mendominasi yaitu Surat Berharga Negara (29,0%), Reksa Dana (22,7%), Saham (21,4%) dan Obligasi (11,3%).

Jumlah pelaku pada pelaporan triwulan ini tidak ada perubahan dibanding triwulan sebelumnya, sehingga jumlah pelaku asuransi secara keseluruhan masih sebesar 138 perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I - 34 ◇ Jumlah Industri Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS

No.	Perusahaan Perasuransian	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019
1.	Asuransi Jiwa					
a.	BUMN	1	1	1	1	1
b.	Swasta Nasional	30	30	29	29	28
c.	Patungan	22	22	23	23	24
Sub Total		53	53	53	53	53
2.	Asuransi Kerugian					
a.	BUMN	2	2	2	2	2
b.	Swasta Nasional	50	50	52	52	53
c.	Patungan	22	22	21	21	19
Sub Total		74	74	75	74	74
3.	Reasuransi	6	6	6	6	6
4.	BPJS	2	2	2	2	2
5.	Penyelenggara Asuransi Wajib	3	3	3	3	3
Total Asuransi dan Reasuransi		138	138	139	138	138

Tabel I - 35 ◇ Densitas dan Penetrasi Industri Perasuransian Konvensional dan BPJS

Uraian	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019
GDP (Rp Miliar)	13.588.797	13.588.797	14.837.400	14.837.400	14.837.400
Premi Bruto (Rp Miliar)	411.158	411.022	414.082	415.665	429.794
Jumlah Penduduk (juta)	257	257	265	265	265
Penetrasi	3,03%	3,02%	2,79%	2,80%	2,90%
Densitas (Rp Ribu)	1.569,90	1.569,39	1.562,57	1.568,55	1.621,87

- 1) Angka Premi Bruto merupakan premi per TW III 2019 yang disetahunkan
 2) Angka GDP merupakan GDP per TW 4 2017 berdasarkan press release BPS
 3) Penetrasi: Premi Bruto/GDP
 4) Densitas: Premi Bruto/Jumlah penduduk

Selama periode laporan, densitas asuransi yang menggambarkan rata-rata pengeluaran tiap penduduk untuk pembayaran premi asuransi naik sebesar 3,4% menjadi Rp1.621.866 per tahun. Adapun

tingkat penetrasi asuransi yang menggambarkan kontribusi premi bruto terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah sebesar 2,90% atau meningkat 0,10%.

Tabel I - 36 ◇ RBC Industri Asuransi

Uraian	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019
Asuransi Jiwa	430,5%	440,6%	456,6%	662,9%	667,5%
Asuransi Umum dan Reasuransi	315,3%	332,5%	314,6%	312,6%	321,4%

RBC industri asuransi masih memenuhi batas ketentuan RBC minimal yaitu 120%. Permodalan industri asuransi jiwa masih terjaga dengan rata-rata RBC mencapai 667,5%, atau naik 4,6% dibanding periode sebelumnya. Peningkatan RBC tersebut

didorong oleh naiknya investasi dan pendapatan premi pada industri asuransi jiwa. Sejalan dengan Asuransi Jiwa, RBC Asuransi Umum juga mengalami peningkatan sebesar 8,8% menjadi 321,4% dibanding periode sebelumnya.

1.4.2 Perkembangan Industri Dana Pensiun

Pada triwulan III-2019, aset industri Dana Pensiun mengalami peningkatan sebesar Rp2,3 triliun atau naik 0,8% dari Rp282,4 triliun menjadi Rp284,7 triliun. Peningkatan aset dialami oleh DPPK-PIIP dan DPLK masing-masing sebesar Rp0,2 triliun dan Rp2,3

triliun, sedangkan DPPK-PPMP mengalami penurunan sebesar Rp0,2 triliun atau turun 0,1%. Investasi Dana Pensiun periode triwulan III-2019 mencapai Rp274,6 triliun (mengalami peningkatan sebesar Rp1,8 triliun atau naik 0,7%).

Tabel I - 37 ◇ Distribusi Aset Industri Dana Pensiun

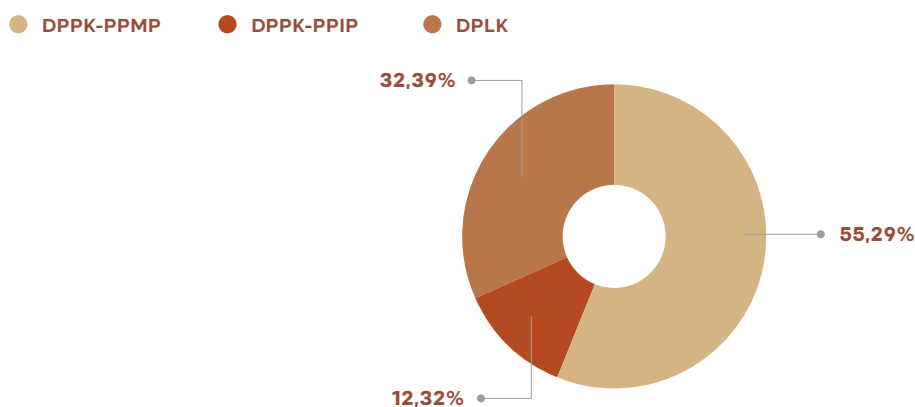
(dalam triliun Rupiah)

Jenis Program	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019
DPPK-PPMP	151,5	154,0	157,2	159,0	158,9
<i>Growth</i>	0,8%	1,7%	2,1%	1,1%	-0,1%
DPPK-PIIP	31,8	32,7	33,6	34,6	34,8
<i>Growth</i>	1,3%	2,7%	2,8%	3,0%	0,5%
DPLK	80,2	82,8	86,1	88,7	91,0
<i>Growth</i>	1,5%	3,2%	4,0%	3,1%	2,6%
Total Aset (triliun rupiah)	263,5	269,5	276,9	282,4	284,7
<i>Growth</i>	1,1%	2,3%	2,7%	2,0%	0,8%

Tabel I - 38 ◇ Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun

(dalam triliun Rupiah)

Jenis Program	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019
DPPK-PPMP	144,4	147,4	150,0	151,8	151,8
<i>Growth</i>	0,0%	2,1%	1,8%	1,2%	0,0%
DPPK-PPIP	31,2	32,0	32,6	33,7	33,8
<i>Growth</i>	1,7%	2,9%	1,6%	3,6%	0,2%
DPLK	78,9	81,5	84,1	87,2	88,9
<i>Growth</i>	1,7%	3,2%	3,2%	3,8%	1,9%
Total Aset (triliun rupiah)	254,4	260,9	266,7	272,8	274,6
<i>Growth</i>	0,7%	2,6%	2,2%	2,3%	0,7%

Grafik I - 41 ◇ Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun**Tabel I - 39** ◇ Portofolio Investasi Dana Pensiun

(dalam triliun Rupiah)

No.	Jenis Aset Investasi	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019
1.	SBN	58,0	59,3	62,0	64,5	65,3
2.	Tabungan	0,5	0,4	0,4	0,6	0,5
3.	Deposito on call	1,0	1,1	1,5	1,8	1,3
4.	Deposito berjangka	66,0	68,3	70,5	72,5	75,7
5.	Sertifikat deposito	1,2	1,5	1,5	0,7	0,7
6.	Surat berharga BI	-	-	-	-	-
7.	Saham	30,3	30,6	32,1	32,8	30,6
8.	Obligasi korporasi	55,2	55,3	55,3	56,6	57,6
9.	Sukuk korporasi	3,2	3,3	3,1	3,2	3,9
10.	Obligasi/Sukuk daerah					0,0
11.	Reksa Dana	15,8	16,9	16,0	15,8	15,2
12.	MTN	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
13.	KIK-EBA	1,1	1,0	1,0	0,9	0,9
14.	DIRE-KIK	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
15.	DINFRA-KIK	-	-	-	-	0,1
16.	Kontrak Opsi saham	-	-	-	-	-

17. REPO	-	-	-	-	-
18. Penyertaan langsung	8,8	9,4	9,3	9,6	9,0
19. Tanah	4,0	4,1	4,1	4,1	4,3
20. Bangunan	2,1	2,5	2,5	2,1	2,2
21. Tanah dan Bangunan	6,9	7,0	7,1	7,3	7,1
Total	254,4	260,9	266,7	272,8	274,6

Di antara jenis investasi yang diperkenankan sebagaimana tabel di atas, terdapat empat jenis investasi yang memiliki proporsi terbesar yaitu deposito berjangka (27,6%), obligasi (21%), SBN (23,8%), dan saham (11,2%).

(Dana Pensiun South Pasific Viscose KEP-78/D.05/2019), selain itu ada satu Dana Pensiun melakukan pengalihan program pensiun dari PPMP ke PPIP (Dana Pensiun PPPK Petra KEP-21/NB.1/2019) dan 1 pendirian Dana Pensiun (DPLK Adisarana Wanaartha KEP-65/D.05/2019).

Selama periode triwulan III-2019, terdapat tiga pembubaran Dana Pensiun yang terdiri dari dua DPPK-PPMP (Dana Pensiun BOC Indonesia KEP-58/D.05/2019, Dana Pensiun IPTN KEP-69/D.05/2019) dan 1 DPPK-PPIP

Dengan adanya pembubaran dan pendirian Dana Pensiun tersebut, maka sampai dengan periode triwulan III-2019 terdapat 225 Dana Pensiun dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I - 40 ◇ Jumlah Dana Pensiun

Jenis Dana Pensiun	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019
DPPK PPMP	164	164	162	162	159
DPPK PPIP	44	44	41	41	41
DPLK	24	24	24	24	25
Jumlah	232	232	227	227	225

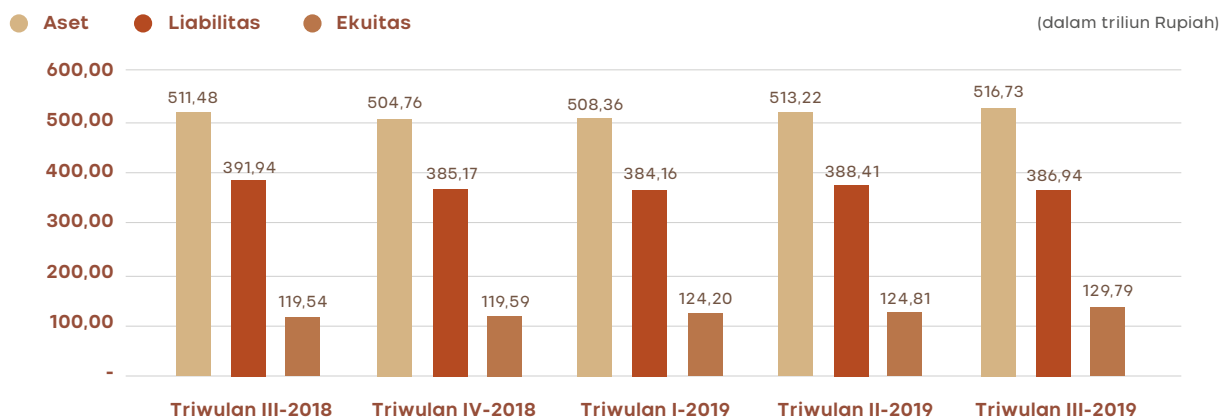
1.4.3 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan

A. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan

Sampai dengan periode laporan, total aset dan ekuitas Perusahaan Pembiayaan mengalami kenaikan, masing-masing sebesar 0,68% dan 3,99% dibandingkan

triwulan sebelumnya. Sementara itu, total liabilitas Perusahaan Pembiayaan mengalami penurunan sebesar -0,38% dibanding triwulan sebelumnya.

Grafik I - 42 ◇ Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan



Catatan: Data sudah termasuk Pembiayaan Syariah

B. Jumlah dan Pangsa Pasar Perusahaan Pembiayaan

Jumlah Perusahaan Pembiayaan pada Triwulan III-2019 sebesar 183 perusahaan. Bila dilihat berdasarkan total aset, sebanyak 71 perusahaan pembiayaan

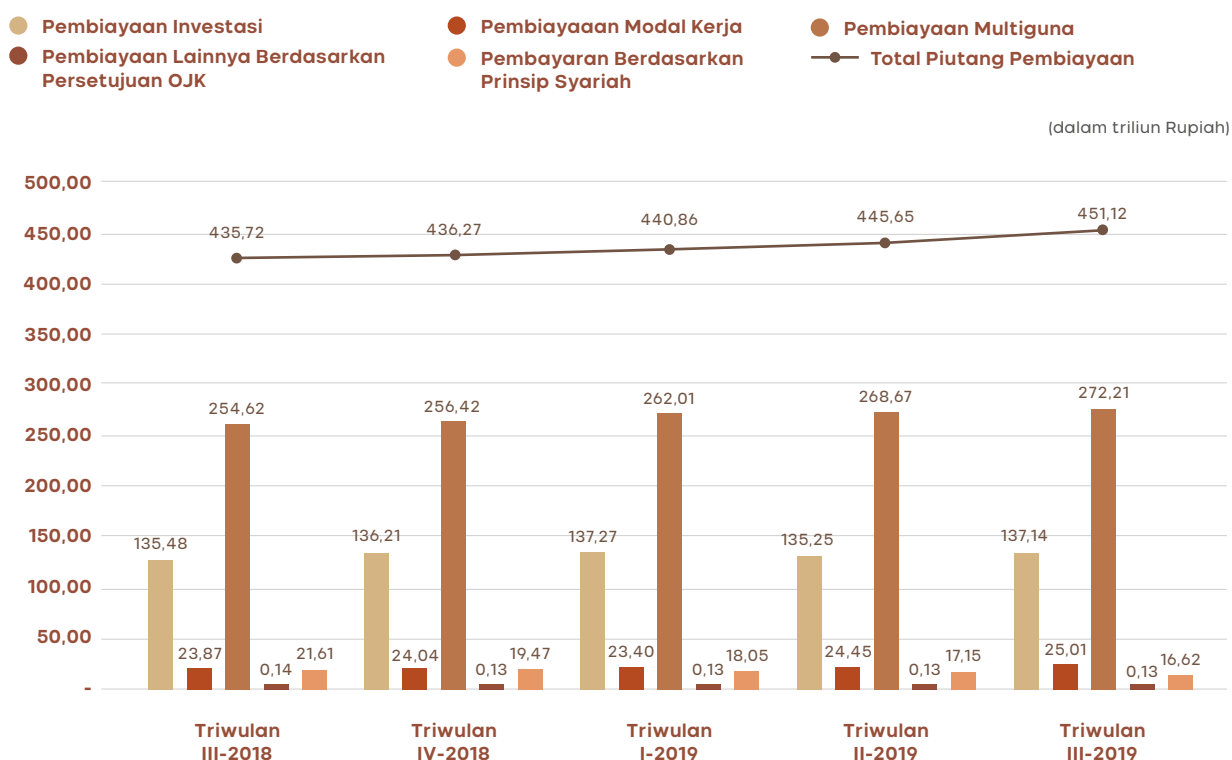
menguasai aset industri dengan porsi sebesar 92%, sedangkan 112 perusahaan pembiayaan menguasai aset industri sebesar 8%.

C. Piutang Perusahaan Pembiayaan

Kinerja kegiatan industri Perusahaan Pembiayaan dalam melakukan penyaluran piutang mengalami peningkatan sebesar Rp5,47 triliun atau 1,23% dibandingkan triwulan sebelumnya, dengan komposisi piutang pembiayaan didominasi oleh Pembiayaan Multiguna dan Pembiayaan Investasi dengan

proporsi masing-masing sebesar 60,34% dan 30,40%. Sementara itu, bila dilihat dari proporsi pembiayaan yang disalurkan berdasarkan sektor ekonomi, maka Sektor Ekonomi Lapangan Usaha mendominasi piutang dengan proporsi sebesar 76,36% (Rp357,82 triliun).

Grafik I - 43 ◇ Piutang Perusahaan Pembiayaan



Tabel I - 41 ◇ Piutang Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

(dalam triliun Rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019
A.	Sektor Ekonomi Lapangan Usaha	347,72	349,18	350,86	353,59	357,82
1.	Pertanian, kehutanan dan perikanan	18,43	18,59	18,37	19,06	18,84
2.	Pertambangan dan penggalian	28,95	29,56	29,53	28,92	28,42
3.	Industri pengolahan	38,17	38,29	37,58	37,89	37,93
4.	Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin	19,83	16,25	17,38	15,14	16,39
5.	Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah	0,40	0,41	0,38	0,44	0,47
6.	Konstruksi	16,46	16,14	15,76	15,54	15,63
7.	Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	75,18	77,51	80,71	85,19	88,92

8.	Transportasi dan pergudangan	30,51	31,62	32,42	32,68	32,80
9.	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	9,98	9,73	9,12	8,76	8,83
10.	Informasi dan komunikasi	3,71	3,00	2,89	2,90	2,89
11.	Jasa keuangan dan asuransi	4,98	6,23	5,95	6,39	6,37
12.	<i>Real Estate</i>	2,16	2,49	2,68	2,72	2,62
13.	Jasa profesional, ilmiah dan teknis	3,21	3,40	3,47	3,78	4,48
14.	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya	43,44	44,46	44,15	43,62	43,10
15.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	7,25	7,06	6,71	6,57	6,66
16.	Jasa pendidikan	4,62	4,76	4,62	4,68	4,83
17.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	9,19	9,08	8,74	8,93	9,09
18.	Kesenian, hiburan dan rekreasi	2,30	2,41	2,22	1,98	1,64
19.	Kegiatan jasa lainnya	21,27	21,01	21,43	22,10	22,75
20.	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan	7,61	7,06	6,61	6,14	5,04
21.	Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	0,11	0,11	0,14	0,14	0,14
B.	Sektor Ekonomi Bukan Lapangan Usaha	103,95	103,38	106,88	109,79	110,76
1.	Rumah tangga	65,68	65,35	72,25	75,09	76,70
2.	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	38,27	38,03	34,63	34,70	34,06
Jumlah		451,67	452,57	457,74	463,38	468,58

D. Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan

Tabel I - 42 ◇ Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan

Uraian	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019
FAR (%)	85,19%	86,43%	86,72%	86,83%	87,30%
NPF (%)	3,17%	2,71%	2,71%	2,82 %	2,66%
<i>Gearing Ratio</i> (kali)	3,03	2,99	2,84	2,83	2,72

Seiring dengan pertumbuhan piutang pembiayaan, rasio FAR (*Financing to Asset Ratio*) masih terjaga pada rasio 87,30% atau masih di atas batas ketentuan, yaitu minimum 40%. Kualitas piutang pembiayaan

(NPF) masih berada pada level 2,66% atau dalam batas ketentuan (maksimal 5%). Selain itu, *Gearing Ratio* pada periode laporan tercatat 2,72 kali atau masih memenuhi ketentuan (maksimal 10 kali).

Tabel I - 43 ◇ NPF Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

No.	Sektor Ekonomi	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019
A.	Sektor Ekonomi Lapangan Usaha	3,23%	2,67%	2,67%	2,81%	2,56%
1.	Pertanian, kehutanan dan perikanan	2,27%	2,66%	3,15%	3,68%	3,55%
2.	Pertambangan dan penggalian	5,75%	5,14%	4,13%	4,44%	3,72%
3.	Industri pengolahan	2,96%	2,28%	2,43%	2,56%	2,59%
4.	Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin	0,15%	0,18%	0,16%	0,21%	0,18%
5.	Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah	2,34%	1,36%	1,88%	1,13%	1,22%
6.	Konstruksi	2,19%	2,28%	2,42%	2,57%	2,80%
7.	Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	3,01%	1,83%	1,83%	1,89%	1,62%
8.	Transportasi dan pergudangan	9,99%	8,97%	8,55%	8,55%	7,95%
9.	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	1,98%	1,84%	2,13%	2,30%	1,90%
10.	Informasi dan komunikasi	0,91%	0,89%	0,87%	0,89%	1,05%
11.	Jasa keuangan dan asuransi	1,82%	1,42%	1,46%	1,37%	1,34%
12.	Real Estate	3,92%	2,93%	3,16%	3,29%	3,07%
13.	Jasa profesional, ilmiah dan teknis	2,02%	1,31%	1,36%	1,48%	1,51%
14.	Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya	1,51%	1,40%	1,53%	1,91%	1,59%
15.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	1,35%	1,17%	1,36%	1,31%	1,10%
16.	Jasa pendidikan	1,62%	1,53%	1,78%	1,66%	1,38%
17.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1,26%	1,23%	1,68%	1,70%	1,55%
18.	Kesenian, hiburan dan rekreasi	1,13%	1,13%	1,20%	1,13%	1,03%
19.	Kegiatan jasa lainnya	3,35%	1,55%	1,96%	1,76%	1,79%
20.	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan	2,08%	1,54%	1,73%	1,87%	1,70%
21.	Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	1,70%	2,44%	1,70%	1,61%	2,56%
B.	Sektor Ekonomi Bukan Lapangan Usaha	2,95%	2,85%	2,85%	2,87%	3,00%
1.	Rumah tangga	2,28%	2,15%	2,09%	2,30%	2,44%
2.	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	4,09%	4,05%	4,44%	4,09%	4,26%
NPF Industri		3,17%	2,71%	2,71%	2,82%	2,66%

E. Laba (Rugi) Perusahaan Pembiayaan

Seiring dengan peningkatan jumlah piutang pembiayaan, laba bersih industri perusahaan pembiayaan juga mengalami kenaikan secara year

on year sebesar 15,70% atau naik menjadi Rp13,96 triliun pada triwulan III-2019.

F. Jenis Valuta Pinjaman

Dalam rangka mendukung kegiatan bisnis operasional perusahaan pembiayaan dalam menyalurkan piutang pembiayaan, perusahaan pembiayaan menerima sumber pendanaan yang berasal dari pinjaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Pada Triwulan III-2019 jumlah pinjaman yang diterima sebesar Rp284,07 triliun. Dari jumlah pinjaman yang diterima perusahaan

pembiayaan tersebut, sebesar 50,46% porsi pinjaman berdenominasi Rupiah, diikuti oleh US Dollar 41,27%, Yen Jepang 8,10%, Euro 0,14%, dan Singapore Dollar 0,03%. Untuk melindungi perusahaan dari fluktuasi nilai tukar valas, seluruh pinjaman berdenominasi mata uang asing tersebut telah dilakukan lindung nilai (*hedging*).

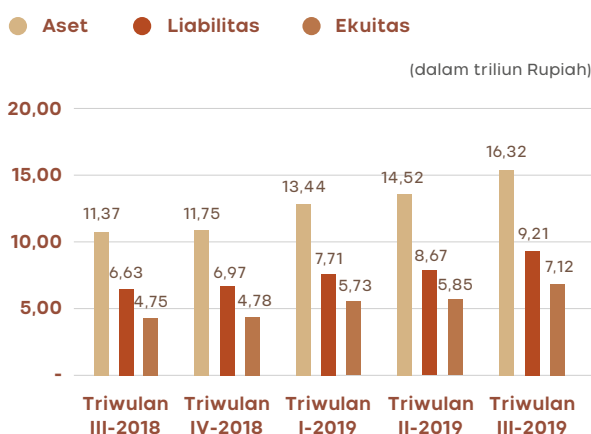
1.4.4 Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura Konvensional

Perusahaan Modal Ventura merupakan badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha dibidang pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (usaha kecil, mikro dan menengah) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/ atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Perkembangan industri perusahaan modal ventura untuk periode triwulan III-2019 sebagai berikut:

A. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Modal Ventura Konvensional

Total aset, liabilitas, dan ekuitas Perusahaan Modal Ventura mengalami kenaikan masing-masing sebesar 12,41%, 6,13%, dan 21,72% menjadi Rp16,32 triliun, Rp9,21 triliun, dan Rp7,12 triliun bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 44 ◇ Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas



Tabel I - 44 ◇ Pembiayaan atau Penyertaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

		(dalam miliar Rupiah)				
No.	Sektor Ekonomi	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019
1.	Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	668	707	678	768	761
2.	Pertambangan	490	507	501	530	508
3.	Perindustrian	735	745	778	844	874
4.	Konstruksi	497	490	443	461	480
5.	Perdagangan, Restoran, dan Hotel	3.597	3.716	4.214	4.926	5.117
6.	Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	137	135	144	162	154
7.	Jasa Pendukung Bisnis	787	932	902	946	1.010
8.	Jasa Sosial dan Masyarakat	177	174	203	236	235
9.	Lain-Lain	1.064	1.132	1.107	1.353	1.985
Jumlah		8.152	8.538	8.971	10.225	11.123

Catatan : Data Pembiayaan sebelum dikurangi pencadangan

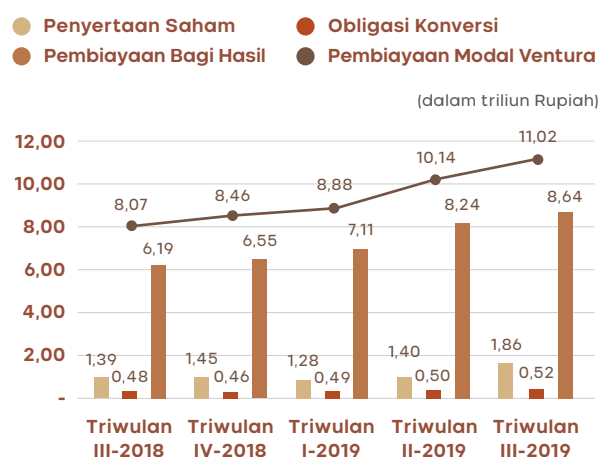
B. Jumlah Perusahaan Modal Ventura

Selama periode triwulan II-2019 sampai triwulan III-2019 tidak terdapat pencabutan maupun penerbitan izin usaha Perusahaan Modal Ventura sehingga jumlah Perusahaan Modal Ventura pada Triwulan III-2019 sebesar 61 perusahaan.

C. Pembiayaan/Penyertaan Perusahaan Modal Ventura Konvensional

Total pembiayaan/penyertaan Perusahaan Modal Ventura mengalami kenaikan sebesar 8,68% menjadi Rp11,02 triliun bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pembiayaan/penyertaan terbesar berasal dari pembiayaan bagi hasil dengan proporsi sebesar 78,37% dari total pembiayaan/penyertaan dengan nilai pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp8,64 triliun. Sementara itu, bila dilihat berdasarkan jenis sektor ekonomi, maka sektor perdagangan, restoran, dan hotel mendominasi total pembiayaan/penyertaan yang disalurkan industri PMV dengan total pembiayaan/penyertaan sebesar Rp5,12 triliun atau sebesar 46,00%.

Grafik I - 45 ◇ Pembiayaan/Penyertaan Modal



D. Rasio Keuangan

Kinerja Perusahaan Modal Ventura diukur dengan rasio keuangan yang terdiri dari Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO), rasio Investasi Terhadap Total Aset (IFAR), *Return on Asset* (ROA), dan *Return on Equity* (ROE). Rasio keuangan tersebut masing-masing adalah 92,21%, 67,51%, 2,87%, 5,27%.

1. BOPO mengalami penurunan dari 95,23% pada Triwulan II-2019 menjadi 92,21% pada Triwulan III-2019.
2. IFAR mengalami penurunan dari 69,82% pada Triwulan II-2019 menjadi 67,51% pada Triwulan III-2019.
3. ROA mengalami kenaikan dari 2,54% pada Triwulan

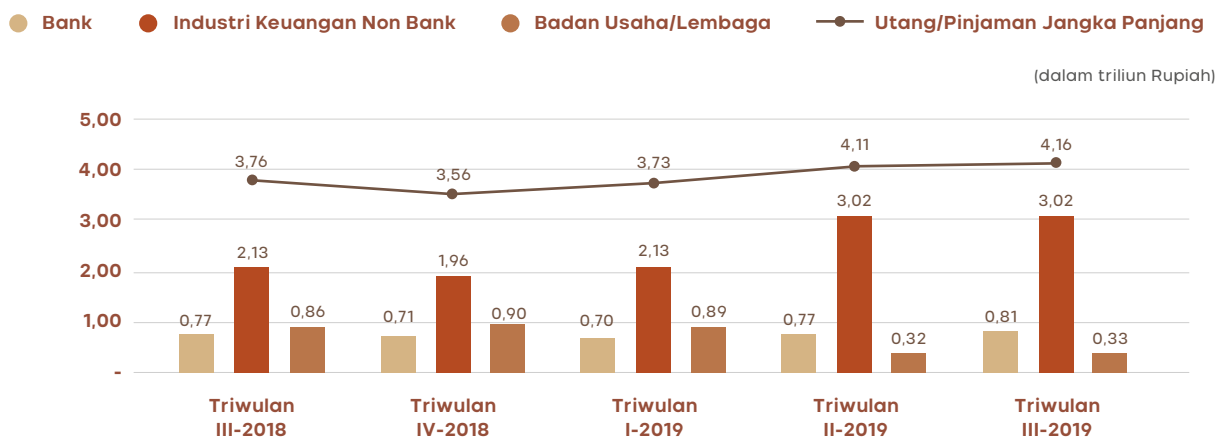
II-2019 menjadi 2,87% pada Triwulan III-2019.

4. ROE mengalami kenaikan dari 4,63% pada Triwulan II-2019 menjadi 5,27% pada Triwulan III-2019.

E. Sumber Pendanaan

Selain menggunakan modal sendiri, untuk membiayai kegiatan usahanya, Perusahaan Modal Ventura menerima pinjaman jangka panjang yang berasal dari bank atau badan usaha lainnya dengan total pinjaman pada triwulan III-2019 adalah sebesar Rp4,16 triliun atau naik sebesar 1,15% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 46 ◇ Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura

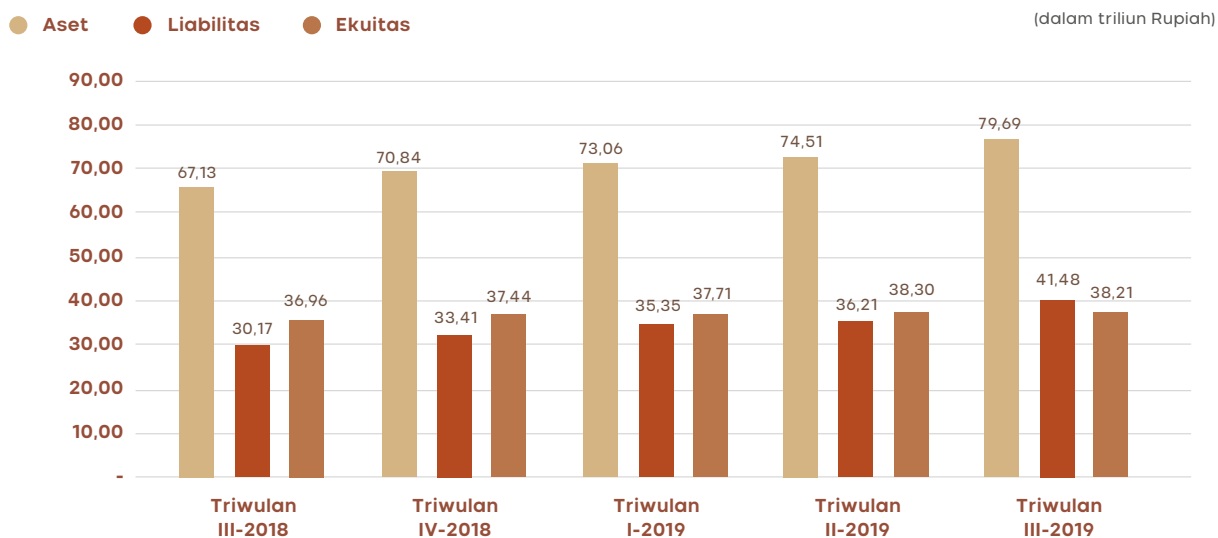


1.4.5 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Terdapat dua Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, yaitu Indonesia Infrastructure Finance (IIF) dan Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan total aset sebesar Rp79,69 triliun dan total liabilitas serta ekuitas masing-masing sebesar Rp41,48 triliun dan Rp38,21 triliun.

Total aset dan liabilitas mengalami kenaikan sebesar 6,95% dan 14,54% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sementara itu, total ekuitas mengalami penurunan sebesar 0,23% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 47 ◇ Tren Aset, Liabilitas, dan Ekuitas



Tabel I - 45 ◇ Pembiayaan Berdasarkan Jenis Infrastruktur

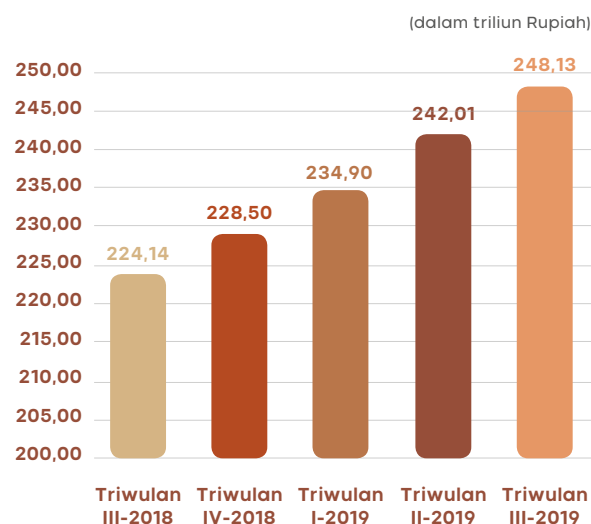
(dalam triliun Rupiah)

Jenis Infrastruktur	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019
Air Minum	1,24	1,43	1,61	1,64	1,78
Jalan	12,51	13,95	14,83	15,24	16,54
Ketenagalistrikan	17,68	18,56	18,50	21,59	20,42
Lainnya	5,47	6,62	6,48	6,57	6,59
Minyak & Gas Bumi	3,49	2,83	2,78	2,74	2,87
Telekomunikasi	1,92	3,34	3,27	5,04	4,93
Transportasi	4,24	5,57	6,87	7,91	8,42
Total	46,54	52,29	54,34	60,74	61,55

1.4.6 Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus

Total Aset LJKK naik 2,53% pada triwulan III-2019 menjadi Rp248,13 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 48 ◇ Pertumbuhan Aset LJKK

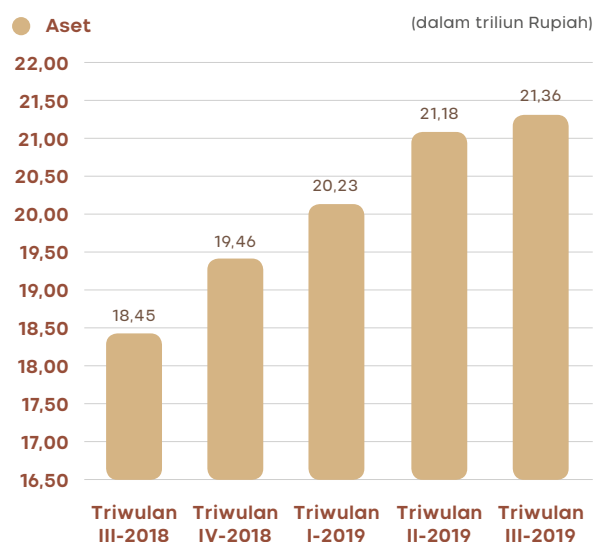


A. Perusahaan Penjaminan

Perusahaan Penjaminan didirikan untuk mendorong program pemerintah melalui peningkatan kemampuan akses UMKM melalui penjaminan kredit.

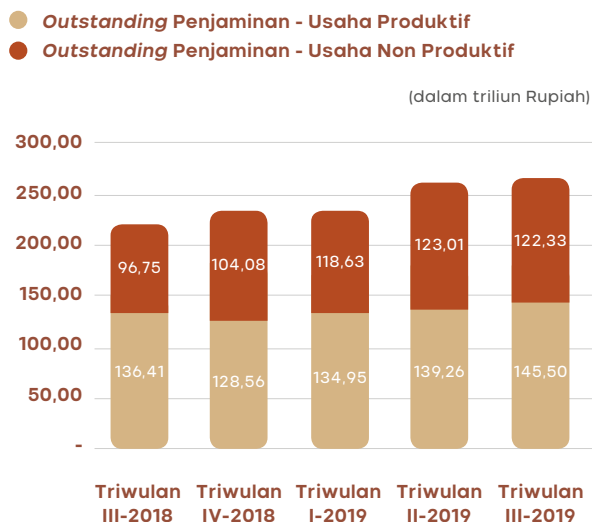
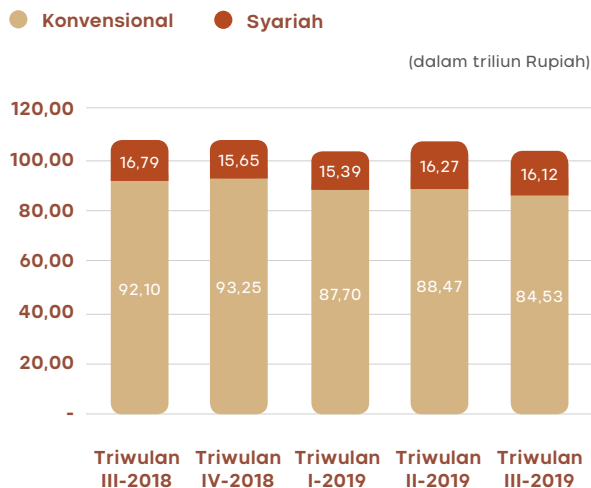
Pada periode laporan, tercatat total aset perusahaan penjaminan naik 0,84% menjadi Rp21,36 triliun.

Grafik I - 49 ◇ Pertumbuhan Aset Perusahaan Penjaminan

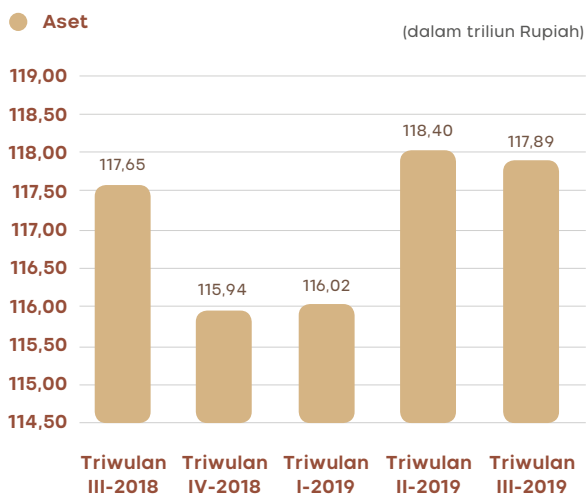


*) data termasuk syariah

Outstanding penjaminan selama triwulan III-2019 mengalami kenaikan 2,12% menjadi Rp267,83 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kenaikan nilai *outstanding* penjaminan tersebut didorong oleh naiknya nilai *outstanding* usaha produktif sebesar 4,48% dibanding dengan triwulan sebelumnya menjadi Rp145,50 triliun. Di sisi lain, nilai *outstanding* penjaminan usaha non produktif turun dari triwulan sebelumnya sebesar 0,55% menjadi Rp122,33 triliun.

Grafik I - 50 ◇ Outstanding Penjaminan**Grafik I - 52** ◇ Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Ekspor Indonesia**B. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia**

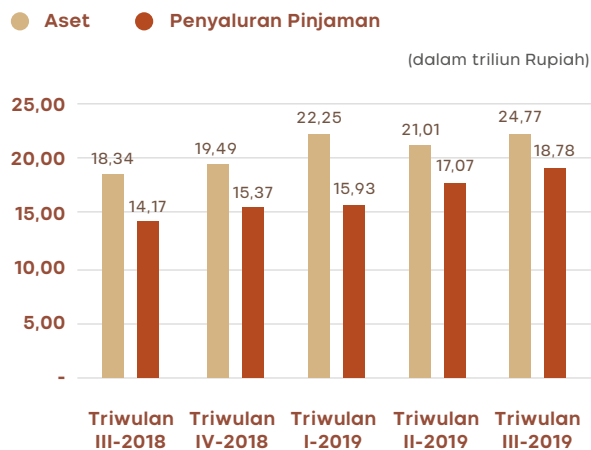
Pendirian Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekspor nasional. Total aset LPEI pada triwulan III-2019 turun 0,43% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, dari Rp118,40 triliun menjadi Rp117,89 triliun.

Grafik I - 51 ◇ Pertumbuhan Aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Pada periode laporan, LPEI mencatat total pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp100,66 triliun, atau turun 3,89% dari periode sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya pembiayaan konvensional sebesar 4,45% menjadi Rp84,53 triliun dan piutang syariah sebesar 0,88% menjadi Rp16,12 triliun.

C. Sarana Multigriya Finansial

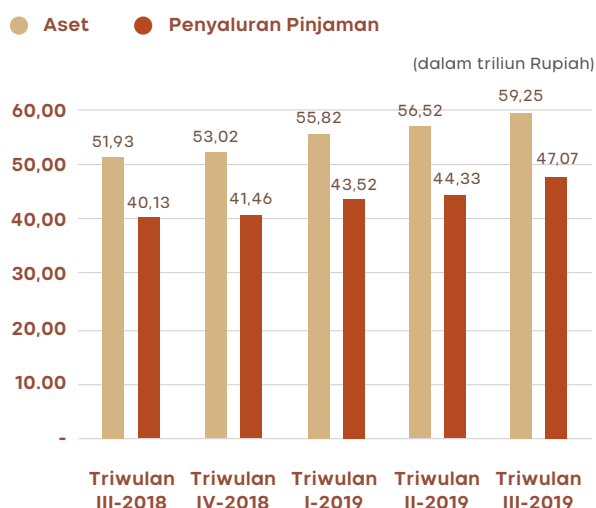
Aset PT SMF (Persero) pada Triwulan III-2019 mengalami kenaikan sebesar 17,91% dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi Rp24,77 triliun. Kenaikan aset tersebut didorong oleh nilai pinjaman yang disalurkan oleh PT SMF (Persero) yang juga mengalami kenaikan 9,97% dari triwulan sebelumnya menjadi Rp18,78 triliun.

Grafik I - 53 ◇ Aset dan Outstanding Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero)

D. Pergadaian

Sampai dengan triwulan III-2019, terdapat 51 perusahaan pergadaian swasta yang mendaftarkan diri dan sedang dalam proses izin usaha (50 perusahaan pergadaian swasta konvensional dan 1 perusahaan pergadaian swasta syariah) serta 26 perusahaan pergadaian swasta yang memperoleh izin dari OJK (24 perusahaan pergadaian swasta konvensional dan 2 perusahaan pergadaian swasta syariah). Pada periode laporan, total aset perusahaan pergadaian tercatat naik 4,82% menjadi Rp59,25 triliun. Seiring dengan kenaikan tersebut, pinjaman yang disalurkan pergadaian pada triwulan III-2019 sebesar Rp47,07 triliun, atau naik 6,18% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 54 ◇ Aset dan *Outstanding* Penyaluran Pinjaman Pergadaian

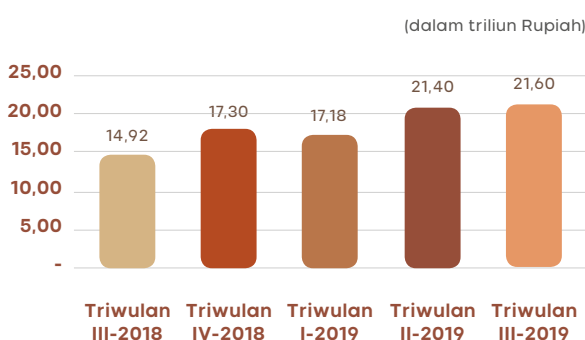


E. PT PNM (Persero)

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau disingkat PNM merupakan badan usaha milik negara yang didirikan dengan tujuan memberikan jasa pembiayaan termasuk kredit program dan jasa manajemen untuk pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.

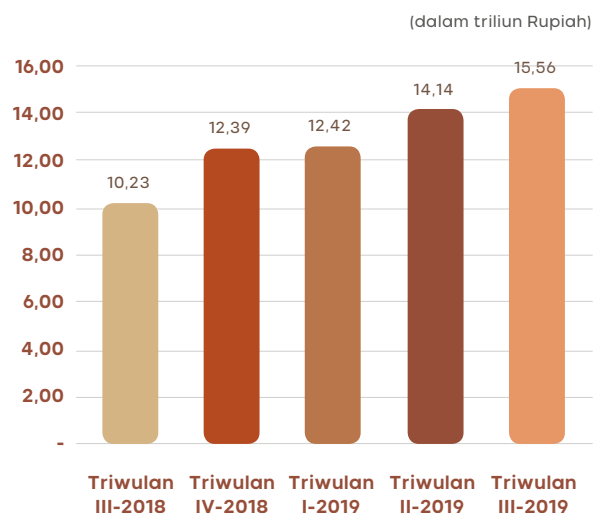
Aset PT PNM (Persero) pada periode laporan tercatat sebesar Rp21,60 triliun, naik 0,97% dari triwulan sebelumnya.

Grafik I - 55 ◇ Pertumbuhan Aset PT PNM (Persero)



Sesuai tujuan pendiriannya, kegiatan usaha utama PT PNM (Persero) adalah pemberian pinjaman dan modal untuk pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah. Pada triwulan III-2019, pemberian pinjaman yang disalurkan PT PNM (Persero) mengalami kenaikan sebesar 10,08% dari periode sebelumnya menjadi Rp15,56 triliun.

Grafik I - 56 ◇ Pertumbuhan Pemberian Pinjaman dan Pembiayaan Modal PT PNM (Persero)



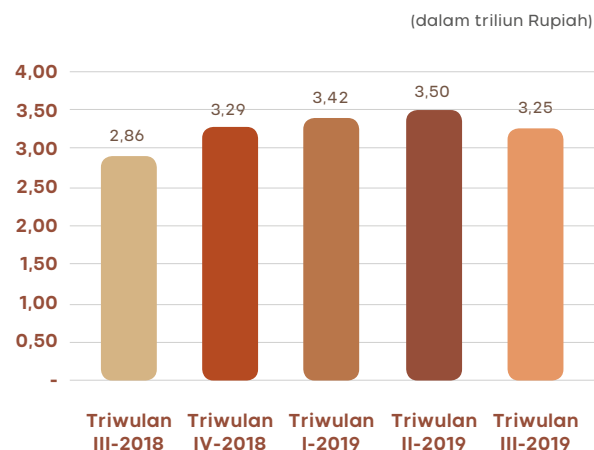
F. PT Danareksa (Persero)

PT Danareksa (Persero) merupakan entitas induk yang memiliki 3 entitas anak, yaitu:

1. PT Danareksa Sekuritas yang bergerak di bidang penjaminan emisi, penasihat keuangan dan perantara perdagangan efek;
2. PT Danareksa Investment Management yang bergerak di bidang pengelolaan dana (Reksa Dana); dan
3. PT Danareksa Finance yang bergerak di bidang pembiayaan.

Aset PT Danareksa (Persero) pada triwulan III-2019 sebesar Rp3,25 triliun, mengalami penurunan 7,09% dari triwulan sebelumnya.

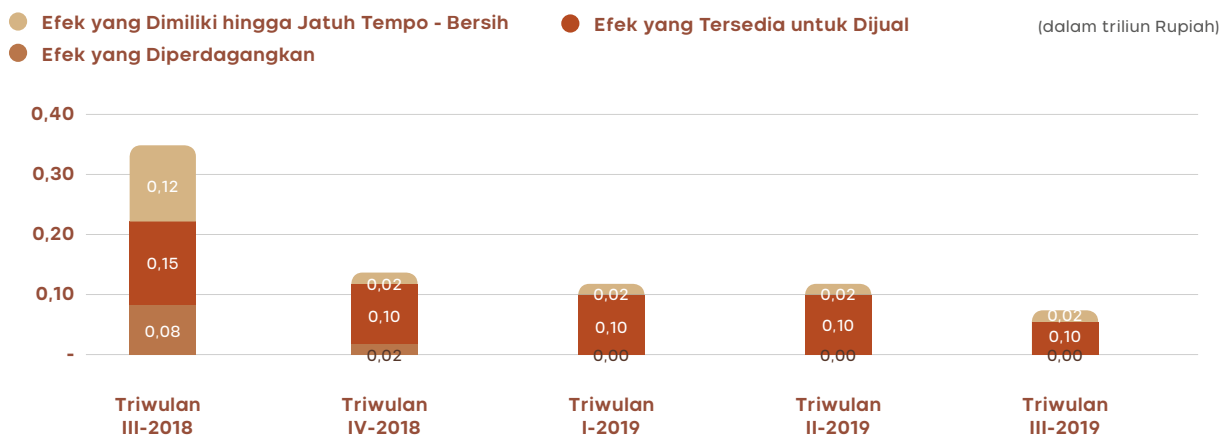
Grafik I - 57 ◇ Pertumbuhan Aset PT Danareksa (Persero)



Portofolio efek PT Danareksa (Persero) terdiri dari efek yang diperdagangkan, efek yang tersedia untuk dijual, dan efek yang dimiliki hingga jatuh tempo. Total

portofolio efek PT Danareksa (Persero) pada triwulan III-2019 tercatat sebesar Rp0,07 triliun, masih tetap seperti triwulan sebelumnya.

Grafik I - 58 ◇ Pertumbuhan Portofolio PT Danareksa (Persero)



1.4.7 Perkembangan Industri Jasa Penunjang IKNB

Aset Industri Jasa Penunjang IKNB semester I-2019 naik 31,63% menjadi Rp12,02 triliun dibandingkan periode semester I-2018. Pendapatan jasa

keperantaraan juga mengalami kenaikan 17,23% menjadi Rp1,62 triliun dibandingkan semester I-2018.

Tabel I - 46 ◇ Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang IKNB

(dalam triliun Rupiah)

No.	Jenis Indikator	Semester II-2017	Semester I-2018	Semester II-2018	Semester I-2019
1.	Aset	8,05	8,98	9,61	12,02
2.	Liabilitas	5,64	6,31	6,94	8,99
3.	Modal Sendiri	2,41	2,67	2,67	3,02
4.	Pendapatan Jasa Keperantaraan	1,91	1,21	2,38	1,62
5.	Laba/ (Rugi)	0,57	0,30	0,69	0,4

Selama periode pelaporan hanya terdapat satu penambahan izin Perusahaan Pialang Asuransi sehingga sampai dengan periode laporan Jumlah

Perusahaan Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Penilai Kerugian Asuransi sampai akhir periode pelaporan adalah 235 perusahaan.

Tabel I - 47 ◇ Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

No.	Jenis Perusahaan	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019
1.	Pialang Asuransi	166	166	165	164	168
2.	Pialang Reasuransi	43	43	44	43	43
3.	Jasa Penilai Kerugian Asuransi	27	27	27	27	27
Jumlah		236	236	236	234	235

1.4.8 Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro Konvensional

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.

Jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang telah mendapatkan izin usaha sampai akhir periode kuartal II-2019 adalah sebanyak 193 LKM dengan 122 LKM Konvensional dan 71 *full syariah*. Total aset LKM Konvensional sesuai dengan laporan kuartal II-2019 adalah sebesar Rp516,87 miliar.

Tabel I - 48 ◇ Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

No.	Jenis Badan Usaha	Kuartal II-2018	Kuartal III-2018	Kuartal I-2019	Kuartal II-2019
1.	Konvensional				
	Koperasi	125	101	89	96
	PT	21	22	23	26
2.	Syariah				
	Koperasi	46	59	64	70
	PT	1	1	1	1
	Jumlah	193	183	177	193

Tabel I - 49 ◇ Indikator Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Konvensional

(dalam miliar Rupiah)

No.	Jenis Indikator	Kuartal II-2018	Kuartal III-2018	Kuartal I-2019	Kuartal II-2019
1.	Aset	402,49	470,10	481,06	516,87
2.	Liabilitas	236,25	268,46	280,30	305,85
3.	Ekuitas	166,23	201,65	200,76	211,02
4.	Pinjaman Yang Diberikan	335,30	344,99	339,13	361,30
5.	Simpanan/Tabungan	195,22	219,88	227,03	249,40

1.4.9 Perkembangan Industri Fintech (Peer-to-Peer Lending)

Jumlah Penyelenggara yang terdaftar sampai dengan periode triwulan III-2019 sebanyak 127 entitas, dengan jumlah pinjaman tersalurkan sebesar Rp60,4 triliun atau naik 35% dari periode sebelumnya sebesar Rp44,8 triliun.

Sementara itu TWP 90 yaitu ukuran tingkat wanprestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban yang tertera dalam perjanjian di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo pada periode laporan adalah sebesar 2,89%.

Tabel I - 50 ◇ Perkembangan Industri Fintech (Peer To Peer Lending)

No.	Keterangan	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019
1.	Penyelenggara Terdaftar	64	88	106	119	127
2.	Pemberi Pinjaman	123.633	207.507	272.548	498.824	558.766
3.	Penerima Pinjaman	1.090.306	4.359.448	6.961.993	9.743.679	14.359.918
4.	Pinjaman Tersalurkan (Rp triliun)	7,6	22,7	33,2	44,8	60,4
5.	TWP 90	0,79%	1,45%	2,62%	1,75%	2,89%

1.5 PERKEMBANGAN PROGRAM FLAGSHIP OJK

1.5.1 Bank Wakaf Mikro (BWM)

Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan mikro syariah (LKM syariah) yang fokus pada pembiayaan masyarakat kecil. Dalam membentuk LKM syariah, OJK bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). LKM Syariah Bank Wakaf Mikro merupakan salah satu upaya untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan di masyarakat. Selain itu, pendirian LKM syariah di lingkungan pesantren diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan syariah.

Pada triwulan III-2019, jumlah BWM meningkat menjadi 53 BWM. Pembiayaan yang disalurkan sebanyak Rp29,32 miliar kepada 22.668 nasabah yang terbentuk ke dalam 2.875 Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI). BWM yang diberikan izin selama triwulan III-2019 sebagai berikut:

Tabel I - 51 ◇ LKM Syariah BWM (Bank Wakaf Mikro)

No.	Nama LKM Syariah	Lokasi
1.	BWM Ahmad Taqluddin Mansur "ATQIA"	Lombok Tengah
2.	BWM Bangkit Nusantara	Rembang
3.	BWM Pesantren Hidayatullah Trenggalek	Trenggalek
4.	BWM Babul Maghfirah	Aceh
5.	BWM Bitu Amanah Umat	Garut

Untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan BWM, OJK turut aktif melaksanakan pendampingan dan pengawasan BWM untuk memastikan operasional BWM berjalan sesuai ketentuan.

1.5.2 Layanan Keuangan Tanpa Kantor (LAKU PANDAI)

Pada triwulan III-2019, terdapat 31 bank yang menjadi penyelenggara Laku Pandai. Jumlah agen Laku Pandai sampai dengan triwulan III-2019 mencapai 1.146.131 agen yang tersebar di 34 Provinsi dan 511 Kota/Kabupaten. Jumlah nasabah tabungan *Basic Savings Account* (BSA) juga bertambah menjadi sebanyak 25.777.824 nasabah dengan nominal BSA sebesar Rp2,21 triliun. Nominal tabungan BSA tersebut terkoreksi 12,67% (qta) dipengaruhi oleh adanya penarikan bansos oleh nasabah.

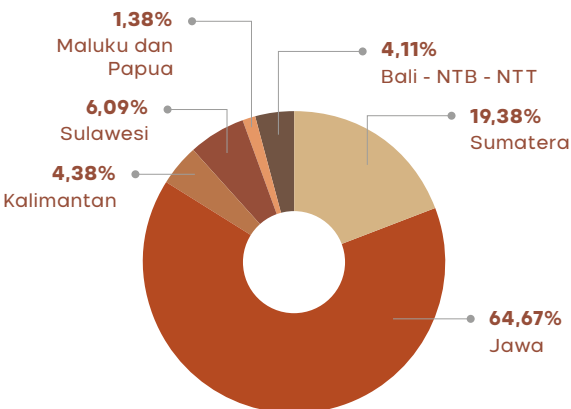
Tabel I - 52 ◇ Jumlah Agen dan Nasabah Laku Pandai

Agen Laku Pandai	
Perorangan	Badan Hukum
1.116.747	29.384
Nasabah Laku Pandai	
Jumlah Nasabah	Outstanding Tabungan BSA
25.777.824	Rp2,22 triliun

Sumber: OJK

Sebagian besar nasabah BSA masih terkonsentrasi di pulau Jawa (68,35%) utamanya di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, diikuti oleh Sumatera sebesar 16,47% dan sisanya sebesar 15,18% tersebar di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. Hal tersebut juga seiring dengan penyebaran agen Laku Pandai yang sebagian besar berada di pulau Jawa (64,67%) dan Sumatera (19,38%), sementara sisanya (15,95%) tersebar di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur.

Grafik I - 59 ◇ Wilayah Persebaran Agen



Sumber: OJK

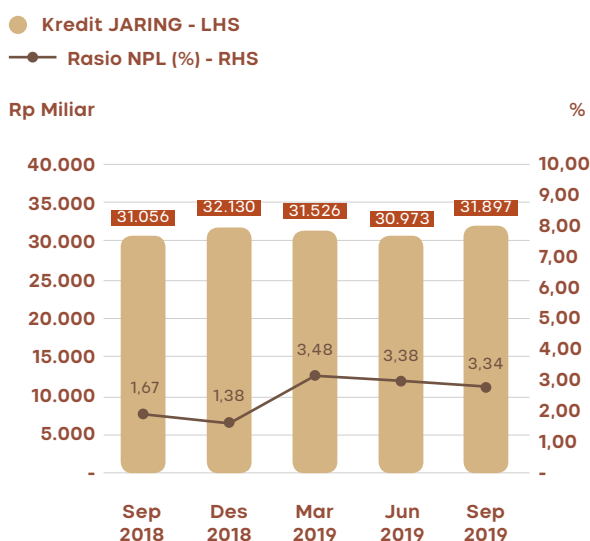
Selain tabungan berkarakteristik BSA, agen Laku Pandai dapat melayani pengajuan kredit mikro, pembelian asuransi mikro, dan produk/layanan keuangan lainnya seperti uang elektronik sepanjang agen Laku Pandai telah memenuhi klasifikasi tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Laku Pandai. Dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah, agen Laku Pandai juga dapat berlaku sebagai agen penyalur Bantuan Sosial Non Tunai dan sarana pembayaran zakat untuk mendukung program Inklusi Zakat/zakat *inclusion*.

1.5.3 Jangkau, Sinergi, dan Guideline (JARING)

Sampai triwulan III-2019, penyaluran kredit program JARING sebesar Rp31,90 triliun atau tumbuh 2,71% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya (16,38%, yoy). Perlambatan yang terjadi dipengaruhi oleh turunnya kredit pada subsektor industri pengolahan dan perdagangan hasil perikanan yang masing-masing turun sebesar 6,24% (yoy) dan 8,12% (yoy), serta melambatnya penyaluran kredit ke subsektor budidaya yang hanya tumbuh 6,61% (yoy). Namun demikian, pertumbuhan pada periode laporan masih cukup baik ditopang oleh penyaluran kredit ke subsektor penangkapan dan jasa sarana produksi perikanan yang masing-masing tumbuh 30,15% (yoy) dan 31,57% (yoy).

Risiko kredit kelautan dan perikanan (JARING) masih terjaga dibawah 5% yaitu sebesar 3,34%, meskipun meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (1,67%) namun rasio NPL tersebut membaik dibandingkan triwulan sebelumnya (3,38%). Perbaikan kualitas kredit terutama terjadi pada sektor penangkapan dan perdagangan ikan yang mulai menunjukkan penurunan rasio NPL. Sementara itu subsektor budidaya, jasa sarana produksi, dan industri pengolahan memiliki kualitas kredit yang masih terjaga rendah.

Grafik I - 60 ◇ Kredit dan NPL Sektor Maritim terkait JARING



Sumber: OJK

Tabel I - 53 ◇ NPL Kegiatan Usaha Kredit Maritim

Kegiatan Usaha	2018 (%)		2019 (%)
	Sep	Jun	Sep
Penangkapan	2,57	9,34	9,20
Budidaya	1,50	1,50	1,53
Jasa Sarana Produksi	3,90	2,50	2,73
Industri Pengolahan	0,36	0,46	0,48
Perdagangan	2,21	3,14	2,79
NPL	1,67	3,38	3,34

Sumber: OJK

*Program JARING (Jangkau, Sinergi, dan Guideline) merupakan program inisiatif OJK dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam pembiayaan sektor Kelautan dan Perikanan.

1.5.4 Simpanan Pelajar (SIMPEL)



Selama triwulan III-2019, OJK melaksanakan kampanye budaya menabung bagi pelajar, yaitu SimPel goes to School bagi pelajar SMP 19 Percontohan di Kota Banda Aceh bekerja sama dengan Bank Aceh Syariah.

Selain itu, telah dilakukan sosialisasi kepada BPR/ BPRS yang berada di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat di Makassar. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 30 BPR/BPRS serta perwakilan PERBARINDO dan BPD Sulselbar.

Pada triwulan III-2019 telah dilakukan pertemuan dalam rangka evaluasi dan rencana program Simpanan Pelajar (SimPel) dengan bank peserta SimPel dengan pembahasan yang dilakukan antara lain kegiatan sinergi terkait program SimPel pada 2019, yakni:

1. Pencanaan Hari Indonesia Menabung dalam bentuk Keputusan Presiden bersinergi dengan Dewan Nasional Keuangan Inklusif.
2. Mendorong SimPel menjadi program nasional yang wajib diikuti seluruh siswa dalam bentuk Instruksi

Presiden atau Surat Edaran Kementerian/Lembaga terkait.

3. Mengupayakan pencantuman Budaya Menabung sebagai salah satu aspek dalam program Penguatan Pendidikan Karakter Kemdikbud.
4. Menyelenggarakan kegiatan SimPel Day 2019 secara berkesinambungan dan masif bersinergi dengan industri keuangan perbankan.

1.5.5 Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pasar Modal

A. Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) Sektor Riil

Reksa Dana Penyertaan Terbatas dapat meningkatkan peran Reksa Dana sebagai alternatif sumber pendanaan bagi dunia usaha dan untuk mendorong pertumbuhan kegiatan dunia usaha, khususnya pada sektor riil. Dana kelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) meningkat sebesar 15,98% menjadi Rp27,36 triliun pada triwulan III-2019. Selain itu, jumlah kontrak RDPT juga mengalami peningkatan sebesar 18,33% menjadi 71 RDPT dari sebelumnya 60 RDPT. Seluruh RDPT pada triwulan III-2019 merupakan RDPT yang berbasis proyek.

B. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Saham (KIK-EBA)

Kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Efek Beragun Aset dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif. Selama periode laporan OJK menerbitkan satu izin baru Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA), sehingga jumlah KIK-EBA menjadi delapan KIK dengan dana kelolaan sebesar Rp6,99 triliun.

C. Efek Beragun Aset – Surat Partisipasi (EBA SP)

Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA SP) merupakan Efek Beragun Aset yang diterbitkan oleh Penerbit yang portofolionya berupa kumpulan piutang dan merupakan bukti kepemilikan secara proporsional atas kumpulan piutang yang dimiliki bersama oleh sekumpulan pemegang EBA-SP. EBA-SP dibentuk dengan tujuan untuk menunjang pembiayaan sekunder perumahan dan menyediakan pilihan produk investasi bagi investor. Selama periode laporan, OJK tidak menerbitkan izin baru ataupun pembubaran Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP), sehingga jumlah EBA-SP tetap sebanyak lima EBA-SP dengan dana kelolaan sebesar Rp2,89 triliun.

D. Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estate (KIK-DIRE)

Dana Investasi Real Estate adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset Real Estate, Aset Yang Berkaitan Dengan Real Estate, dan/atau kas dan setara kas. Jumlah Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estate (KIK-DIRE) pada triwulan III-2019 tetap sebanyak tujuh KIK dengan dana kelolaan sebesar Rp11,34 triliun.

E. Kontrak Pengelolaan Dana (KPD)

Pada triwulan III-2019, jumlah Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) mengalami kenaikan sebesar 3,31% menjadi 531 KPD dengan dana kelolaan sebesar Rp214,10 triliun atau menurun sebesar 1,42% dibanding dengan triwulan sebelumnya.

F. Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur

Jumlah Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur (KIK-DINFRA) pada triwulan III-2019 OJK tidak menerbitkan izin baru ataupun pembubaran Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur (KIK-DINFRA), sehingga jumlah KIK-DINFRA sebanyak enam KIK-DINFRA dengan dana kelolaan sebesar Rp2,96 triliun.

1.5.6 Program 1.000 Aktuaris

Program 1.000 Aktuaris merupakan program yang dicanangkan OJK pada pertengahan tahun 2013. Program ini bertujuan untuk mempercepat jumlah aktuaris sehingga perkiraan kebutuhan profesional aktuaris untuk IKNB dapat terpenuhi. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah sosialisasi dan promosi, perkuliahan singkat sertifikasi aktuaris yang bekerja sama dengan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), serta pendidikan dan pelatihan aktuarial keahlian khusus asuransi umum. Pada triwulan I-2019, OJK melakukan rekapitulasi atas laporan kegiatan Program 1.000 Aktuaris dari Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), Jasindo Insurance Academy (JIA), dan Tim READI dalam rangka penyusunan laporan kegiatan Program 1.000 Aktuaris tahun 2018. Jumlah aktuaris mengalami kenaikan sejumlah 18 orang, sehingga sampai dengan triwulan III-2019 terdapat 620 aktuaris yang terdiri dari 319 FSAI (*Fellow of the Society of Actuaries of Indonesia*) dan 301 ASAI (*Associate of the Society of Actuaries of Indonesia*).

1.5.7 Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

AUTP bertujuan untuk memberikan perlindungan dalam bentuk bantuan modal kerja kepada petani apabila terjadi kerusakan pertanian, serangan hama padi yang menyebabkan gagal panen. Dalam rangka mendukung program pemerintah OJK terlibat aktif dalam penyusunan Peraturan Menteri Pertanian tentang Asuransi Pertanian dan Pedoman Pengelolaan Bantuan Premi. OJK juga berperan serta dalam penyusunan kajian mengenai besaran premi, respon petani membayar premi, dan zona risiko asuransi. Dalam implementasinya, Kementerian BUMN telah menunjuk PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) sebagai pelaku AUTP.

AUTP diberikan untuk areal tanam padi seluas 1 juta Ha lahan pertanian, dengan harga pertanggungan sebesar Rp 6.000.000/ha. Suku premi asuransi diperkirakan sebesar 3% dari harga pertanggungan atau Rp 180.000/ha/MT. Premi AUTP 80 % ditanggung pemerintah dan 20% menjadi tanggungan petani. Porsi premi AUTP beban pemerintah sebesar Rp150 miliar bersumber dari dana APBN.

Sampai dengan triwulan III-2019, total premi yang tercatat adalah sebesar Rp93,63 miliar dengan jumlah petani yang ikut serta sebanyak 825.767 orang dan luas lahan terdaftar adalah 520.153,82 ha. Nilai klaim berjalan sebesar Rp37,16 miliar.

1.5.8 Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)

Pada triwulan III-2019, premi AUTS adalah sebesar Rp20,86 miliar,- dengan rincian premi subsidi (80%) sebesar Rp10,418 miliar dan premi non subsidi (20%) sebesar Rp2,604 miliar. Jumlah sapi yang ditanggung melalui AUTS adalah sebanyak 104.320 ekor sapi (54,26%) di 27 provinsi. Adapun jumlah peternak yang ikut serta program AUTS adalah sebanyak 57.026 orang. Sementara itu, jumlah realisasi klaim adalah sebesar Rp6,26 miliar.

1.5.9 Asuransi Nelayan

Pada triwulan III-2019, program Asuransi Nelayan dengan program bantuan premi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan telah diikuti oleh 122.318 orang dan total premi mencapai Rp17,49miliar. Sementara itu, jumlah nilai klaim per triwulan III-2019 adalah sebesar Rp648,09 juta.

1.5.10 Asuransi Usaha untuk Pembudidaya Ikan Kecil

Asuransi Perikanan memberikan perlindungan risiko pada pembudidaya atas penyakit yang dapat mengakibatkan matinya komoditas perikanan atau kegagalan usaha akibat bencana alam. Komoditas

perikanan yang diasuransikan terdiri dari udang, ikan bandeng, ikan nila payau, ikan nila tawar, ikan patin dan polikultur. Lahan pembudidaya yang ditanggung pada Asuransi Perikanan adalah seluas 10.220 ha dengan rentang nilai premi sebesar Rp90.000,- sampai dengan Rp225.000,- sesuai dengan ketentuan luasan lahan.

Sampai dengan triwulan III-2019, jumlah pembudidaya ikan kecil terdaftar adalah sebanyak 6.914 orang dan total premi sebesar Rp2,9 miliar. Nilai klaim per triwulan III-2019 adalah sebesar Rp2,6 miliar.

1.5.11 Pembiayaan Ekonomi Kreatif

Dalam rangka meningkatkan Penyaluran Pembiayaan pada Sektor Produktif khususnya di sektor industri kreatif berorientasi ekspor dan UMKM serta mendukung Program Pemerintah dalam rangka meningkatkan pembiayaan ekspor pada ekonomi kreatif dan UMKM sebagai sumber pertumbuhan baru ekonomi Indonesia dalam jangka panjang, Perusahaan Pembiayaan diharapkan juga melakukan pembiayaan di sektor ekonomi kreatif tersebut. Pada triwulan III-2019, total penyaluran pembiayaan di sektor ekonomi kreatif sebesar Rp43,28 triliun dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I - 54 ◇ Penyaluran Pembiayaan Ekonomi Kreatif

No.	Kelompok Sub Sektor	Saldo (Rp juta)
1.	Arsitektur	799.451.864.040
2.	Desain Interior, Desain Komunikasi Visual, dan Desain Produk	2.752.629.788.290
3.	Film, Animasi, dan Video	139.203.405.053
4.	Fotografi	1.332.045.105.055
5.	Kriya	16.108.577.691.740
6.	Kuliner	10.891.696.060.637
7.	Musik	931.389.169.040
8.	Fashion	4.979.219.710.340
9.	Aplikasi dan Game Developer	8.732
10.	Penerbitan	1.022
11.	Periklanan	96.700
12.	Televisi dan Radio	561.636
13.	Seni Pertunjukan	8.413
14.	Seni Rupa	6.878
Total		43.278.659.133.508

1.5.12 Asuransi pada Sektor Pariwisata

OJK mendorong partisipasi aktif Perusahaan untuk membentuk konsorsium dalam mendukung program pengembangan sektor pariwisata. Dalam langkah awal, OJK telah mengirimkan surat kepada Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata pada bulan Maret 2019 yang memaparkan tentang pentingnya perlindungan kepada para wisatawan dan pelaku usaha pariwisata karena semakin besarnya potensi risiko bencana alam, terutama bencana alam gempa bumi, tanah longsor dan tsunami. Sampai dengan triwulan II-2019, terdapat 1 Konsorsium Asuransi yang memiliki produk khusus bagi para wisatawan (*universal travel protection*) yang melindungi jiwa dan aset pelaku usaha pariwisata. Namun, belum terdapat tanggapan positif dari para pelaku usaha pariwisata, mengingat belum terdapat Peraturan Menteri yang mengatur kewajiban asuransi dan peraturan petunjuk teknis pelaksanaan kewajiban asuransi sektor pariwisata.





02

Tinjauan Operasional
Sektor Jasa Keuangan



Pengaturan dan Pengawasan

- Penerbitan 3 POJK yang mengatur Pengawasan Pasar Modal, 2 POJK yang mengatur Pengawasan IKNB Konvensional, dan 1 POJK yang mengatur SJK secara umum
- Perubahan atas POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
- Penerbitan 6 Sprindik, 6 Pelimpahan Berkas Perkara ke Kejaksaan, dan 6 berkas Perkara dinyatakan Lengkap (P-21)



Pengembangan

- Pemberian Surat Tanda Tercatat kepada 48 Penyelenggara Industri Keuangan Digital dan dan pelaksanaan pengujian 34 sampel objek *Regulatory Sandbox*
- Kebijakan dalam rangka mendorong sektor Prioritas (Sektor Perumahan, Pariwisata dan Industri Berorientasi Ekspor Impor)
- Kajian Dana Pensiun Mikro
- Strategi Penyelenggaraan Pengawasan Inovasi Keuangan Digital (*Supervisory Technology*) dengan peluncuran *minisite* Gesit
- *Bilateral Meeting* dengan Bank of Thailand



Edukasi dan Perlindungan Konsumen

- Sosialisasi Ketentuan EPK di Cirebon, Bengkulu, Malang, dan Ambon
- Penyelenggaraan Sinergi Edukasi OJK pada Guru SD dan MI di Bengkulu dan Kupang
- Edukasi Masif dan Sosialisasi Bantuan Pangan Non Tunai
- iB Vaganza di Medan dan Palembang
- Edukasi Keuangan kepada komunitas Pekerja Migran Indonesia di Taiwan dan Korea Selatan, Komunitas Pelajar, Karyawan dan Pengusaha Muda serta UMKM

2.1 AKTIVITAS PENGATURAN

2.1.1 Pengaturan Bank

Pada triwulan III-2019, OJK menerbitkan satu ketentuan terkait bank umum, sebagai berikut:

1. SEOJK Nomor 16/SEOJK.03/2019 tentang Perubahan atas SEOJK Nomor 39/SEOJK.03/2017 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat

Peraturan ini diterbitkan sebagai ketentuan lebih lanjut atas ditetapkannya POJK Nomor 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan BPR dan BPRS Melalui Sistem Pelaporan OJK, serta harmonisasi dengan ketentuan yang berlaku antara lain POJK Nomor 33/POJK.03/2018 tentang KAP dan PPAP BPR. Pokok-pokok ketentuan yang diatur antara lain terkait format dan pedoman pengisian Laporan Keuangan Publikasi BPR.

2.1.2 Pengaturan Pasar Modal

Pada triwulan III-2019 OJK menerbitkan tiga Peraturan Industri Pasar Modal dengan rincian sebagai berikut:

1. POJK Nomor 17/POJK.04/2019 tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana

Peraturan ini diterbitkan sebagai langkah strategis dalam rangka meningkatkan kualitas layanan perizinan wakil agen penjual efek reksa dana serta untuk mengoptimalkan sistem perizinan wakil agen penjual efek reksa dana.

2. POJK Nomor 18/POJK.04/2019 tentang Perusahaan Efek Daerah.

Peraturan ini diterbitkan dalam rangka pengembangan infrastruktur jaring pemasaran layanan jasa pasar modal untuk meningkatkan peran perusahaan efek terhadap perekonomian daerah dan memperluas akses masyarakat di daerah untuk berinvestasi di sektor pasar modal.

3. POJK Nomor 22/POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek

Peraturan ini diterbitkan dalam rangka merespon perkembangan transaksi efek yang bertambah kompleks, sehingga perlu peraturan yang dapat mendukung peningkatan perlindungan terhadap kepentingan pemodal dan pelaku di pasar modal serta meningkatkan pengawasan transaksi efek sehingga tercipta pelaksanaan transaksi efek secara teratur, wajar, dan efisien.

Selain itu, OJK juga menerbitkan ketentuan terkait Pengawasan Berdasarkan Risiko Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek dan Pedoman Pengawasan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Berbasis Risiko Bank Kustodian.

2.1.3 Pengaturan IKNB

Pada triwulan III-2019, OJK menetapkan sebanyak tiga peraturan terkait IKNB Konvensional dengan detail sebagai berikut:

1. POJK Nomor 19/POJK.05/2019 tentang Perubahan atas POJK nomor 14/POJK.05/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri

POJK ini ditetapkan dalam rangka mendukung negosiasi perundingan perdagangan internasional dengan perubahan substansi yang terdiri dari penambahan penjelasan atas Pasal 7, yang menjelaskan risiko sederhana (*simple risk*). Dengan perubahan penjelasan Pasal 7 dimaksud, seluruh ketentuan retensi sendiri dan penempatan dukungan reasuransi tetap tunduk dan mengacu pada batasan yang telah diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.05/2015 tentang Batas Retensi Sendiri, Besar Dukungan Reasuransi, dan Laporan Reasuransi/Retrosesi (SEOJK 31/2015).

2. POJK Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non Bank

POJK ini bertujuan untuk menyempurnakan pengaturan mengenai penyusunan rencana bisnis LJKNB. Rencana bisnis perlu disusun secara realistis dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha LJKNB. Rencana bisnis dapat menjadi salah satu acuan pengawas dalam menyusun rencana pengawasan yang optimal dan efektif. Pokok-pokok pengaturan, yaitu penyusunan dan pelaksanaan, cakupan, penyampaian, perubahan, dan pelaporan Rencana Bisnis, dan penegakan kepatuhan.

3. SEOJK Nomor 15/SEOJK.05/2019 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan Non Bank

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 23 POJK Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, perlu diatur ketentuan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama LJKNB. Pokok-pokok pengaturan antara lain yaitu Pihak Utama, Cakupan, Tata Cara, dan Konsekuensi Penilaian Kembali.

2.2 AKTIVITAS PENGAWASAN

2.2.1 Pengawasan Perbankan

A. Penegakan Kepatuhan Bank

1. Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank)

Selama triwulan III-2019, rincian penanganan tindak pidana perbankan, sebagai berikut:

Tabel II - 1 ◇ Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan

Tahapan Kegiatan	Triwulan III-2019					
	Kantor Bank (KB)		Kasus (PKP)		Total	
	BU	BPR	BU	BPR	KB	PKP
1. PKP yang diterima	2	5	4	9	7	13
2. PKP dalam proses analisis *)	-	2	-	3	2	3
3. PKP yang dikembalikan sebelum investigasi	1	1	2	3	2	5
4. PKP yang diinvestigasi *)	1	2	2	3	3	5
a. Persiapan dan/atau Proses Investigasi *)	-	1	-	2	1	2
b. Investigasi Selesai/Tindak Lanjut dalam Proses Pelimpahan ke Satker Penyidikan OJK	1	1	2	1	2	3
5. Pelimpahan kepada Satker Penyidikan OJK *)	3	4	3	9	7	12

*) Termasuk *carryover* PKP yang diterima dari periode tahun sebelumnya

Sumber : OJK

Berdasarkan hasil pelimpahan, pada triwulan III-2019 terdapat 12 kasus dugaan tipibank, di antaranya pada bidang perkreditan sebanyak 11 kasus dan bidang penyalahgunaan aset sebanyak satu kasus. Terkait tindak pidana perbankan tersebut, manajemen bank diharapkan melaksanakan *independent review* oleh SKAI, kaji ulang kebijakan internal, serta pengamanan teknologi informasi dan infrastruktur pendukungnya.

2. Pemberian Keterangan Ahli atau Saksi

Dalam rangka memenuhi permintaan aparat penegak hukum (APH), selama triwulan III-2019 OJK melakukan pemberian keterangan ahli dan pemberian keterangan saksi dengan detail sebagai berikut:

Tabel II - 2 ◇ Pemberian Keterangan Ahli/Saksi

No.	APH	Permintaan		
		Saksi	Ahli	Total
1.	Polri	16	0	16
2.	Kejaksaan RI	1	4	5
Total		17	4	21

Sumber : OJK

Keterangan ahli yang diberikan antara lain meliputi kasus yang pernah ditangani OJK maupun terhadap kasus yang dilaporkan oleh pihak bank atau pihak lainnya kepada Polri, Kejaksaan RI, ataupun Satuan Kerja Penyidikan OJK. Pemberian keterangan ahli dilakukan sesuai dengan kompetensi terkait ketentuan perbankan dan pengawasan bank serta pengalaman pegawai dalam menangani kasus dugaan tipibank.

B. Kelembagaan Bank Umum

Pada 2019, OJK mengeluarkan kebijakan dan inisiatif yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, salah satunya yaitu reformasi internal berupa percepatan perizinan perbankan termasuk proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) dari sebelumnya 30 hari kerja menjadi 14 hari kerja.

1. Perizinan

Pada triwulan III-2019, OJK menyelesaikan 115 perizinan perubahan jaringan kantor Bank Umum di Jabodetabek. Perizinan tersebut sebagian besar berupa penutupan Kantor Cabang Pembantu (KCP) sebanyak 41 perizinan dan penutupan Kantor Cabang (KC) sebanyak 20 perizinan.

OJK juga menyetujui perizinan *merger* bank, yaitu *merger* Bank Mitraniaga ke dalam Bank Agris pada 14 Agustus 2019 dan terdapat dua proses perubahan nama bank, yaitu: (i) Perubahan nama Bank Dinar Indonesia menjadi Bank OKE Indonesia, dan (ii) Perubahan nama Bank Agris menjadi Bank IBK Indonesia.

Tabel II - 3 ◇ Perizinan Perubahan Jaringan Kantor Bank Umum

No.	Jenis Perizinan	Triwulan III-2019
1.	Pembukaan Bank Umum	
	a. Kantor Wilayah (Kanwil)	-
	b. Kantor Cabang (KC)	3
	c. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	2
	d. Kantor Fungsional (KF)	2
	e. Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri	-

2. Penutupan Bank Umum	
a. Izin Usaha	-
b. Kantor Perwakilan Bank Umum di luar Negeri	-
c. Kantor Cabang (KC)	20
d. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	41
e. Kantor Fungsional (KF)	1
3. Pemindahan Alamat Bank Umum	
a. Kantor Pusat (KP)	3
b. Kantor Wilayah (Kanwil)	1
c. Kantor Cabang (KC)	4
d. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	17
e. Kantor Fungsional (KF)	-
f. Kantor Perwakilan Bank	-
4. Perubahan Status Bank Umum	
a. Peningkatan Status	
- KP menjadi KC	2
- KK menjadi KCP	9
- KF menjadi KCP	-
- KK menjadi KC	-
b. Penurunan Status Bank Umum	
- KP menjadi KC	-
- KC menjadi KCP	1
- KCP ke KF/KK	6
5. Perubahan Penggunaan Izin Usaha (Perubahan Nama)	2
6. Perubahan Badan Hukum	-
7. Merger Bank Umum	1
8. Izin Bank Devisa	-
9. Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Luar Negeri di Indonesia	-
Jumlah	115

*J) Ket: Hanya mencakup perizinan perubahan jaringan kantor di wilayah Jabodetabek

Sumber: OJK

2. Jaringan Kantor

Pada triwulan III-2019, jaringan kantor BUK berkurang 1.913 unit sehingga jaringan kantor menjadi 137.358 jaringan kantor. Jaringan kantor terbanyak masih didominasi oleh ATM/ADM sebanyak 103.613 unit. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, penurunan jaringan kantor terbanyak juga terdapat pada ATM/ADM yang berkurang 1.627 unit, diikuti penurunan pada KCP sebanyak 232 kantor. Sementara itu, terdapat peningkatan pada *payment point* sejumlah 43 unit dan Kantor Pusat Non Operasional sebanyak 2 kantor.

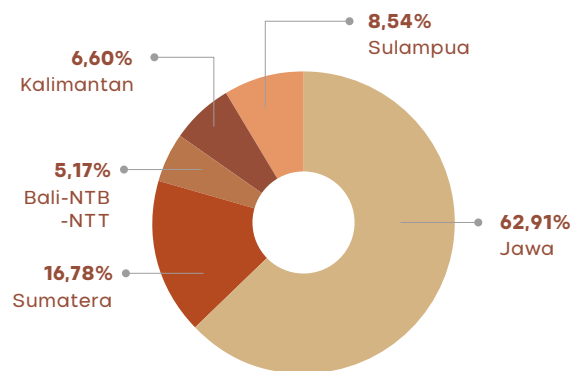
Tabel II - 4 ◇ Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional

No.	Jaringan Kantor	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019
1.	Kantor Pusat Operasional	47	46
2.	Kantor Pusat Non Operasional	52	54
3.	Kantor Cabang Bank Asing	8	8
4.	Kantor Wilayah	172	171
5.	Kantor Cabang (Dalam Negeri)	2.865	2.852
6.	Kantor Cabang (Luar Negeri)	1	1
7.	Kantor Cabang Pembantu Bank Asing	25	25
8.	Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	16.001	15.769
9.	Kantor Kas	10.280	10.254
10.	Kantor Fungsional	1.062	1.029
11.	<i>Payment Point</i>	2.080	2.123
12.	Kas Keliling/ Kas Mobil/ Kas Terapung	1.424	1.399
13.	Kantor Dibawah KCP KCBA yang tidak termasuk 8, 9, 10*)	12	12
14.	Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri	2	2
15.	ATM/ADM	105.240	103.613
Total		139.271	137.358

Sumber : LKPBU

Berdasarkan pembagian wilayah, sebaran jaringan kantor tersebut sebagian besar berada di pulau Jawa sejumlah 86.407 jaringan kantor (62,91%), diikuti pulau Sumatera 23.049 (16,78%), Sulampua 11.735 (8,54%), Kalimantan 9.065 (6,60%), dan Bali-NTB-NTT 7.102 (5,17%). Secara umum, jaringan kantor menurun pada semua wilayah, dengan penurunan terbesar terdapat di wilayah Jawa yang berkurang sejumlah 1.209 jaringan kantor utamanya berupa pengurangan ATM/ADM sebanyak 1.056 unit.

Grafik II - 1 ◇ Penyebaran Jaringan Kantor BUK



Sumber : LKPBU

3. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (FPT New Entry)

Dalam pengelolaan bank diperlukan sumber daya manusia berintegritas tinggi, berkualitas dan memiliki reputasi keuangan yang baik. Sehubungan dengan hal tersebut, OJK melakukan proses uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon pemilik dan calon pengelola bank melalui penelitian administratif yang lebih efektif dan proses wawancara yang lebih efisien, dengan tetap memperhatikan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan (*Fit and Proper New Entry*).

Pada triwulan III-2019, dari 94 pemohon terdapat 47 calon pengurus yang lulus wawancara. Selanjutnya, terdapat 38 calon yang lulus sebagai PSP/PSPT, Dewan Komisaris, dan Direksi BUK, termasuk calon yang mengikuti proses (*carry over*) pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, terdapat satu permohonan yang tidak ditindaklanjuti dikarenakan tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan.

Tabel II - 5 ◇ FPT Calon Pengurus dan PSP Bank Umum Konvensional

Pemohon FPT	Wawancara		Surat Keputusan (SK) FPT		Tidak Ditindaklanjuti	Triwulan III-2019
	Lulus	Tidak Lulus	Lulus	Tidak Lulus		
PSP/PSPT	2	-	5	-	-	7
Dewan Komisaris	18	1	7	-	-	26
Direksi	27	4	26	3	1	61
Total	47	5	38	3	1	94

Sumber: OJK

C. Kelembagaan BPR

1. Perizinan

Pada triwulan III-2019, OJK menyetujui tiga jenis permohonan perizinan BPR, dengan rincian sebagai berikut:

- Izin pendirian BPR telah diberikan kepada PT BPR Modern Makassar.
- 3 proses *Merger*, yaitu pada:
 - PD BPR Beber, PD BPR Cirebon Selatan, PD BPR Ciwaringin, PD BPR Gegesik, PD BPR Kapetakan dan PD BPR Klangeran ke dalam PD BPR Astanajapura.
 - PT BPR Sumber Ekonomi, PT BPR Arthamutiara Permai, PT BPR Polin Jaya, PT BPR Nauli Dhanaraya, PT BPR Mustika Permai, PT BPR Dipon Sejahtera, PT BPR Sahat Sentosa dan PT BPR Sehat Ekonomi ke dalam PT BPR Sinar Mas Pelita; dan
 - PD BPR Sumber, PD BPR Susukan, PD BPR Plumbon, PD BPR Cirebon Barat, PD BPR Cirebon Utara, PD BPR Karangsembung, PD BPR Lemahabang, PD BPR Arjawinangun, PD BPR Weru, PD BPR Palimanan dan PD BPR Waled ke dalam PD BPR Babakan.
- Pencabutan Izin Usaha PT BPR Efit Dana Sejahtera dan PT BPR Calliste Bestari.

2. Jaringan Kantor

Pada triwulan III-2019, terdapat 1.578 BPR dengan 14.934 jaringan kantor di mana 6.287 di antaranya merupakan kantor bank yang meliputi Kantor Pusat (KP), Kantor Cabang (KC), dan Kantor Kas (KK). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat pengurangan tiga BPR dan delapan

kantor BPR. Berdasarkan lokasi, penyebaran kantor BPR masih terpusat di wilayah Jawa dengan porsi sebesar 75,17% (4.726 kantor), diikuti wilayah Sumatera sebesar 11,50% (723 kantor).

3. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (FPT New Entry)

OJK melaksanakan FPT *New Entry* kepada 310 calon Direksi, Komisaris, dan PSP BPR, dengan hasil terdapat 256 calon (82,58% dari total pelamar) yang mendapatkan persetujuan (lulus) untuk menjadi Direksi, Komisaris dan PSP, sementara 54 calon yang tidak disetujui (tidak lulus).

Tabel II - 6 ◇ Daftar Hasil *Fit and Proper Test New Entry* BPR

Pemohon FPT	Triwulan III-2019		
	Lulus	Tidak Lulus	Total
Direksi	140	45	185
Komisaris	90	9	99
PSP	26	-	26
Jumlah	256	54	310

Sumber: OJK

2.2.2 Pengawasan Pasar Modal

A. Pengawasan Lembaga dan Transaksi Efek

1. Pengawasan Transaksi Saham

- Monitoring* terhadap 53 saham atas hasil pantauan laporan harian, mingguan, dan bulanan perdagangan yang diindikasikan tidak wajar

Tabel II - 7 ◇ Pengawasan Transaksi Efek

No.	Kategori	Jumlah Saham
1.	Saham telah ditindaklanjuti ke proses penelaahan	10
2.	Saham disampaikan dalam bentuk <i>pointers</i>	14
3.	Saham telah diputuskan untuk di- <i>discard</i> , setelah dilakukan analisa lebih lanjut mengenai ada tidaknya indikasi pelanggaran	7
4.	Saham sedang dilakukan <i>monitoring</i>	22
Total		53

- b. Penelaahan terhadap 12 perdagangan saham sebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan *monitoring unusual market activity* di mana aktivitas perdagangan atas saham tersebut diindikasikan tidak wajar. Dari saham-saham tersebut, tujuh saham sedang dilakukan penelaahan, sementara lima saham telah ditingkatkan ke pemeriksaan teknis.
- c. Pemeriksaan teknis terhadap tujuh saham sebagai tindak lanjut dari proses penelaahan untuk membuktikan adanya indikasi transaksi semu, manipulasi perdagangan dan/atau perdagangan orang dalam. Dari saham-saham tersebut, lima saham telah selesai pemeriksaan dan dilimpahkan ke Unit Kerja Pemeriksaan Pasar Modal dan dua saham sedang dilakukan pemeriksaan teknis.

2. Pengawasan Transaksi Surat Utang dan Efek Lainnya

- a. *Review alert* Juli, Agustus dan September yang menghasilkan 4.277 *alert* Obligasi Pemerintah, 3.129 *alert* Obligasi Korporasi dan 505 *alert* waran. Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan terhadap tiga seri Obligasi Pemerintah, penelaahan terhadap dua Waran, dan *monitoring* terhadap dua seri Obligasi Pemerintah, tujuh seri Obligasi Korporasi dan empat seri Waran.
- b. Penelaahan atas laporan dari Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE) bulan Juli dan Agustus berupa keterlambatan pelaporan transaksi Efek masing-masing sebanyak 17 dan 14 partisipan.
- c. Penelaahan atas laporan kecenderungan Pasar Surat Utang dari Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA) bulan Juli, Agustus dan September 2019.

3. Pengawasan Self Regulatory Organization, Lembaga Penilai Harga Efek dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal

Selama triwulan III-2019, OJK dalam melakukan pengawasan terhadap *Self Regulatory Organization* (SRO), Lembaga Penilai Harga Efek (LPHE) dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) dengan melaksanakan sejumlah kegiatan, antara lain:

- a. Penyampaian persetujuan kepada KPEI sebagai penyedia jasa kliring perdagangan efek bersifat utang dan sukuk (ebus).
- b. Penyampaian tanggapan atas perubahan prosedur operasional standar dan instruksi kerja PHEI.
- c. Penyampaian dukungan terhadap pengembangan *Straight Through Processing* (STP) pada *Electronic Trading Platform* (ETP).
- d. Penyampaian persetujuan atas perubahan prosedur operasional P3IEI.
- e. Penyampaian tanggapan atas laporan realisasi anggaran dan realisasi rencana kerja PT KPEI, PT BEI, PT KSEI, PT P3IEI Triwulan II-2019.

4. Pengawasan Perusahaan Efek

- a. Persetujuan 19 perubahan susunan direksi dan 17 perubahan susunan komisaris.
- b. Persetujuan peningkatan modal disetor atas 4 Perusahaan Efek.
- c. Analisis dan pemantauan atas laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) terhadap 124 Perusahaan Efek. Rata-rata total MKBD sampai pada akhir triwulan III-2019 sebesar Rp23,50 triliun atau turun sebesar 1,51% dari rata-rata triwulan II-2019. Penurunan rata-rata total MKBD tersebut disebabkan oleh kenaikan nilai aset lancar industri yang lebih kecil dari pada kenaikan liabilitas industri. Pada periode laporan, dari 105 Perusahaan Efek Anggota Bursa, semuanya memenuhi nilai minimum MKBD yang dipersyaratkan.
- d. Analisis dan pemantauan atas 28 Perusahaan Efek yang melakukan Penjaminan Emisi Efek terhadap 24 Emiten. Analisis dan pemantauan tersebut dalam rangka menilai kemampuan Perusahaan Efek dalam pemenuhan nilai MKBD pada saat melakukan kegiatan Penjaminan. Dari analisis yang sudah dilakukan, seluruh Perusahaan Efek tersebut dinilai memiliki MKBD yang cukup dalam melakukan tugasnya sebagai Penjamin Emisi Efek.
- e. Laporan bulanan atas Laporan Kegiatan Perantara Pedagang Efek (LKPPE) dalam triwulan III-2019 yaitu periode bulan Juni 2019 sampai dengan Agustus 2019. Dalam periode tersebut, terdapat empat Perusahaan Efek yang belum menyampaikan LKPPE pada bulan Juni 2019, tiga Perusahaan Efek yang belum menyampaikan LKPPE pada bulan Juli 2019, dan empat Perusahaan Efek yang belum menyampaikan LKPPE pada bulan Agustus 2019. Adapun Perusahaan Efek dimaksud yang merupakan Perusahaan Efek tidak aktif/suspen.
- f. Laporan semesteran atas Laporan Kegiatan Penjamin Emisi Efek (LKPEE) dalam triwulan III-2019 yaitu periode Juni 2019. Dalam periode tersebut, terdapat tiga PE yang terlambat melaporkan LKPEE dan delapan PE belum menyampaikan LKPEE. Atas hal tersebut, kami telah menyampaikan surat konfirmasi keterlambatan kepada tiga PE

dan surat mengingatkan PE agar menyampaikan LKPEE kepada delapan PE tersebut.

5. Pemeriksaan terhadap *Self Regulatory Organization*, Lembaga Penilai Harga Efek dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal

Pada triwulan III-2019, telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan telah disampaikan hasil pemeriksaan sementara kepada KPEI, serta dilakukan *exit meeting*. Adapun fokus pemeriksaan KPEI adalah pemeriksaan aspek kegiatan penjaminan dan pengelolaan risiko serta aspek keuangan.

6. Pemeriksaan Kepatuhan Perusahaan Efek

a. Pemeriksaan Kepatuhan

Pada triwulan III-2019, telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap delapan Perusahaan Efek. Adapun fokus pemeriksaan adalah Risk Based Approach Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (RBA APU-PPT). Pada periode ini juga telah dilakukan pendampingan pemeriksaan kepada pengawas kantor OJK terhadap dua kantor cabang Perusahaan Efek.

b. Pemeriksaan Kepatuhan Khusus

Pada triwulan III-2019, telah selesai disusun laporan hasil pemeriksaan terhadap satu Perusahaan Efek dan telah disampaikan kepada Perusahaan Efek untuk dilakukan langkah-langkah perbaikan atas temuan pelanggaran.

c. Penanganan Pengaduan

Pada triwulan III-2019, telah dilakukan penanganan atas empat pengaduan yang melibatkan lima Perusahaan Efek dan sedang dilakukan penyusunan laporan penanganan tiga pengaduan tersebut.

B. Pengawasan terhadap Pengelolaan Investasi

OJK melakukan pemeriksaan kepatuhan pelaku industri pengelolaan investasi terhadap peraturan perundang-undangan. Sampai dengan triwulan III-2019, OJK telah melakukan pemeriksaan kepatuhan pelaku industri pengelolaan investasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap 24 kantor pusat MI, dua Perusahaan Efek sebagai APERD, tujuh kantor pusat APERD, enam Bank Kustodian, dua Penasihat Investasi Institusi, dua EBA-SP, satu KIK-EBA, dan satu DIRE. Dari sisi pemeriksaan kepatuhan pelaku industri pengelolaan investasi, sampai dengan triwulan III-2019, 12 MI telah selesai LHP nya, satu MI dalam tahap finalisasi LHP, dan 11 MI masih dalam proses permintaan konfirmasi. Pemeriksaan kepatuhan terhadap PE APERD, seluruhnya telah selesai LHP nya.

Pemeriksaan kepatuhan terhadap APERD, tiga APERD telah selesai LHP nya dan empat APERD dalam tahap finalisasi LHP. Untuk pemeriksaan kepatuhan

terhadap BK, empat BK telah selesai LHP nya, satu BK masih dalam proses finalisasi, dan satu BK masih dalam proses permintaan konfirmasi.

Dari sisi pemeriksaan kepatuhan produk pengelolaan investasi, sampai dengan triwulan III-2019, sebanyak satu EBA-SP telah selesai LHP nya dan satu EBA-SP masih dalam proses permintaan konfirmasi. Adapun pemeriksaan kepatuhan terhadap KIK-EBA, saat ini masih dalam proses permintaan konfirmasi.

Pemeriksaan kepatuhan terhadap KIK-DIRE, seluruhnya telah selesai LHP nya.

Pengawasan terhadap pelaku industri pengelolaan investasi juga didukung oleh sistem *E-monitoring* yang digunakan OJK untuk melakukan kegiatan pemantauan transaksi industri pengelolaan investasi. Untuk meningkatkan kualitas pemantauan, OJK masih terus melakukan pembenahan dan pengembangan sistem *E-monitoring* yang ada, sehingga sistem *E-Monitoring* dapat dijadikan sebagai alat yang andal dan terpercaya dalam melakukan pemantauan.

Dalam rangka aktivitas pengawasan atas laporan berkala, OJK melakukan pemantauan terhadap laporan bulanan Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor X.N.1 tentang Laporan Kegiatan Bulanan Manajer Investasi. Pada triwulan III-2019, terdapat dua MI yang terlambat menyampaikan laporan X.N.1 bulan April dan Mei 2019.

Sementara itu, OJK juga mewajibkan MI untuk menyampaikan laporan MKBD setiap bulan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD). Pada periode triwulan III-2019, tidak terdapat MI yang terlambat menyampaikan laporan MKBD periode Juli 2019 dan Agustus 2019

C. Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik

Selama periode laporan, OJK telah melakukan pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik terkait aksi korporasi sebagai berikut:

Tabel II - 8 ◇ Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik

No.	Aksi Korporasi	Triwulan III-2018	Triwulan III-2019
1.	Transaksi Afiliasi	29	34
2.	Transaksi Afiliasi Bersama Dengan Transaksi Material	1	1
3.	Transaksi Material Tidak Memerlukan RUPS	7	8

4.	Transaksi Material Yang Harus Terlebih Dahulu Mendapat Persetujuan RUPS	1	-
5.	Transaksi Perubahan Kegiatan Usaha Utama	-	-
6.	Pembagian Saham Bonus	-	1
7.	Pembagian Dividen Berupa Kas	19	14
8.	Pembagian Dividen Saham	-	3
9.	Laporan <i>Buyback</i> Saham	9	15
10.	Laporan <i>Buyback</i> Saham Dalam Kondisi Pasar Yang Berpotensi Krisis	-	-
11.	Pembelian Kembali Obligasi	-	-
12.	Penelaahan Terhadap Program ESOP/MSOP	5	5
13.	Penelaahan Atas Rencana Penggabungan Usaha	1	1
14.	Penelaahan Atas Penawaran Tender	1	3
15.	Penelaahan Atas Penawaran Tender Sukarela	-	-
16.	Penelaahan Atas Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD	2	2
17.	Penelaahan <i>Go Private</i>	-	-

OJK juga melakukan pemantauan atas penyampaian laporan berkala, sebagai berikut:

Tabel II - 9 ◆ Laporan Berkala

No.	Laporan Berkala	LKT 2018		LT 2018		LKTT 2019	
		EPP	%	EPP	%	EPP	%
1.	Tepat Waktu	583	79,1	563	76,4	626	85,3
2.	Terlambat	25	3,4	104	14,1	54	7,4
3.	Belum Menyampaikan	91	12,3	32	4,3	45	6,1
4.	Belum Wajib Menyampaikan	38	5,2	38	5,2	9	1,2

Selain itu, OJK juga melakukan Pemeriksaan Teknis terhadap 16 Emiten dan Perusahaan Publik.

D. Pengawasan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Sampai dengan triwulan III-2019 OJK melakukan penelaahan atas 21 laporan perubahan data dan informasi Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari dua laporan dari Akuntan, lima laporan dari Konsultan Hukum, enam laporan dari Penilai, dua laporan dari Notaris dan enam laporan Perubahan Data ASPM.

OJK melaksanakan kegiatan pemeriksaan kepatuhan (onsite) dan pemetaan/*mapping* yang dilakukan terhadap beberapa lembaga dan profesi penunjang pasar modal adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan kepatuhan terhadap satu Perusahaan Pemeringkat Efek (PPE);
2. Pemeriksaan kepatuhan terhadap enam Bank Kustodian (BK);
3. Pemetaan/*mapping* terhadap tiga Notaris Pasar Modal
4. Pemeriksaan kepatuhan terhadap lima Konsultan Hukum; dan
5. Pemeriksaan kepatuhan terhadap empat Penilai;
6. Pemeriksaan insidentil terhadap dua Penilai;
7. Pemeriksaan kepatuhan terhadap satu Wali Amanat; dan
8. Pemeriksaan kepatuhan terhadap satu Biro Administrasi Efek.

Dari kegiatan pemeriksaan dan/atau *mapping* tersebut, telah diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pemeriksaan kepatuhan Perusahaan Pemeringkat Efek, tiga Bank Kustodian, satu Wali Amanat, satu Biro Administrasi Efek, tiga Konsultan Hukum dan dua Penilai serta pemeriksaan insidentil terhadap dua Penilai. Sementara LHP atas pemeriksaan kepatuhan tiga Bank Kustodian, dua Konsultan Hukum, dan dua Penilai dalam proses penyusunan. Selain itu telah diselesaikan Laporan Hasil *Mapping* untuk tiga pemetaan/*mapping* Notaris.

Terkait Pemeriksaan Kepatuhan Akuntan Publik Pasar Modal tahun 2019, telah dilakukan pemeriksaan terhadap tujuh KAP dan telah diselesaikan dua LHP atas pemeriksaan terhadap Akuntan Publik dari dua KAP.

Selain itu, OJK juga telah melakukan penelaahan atas enam permohonan izin perorangan sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dan mengeluarkan enam Surat Keputusan Izin ASPM.

E. Penegakan Hukum Industri Pasar Modal

1. Pemeriksaan Pasar Modal

OJK melaksanakan 63 pemeriksaan Pasar Modal yang terdiri dari tiga Pemeriksaan terkait Pengelolaan Investasi, 22 Pemeriksaan terkait Transaksi dan Lembaga Efek, dan 38 Pemeriksaan terkait Emiten dan Perusahaan Publik.

Selain itu, terdapat dua pemeriksaan yang diteruskan kepada Satuan Kerja Penyidikan Sektor Jasa Keuangan dengan dugaan pelanggaran antara lain ketentuan terkait Manipulasi Pasar dan Kode Etik.

2. Penetapan Sanksi dan Penanganan Keberatan Pada Industri Pasar Modal

a. Penetapan Sanksi Administratif

OJK telah menetapkan 199 sanksi administratif kepada para pelaku industri Pasar Modal, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 10 ◇ Sanksi Administratif Pasar Modal

Pelanggaran	Sanksi Administratif		Perintah Tertulis	
	Peringatan Tertulis	Denda	Pembekuan Izin	Pencabutan Izin
Keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman	23	165 dengan total denda sebesar Rp1.096.790.000		
Pelanggaran selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen lain, dan keterlambatan pengumuman	1	8 dengan total denda sebesar Rp6.429.200.000	2 Pembekuan Surat Tanda Terdaftar Perorangan	-
Pelanggaran selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen lain, dan keterlambatan pengumuman yang tidak dikategorikan sebagai kasus.	-	-		
Total	24	173	2	-

Sebagai tindak lanjut atas penetapan Sanksi Administratif Berupa Denda di tahun 2018 dan 2019, selama triwulan III-2019 OJK menetapkan 28 Surat Teguran Pertama dan delapan Surat Teguran Kedua dan 12 pelimpahan piutang macet ke PUPN terkait dengan keterlambatan pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda.

OJK masih memproses pengenaan sanksi administratif terkait keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman sebanyak lima rekomendasi sanksi administratif, 17 rekomendasi atas kasus pelanggaran ketentuan di sektor Pasar Modal selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman, serta lima rekomendasi sanksi selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen lain, dan keterlambatan pengumuman yang tidak dikategorikan sebagai kasus.

b. Penanganan Keberatan Atas Sanksi Administratif
OJK menindaklanjuti 22 Permohonan Keberatan di mana tujuh Keberatan telah ditanggapi dan 15 Keberatan masih dalam proses.

2.2.3 Pengawasan IKNB

A. Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan

1. Off-site dan On-site Supervision

OJK melakukan analisis terhadap tujuh laporan keuangan berkala Perusahaan Perasuransian. Selain itu, OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 Perusahaan Asuransi, yaitu lima Asuransi Jiwa dan tujuh Asuransi Umum dengan ruang lingkup

mencakup operasional, dukungan dana, APU dan PPT, risiko strategi dan asuransi serta posisi aset dan liabilitas. Terkait pemeriksaan tersebut OJK telah menerbitkan 12 LHP yang terdiri dari tujuh LHP Sementara, empat LHP Final dan satu LHP BPJS Kesehatan.

2. Pemantauan Tindak Lanjut, Penegakan Kepatuhan, dan Pengenaan Sanksi

OJK mengenakan 22 sanksi peringatan pertama dan sembilan denda administratif. Selain itu, OJK juga melakukan pencabutan sanksi yang terdiri dari empat surat pencabutan sanksi peringatan pertama.

3. Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan

OJK menindaklanjuti 41 pengaduan yang berkaitan dengan klaim asuransi.

4. Penatausahaan Dana Jaminan, Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan, dan Pengesahan Cadangan

OJK menindaklanjuti 41 pengaduan yang berkaitan dengan klaim asuransi.

a. Penatausahaan Dana Jaminan

OJK memproses sembilan permohonan pencairan/penggantian dana jaminan.

b. Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan

OJK menerima 35 permohonan surat keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan telah diselesaikan seluruhnya.

c. Pengesahan Cadangan

OJK menindaklanjuti 13 permohonan pengesahan cadangan premi dan satu pengesahan kenaikan cadangan teknis yang diajukan oleh perusahaan.

B. Pengawasan Dana Pensiun

1. Analisis Laporan (*off-site supervision*)

Rekapitulasi penyampaian laporan bulanan Dana Pensiun pada triwulan III-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel II - 11 ◇ Penyampaian Laporan Bulanan Dana Pensiun

Jenis Dana Pensiun	Telah Menyampaikan			Belum Menyampaikan		
	Juli 2019	Agustus 2019	September 2019	Juli 2019	Agustus 2019	September 2019
Dana Pensiun Pemberi Kerja	196	197	195	6	4	5
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	22	23	22	3	2	3
Total	218	220	217	9	6	8

2. Pemeriksaan Langsung

Pada triwulan III-2019, OJK telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap enam Dana Pensiun, yaitu:

- Dana Pensiun PT Trakindo Utama
- Dana Pensiun Bank Mandiri Empat
- Dana Pensiun Danpera
- Dana Pensiun Pendidikan Cendekia Utama
- Dana Pensiun Eveready Indonesia
- Dana Pensiun BPD NTB

Terkait pemeriksaan tersebut, OJK menerbitkan delapan LHP Sementara (LHPS) dan 10 LHP Final (LHPF).

3. Pengenaan Sanksi

Pada triwulan III-2019, OJK telah mengenakan sanksi peringatan tertulis pertama kepada 15 Dana Pensiun, sanksi peringatan tertulis kedua kepada empat Dana Pensiun, sanksi peringatan tertulis ketiga kepada satu Dana Pensiun, teguran tertulis pertama kepada 15 Dana Pensiun, sanksi denda administrasi kepada 38 Dana Pensiun, dan pencabutan sanksi kepada empat Dana Pensiun.

C. Pengawasan BPJS Ketenagakerjaan

Selama triwulan III-2019, OJK menerima laporan berkala dari BPJS Ketenagakerjaan sebanyak sembilan laporan berkala yang terdiri dari tiga laporan pengelolaan program Dana Jaminan Sosial periode Juni-Agustus 2019 dan enam laporan keuangan bulanan periode Juni-Agustus 2019 masing-masing untuk Badan dan Dana Jaminan Sosial yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya, telah dilakukan audiensi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait penyampaian dan format laporan keuangan semesteran pada bulan Juni-Agustus 2019.

D. Pengawasan Lembaga Pembiayaan

1. Analisis Laporan Berkala (*off-site supervision*)

Selama triwulan III-2019, pengawasan *off-site* dilakukan dengan cara menganalisis laporan bulanan perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur untuk periode Juni-Agustus 2019.

Tabel II - 12 ◇ Penyampaian Laporan Bulanan Lembaga Pembiayaan

Jenis Laporan	Terlambat			Tidak Terlambat		
	Juni 2019	Juli 2019	Agustus 2019	Juni 2019	Juli 2019	Agustus 2019
LBPP	2	1	2	177	178	177
LBPMV	1	-	-	56	57	57
LBPPI	-	-	-	2	2	2

*J) LBPP: Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan, LBPMV: Laporan Bulanan Perusahaan Modal Ventura, LBPPI: Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

2. Pemeriksaan Langsung (On-site Supervision)

Pada triwulan III-2019, OJK telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap 18 Lembaga Pembiayaan, yang terdiri dari 14 Perusahaan Pembiayaan dan

empat Perusahaan Modal Ventura. Pemeriksaan terhadap perusahaan pembiayaan dilakukan dengan menerapkan *Risk Based Supervision* (RBS).

Tabel II - 13 ◇ Pemeriksaan (On-site Supervision) Lembaga Pembiayaan

No.	Nama Perusahaan	Jenis
1.	PT Sinarmas Hana Finance	Perusahaan Pembiayaan
2.	PT Sarana Sumut Ventura	Perusahaan Modal Ventura
3.	PT Pool Advista Finance	Perusahaan Pembiayaan
4.	PT Bintang Mandiri Finance	Perusahaan Pembiayaan
5.	PT Akulaku Finance Indonesia	Perusahaan Pembiayaan
6.	PT Selaparang Finansial	Perusahaan Modal Ventura
7.	PT Sarana Global Finance Indonesia	Perusahaan Pembiayaan
8.	PT MNC Guna Usaha Indonesia	Perusahaan Pembiayaan
9.	PT Karunia Multifinance	Perusahaan Pembiayaan
10.	PT Sarana NTB Ventura	Perusahaan Modal Ventura
11.	PT Artha Prima Finance	Perusahaan Pembiayaan
12.	PT Indosurya Inti Finance	Perusahaan Pembiayaan
13.	PT CIMB Niaga Auto Finance	Perusahaan Pembiayaan
14.	PT Anadana Global Multifinance	Perusahaan Pembiayaan
15.	PT Mandala Multifinance Cabang Ungaran Semarang	Perusahaan Pembiayaan
16.	PT Sarana Maluku Ventura	Perusahaan Modal Ventura
17.	PT Mega Finance Cabang Balikpapan	Perusahaan Pembiayaan
18.	PT First Indo American Leasing	Perusahaan Pembiayaan

Tabel II - 14 ◇ Penerbitan LHP Lembaga Pembiayaan

Kegiatan	Jumlah
LHPS telah dikirimkan	10
LHPF telah dikirimkan	9

3. Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi

Selama triwulan III-2019, OJK mengenakan 119 sanksi administratif terhadap lembaga pembiayaan yang terdiri dari sanksi peringatan pertama (SP 1), sanksi

peringatan kedua (SP 2), sanksi peringatan ketiga (SP 3), dan sanksi pembekuan kegiatan usaha.

4. Sosialisasi

Selama triwulan III-2019 telah dilakukan Sosialisasi Fidusia di Manado dan Banyuwangi. Peserta kegiatan sosialisasi adalah pimpinan atau perwakilan kantor cabang Perusahaan Pembiayaan. Sementara itu, pihak-pihak yang terlibat terdiri dari OJK, Asosiasi Perusahaan

Pembiayaan Indonesia, dan Kementerian Hukum dan HAM yang bertindak selaku narasumber. Selain itu OJK juga menyelenggarakan sosialisasi "Peningkatan Peran Perusahaan Pembiayaan dalam Percepatan Pengembangan Pariwisata" di Banyuwangi.

E. Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro

1. Pemberian Izin Usaha LKM

Pada triwulan III-2019, OJK memberikan izin usaha sebanyak 10 izin usaha sehingga terdapat 195 LKM yang terdiri dari 123 LKM Konvensional dan 72 LKM

Syariah. Cakupan wilayah usaha LKM paling banyak terdiri dari Kecamatan (118 LKM), Kabupaten/Kota (47 LKM) dan Desa/Kelurahan (30 LKM).

Tabel II - 15 ◇ Daftar LKM yang Mendapatkan Izin Usaha

No.	Nama LKM	Jenis Usaha	Asal Daerah
1.	Koperasi LKM Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Candi	Konvensional	Kabupaten Temanggung
2.	Koperasi LKMS BWM Bangkit Nusantara	Syariah	Kabupaten Rembang
3.	Koperasi LKM Agribisnis Bina Usaha	Konvensional	Kabupaten Purworejo
4.	Koperasi LKMS Manten Aman Makmur	Syariah	Kabupaten Blitar
5.	Koperasi LKMA Batu Taba Sepakat	Konvensional	Kabupaten Agam
6.	Koperasi LKMS Pensantren Hidayatulloh Trenggalek	Syariah	Kabupaten Trenggalek
7.	Koperasi LKMA Tri Asri Sejahtera	Konvensional	Kabupaten Grobogan
8.	Koperasi LKMS Bank Wakaf Mikro Babul Maghfirah	Syariah	Kabupaten Aceh Besar
9.	PT Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Desa Kabupaten Tulungagung	Konvensional	Kabupaten Tulungagung
10.	Koperasi LKMS Bitu Amanah Ummat	Syariah	Kabupaten Garut

2. Sosialisasi Undang-Undang LKM dan Pengembangan LKM

Dalam rangka mensosialisasikan Undang-undang LKM dan peraturan pelaksanaannya, serta pengembangan LKM, selama triwulan III-2019 OJK telah turut serta memenuhi undangan dalam berbagai acara, antara lain:

- Sinergi *Stakeholder* dengan LKM Provinsi Jawa Tengah di Solo.
- Pelatihan Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan LKM di Lampung.
- Sinergi Program Pembiayaan Pertanian Direktorat Pembiayaan Kementerian Pertanian.
- Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan dan Proses Bisnis LKM Provinsi Sumatera Barat di Padang
- Focus Group Discussion* Asistensi Peningkatan Pengawasan IKNB Daerah di Jakarta.
- Asistensi BKD Kelurahan Purwokerto di Kabupaten Banyumas.

3. Pelaksanaan Pendampingan Secara Langsung dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan LKM

OJK juga melaksanakan pelatihan bagi LKM konvensional di Tangerang, Banten. Materi pelatihan dititikberatkan pada aspek-aspek manajemen dan tata kelola LKM, analisis kredit dan penanganan kredit bermasalah, termasuk juga pengelolaan simpanan. Peserta pelatihan LKM terdiri dari empat LKM yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) di wilayah Banten, yaitu:

- PT LKM Artha Kertaraharja
- PT LKM Ciomas
- PT LKM Pandeglang Berkah
- PT LKM Rangkasbitung

Selain melakukan pelatihan dalam hal penyusunan laporan keuangan kepada LKM yang telah memperoleh izin usaha, OJK juga melakukan kegiatan pendampingan secara langsung.

Kegiatan pendampingan dilakukan untuk memastikan penyampaian laporan keuangan LKM sesuai dengan ketentuan serta untuk dapat memberikan evaluasi terhadap proses bisnis LKM. Selama triwulan III-2019, kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan LKM dilaksanakan kepada 15 LKM yang tersebar di beberapa daerah sebagai berikut:

Tabel II - 16 ◇ Pelaksanaan Pendampingan LKM

No.	Lokasi	Nama LKM
1.	Jambi	Koperasi LKMS Pondok Pesantren As'ad
2.	Pandeglang	PT LKM Pandeglang Berkah
3.	Lebak	Koperasi LKMS AI Manahij
4.	Sragen	1. Koperasi LKM Desa Bendo 2. Koperasi LKM Soko Rahayu 3. Koperasi LKM Murih Raharjo 4. Koperasi LKM Pondok Subur
5.	Sumatera Barat	Koperasi LKM Lembah Sarang Olang
6.	Malang	Koperasi LKMS Sinar Sukses Bersama
7.	Kediri	1. Koperasi LKMS Berkah Rizki Lirboyo 2. Koperasi LKMS Amanah Makmur Sejahtera
8.	Sumatera Utara	Koperasi LKMS Madani Emas Nusantara
9.	Probolinggo	Koperasi LKMS Usaha Mulia
10.	Yogyakarta	1. Koperasi LKMS BWM Almuna Berkah Mandiri 2. PT LKM Sedasa

F. Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus

Pada triwulan III-2019, OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap delapan Lembaga Keuangan Khusus sebagai berikut:

Pada triwulan III-2019, OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap delapan Lembaga Keuangan Khusus yang terdiri dari satu Perusahaan Penjaminan dan tujuh Perusahaan Pergadaian. Pemeriksaan langsung terhadap Lembaga Keuangan Khusus pada triwulan III-2019 sebagai berikut:

Tabel II - 17 ◇ Pemeriksaan Langsung Lembaga Keuangan Khusus

No.	Nama Perusahaan
1.	PT Indogold Solusi Gadai
2.	PT Jawa Barat Gadai
3.	PT Jamkrida Jakarta
4.	PT Solusi Gadai Mandiri
5.	PT DPM Gadai Sejahtera
6.	PT Jamkrida Riau
7.	PT Gadai Mitra Rakyat
8.	PT Jamkrida Jatim

Berdasarkan pemeriksaan langsung yang telah diselesaikan, telah diterbitkan sebanyak delapan Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara (LHPS) dan 15 Laporan Hasil Pemeriksaan Final (LHPF).

G. Pengawasan Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

Sampai dengan triwulan III-2019, pengawasan atas perusahaan jasa penunjang yang telah beroperasi dilakukan dengan:

1. Pemeriksaan tematik terhadap 41 Perusahaan Jasa Penunjang IKNB, yaitu sebanyak 26 pemeriksaan terhadap Perusahaan Pialang Asuransi, 11 Perusahaan Pialang Reasuransi, dan empat Perusahaan Penilaian Kerugian Asuransi, serta terdapat pemeriksaan cabang terhadap lima Perusahaan Pialang Asuransi.
2. Penerbitan 33 Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara (LHPS) dan 16 Laporan Hasil Pemeriksaan Final (LHPF) berdasarkan pemeriksaan tahun 2019, serta satu LHPS dan 21 LHPF berdasarkan pemeriksaan tahun 2018;
3. Pengenaan sanksi atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan perusahaan jasa penunjang sebanyak 74 sanksi yang terdiri dari 30 Sanksi Peringatan Pertama (SP1), 12 Sanksi Peringatan Kedua (SP2), enam Sanksi Peringatan Ketiga (SP3), 14 Sanksi Administratif berupa Denda, dan 12 Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (SPKU) pada periode triwulan III-2019.

H. Pengawasan Financial Technology (Fintech)

Selama triwulan III-2019, OJK memberikan tanda terdaftar kepada 15 Penyelenggara *Fintech Lending* dan izin usaha kepada 6 penyelenggara *Fintech Lending*, sehingga jumlah penyelenggara *Fintech Lending* sampai dengan triwulan III-2019 adalah 114 penyelenggara terdaftar dan 13 penyelenggara berizin.

Tabel II - 18 ◇ Penyelenggara *Fintech P2P Lending* Terdaftar dan Berizin Usaha

No.	Nama Platform	Jenis Industri	Status
1.	Modalku	PT Mitrausaha Indonesia Grup	Berizin Usaha
2.	KTA Kilat	PT Pendanaan Teknologi Nusa	Berizin Usaha
3.	Kredit Pintar	PT Kredit Pintar Indonesia	Berizin Usaha
4.	Maucash	PT Astra Welab Digital Artha	Berizin Usaha
5.	Finmas	PT Oriente Mas Sejahtera	Berizin Usaha
6.	KlikACC	PT Aman Cermat Cepat	Berizin Usaha
7.	qazwa.id	PT Qazwa Mitra Hasanah	Terdaftar
8.	bsalam	PT Maslahat Indonesia Mandiri	Terdaftar
9.	Onehope	PT Teknologi Indonesia Sentosa	Terdaftar
10.	LadangModal	PT Digital Yinshan Technology	Terdaftar
11.	Dhanapala	PT Semangat Gotong Royong	Terdaftar
12.	Restock	PT Cerita Teknologi Indonesia	Terdaftar
13.	Solusiku	PT Anugrah Digital Indonesia	Terdaftar
14.	Pinjamdisini	PT Pendanaan Gotong Royong	Terdaftar
15.	AdaPundi	PT Info Tekno Siaga	Terdaftar
16.	Tree+	PT Satrio Jaya Persada	Terdaftar
17.	Assetkita	PT Assetku Mitra Bangsa	Terdaftar
18.	Edufund	PT Fintech Bina Bangsa	Terdaftar
19.	Finanku	PT Smart Karya Digital	Terdaftar
20.	Tunasaku	PT Digital Quantum Tek	Terdaftar
21.	Uatas	PT Plus Ultra Abadi	Terdaftar

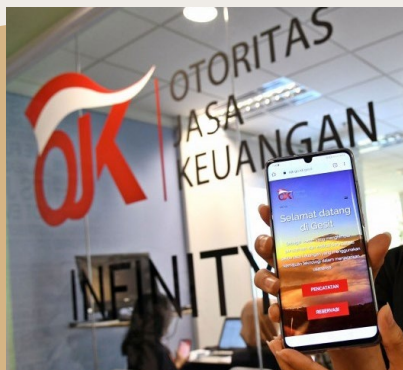
Penerapan *Supervisory Technology* untuk Pengawasan dan Pengembangan Ekosistem *Fintech*



OJK mulai menerapkan *Supervisory Technology* (*SupTech*) untuk mengembangkan ekosistem perusahaan *financial technology* (*fintech*) yang masuk dalam ranah Inovasi Keuangan Digital (IKD).

Penerapan *SupTech* di IKD ditandai dengan peresmian laman mini di portal OJK yang diberi nama Gerbang Elektronik Sistem Informasi Keuangan Digital (*Gesit*) sebagai media interaksi antara OJK, penyelenggara IKD dan masyarakat.

Gesit merupakan bentuk awal dari pengembangan *SupTech* untuk IKD. *SupTech* nantinya menjadi alat pemantauan terhadap penyelenggara yang telah terdaftar di OJK dengan mempergunakan teknologi. *SupTech* ditujukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemantauan terhadap Penyelenggara terkait aspek kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.



OJK berkomitmen mendukung perkembangan sektor keuangan digital secara utuh dan berkelanjutan, dengan memberikan layanan yang efektif, efisien, dan bermanfaat serta mendukung peningkatan inklusi keuangan dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

I. Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB

Pada triwulan III-2019, OJK menerima 1.556 permohonan dan pelaporan kelembagaan IKNB. Rincian permohonan

perizinan kelembagaan IKNB selama triwulan III-2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel II - 19 ◇ Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Kelembagaan IKNB

Kegiatan	Permohonan			Selesai	Telah Dianalisis & Ditanggapi*)	Dalam Proses Analisis	Dokumen Dikembalikan
	Outstanding s.d. Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Jumlah				
Pemberian Izin Usaha/ Pendaftaran	32	16	48	14	20	10	4
Pencabutan Izin Usaha	21	1	22	16	6	-	-
Likuidasi	33	8	41	20	16	5	-
Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan	29	7	36	12	8	8	8
Perubahan Kepemilikan/AD/ Modal/PS/PDP	254	82	336	165	116	49	6
Perubahan Nama	7	3	10	9	-	-	1
Kantor Cabang	367	201	568	474	54	40	-
Kantor Pemasaran dan Kantor Selain Kantor Cabang	663	210	873	829	15	29	-
Produk	878	366	1.244	1.113	117	14	-
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	766	338	1.104	664	211	60	169
Pelaporan Pengurus	381	190	571	513	44	14	-
Pelaporan Syarat Keberlanjutan	135	13	148	148	-	-	-
Pelaporan Pengangkatan Tenaga Ahli, Aktuaris, dan Auditor Internal	121	85	206	154	13	39	-
Pelaporan Pengangkatan Tenaga Kerja Asing	97	36	133	125	4	4	-
Total	3.784	1.556	5.340	4.256	624	272	188

*) Dalam proses meliputi permintaan kelengkapan dokumen, menunggu penjadwalan penilaian kemampuan dan kepatutan (PKK) atau masih proses analisis

1. Pemberian dan Pencabutan Izin Usaha/Pendaftaran

Pada periode triwulan III-2019 OJK menyelesaikan 20 permohonan pemberian izin usaha IKNB dan satu permohonan pencabutan izin usaha, yaitu permohonan pembubaran Dana Pensiun.

Adapun 16 izin usaha yang telah ditetapkan pencabutannya sampai dengan triwulan III-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel II - 20 ◇ Pencabutan Izin IKNB

No.	Nama Perusahaan	Jenis Industri
1.	Dana Pensiun Citas Otis Elevator	Dana Pensiun
2.	Dana Pensiun Dystar Colours Indonesia Iuran Pasti	Dana Pensiun
3.	Dana Pensiun Avrist	Dana Pensiun
4.	PT Ventura Tunai Capital	Perusahaan Modal Ventura
5.	PT Nusa Makmur Ventura	Perusahaan Modal Ventura
6.	PT Suwadana Venture Capital	Perusahaan Modal Ventura
7.	PT Ventura Cakrawala Investama	Perusahaan Modal Ventura
8.	PT Evolusi Finansial Indonesia (d/h PT Swadesi Finance)	Perusahaan Pembiayaan

9.	PT Sumber Artha Mas Finance	Perusahaan Pembiayaan
10.	PT Asuransi Himalaya Pelindung	Perusahaan Asuransi Umum
11.	PT Sejahtera Pertama Multifinance	Perusahaan Pembiayaan
12.	PT Modal Nusantara Ventura	Perusahaan Modal Ventura
13.	DPLK Pasaraya	Dana Pensiun
14.	Dana Pensiun BOC	Dana Pensiun
15.	Dana Pensiun IPTN	Dana Pensiun
16.	Dana Pensiun South Pacific Viscose	Dana Pensiun

Sampai dengan triwulan III-2019, jumlah IKNB konvensional adalah sebanyak 655 perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 21 ◇ Jumlah IKNB Konvensional

Jenis industri	Jumlah
I. Asuransi dan Reasuransi	
1. Asuransi Jiwa	53
2. Asuransi Umum	74
3. Reasuransi	6
4. Penyelenggara Program Asuransi Sosial & BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan	3
5. Penyelenggara Asuransi untuk PNS, TNI dan POLRI	2
Total Asuransi dan Reasuransi	138
II. Dana Pensiun	
1. DPPK PPIP	41
2. DPPK PPMP	161
3. DPLK	25
Total Dana Pensiun	227
III. Lembaga Pembiayaan	
1. Perusahaan Pembiayaan	180
2. Modal Ventura	57
3. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	2
Total Lembaga Pembiayaan	239
IV. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	
1. Perusahaan Penjaminan	22
2. Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan / PT SMF	1
3. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia / Indonesia Eximbank	1
4. Perusahaan Pegadaian / PT Pegadaian (Persero)- Izin usaha	27
Total Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	51
TOTAL LJKNB (Konvensional)	655

OJK menerima satu permohonan terkait proses likuidasi Perusahaan Asuransi Jiwa dan 18 permohonan terkait proses likuidasi Perusahaan Asuransi Jiwa.

2. Pengambilalihan (Akuisisi)

OJK menyetujui satu permohonan peleburan Perusahaan Pembiayaan, satu permohonan pengambilalihan Perusahaan Asuransi Umum, dan

lima permohonan pengambilalihan Perusahaan Pembiayaan.

Selain itu, OJK memberikan persetujuan kepada permohonan penggabungan Perusahaan Pembiayaan, yaitu untuk PT Verena Multifinance Tbk dan PT IBJ Verena Finance dengan PT Verena Multifinance Tbk sebagai *surviving entity*, sedangkan permohonan pengambilalihan

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pembiayaan yang telah disetujui sampai dengan triwulan III-2019, yaitu:

Tabel II - 22 ◇ Persetujuan Pengambilalihan IKNB

No.	Nama Perusahaan	Jenis Industri
1.	PT Asuransi AXA Indonesia	Perusahaan Asuransi Umum
2.	PT Asuransi Parolamas	Perusahaan Asuransi Umum
3.	PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur	Perusahaan Asuransi Umum
4.	PT Asuransi Adira Dinamika	Perusahaan Asuransi Umum
5.	PT Radana Bhaskara Finance Tbk	Perusahaan Pembiayaan

3. Perubahan Kepemilikan Perusahaan/Perubahan Anggaran Dasar/Perubahan Pemegang Saham/Perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP)

Sampai dengan triwulan III-2019 telah diselesaikan 165 persetujuan/pencatatan/pengesahan sebagai berikut:

Tabel II - 23 ◇ Rekapitulasi Perubahan Kepemilikan Perusahaan/Perubahan Anggaran Dasar/Perubahan Pemegang Saham/Perubahan PDP IKNB

IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Ditanggapi*	Proses Analisis	Dokumen Dikembalikan
	Outstanding s.d. Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Total				
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	28	11	39	22	12	5	-
Perusahaan Asuransi Jiwa	25	12	37	24	2	6	5
Dana Pensiun	67	7	74	28	44	2	-
Perusahaan Pembiayaan	78	38	116	57	37	21	1
Perusahaan Modal Ventura	42	11	53	23	17	13	-
Perusahaan Penjaminan	11	3	14	9	3	2	-
Perusahaan Pergadaian	2	-	2	2	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	1	-	1	-	1	-	-
Total	254	82	336	165	116	49	6

*j) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

4. Perubahan Nama

Pada triwulan III-2019, OJK menerima tiga pelaporan perubahan nama IKNB dengan rincian Pelaporan perubahan nama yang telah ditetapkan oleh OJK, yaitu:

- PT Asuransi Jiwa Starinvestama (d/h PT Asuransi Jiwa Recapital);
- PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia (d/h PT Asuransi Asoka Mas);

- PT BRI Ventura Investama (d/h PT Sarana NTT Ventura);
- PT Sejahtera Bahtera Finance (d/h PT Sejahtera Pertama Multifinance);
- PT Jtrust Olympindo Multi Finance (d/h PT Olympindo Multi Finance); dan
- PT Great Eastern General Insurance Indonesia (d/h PT QBE General Insurance Indonesia);

- g. PT BCA Multi Finance (d/h PT Central Sentosa Finance);
- h. PT Fuji Finance Indonesia Tbk (d/h PT Fuji Finance Indonesia); dan
- i. PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk (d/h PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG).

5. Kantor di Luar Kantor Pusat (Kantor Cabang dan Kantor Pemasaran)

Sampai dengan triwulan III-2019, 474 pelaporan telah diselesaikan. Rincian pelaporan kantor cabang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 24 ◇ Rekapitulasi Pelaporan Kantor di Luar Kantor Pusat IKNB

IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Ditanggapi*	Proses Analisis	Dokumen Dikembalikan
	Outstanding s.d. Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Total				
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi							
- Pembukaan Kantor Cabang	6	5	11	8	3	-	-
- Penutupan Kantor Cabang	6	-	6	6	-	-	-
- Perubahan Alamat	21	4	25	23	2	-	-
- Pencatatan Perubahan Alamat Kantor Pusat	3	1	4	4	-	-	-
Subtotal	36	10	46	41	5	-	-
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi							
- Pembukaan Kantor Cabang	-	-	-	-	-	-	-
- Penutupan Kantor Cabang	1	-	1	1	-	-	-
- Perubahan Alamat	-	-	-	-	-	-	-
- Pencatatan Perubahan Alamat Kantor Pusat	4	2	6	6	-	-	-
Subtotal	5	2	7	7	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan							
- Pembukaan Kantor Cabang	69	40	109	78	23	8	-
- Penutupan Kantor Cabang	47	11	58	43	9	6	-
- Perubahan Alamat	157	91	248	219	14	15	-
Subtotal	273	142	415	340	46	29	-
Perusahaan Modal Ventura							
- Pembukaan Kantor Cabang	24	39	63	54	-	9	-
- Penutupan Kantor Cabang	3	-	3	2	1	-	-
- Perubahan Alamat	17	8	25	23	-	2	-
Subtotal	44	47	91	79	1	11	-
Perusahaan Modal Ventura							
- Pembukaan Kantor Cabang	1	-	1	1	-	-	-
- Penutupan Kantor Cabang	-	-	-	-	-	-	-
- Perubahan Alamat	8	-	8	6	2	-	-
Subtotal	9	-	9	7	2	-	-
Total	367	201	568	474	54	40	-

*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

Sementara itu, sampai dengan triwulan III-2019, OJK menerima 210 pelaporan pembukaan, penutupan dan perubahan alamat kantor pemasaran Perusahaan

Asuransi dan kantor selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan. Rincian pelaporan kantor selain kantor cabang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 25 ◇ Rekapitulasi Pelaporan Kantor Pemasaran Perusahaan Asuransi dan Kantor Selain Kantor Cabang IKNB

IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Ditanggapi*	Proses Analisis
	Outstanding s.d. Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Total			
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi						
- Pembukaan KLKP	34	30	64	62	2	-
- Penutupan KLKP	16	11	27	27	-	-
- Perubahan Alamat KLKP	28	5	33	32	1	-
- Perubahan Pimpinan KLKP	-	-	-	-	-	-
Subtotal	78	46	124	121	3	-
Perusahaan Asuransi Jiwa						
- Pembukaan KLKP	43	38	81	76	4	1
- Penutupan KLKP	25	16	41	41	-	-
- Perubahan Alamat KLKP	24	12	36	33	3	-
- Perubahan Pimpinan KLKP	1	-	1	1	-	-
Subtotal	93	66	159	151	7	1
Perusahaan Pembiayaan						
- Pembukaan KSKC	420	31	451	431	4	16
- Penutupan KSKC	29	38	67	66	-	-
- Perubahan Alamat KSKC	43	29	72	60	1	11
Subtotal	492	98	590	557	5	28
Total	663	210	873	829	15	29

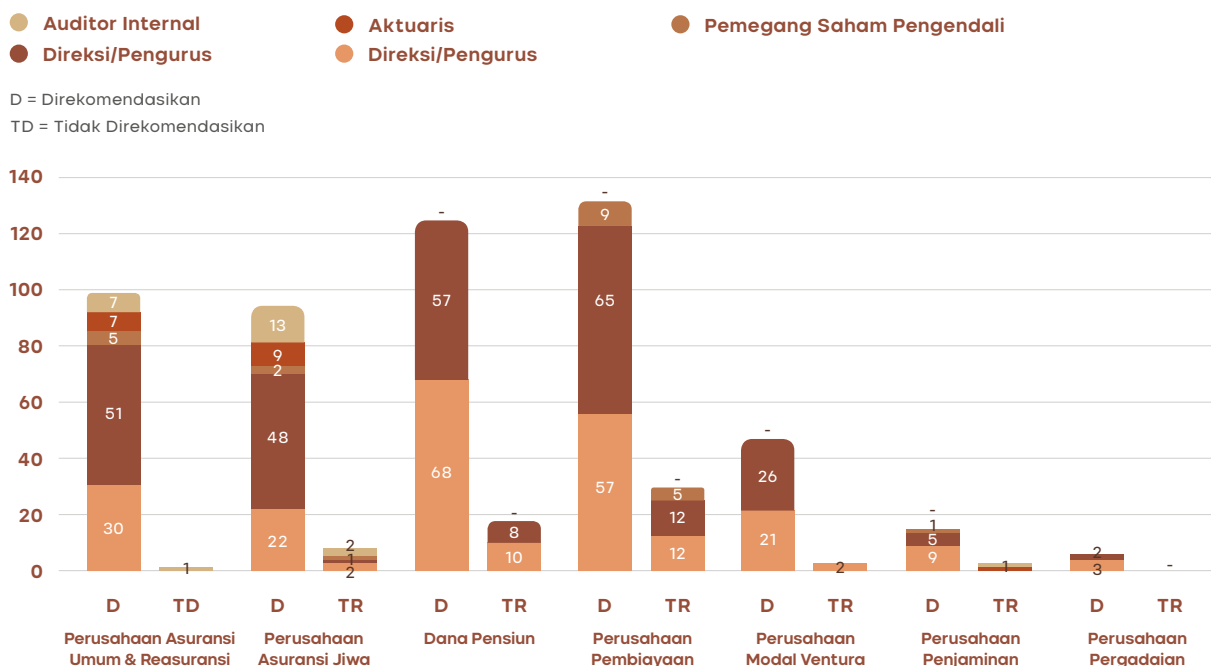
*J) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

6. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama IKNB

Pada triwulan III-2019, terdapat 338 permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) disertai dengan 766 yang merupakan outstanding dari triwulan sebelumnya. Sampai dengan triwulan III-2019, permohonan yang telah diselesaikan adalah sebanyak 664 permohonan, sementara

itu sebanyak 271 permohonan masih menunggu proses penetapan, penjadwalan, dan kelengkapan dokumen, dan sebanyak 169 permohonan dikembalikan karena tidak sesuai ketentuan dan termasuk karena dibatalkan oleh perusahaan.

Grafik II - 2 ◇ Hasil Penilaian Kemampuan dan Kematangan



7. Pelaporan Perubahan Pengurus IKNB

Selama triwulan III-2019, terdapat 190 pelaporan perubahan pengurus IKNB, disertai dengan sebanyak 381 pelaporan yang merupakan *outstanding* dari triwulan sebelumnya. Berdasarkan jumlah dimaksud, sebanyak 513 pelaporan telah

dicatat dan sebanyak 58 sisanya telah ditanggapi dan dalam proses analisis. Rincian pelaporan perubahan pengurus IKNB dari masing-masing industri disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 26 ◇ Rekapitulasi Pelaporan Perubahan Pengurus IKNB

IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Ditanggapi*	Proses Analisis
	<i>Outstanding s.d. Triwulan II-2019</i>	Triwulan III-2019	Total			
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	48	30	78	69	-	9
Perusahaan Asuransi Jiwa	49	22	71	66	-	5
Dana Pensiun	189	61	250	206	44	-
Perusahaan Pembiayaan	71	54	125	125	-	-
Perusahaan Modal Ventura	17	13	30	30	-	-
Perusahaan Penjaminan	7	10	17	17	-	-
Total	381	190	571	513	44	14

*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

8. Pelaporan Syarat Keberlanjutan Pengurus IKNB

Pada triwulan III-2019, terdapat 13 pelaporan syarat keberlanjutan pengurus IKNB serta 135 pelaporan yang merupakan *outstanding* dari periode sebelumnya. Pelaporan dimaksud telah

diselesaikan seluruhnya pada periode yang sama. Rincian pelaporan syarat keberlanjutan pengurus IKNB dari masing-masing industri disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 27 ◇ Rekapitulasi Pelaporan Syarat Keberlanjutan Pengurus IKNB

IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Ditanggapi*	Proses Analisis
	Outstanding s.d. Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Total			
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Asuransi Jiwa	-	-	-	-	-	-
Dana Pensiun	95	5	100	100	-	-
Perusahaan Pembiayaan	40	8	48	48	-	-
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Penjaminan	-	-	-	-	-	-
Total	135	13	148	148	-	-

*] Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

9. Pelaporan Aktuaris dan Auditor Internal

Selama triwulan III-2019, terdapat 85 pelaporan tenaga ahli, aktuaris dan auditor internal yang seluruhnya merupakan tenaga ahli dari Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Jiwa. Selain itu, pelaporan tenaga ahli, aktuaris dan auditor internal yang merupakan *outstanding*

dari periode sebelumnya sebanyak 121 pelaporan. Berdasarkan jumlah dimaksud, jumlah pelaporan tenaga ahli, aktuaris dan auditor internal yang telah dicatat sebanyak 154 pelaporan. Rincian pelaporan aktuaris dan auditor internal dari masing-masing industri disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 28 ◇ Rekapitulasi Pelaporan Aktuaris dan Auditor Internal

IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Ditanggapi*	Proses Analisis
	Outstanding s.d. Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Total			
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi						
- Tenaga Ahli dan Aktuaris	60	66	126	83	11	32
- Auditor Internal	10	6	16	12	1	3
Subtotal	70	72	142	95	12	35
Perusahaan Asuransi Jiwa						
- Tenaga Ahli dan Aktuaris	36	9	45	41	1	3
- Auditor Internal	15	4	19	18	-	1
Subtotal	51	13	64	59	1	4
Total	121	85	206	154	13	39

*] Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

10. Pelaporan Tenaga Kerja Asing

Pada triwulan III-2019, terdapat 36 pelaporan penggunaan tenaga kerja asing dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Modal Ventura, serta terdapat 97 pelaporan yang

merupakan *outstanding* dari periode sebelumnya. Adapun rincian pelaporan tenaga kerja asing dari masing-masing industri disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 29 ◇ Rekapitulasi Pelaporan Tenaga Kerja Asing IKNB

IKNB	Permohonan			Selesai	Telah Ditanggapi*	Proses Analisis
	Outstanding s.d. Triwulan II-2019	Triwulan III-2019	Total			
Perusahaan Asuransi Umum dan Reasuransi	23	4	27	26	-	1
Perusahaan Asuransi Jiwa	50	13	63	56	4	3
Dana Pensiun	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan	23	19	42	42	-	-
Perusahaan Modal Ventura	1	-	1	1	-	-
Perusahaan Penjaminan	-	-	-	-	-	-
Total	97	36	125	125	4	4

*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB

11. Pelayanan Kelembagaan Jasa Penunjang IKNB

Selama triwulan III-2019, OJK menerima permohonan terkait Kelembagaan Jasa Penunjang IKNB sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel II - 30 ◇ Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Kelembagaan Jasa Penunjang IKNB

No.	Jenis Layanan	Permohonan Triwulan II-2019	Outstanding Triwulan II-2019	Status			
				Selesai	Proses*	Batal	Pengembalian Dokumen**
1.	Pemberian Izin Usaha	1	1	-	1	1	-
2.	Perubahan Nama	2	1	-	3	-	-
3.	Perubahan Kepemilikan	16	46	13	48	-	1
4.	Penambahan Modal	4	12	3	12	1	-
5.	Perubahan Pengurus	22	65	21	59	2	5
6.	Perubahan Alamat	8	15	7	16	-	-
7.	Pembukaan Kantor Cabang/ Perwakilan	2	3	3	2	-	-
8.	Pendaftaran Tenaga Ahli	25	30	17	36	2	-
9.	Pendaftaran Pialang Asuransi	19	14	20	10	3	-
10.	Pendaftaran Pialang Reasuransi	11	1	8	3	-	1
11.	Rekomendasi Tenaga Kerja Asing	-	1	1	-	-	-

*) Dalam proses meliputi permintaan kelengkapan dokumen, menunggu penjadwalan penilaian kemampuan dan kepatutan (PKK) atau masih proses analisis

**) Pengembalian dokumen dilakukan apabila dokumen yang disampaikan pihak pemohon (perusahaan) belum sesuai dengan yang dipersyaratkan dan harus dilengkapi secara benar jika permohonan ingin diproses

Sampai dengan triwulan III-2019 jumlah Akuntan Publik, Konsultan Aktuaria, dan Penilai yang berkegiatan di IKNB tersaji sebagai berikut:

Tabel II - 31 ◇ Pendaftaran Profesi

Jenis Profesi	Jumlah Profesi yang Teraftar pada Triwulan III-2019	Total Jumlah Profesi Teraftar
Akuntan Publik	8	416
Konsultan Aktuaria	1	32
Penilai	10	182
Total	19	630

Berdasarkan data laporan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), jumlah Agen Asuransi Umum bertambah sebanyak 610 orang dan 18.681 orang

untuk Agen Asuransi Jiwa. Sementara itu, jumlah Agen Penjamin Berbadan Hukum bertambah sebanyak 4 orang per triwulan III-2019.

Tabel II - 32 ◇ Pendaftaran Agen Asuransi dan Agen Penjamin

Jenis Profesi	Jumlah Agen Teraftar sampai dengan Triwulan II-2019
Agen Asuransi Perseorangan	
- Asuransi Umum	20.716
- Asuransi Jiwa	603.605
Agen Asuransi Berbadan Hukum	6
Agen Penjamin Perseorangan	59
Agen Penjamin Berbadan Hukum	54

Penetapan hasil Pengujian Kemampuan dan Keputusan sepanjang triwulan III-2019 terlampir sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel II - 33 ◇ Jumlah Penetapan Hasil Pengujian Kemampuan dan Keputusan (PKK)

Jabatan	Pelaksanaan PKK Triwulan III-2019		Jumlah
	Disetujui	Tidak Disetujui	
Pemegang Saham Pengendali	7	-	7
Komisaris	18	2	20
Direksi	22	3	25
Total	47	5	52

Pada triwulan III-2019 terdapat pencabutan izin usaha terhadap satu Perusahaan Pialang Asuransi, sehingga jumlah Perusahaan Penunjang Usaha

Perasuransian pada triwulan III-2019 adalah 233 perusahaan dengan rincian seperti pada tabel berikut:

Tabel II - 34 ◇ Jumlah Perusahaan Penunjang Berdasarkan Jenis Usaha

No.	Jabatan	Sampai dengan Triwulan III-2019	Pelaksanaan PKK Triwulan III-2019		Jumlah
			Disetujui	Tidak Disetujui	
1.	Pialang Asuransi	163	1	1	163
2.	Pialang Reasuransi	43	-	-	43
3.	Jasa Penilai Kerugian	27	-	-	27
	Total	233	2	1	233

2.3 AKTIVITAS PENGEMBANGAN

2.3.1 Pengembangan Industri Perbankan

A. Pengembangan Bank Umum

Pengembangan pengawasan Bank Umum pada triwulan III-2019, mencakup antara lain:

1. Penguatan pengawasan berbasis Teknologi Informasi, berupa aplikasi OJK-BOX dan *Condensed Report* dengan melakukan sosialisasi dan *capacity building* kepada pengawas dan Bank;
2. Penyusunan pedoman koordinasi untuk internal Pengawas Bank dengan satuan kerja yang memiliki fungsi investigasi Bank dalam menindaklanjuti penyimpangan ketentuan perbankan yang dilakukan oleh Bank; dan
3. Penyusunan Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang pengawasan APU dan PPT bagi bank umum untuk memperkuat standar pengawasan bank umum terkait APU dan PPT.

Dalam upaya peningkatan pemahaman mengenai peran OJK dalam penanganan dugaan tipibank, manajemen risiko dalam kegiatan operasional bank, serta penerapan strategi *anti fraud*, pada triwulan III-2019 telah dilakukan sosialisasi Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan kepada industri perbankan (Bank Umum dan BPR) di provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, juga dilakukan sosialisasi kepada mahasiswa di Universitas Sriwijaya dan Universitas Muhammadiyah Palembang.

B. Pengembangan BPR/BPRS

Pada triwulan III-2019, kegiatan pengembangan pengawasan BPR dan/atau BPRS yang telah dilakukan yaitu meliputi:

1. Penyusunan Rancangan SEDK tentang Perubahan atas SEDK No.2/SEDK.03/2019 tentang Pedoman Pengawasan Penerapan Program APU dan PPT Berdasarkan Risiko bagi BPR dan BPRS. Berdasarkan *mock interview* bersama TA IMF dalam rangka persiapan menghadapi MER FATF pada tahun 2020, salah satu yang menjadi perhatian adalah perbedaan *tools* penilaian sektor perbankan dengan sektor lainnya, sehingga diperlukan perubahan pada SEDK dimaksud dalam rangka penyeragaman formulasi penilaian tingkat risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) dengan formulasi pada sektor Pasar Modal dan IKNB. Hingga saat ini, rancangan SEDK perubahan dimaksud sedang dalam proses finalisasi.
2. Pengembangan lanjutan bahan *user requirement* pengembangan Sistem Informasi Pengawasan BPR (SIP BPR) untuk modul perencanaan pengawasan BPR berdasarkan risiko. Bahan *user requirement* ini merupakan dasar dalam pengembangan sistem

aplikasi SIP BPR modul perencanaan pengawasan BPR berdasarkan risiko.

3. Penyelesaian Standar Prosedur Operasional (SPO) Pengawasan BPR. SPO dimaksud ditujukan untuk dapat menjadi petunjuk teknis bagi Pengawas BPR. Proses penyusunan dan pengkinian SPO akan dilakukan secara bertahap. Pada triwulan III-2019, SPO yang telah diselesaikan yaitu:
 - a. SPO terkait Ketentuan Laporan Bulanan BPR, Laporan Publikasi BPR, Laporan Tahunan BPR; dan
 - b. SPO terkait Rencana Bisnis BPR

2.3.2 Pengembangan Industri Pasar Modal

A. Kajian Pasar Modal

1. Kajian Stratifikasi Perusahaan Efek

Tujuan studi ini adalah untuk mendapatkan strata PE dan kegiatannya sesuai dengan modal dan risiko serta efisiensi, spesialisasi dan sinergi pelaku pasar yang mendorong perkembangan industri yang sehat.

2. Kajian Master Plan Perusahaan Efek

Tujuan studi ini adalah untuk melakukan pemetaan isu, potensi dan tantangan terkait regulasi dan kebijakan, internal proses bisnis, dan infrastruktur pasar yang dihadapi oleh Perusahaan Efek (PEE & PPE).

3. Kajian tentang Code of Conduct Perusahaan Pemeringkat Efek (Revisi POJK 51/2015) tentang Perilaku Perusahaan Pemeringkat Efek

Kajian ini membahas mengenai kecukupan dan kesesuaian *Code of Conduct* yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek di Indonesia dengan IOSCO *Code of Conduct Fundamentals Credit Rating Agency* tahun 2015, IOSCO *Statement of Principles regarding the Activities of Credit Rating Agencies*, dan *Methodology for Assessing Implementation of the IOSCO Objectives and Principles of Securities Regulation: Principle 22* dan aplikasinya dalam praktik bisnis pemeringkatan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

4. Kajian Gap Analysis Ketentuan Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek (PAPE Bab 3 tentang Akuntansi Perantara Pedagang Efek

Kajian ini merupakan komitmen OJK atas revisi yang perlu dilakukan pada PAPE yaitu terkait perubahan PAPE sebelum dilakukannya revisi PAPE secara keseluruhan. Kajian usulan perubahan PAPE tersebut dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan mengingat ruang lingkup pengaturan PAPE yang cukup luas. Terkait kajian tersebut, direncanakan akan dilakukan:

- a. Kajian perubahan PAPE terkait Akuntansi Manajer Investasi, dan
- b. Kajian *gap analysis* ketentuan PAPE Bab 3 tentang Akuntansi Perantara Pedagang Efek

5. Kajian Akuntan Publik dalam Rangka Perlindungan Investor Reksa Dana

Mengingat lemahnya posisi investor dalam mengetahui validitas NAB, NAB yang ditransaksikan dan Informasi dalam *fund fact sheet* maka perlu dikaji apakah diperlukan peran pihak yang independen agar kebenaran informasi-informasi tersebut lebih dapat dipercaya.

Adapun tujuan dari kajian adalah:

- a. Memperoleh informasi dari investor Reksa Dana terkait:
 1. Informasi yang dibutuhkan investor dalam pengambilan keputusan investasi;
 2. Area-area dalam setiap industri Reksa Dana yang paling memerlukan pengawasan; dan
 3. Informasi penting menurut investor yang memerlukan keterlibatan Akuntan Publik.
- b. Mengidentifikasi peraturan keterbukaan informasi dan keterlibatan Akuntan Publik dalam Reksa Dana di Indonesia dengan negara pembanding (USA, UK, Hong Kong)

6. Kajian Penerapan Standar Akuntansi Keuangan dalam Mengadopsi IFRS Secara Penuh (SAK Full IFRS) di Indonesia

Latar belakang kajian ini adalah wacana Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) untuk menambah pilar standar akuntansi yaitu SAK *Full IFRS*. SAK *Full IFRS* adalah SAK berbasis IFRS tanpa adanya gap waktu, tanpa adanya penyesuaian dengan kondisi di Indonesia, serta tanpa adanya SAK non-IFRS dan SAK Syariah. Dalam rangka menanggapi wacana DSAK IAI tersebut, perlu adanya suatu kajian untuk mengetahui kesiapan Indonesia dalam menerapkan SAK *Full IFRS*, terutama dari sisi regulator.

Terdapat tiga tujuan dalam penyusunan kajian ini, yaitu:

- a. Mengetahui perubahan standar yang akan terjadi apakah SAK berlaku saat ini (SAK konvergensi) memiliki perbedaan material dengan IAS/IFRS, dengan melakukan gap analysis SAK dengan IAS/IFRS;
- b. Mengetahui bagaimana penerapan IAS/IFRS di negara lain, dengan melakukan perbandingan penerapan IAS/IFRS di negara lain; dan
- c. Mengetahui perusahaan di Indonesia yang berpotensi menggunakan SAK *Full IFRS*.

B. Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu (SEPMT)

Pada triwulan III-2019, OJK melaksanakan sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu di Makassar, Yogyakarta dan Medan dengan rangkaian kegiatan mencakup:

1. Seminar Reksa Dana
2. Pendalaman Materi Pasar Modal
3. *Workshop Go Public*

4. *Media Gathering* bersama Wartawan
5. Arah Kebijakan Pasar Modal 2019
6. *Bilateral Meeting* dengan Calon Emiten Potensial
7. *Breakfast Meeting* dengan Pemilik/Pengendali Kelompok Usaha

Selain itu, OJK juga melakukan beberapa kegiatan lainnya, antara lain:

1. Seminar Pembiayaan Sektor Riil dan infrastruktur melalui Reksa Dana Penyertaan Terbatas, Dana Investasi Infrastruktur, dan Obligasi Daerah.
2. Seminar "Reksa Dana Sebagai Investasi Masa Depan yang Mudah dan Terjangkau"
3. Sosialisasi POJK Nomor 17/POJK.04/2019 tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana di Jakarta
4. Diseminasi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) revisi atau baru yang diterbitkan sampai dengan 31 Desember 2018 dan berlaku efektif per 1 Januari 2020.

C. Penguatan Infrastruktur Pasar Modal

Dalam rangka pembenahan untuk memperkuat performa Pasar Modal, OJK bersama SRO menginisiasi pengembangan infrastruktur Pasar Modal, yaitu:

1) Pengembangan Infrastruktur Pasar Repo - *Tri Party Repo*

Pengembangan sistem *third party* repo bertujuan untuk mengembangkan model bisnis dan sistem repo yang efektif dan efisien serta dapat diaplikasikan oleh pelaku pasar. KPEI sebagai *third party* menyediakan layanan *back-office* atas transaksi repo yang sudah dilakukan para partisipan dalam pengelolaan agunan, *mark to market* dan *margin management*. Berdasarkan hasil rapat koordinasi antara OJK-SRO, dapat ditetapkan bahwa:

- a) Sistem telah *live* dan memasuki tahap implementasi bisnis, yaitu sosialisasi ke pelaku untuk pemanfaatan sistem *Triparty Repo*
- b) Anggota Kliring yang akan menggunakan sistem *triparty* dalam tahap pengajuan sebagai partisipan (*workshop*, pemenuhan administrasi)

2) Dukungan Pendirian Perusahaan Efek Daerah (PED)

Dalam rangka mendukung program pendirian PED, telah disusun kajian mekanisme bisnis SRO guna mendukung pembentukan serta operasional PED. Saat ini telah dilakukan pembuatan kajian infrastruktur PED, sosialisasi kepada pihak terkait, FGD terkait konsep PED, pengembangan infrastruktur, serta pengembangan BOFIS PED untuk membahas kesiapan Sponsor PED.

3) *Electronic Book Building*

Dalam rangka Meningkatkan kemudahan akses investor untuk berpartisipasi dalam Pasar Perdana baik dalam pembentukan harga maupun Penawaran

Umum; Meningkatkan kepercayaan investor terhadap proses Penawaran Umum dan harga IPO yang telah ditetapkan serta Memperluas partisipasi Perusahaan Efek sebagai *selling agent* dalam proses Penawaran Umum maka diinisiasi proyek *Electronic Book Building*. Adapun progress pengembangan sampai saat ini yaitu telah dilakukan finalisasi RPOJK EBB dan RSE OJK EBB IPO Saham serta penyusunan konsep *User manual* dan perjanjian SLA dengan SRO.

4) Sistem Penyampaian Dokumen Pencatatan Secara Elektronik (E-Registration)

Dalam rangka peningkatan efisiensi dan kecepatan dalam proses evaluasi Penawaran Umum dan Pencatatan serta kebutuhan untuk memudahkan akses penyampaian dokumen yang relatif sejenis, OJK menginisiasi sistem yang dapat digunakan oleh Calon Emiten dan *Underwriter* dalam melakukan penyampaian Pernyataan Pendaftaran ke OJK dan Permohonan Pencatatan kepada BEI satu pintu dan terintegrasi dalam sistem SPRINT OJK. Sampai periode pelaporan, OJK masih melakukan proses sosialisasi kepada *Underwriter*, Anggota Bursa, dan Emiten.

5) Pengembangan Notasi Khusus

Dalam rangka menyajikan keterbukaan informasi Perusahaan Tercatat yang perlu mendapat perhatian bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi, OJK menginisiasi peningkatan *awareness* dan pemahaman investor melalui informasi notasi khusus. Hingga periode pelaporan progres sistem dan peraturan telah rampung dan sosialisasi telah dilakukan secara efektif untuk mendukung implementasi.

6) Pengembangan Produk Derivatif 2019

a) Structured Warrant

Dalam rangka mendukung aktifnya perdagangan *equity warrant* di Bursa telah dikembangkan produk *Structured Warrant* untuk menambah instrument investasi dengan target investor ritel. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan basis investor serta menambah alternatif produk investasi dan sarana diversifikasi bagi investor. *Output project* ini adalah tersedianya peraturan pencatatan, keanggotaan dan perdagangan, serta sistem perdagangan *structured warrant* dengan *cash settlement*. Sampai periode laporan telah dilakukan penyusunan *business requirement* dan tengah dilakukan penyusunan *technical requirement* terkait *structured warrant*.

b) IDX 30 Futures

Berdasarkan hasil evaluasi atas produk derivatif yang ada saat ini, Bursa akan mengeluarkan produk *IDX30 Futures* dengan beberapa perbaikan spesifikasi produk dan mekanisme

perdagangan untuk meningkatkan aktivitas perdagangan derivatif di Bursa. Program ini bertujuan selain sebagai Sarana lindung nilai portofolio atas pergerakan harga Index 30 di Pasar Sekunder juga untuk menambah alternatif produk investasi dan sarana diversifikasi. *Output* program ini tersedianya peraturan perdagangan dan sistem perdagangan *IDX30 Futures* dengan *cash settlement*. Sampai periode laporan telah dilakukan penyusunan *business requirement* dan tengah dilakukan penyusunan *technical requirement* terkait *IDX 30 Futures*.

c) Single Stock Futures

Program *Single Stock Futures* diinisiasi atas kebutuhan Investor akan sarana lindung nilai terhadap pergerakan harga saham di Pasar Sekunder, menambah alternatif produk investasi dan sarana diversifikasi. *Output* program ini tersedianya peraturan perdagangan, dan sistem perdagangan *Single Stock Futures* dengan *cash settlement*. Sampai periode laporan telah dilakukan penyusunan *business requirement* dan tengah dilakukan penyusunan *technical requirement* terkait *Single Stock Futures*.

2.3.3 Pengembangan IKNB

A. Standar Kompetensi Kinerja Nasional Indonesia Bidang Asuransi (SKKNI)

Dalam rangka mendukung penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan Kompetensi Kerja Nasional Indonesia serta pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, dibentuk suatu Tim Perumus dan Tim Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perasuransian.

B. Sosialisasi

Selama triwulan III-2019 telah dilakukan Sosialisasi Fidusia di Manado dan Banyuwangi. Peserta kegiatan sosialisasi adalah pimpinan atau perwakilan kantor cabang Perusahaan Pembiayaan. Sementara itu, pihak-pihak yang terlibat terdiri dari OJK, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, dan Kementerian Hukum dan HAM yang bertindak selaku narasumber. Selain itu OJK juga menyelenggarakan sosialisasi "Peningkatan Peran Perusahaan Pembiayaan dalam Percepatan Pengembangan Pariwisata" di Banyuwangi.

Dalam rangka melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta pengembangan *Fintech* P2P *Lending* dan ekosistemnya, pada triwulan III-2019

OJK menyelenggarakan OJK *Fintech Days* dan OJK *Goes to Campus*. OJK *Fintech Days* diselenggarakan di Samarinda, Kalimantan Timur dengan rangkaian kegiatan berupa seminar dan kunjungan ke kampus. Seminar tersebut bertajuk "Membangun Industri *Fintech P2P Lending* Terpercaya" yang dihadiri oleh 520 peserta yang terdiri dari Asosiasi Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), kantor hukum, koperasi, kedinasan di Kalimantan Timur, Kantor OJK Provinsi Kalimantan Timur, IJK, penyelenggara, pesantren, Sekolah Menengah Atas, Universitas, dan UMKM. Sementara itu, OJK *Goes to Campus* di Samarinda dilaksanakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman dengan kegiatan berupa penyelenggaraan seminar nasional yang dihadiri oleh 371 peserta.

Selain diselenggarakan di Samarinda, OJK *Goes to Campus* juga dilaksanakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala yang berlokasi di Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengenalkan *Fintech P2P Lending* berbasis syariah yang dilakukan dalam bentuk seminar nasional oleh OJK dan pameran oleh AFPI dengan melibatkan seluruh anggota *Fintech P2P Lending* berbasis syariah, yang pada saat itu terdapat enam penyelenggara *Fintech P2P Lending* berbasis syariah dan satu penyelenggara *Fintech P2P Lending* yang memiliki produk syariah yang sudah terdaftar di OJK. Seminar tersebut dihadiri oleh 371 peserta.

2.3.4 Inovasi Keuangan Digital

Pada triwulan III-2019 mengajukan permohonan pencatatan IKD, dan sudah ditetapkan 48 IKD mendapat status tercatat yang terbagi menjadi 15 klaster yaitu *aggregator, credit scoring, claim service handling, digital DIRE, financial planner, financing agent, funding agent, online distress solution, online gold depository, project financing, social network and robo advisor, block-chain based, verification non-CDD, tax and accounting* dan e-KYC dengan 34 IKD menjadi sampel Uji Coba *Regulatory Sandbox*.

Dalam rangka memfasilitasi pelaku industri dalam pengembangan inovasi keuangan digital, OJK, melalui OJK Infinity, melayani 397 konsultasi dan menerima lebih dari 800 pengunjung yang terdiri dari pelaku Inovasi Keuangan Digital, Pelaku Jasa Keuangan, pemerintah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.

Selain itu, OJK meresmikan Penunjukan Aftech sebagai Asosiasi Penyelenggara IKD dipimpin oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner, Nurhaida. Dengan dilakukannya penunjukan tersebut, Aftech telah resmi menjadi asosiasi yang ditunjuk oleh OJK untuk memantau dan mengawasi penyelenggara IKD tercatat di OJK.

OJK juga melaksanakan pengembangan kapasitas SDM internal dan eksternal terkait inovasi keuangan digital, melalui seminar tahunan OJK *Infinity* yang dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Perwakilan Prospera dan lebih dari 250 peserta dari kalangan internal OJK dan *stakeholder* eksternal. Dalam acara tersebut, dilaksanakan pula *launching mini-site fintech* Gerbang Elektronik Sistem Informasi Keuangan Digital (GESIT). GESIT memuat informasi esensial dan kabar terkini seputar IKD. Melalui GESIT masyarakat umum dapat berkomunikasi dengan Tim OJK *Infinity* seputar perkembangan inovasi keuangan digital dan juga melakukan reservasi untuk menggunakan *co-working space* OJK *Infinity* dalam rangka pengembangannya. Di sisi lain, GESIT juga memungkinkan para penyelenggara IKD untuk mengajukan permohonan pencatatan secara elektronik sehingga ke depannya, para penyelenggara IKD dapat lebih mudah mengajukan permohonan pencatatan. Dalam acara tersebut juga telah dilaksanakan seminar *parametric insurance* yang disampaikan dari sudut pandang pelaku dan asosiasi. Selain itu OJK juga melaksanakan *Training on Technology Risk Supervision* dan *Workshop on RegTech & SupTech* di Bogor dengan narasumber dari Toronto Centre. Acara dihadiri oleh 42 peserta yang merupakan perwakilan dari Forum Panel IKD, AFTECH, AFSI, AFPI dan internal OJK.



Indonesia *Fintech Summit & Expo* (IFSE) 2019



Sebagai bentuk sinergi dalam mendorong perkembangan ekosistem keuangan digital di Indonesia, Pada 23-24 September 2019, OJK berkolaborasi dengan Bank Indonesia dan Aftech telah menyelenggarakan Indonesia Fintech Summit & Expo 2019 (IFSE 2019) "Innovation for Inclusion" di Jakarta Convention Center. Peresmian IFSE dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, didampingi oleh Ketua Dewan Komisiner OJK, Wimboh Santoso; Menteri Keuangan Sri Mulyani; Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo; dan Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) Niki Luhur.

Acara dilanjutkan *Fintech Visionary Talk* dengan topik "*refreshment*" *Fintech* Bali Agenda yang sebelumnya telah disepakati dalam acara Annual Meetings IMF World Bank 2018. Dalam *Fintech Visionary Talk* tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pembangunan harus bersifat inklusif dan tidak diskriminatif. Melihat industri *fintech* yang terus berkembang pesat, Kementerian Keuangan akan terus memberikan dukungan melalui peraturan-peraturan yang ramah dan tidak memberatkan industri. Ketua Dewan Komisiner OJK, Wimboh Santoso menyampaikan perkembangan teknologi informasi harus dapat dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan efisiensi dalam bertransaksi di sektor jasa keuangan. Komitmen OJK terhadap *fintech*/inovasi keuangan digital pun telah dibuktikan dengan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa seperti POJK No. 77 Tahun 2016, POJK No. 13 Tahun 2018 dan POJK No. 37 Tahun 2018 serta pembentukan OJK INFINITY sebagai *fintech center*. Hal serupa juga disampaikan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo Bank Indonesia berkomitmen penuh untuk mengembangkan sistem pembayaran dan memfasilitasi perkembangan inklusi keuangan, hal ini ditunjukkan melalui beberapa kebijakan atau program yang telah ditempuh Bank Indonesia. Dalam kegiatan tersebut, seminar dihadiri lebih dari 2.000 peserta *summit* serta 105 narasumber baik dari sisi regulator, investor maupun pelaku inovasi keuangan digital sedangkan pameran Expo pada IFSE 2019 dikunjungi lebih dari 11.000 pengunjung.

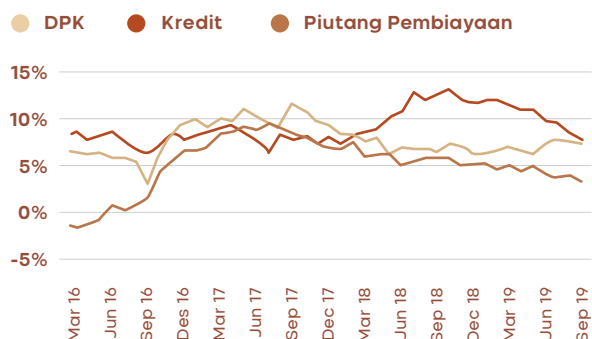
2.4 STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Stabilitas sistem keuangan masih terjaga di triwulan III-2019, didukung oleh kinerja industri jasa keuangan yang stabil, solvabilitas yang tinggi, dan tingkat risiko yang terkendali. Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan ke depan, OJK senantiasa memantau dinamika perekonomian dan pasar keuangan global secara berkala dengan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, terutama melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

2.4.1 Pasar Keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan

Kinerja intermediasi industri jasa keuangan masih terjaga. Kredit perbankan tumbuh sebesar 7,89% (yoy), dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh meningkat menjadi 7,47% (yoy). Sementara itu, piutang pembiayaan tumbuh moderat sebesar 3,53% (yoy).

Grafik II - 3 ◆ Kinerja Intermediasi IJK



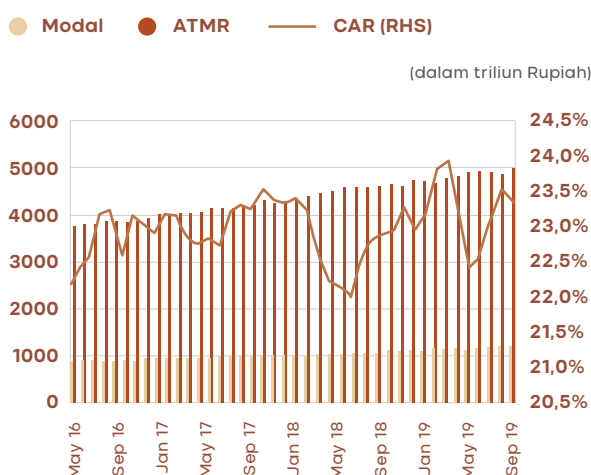
Pemanfaatan pasar modal Indonesia sebagai sumber pendanaan korporasi domestik masih terpantau positif. Sejak awal tahun 2019, penghimpunan dana di pasar modal mencapai Rp133,2 triliun (ytd) yang berasal dari 36 emiten baru.

Pasar keuangan bergerak *mixed* di triwulan III-2019. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 6169,1 (-2,54% *qtq*) di akhir triwulan. *Yield* Surat Berharga Negara (SBN) tercatat turun rata-rata 17,92 *bps*, dengan penurunan terbesar berasal dari *yield* tenor jangka pendek sebesar 31,3 *bps*. *Yield* tenor jangka menengah dan panjang masing-masing turun sebesar 11,4 *bps* dan 16,5 *bps*. Performa pasar keuangan tersebut sejalan dengan *net sell* investor non residen di pasar saham sebesar Rp16,86 triliun

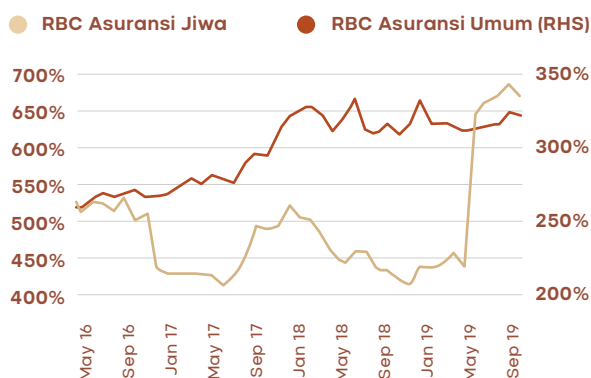
dan *net buy* investor non residen di pasar SBN sebesar Rp40,63 triliun.

Daya tahan sektor jasa keuangan terhadap potensi peningkatan risiko ke depan dinilai masih kuat. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat *Capital Adequacy Ratio* (CAR) perbankan, *Risk-Based Capital* (RBC) perasuransian, dan *gearing ratio* perusahaan pembiayaan yang berada di atas ketentuan minimum. CAR perbankan tercatat stabil sebesar 23,38%. Sementara itu, RBC industri asuransi jiwa dan asuransi umum di September 2019 tercatat masing-masing sebesar 667%, dan 321%. *Gearing ratio* perusahaan pembiayaan di akhir triwulan III-2019 tercatat sebesar 2,72 kali.

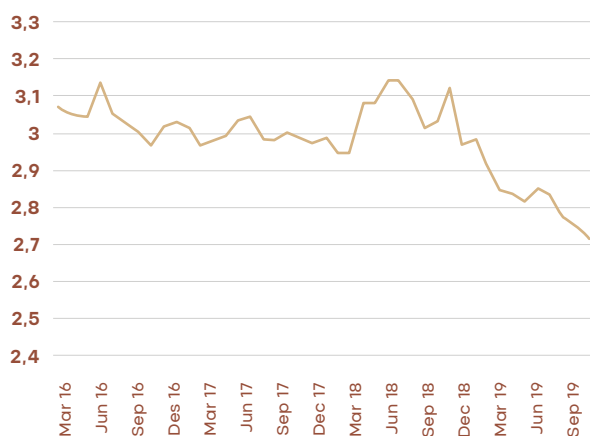
Grafik II - 4 ◆ CAR Perbankan



Grafik II - 5 ◆ RBC Industri Perasuransian



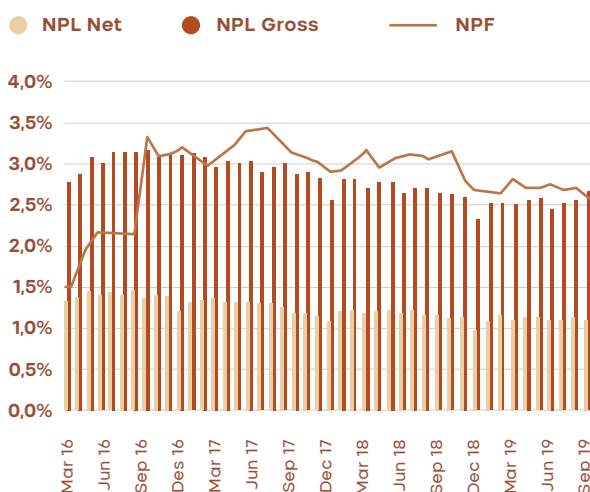
Grafik II - 6 ◇ *Gearing Ratio Perusahaan Pembiayaan*



Sumber: OJK

Risiko kredit industri jasa keuangan terpantau masih di bawah ambang batas yang ditetapkan. Rasio *Non-Performing Loan (NPL) gross* dan *net* perbankan per September 2019 tercatat masing-masing sebesar 2,66% dan 1,15%. Rasio *Non-Performing Financing (NPF)* perusahaan pembiayaan stabil di 2,66%. Rasio NPL dan NPF ini berada di bawah ketentuan maksimum yang telah ditetapkan dan masih berada pada level yang terkendali.

Grafik II - 7 ◇ *Rasio NPL Perbankan dan NPF Perusahaan Pembiayaan*



Sumber: OJK

Risiko likuiditas dan risiko pasar industri jasa keuangan dinilai masih rendah. Pada Juni 2019, Rasio Alat Likuid terhadap *Non-Core Deposit (AL/ NCD)* tercatat sebesar 92,20% dan rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tercatat sebesar 19,43%. Tingkat *Loan to Deposit Ratio (LDR)* perbankan tercatat di 94,34%. Eksposur perbankan terhadap risiko volatilitas nilai tukar juga dinilai masih rendah, tercermin dari rasio Posisi Devisa Neto yang masih rendah di tingkat 1,64%. Tingkat indikator risiko

likuiditas dan pasar tersebut masih berada jauh dari batas ketentuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, nilai investasi industri reksa, perasuransian, dan dana pensiun menunjukkan peningkatan. Nilai Aktiva Bersih (NAB) triwulan III-2019 naik 5,53% *qta* serta nilai investasi industri perasuransian dan dana pensiun masing-masing naik 0,88% (*qta*) dan 0,66% (*qta*).

Stabilitas sistem keuangan Indonesia relatif lebih baik dibandingkan negara berkembang lainnya. Pertumbuhan kredit perbankan masih berada di atas rata-rata *peer group*, dengan pertumbuhan DPK yang masih mampu menopang pertumbuhan kredit. Risiko kredit masih berada pada level yang terkendali dengan tingkat solvabilitas masih menjadi yang tertinggi dibandingkan negara lainnya. Selain itu, risiko pasar perbankan Indonesia merupakan yang terkecil sehingga relatif lebih tahan terhadap tekanan nilai tukar dibandingkan dengan negara lainnya.

Tabel II - 35 ◇ *Perbandingan Kinerja Perbankan Negara Berkembang*

EMs	Kredit (% yoy)	DPK (% yoy)	NPL %	PDN %	CAR %
Indonesia	7,89	7,47	2,66	1,64	23,38
Malaysia	3,90 ⁴	4,55 ⁴	1,57 ²	10,07 ²	17,86 ²
Thailand	2,34 ⁴	4,42 ⁴	3,03	N.A. ²	18,47 ²
Filipina	10,01 ⁴	6,16 ⁴	2,10 ²	5,04 ²	15,95 ²
Vietnam	13,28 ³	11,29 ³	2,02 ¹	N.A.	11,79 ¹

¹Data Maret ²Data Juni ³Data Juli ⁴Data Agustus Sumber: OJK, CEIC

2.4.2 Arah Kebijakan dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

OJK akan terus memantau dinamika perekonomian dan pasar keuangan global serta dampaknya terhadap kinerja dan stabilitas sektor jasa keuangan nasional secara berkala. Dalam merespons hal tersebut OJK berupaya untuk mengambil *policy measures* yang tepat dan memperkuat koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk memitigasi dampak tingginya volatilitas di pasar keuangan global terhadap perekonomian dan pasar keuangan domestik.

Dengan masih tingginya risiko di pasar keuangan, OJK akan terus memperkuat pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan, khususnya kegiatan operasional yang berkaitan dengan risiko pasar dan risiko likuiditas. Selanjutnya, sebagai implementasi mandat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), OJK juga terus memutakhirkan daftar bank sistemik yang ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia.

Di samping memastikan stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga, OJK juga mengarahkan agar sektor jasa keuangan berperan semakin signifikan dalam upaya mempersempit defisit transaksi berjalan dan mendorong pertumbuhan. OJK juga akan melanjutkan inisiatif pendalaman pasar keuangan dalam upaya memperkuat ketahanan pasar domestik.

2.4.3 Koordinasi Antar Lembaga dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

OJK terus melanjutkan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, terutama melalui wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). UU PPKSK telah mengamanatkan KSSK untuk menyelenggarakan rapat berkala sebanyak satu kali setiap tiga bulan. Berdasarkan hasil pemantauan lembaga-lembaga anggota KSSK terhadap perkembangan perekonomian, moneter, fiskal, pasar keuangan, lembaga jasa keuangan, dan penjaminan simpanan, KSSK menyimpulkan bahwa stabilitas sistem keuangan nasional terjaga dengan baik. KSSK akan menyelenggarakan rapat berkala kembali pada bulan Oktober 2019.

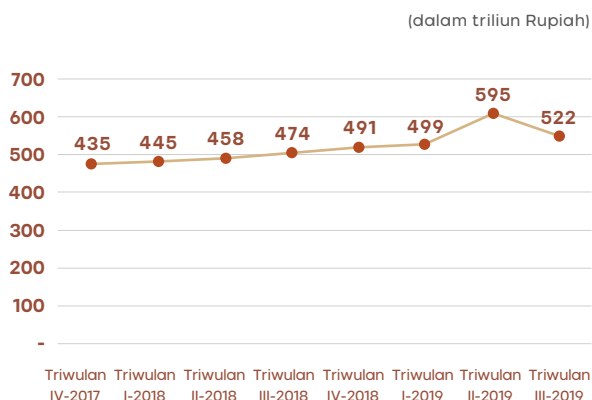
2.5 KEBIJAKAN SEKTOR JASA KEUANGAN TERINTEGRASI

2.5.1 Kebijakan dalam Rangka Mendorong Pengembangan Sektor Prioritas

A. Sektor Perumahan

1. Penyaluran Kredit Perbankan

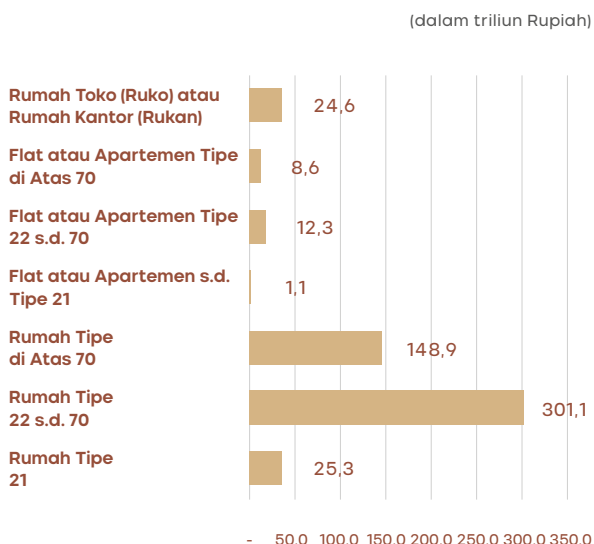
Grafik II - 8 ◇ Kredit Perbankan ke Sektor Perumahan



Pada triwulan III-2019 kredit ke sektor perumahan menurun sebesar -13,98% seiring dengan melambatnya pertumbuhan kredit sektor perbankan. Porsi terbesar penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) tinggal tipe 22 sampai

dengan 70, yaitu sebesar Rp301,1 triliun menyusul kepemilikan rumah tinggal tipe di atas 70 sebesar Rp148,9 triliun. Tingginya proporsi penyaluran KPR untuk tipe 22 sampai dengan 70 merupakan salah satu bentuk dukungan SJK pada salah satu kebijakan strategis pemerintah yaitu program sejuta rumah. Sementara itu tingginya penyaluran KPR pada rumah tapak (*landed house*) menunjukkan preferensi masyarakat Indonesia pada jenis hunian dimaksud.

Grafik II - 9 ◇ Porsi Kredit Kepemilikan Rumah



2. KPR Milenial

Untuk meningkatkan industri properti, pemerintah merancang program Kredit Perumahan Rakyat (KPR) khusus untuk generasi milenial. Program dimaksud dirancang terutama untuk generasi milenial yang relatif baru bekerja sehingga belum memiliki penghasilan dengan jumlah besar untuk membeli hunian. Beberapa pelaku jasa keuangan terutama perbankan telah mendukung program dimaksud dengan meluncurkan produk KPR yang menyasar kalangan milenial.

Pemantauan terhadap program KPR Milenial:

- Rata-rata usia milenial yang sudah mampu membeli rumah yaitu milenial yang telah menikah antara umur 30-35 tahun.
- Penyebaran penyaluran program KPR Milenial paling besar di Jabodetabek, kemudian Jawa dan daerah Barat serta Timur. Dalam menetapkan strategi bisnis, bank menargetkan wilayah dengan potensi terbesar, sehingga sebagian besar kegiatan promosi dan pemasaran dilakukan di Jabodetabek dan kota-kota besar lainnya seperti Surabaya dan Makassar.
- Berdasarkan data Bank CIMB Niaga tahun 2017, sebesar 55% kaum milenial mengambil segmen *primary market* yaitu pembiayaan dari *developer* rekanan bank, kemudian dilanjutkan dengan

secondary, take-over (sekitar 10%) dan multiguna (5%). Tingginya minat kaum milenial pada *primary market* disebabkan oleh tujuan investasi, harga sesuai *price list* dan terdapat cicilan DP.

- d. Salah satu tantangan dalam program KPR milenial yaitu masih tingginya pemenuhan kebutuhan tersier (seperti wisata, gawai *gadget*, dan sosial). Selain itu sebagian besar milenial memiliki preferensi hunian yang berada di tengah kota meskipun kemampuan bayar mereka masih rendah.
- e. Dalam rangka meringankan biaya kredit (biaya asuransi, notaris, dsb), bank bekerja sama dengan *developer* sehingga dapat menawarkan program KPR dengan biaya kredit yang lebih murah.

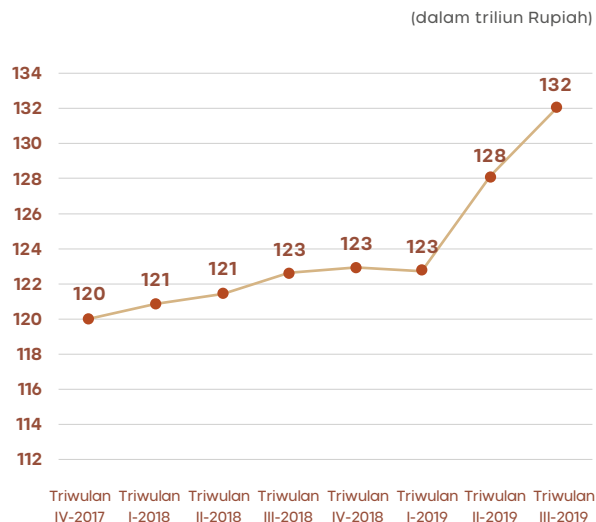
B. Sektor Pariwisata

Sektor Pariwisata ditargetkan menjadi salah satu penyokong perekonomian Indonesia, karena memiliki berbagai keunggulan kompetitif serta komparatif di regional. *Country branding* 'Wonderful Indonesia' menempati ranking 47 dunia, mengalahkan branding 'Amazing Thailand' (ranking 83) dan Malaysia 'Truly Asia' (ranking 96). Pada 2019, pariwisata Indonesia ditargetkan menjadi yang terbaik di kawasan dan diproyeksikan menyumbang devisa senilai US\$ 20 miliar.

Target ini didukung oleh pertumbuhan pariwisata Indonesia yang menempati peringkat sembilan tercepat di dunia, peringkat tiga tercepat di Asia, serta tertinggi di Asia Tenggara berdasarkan World Travel and Tourism Council (WTTC) pada September 2018. Jumlah kunjungan wisatawan di Indonesia sepanjang 2018 meningkat 12,58%, dua kali lipat dibandingkan angka pertumbuhan pariwisata dunia pada 5,6%. Lebih lanjut, *World Economic Forum* mencatat peningkatan peringkat Indonesia di *Travel and Tourism Competitiveness Index* (TTCI) dari peringkat 70 di tahun 2013 menjadi peringkat 40 di 2019.

Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah menetapkan 10 Destinasi Wisata Prioritas dan lima Destinasi super prioritas yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Likupang.

Grafik II - 10 ◇ Kredit Sektor Pariwisata



Sebagai bentuk dukungan sektor jasa keuangan terhadap sektor pariwisata, sejumlah kredit disalurkan untuk mendukung perkembangannya.

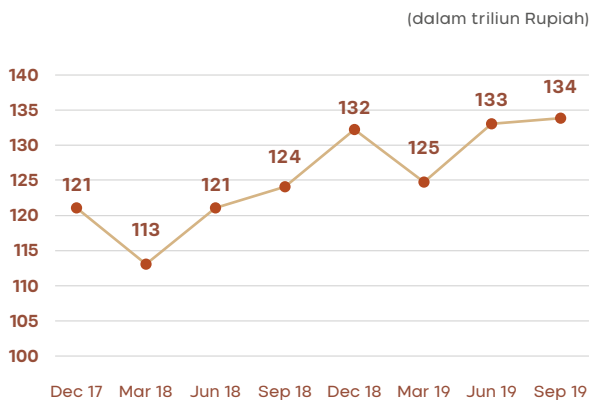
Pada triwulan III-2019, terdapat pertumbuhan kredit ke sektor pariwisata sebesar 3,03%. Porsi terbesar penyumbang kredit ke sektor pariwisata yaitu berasal dari pembangunan hotel/infrastruktur penginapan.

OJK terus mendorong Bank untuk memberikan kredit dalam rangka pembangunan dan pengembangan kawasan pariwisata, melalui:

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah		
Pengembangan Sektor Pariwisata		
1. Competitiveness	2. Promotion	
MoU OJK & Kementerian Pariwisata		
Perbankan • Keringanan pembukaan Jaringan Kantor Bank di wilayah destinasi wisata prioritas pemerintah • Pelonggaran BMPK menjadi 30% untuk penyediaan dana kepada BUMN yang membangun 10 Destinasi Wisata - Bali Baru • Pelonggaran BMPK menjadi 30% untuk penyediaan dana kepada BUMN yang membangun 10 Destinasi Wisata - Bali Baru *Outstanding Kredit Rp162 T	Pasar Modal • Mengembangkan instrumen pasar modal untuk pembiayaan proyek Infrastruktur Kawasan Pariwisata • RDPT • DINFRA • <i>Blended Finance</i> • Obligasi Daerah • Pelonggaran BMPK menjadi 30% untuk penyediaan dana kepada BUMN yang membangun 10 Destinasi Wisata - Bali Baru	Industri Keuangan Non Bank • Meningkatkan peran Lembaga Dana Pensiun dan Asuransi dalam investasi di instrumen pasar modal untuk sektor pariwisata • Mendorong pengembangan produk-produk asuransi yang mendukung pengembangan sektor pariwisata, termasuk penerbitan Asuransi Perjalanan Wisata • Meningkatkan peran Lembaga Penjaminan dalam proyek infrastruktur di sektor pariwisata • Memanfaatkan <i>platform peer-to-peer landing</i> dan skema pembiayaan Bank Wakaf Mikro untuk UMKM sektor pariwisata

C. Sektor Berorientasi Ekspor

Grafik II - 11 ♦ Kredit Sektor Berorientasi Ekspor



Pada Triwulan III, terdapat pertumbuhan kredit ke sektor berorientasi ekspor sebesar 0,75%.

2.5.2 Perizinan Terintegrasi

A. Pengembangan Aplikasi Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT)

Capaian pengembangan modul perizinan pada aplikasi SPRINT sampai dengan triwulan III-2019 adalah 37,1% atau sebanyak 259 dari 699 sub izin yang menjadi target pengembangan sampai dengan tahun 2022. Adapun jumlah layanan perizinan yang masuk melalui SPRINT dapat dilihat pada figur di bawah ini.



IZIN
LEMBAGA
1.704

Perbankan	112	Notaris	279
APERD	72	Biro Administrasi Efek	11
Asuransi	155	Penasihat Investasi	15
Manajer Investasi	109	Penjamin Emisi Efek	52
KAP	339	Wali Amanat	8
Konsultan Hukum	438		

IZIN PERSEORANGAN 31.069		
WAPERD	19.512	
WPPE	7.330	
WPEE	775	
WMI	3.031	
Akuntan Publik	1.783	
Ahli Syariah Pasar Modal	114	
Penilai	258	

IZIN PRODUK/ AKTIVITAS 5.865		
Pemasaran RD	771	
Reksadana	3.700	
Bancassurance	1.705	
ETF	49	
Investasi pada Efek Bersifat Ekuitas	48	
Investasi pada Efek Bersifat Utang	189	
Kontrak Investasi Kolektif Dana	17	
Investasi Real Estate		
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset	14	



IPO, Obligasi, Suku 219

B. Layanan Informasi Satu Pintu SPRINT

Guna mendukung pelayanan satu pintu SPRINT, OJK memberikan fasilitas SPRINT *Corner* (*Walk In Submission SPRINT*) yang bertempat di Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 26. SPRINT *Corner* tersebut dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan asistensi/panduan dalam menggunakan aplikasi SPRINT.

C. Integrasi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

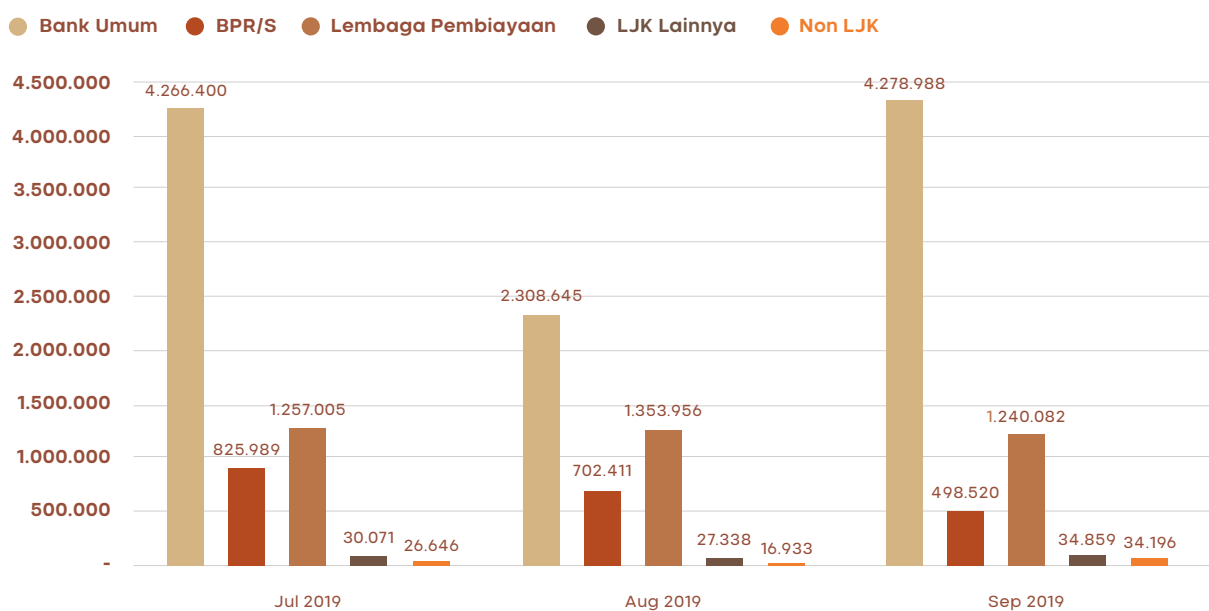
OJK dan Bursa Efek Indonesia telah mencapai kesepakatan untuk melakukan integrasi proses Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum dan Pencatatan Efek secara satu pintu melalui aplikasi SPRINT. Saat ini integrasi tahap 1 telah selesai dikembangkan dan diresmikan dalam rangkaian kegiatan peringatan 42 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia.

2.5.3 Layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

Sejak Januari 2018, masyarakat dapat memperoleh informasi debitur melalui layanan SLIK di kantor OJK masing-masing wilayah pada pukul 09.00-15.00 WIB. Salah satu kelebihan SLIK dibandingkan dengan layanan Sistem Informasi Debitur (SID) yang diberikan Bank Indonesia sebelumnya adalah cakupan informasi yang lebih luas dan tidak terbatas pada industri perbankan saja namun termasuk juga industri keuangan non bank.

Informasi debitur pada SLIK merupakan kontribusi 2.106 Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang terdiri dari 98 Bank Umum Konvensional, 34 BUS/UUS, 1.578 BPR, 165 BPRS, 179 Lembaga Pembiayaan, 8 Perusahaan Modal Ventura, 35 Perusahaan Pembiayaan Syariah, 1 Perusahaan Modal Ventura Syariah, 3 Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, 1 Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Syariah dan 4 Koperasi Simpan Pinjam (per September 2019). LJK yang menjadi pelapor SLIK dapat melakukan akses permintaan informasi debitur secara *online* melalui SLIK *Web*.

Grafik II - 12 ◇ Perkembangan Jumlah Permintaan Informasi Debitur oleh Pelapor SLIK

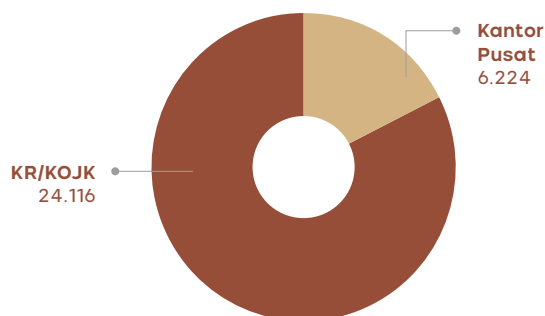


Sumber: OJK

Pada triwulan III-2019, sebanyak 30.340 masyarakat telah menerima layanan SLIK melalui Gerai Pelayanan SLIK di seluruh kantor OJK. Cakupan informasi debitur yang bersumber dari SLIK terdiri dari informasi mengenai data pokok debitur, fasilitas penyediaan

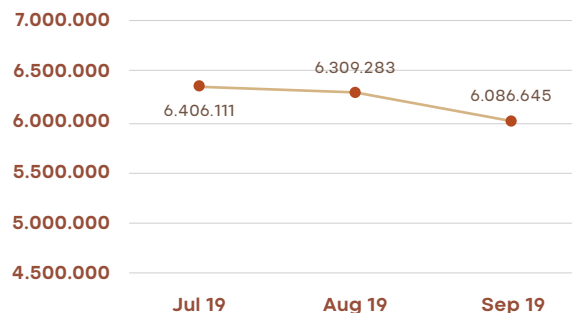
dana (plafon kredit, baki debet, kualitas kredit, tunggakan, serta denda atau penalti), agunan, dan penjamin kredit/pembiayaan. Di samping itu, SLIK juga menyediakan informasi mengenai rincian pengurus khususnya untuk debitur badan usaha.

Grafik II - 13 ◇ Jumlah Layanan SLIK kepada Masyarakat Periode Triwulan II-2019



SLIK merupakan infrastruktur penting di sektor jasa keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan mitigasi risiko, khususnya risiko kredit/pembiayaan sehingga dapat membantu menurunkan tingkat risiko

Grafik II - 14 ◇ Jumlah Permintaan Informasi Debitur oleh Pelapor SLIK



kredit bermasalah. Dengan ketersediaan data debitur yang komprehensif dan lintas sektor upaya perluasan akses kredit/pembiayaan dapat dilakukan dengan lebih optimal.

Grafik II - 15 ◇ Manfaat SLIK



2.6 EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

2.6.1 Penelitian dan Pengaturan

A. Sosialisasi Pengaturan

Sebagai rangkaian kegiatan sosialisasi ketentuan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK), selama triwulan III-2019 OJK menyelenggarakan sosialisasi di Cirebon, Bengkulu, Malang, dan Ambon. Total peserta yang hadir berjumlah 549 peserta terdiri

dari perwakilan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), akademisi, media lokal dan masyarakat umum.

Materi yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut antara lain terkait:

Tabel II - 36 ◇ Materi Kegiatan Sosialisasi Ketentuan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK)

No.	Tema	Materi Sosialisasi
1.	"Peningkatan Kualitas Layanan Konsumen melalui Rangkaian Mekanisme Penanganan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan"	a. POJK No.18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan b. SEOJK No.17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan c. Regulasi dan Kebijakan dalam rangka Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan d. Materi "Cerdas Memanfaatkan Produk dan Layanan Keuangan di Era Keuangan Digital"
2.	"Peningkatan Kualitas Layanan Konsumen Melalui Rangkaian Mekanisme Penanganan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan"	a. POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan b. SEOJK Nomor 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan c. Mekanisme Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan
3.	"Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan serta Layanan Pengaduan Konsumen"	a. POJK No.18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan b. SEOJK No.17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan c. Regulasi dan Kebijakan dalam rangka Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan d. Materi "Cerdas Memanfaatkan Produk dan Layanan Keuangan di Era Keuangan Digital"
4.	"Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kegiatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Serta Layanan Pengaduan Konsumen Sektor Jasa Keuangan"	a. POJK No.18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan b. SEOJK No.17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. c. Regulasi dan Kebijakan dalam rangka Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan d. Materi "Cerdas Memanfaatkan Produk dan Layanan Keuangan di Era Keuangan Digital"

B. Kajian Dana Pensiun Mikro

Pada triwulan II-2019 OJK melaksanakan mini survey "Pemanfaatan Program Pensiun pada Masyarakat" sebagai tindak lanjut dari Focus Group Discussion (FGD) "Peluang dan Tantangan Pengembangan Model Inklusi Keuangan bagi pekerja Sektor Informal Melalui Produk Dana Pensiun Mikro" dalam kajian terkait Dana Pensiun Mikro.

Hasil *mini survey* menunjukkan bahwa hanya 57% dari responden telah mempersiapkan hari tua. Sebagian besar masyarakat yang telah mempersiapkan hari tuanya merupakan pekerja formal. Persiapan yang mereka lakukan cenderung dengan menabung di bank, berinvestasi atau mengikuti program pensiun. Sementara pada pekerja informal menyiapkan hari tua mereka dengan menabung di bank, menabung di rumah (sendiri), berinvestasi atau membuka usaha.

Selain itu, hasil mini survey menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai dana pensiun masih terbatas pada kalangan pekerja formal yang umumnya telah didaftarkan oleh perusahaan (pemberi kerja) dalam dana pensiun. 83% Responden memilih untuk membayarkan iuran peserta dana pension secara bulanan dengan nilai nominal Rp25.000-30.000/bulan bagi kelompok pekerja sektor informal atau di atas Rp50.000/bulan bagi kelompok pekerja sektor formal.

Hasil survei tersebut secara detail akan menjadi bahan diskusi terkait perumusan produk Dana Pensiun Mikro.

2.6.2 Inklusi Keuangan

A. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) merupakan forum koordinasi antar instansi dan *stakeholders* terkait untuk percepatan akses keuangan daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Penyusunan program-program TPAKD dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal utama seperti karakteristik dan kebutuhan daerah, potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan produk dan layanan jasa keuangan, peningkatan usaha sektor produktif, pengembangan UMKM serta usaha rintisan (*startup business*) lainnya.

Selama triwulan III-2019, telah dikukuhkan 17 TPAKD, yaitu TPAKD Kabupaten Banjarnegara dan TPAKD Kabupaten Jeneponto. Sehingga sampai dengan triwulan III-2019, sebanyak 106 TPAKD dengan rincian 32 TPAKD Provinsi dan 74 TPAKD Kabupaten/Kota telah dikukuhkan.

Kegiatan terkait TPAKD selama triwulan III-2019 antara lain pembahasan rencana *pilot project* percepatan keuangan inklusif yang bersinergi dengan TPAKD di Desa Pegagan Kidul, Kabupaten Cirebon. Pada pertemuan tersebut dilakukan pembahasan *need assessment*, seperti informasi produk keuangan, kebiasaan masyarakat sekitar, norma sosial yang umumnya diterapkan, pola pengelolaan keuangan dan lain sebagainya. Tahapan selanjutnya adalah

pemetaan kebutuhan masyarakat dan penyusunan modul edukasi yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. OJK berharap seluruh instrumen *pilot project* dapat diimplementasikan ke seluruh jenis komunitas masyarakat dan dapat direplikasikan pada beberapa wilayah.

B. Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)

SimPel/SimPel iB merupakan program inklusi keuangan yang bertujuan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Program yang ditujukan bagi pelajar sejak PAUD hingga SMA ini diluncurkan pada tanggal 14 Juni 2015 dan sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) No.82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Sampai dengan triwulan III-2019, data SimPel/SimPel iB adalah sebagai berikut:



C. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Hingga triwulan III-2019, terdapat beberapa program yang telah dilaksanakan dalam rangka optimalisasi BUMDes:

- a. Kegiatan sosialisasi dan *workshop* penguatan BUMDes/BUMADEs
Kegiatan sosialisasi dan *workshop* penguatan BUMDes/BUMADEs diselenggarakan dalam rangka memaparkan perspektif strategi tiga pilar (pilar kelembagaan dan bisnis, pilar akses keuangan, dan pilar digitalisasi) serta skema bisnis yang dikembangkan oleh OJK bersama *stakeholders* terkait. Dalam sosialisasi dan *workshop* dimaksud, OJK juga memfasilitasi pengembangan bisnis kepada BUMDes/BUMADEs dalam bentuk *business matching* dengan industri jasa keuangan dan berbagai pelaku bisnis di sektor lain.
- b. Realisasi BUM-Desa *Center*
Secara total, sampai triwulan III-2019 telah terbentuk 23 BUM-Desa *Center* (di wilayah Desa-Pedesaan) dan 2 BUM-Rakyat *Center* (di wilayah Desa-Perkotaan).

Aksi Mahasiswa dan Pemuda Indonesia Menabung (AKSIMUDA) 2019



Dalam rangka meningkatkan kesadaran mahasiswa dan pemuda terkait program Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMUDA), telah diselenggarakan kegiatan Aksi Mahasiswa dan Pemuda Indonesia Menabung (AKSiMUDA) pada tanggal 30 Juli 2019 di Jakarta. Kegiatan yang dihadiri oleh kurang lebih 1.500 pemuda, mahasiswa, dan undangan ini bersinergi dengan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), 14 Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), Asian Development Bank (ADB), Kementerian/Lembaga terkait, serta 47 Perguruan Tinggi.

Kegiatan AKSiMUDA 2019 dihadiri oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian RI, Ketua Dewan Komisiner OJK, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) RI, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, seluruh Anggota Dewan Komisiner (ADK) OJK, ADB Country Director for Indonesia, Ketua Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), Direksi LJK yang berpartisipasi, pejabat perwakilan Kementerian/Lembaga, rektor perguruan tinggi yang berlokasi di wilayah Jabodetabek, serta para mahasiswa dan pemuda. Tujuan pelaksanaan kegiatan AKSiMUDA 2019 sebagai bentuk komitmen OJK bersinergi dengan Kementerian/Lembaga dalam mewujudkan budaya menabung di masyarakat serta sosialisasi upaya-upaya OJK dalam rangka membangun budaya menabung.

Kegiatan AKSiMUDA 2019 merupakan sebuah inisiasi gerakan agar pemuda mulai menggunakan uang yang dimiliki untuk menabung, tidak hanya di bank, namun pada berbagai produk keuangan, sebagai bentuk kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam RPJMN 2020 – 2024 disebutkan bahwa hanya 13% dana yang dibutuhkan untuk membangun negara bersumber dari APBN. Selebihnya dipenuhi salah satunya dari tabungan dan investasi masyarakat. Menabung juga penting bagi perekonomian negara, mengingat pertumbuhan kredit yaitu sekitar 12% sedangkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) hanya 7-8%. Selain itu, jika tabungan tidak dapat mengimbangi modal asing yang masuk untuk pembangunan, maka akan meningkatkan ketergantungan kita kepada dana asing yang dapat juga berdampak pada melemahnya nilai rupiah jika terjadi

Aksi Mahasiswa dan Pemuda Indonesia Menabung (AKSIMUDA) 2019

gejolak ekonomi global. Hal ini menjadi esensi pentingnya inklusi keuangan, agar masyarakat lebih banyak menempatkan uangnya pada sektor jasa keuangan. Selain itu, pemuda dan mahasiswa juga perlu mendapatkan pembinaan lebih lanjut untuk menjadi entrepreneur atau pelaku start-up, misalnya memanfaatkan inkubator financial technology yang saat ini didorong pengembangannya oleh industri dan universitas sebagai wadah belajar bagi pemuda. Dengan terwujudnya budaya menabung dan entrepreneurship di kalangan pemuda, maka akan menggerakkan perekonomian, menunjang kemakmuran masyarakat, dan memajukan negara yang menjadi tujuan jangka panjang dari pelaksanaan kegiatan AKSiMUDA 2019.

Sebagai puncak kegiatan AKSiMUDA tahun 2019, telah dilakukan pengukuhan terhadap 6 (enam) orang Duta Literasi dan Inklusi Keuangan yang merupakan mahasiswa berprestasi terpilih dari LJK dan perwakilan Youth Financial Inclusion Ambassador dari ADB. Duta Literasi dan Inklusi Keuangan tersebut diharapkan dapat berperan sebagai penggerak pemuda di sekitarnya dalam melaksanakan program inklusi keuangan, edukasi keuangan hingga perlindungan konsumen. Selanjutnya, keenam duta memimpin pembacaan "Ikrar Aksi Mahasiswa dan Pemuda Indonesia Menabung" sebagai simbolisasi komitmen dan semangat pemuda untuk menjadi role model budaya menabung serta mendukung implementasi Aksi Indonesia Menabung. Pembacaan ikrar diwakili oleh para mahasiswa berprestasi dari berbagai daerah di Indonesia.

Dengan diselenggarakannya kegiatan AKSiMUDA tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengelola keuangan sejak dini, serta mendorong budaya menabung di kalangan mahasiswa dan pemuda di seluruh Indonesia. Kegiatan dimaksud juga akan diperluas ke seluruh daerah dan universitas agar mahasiswa semakin siap dengan kemajuan produk keuangan dan berbagai potensi usaha.

D. Tabungan Mahasiswa dan Pemuda (SiMUDA)

Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMUDA) merupakan program tabungan bagi kelompok usia 18-30 tahun dengan dilengkapi fitur produk keuangan

sesuai seperti asuransi dan/atau produk investasi lainnya yang ditawarkan oleh perbankan di Indonesia dengan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel II - 37 ◇ Fitur Tabungan Mahasiswa dan SiMUDA

	SiMuda RumahKu	SiMuda InvestasiKu	SiMuda EmasKu
	Tabungan rencana untuk mengangsur uang muka KPR (DP KPR) dan dilindungi dengan proteksi asuransi.	Tabungan rencana yang memiliki fitur berinvestasi di reksa dana secara berkala dan dilindungi dengan proteksi asuransi.	Pembiayaan kepemilikan emas dengan menggunakan akad murabahah (jual beli) dan dilindungi dengan proteksi asuransi.
Setoran Awal	Kebijakan masing-masing bank	Minimal Rp100.000	Kebijakan masing-masing bank
Biaya Admin	Tidak ada	Kebijakan masing-masing bank	Tidak ada
Setoran Bulanan	Minimal Rp100.000	Sama dengan setoran awal	Minimal Rp50.000
Jangka Autodebet	Minimal 12 bulan	Minimal 12 bulan	Minimal 12 bulan

Jumlah rekening SiMUDA pada triwulan III-2019 adalah 15.452 rekening dengan total saldo sebesar Rp25,85

miliar. Adapun rincian berdasarkan fitur tabungan SiMuda adalah sebagai berikut:

SiMuda RumahKu Jumlah rekening sebanyak 15.384 rekening dengan nominal sebesar Rp25.794.412.026,-	SiMuda InvestasiKu Jumlah rekening sebanyak 56 rekening dengan nominal sebesar Rp35.259.962,-	SiMuda EmasKu Jumlah rekening sebanyak 12 rekening dengan nominal sebesar Rp17.624.466,-
--	--	---

2.6.3 Literasi dan Edukasi Keuangan

A. Pengembangan Infrastruktur dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Masyarakat

1. Sinergi Edukasi OJK

Sebagai upaya peningkatan pemahaman tentang OJK dan Industri Jasa Keuangan dan memperkenalkan materi buku "Menenal OJK dan Industri Jasa Keuangan" kepada para guru agar diharapkan dapat mengajarkan materi literasi keuangan kepada siswa serta kepada guru lainnya sehingga menghasilkan *multiplier effect* yang lebih luas, OJK menyelenggarakan Sinergi Edukasi OJK dengan Kemendikbud dan Kemenag bagi Guru SD/ MI di wilayah Kota Bengkulu dan Kupang.

Kegiatan tersebut diikuti oleh 287 orang Guru SD dan MI di wilayah Kota Kupang dan Bengkulu. Peserta menerima materi dari para narasumber sebagai berikut: OJK dan Perencanaan Keuangan, Pembiayaan, Perbankan, Perasuransian, Pergadaian, Pasar Modal, Dana Pensiun dan Ekonomi Syariah. Peningkatan pemahaman peserta mengenai materi yang disampaikan berdasarkan nilai *pre test* dan *post test* sebesar 31,6%.

2. Training of Trainers (ToT)

Dalam rangka diseminasi informasi literasi keuangan bekerja sama dengan Badan Pengadilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Badilag MA RI), OJK menyelenggarakan *Training of Trainers* (ToT) Bagi Hakim/ Panitera Pengadilan Agama di Yogyakarta. Kegiatan tersebut diikuti oleh 50 orang Hakim Tinggi, Hakim dan Panitera di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai pembekalan bagi peserta disampaikan materi dari para narasumber sebagai berikut: Regulasi Perbankan Syariah, Konsep Harta dalam Islam, Akad dan Produk Bank Syariah, *Hybrid Contract*, Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, Isu dan Studi Kasus Perbankan Syariah, Penyelesaian Sengketa dengan Acara Sederhana, Eksekusi Hak Tanggungan, Eksekusi Jaminan Fidusia, dan Arbitrase Syariah, Pengenalan Asuransi Syariah serta OJK dan Waspada Investasi Ilegal.

Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari dengan peningkatan pemahaman peserta mengenai materi yang disampaikan berdasarkan nilai *pre test* dan *post test* sebesar 9,7%. Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas Hakim Agama atau Panitera Pengadilan Agama khususnya di wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta yang relatif banyak kasus terkait jasa keuangan syariah.

B. Edukasi Masif

1. Kegiatan Edukasi Keuangan Masif berupa Pagelaran Ludruk dan Sosialisasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada Masyarakat Umum

Sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, khususnya Pilar I, Edukasi Keuangan, dan Pilar IV, Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah, dengan ini OJK telah menyelenggarakan Kegiatan Edukasi Keuangan dan Sosialisasi Penyaluran Bantuan Pangan NonTunai (BPNT) kepada masyarakat umum dalam bentuk pagelaran kesenian Ludruk. Kegiatan edukasi keuangan dan sosialisasi penyaluran BPNT tersebut dilaksanakan pada dua kabupaten yang merupakan salah satu sasaran penyaluran BPNT, yaitu di Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Malang. Adapun tujuan dari penyelenggaraan kegiatan tersebut antara lain, para peserta diharapkan dapat mengenal dan memahami tugas dan fungsi OJK, peserta juga diharapkan lebih mewaspadaai tawaran investasi ilegal, dan dapat lebih memahami produk dan layanan keuangan yang legal, serta para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diharapkan dapat lebih baik mengelola keuangan keluarga dengan memanfaatkan bantuan dari pemerintah dengan mengurangi perilaku konsumtif di masa yang akan datang. Masyarakat juga diharapkan dapat memahami mekanisme penyaluran dan sosialisasi pemanfaatan BPNT.

Kegiatan edukasi keuangan dan sosialisasi penyaluran BPNT tersebut telah diselenggarakan dengan baik berkat kerja sama OJK dengan pemerintah daerah setempat, kementerian sosial, dan IJK. Para IJK berpartisipasi dengan membuka booth dan membawa mobil layanan gerak untuk mengenalkan sekaligus mengedukasi produk layanan mereka. Materi edukasi disampaikan secara interaktif didalam pagelaran seni ludruk, sehingga masyarakat dapat terhibur sekaligus mendapatkan ilmu terkait peranan OJK, tips menabung yang aman dan lebih memahami teknis pemanfaatan penyaluran BPNT.

2. Islamic Banking (iB) Vaganza

OJK menyelenggarakan Expo iB Vaganza di Kota Medan dan Palembang. Kegiatan tersebut diisi oleh beragam rangkaian kegiatan yang edukatif dan menarik. Kegiatan edukatif berupa talkshow yang dibawakan oleh OJK dan IJK Syariah, dengan berbagai tema seperti Serunya Bertransaksi Syariah, Bank Syariah Solusi Kebutuhan Keluarga, dan Solusi Transaksi Keuangan Syariah. Booth-booth Bank Syariah peserta juga gencar menawarkan berbagai produk dan jasa perbankan syariah kepada pengunjung mall. Tidak hanya itu, OJK yang juga membuka booth pada expo dimaksud, ramai dikunjungi oleh pengunjung yang ingin bermain games seputar Bank Syariah dan OJK, juga untuk aktifitas cek Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Berbagai lomba

dengan hadiah menarik dan hiburan, menjadi daya tarik lainnya bagi pengunjung mall untuk turut meramaikan Expo iB Vaganza. Adapun pencapaian pada kegiatan dimaksud adalah adanya penambahan *Number of Account* (NoA) sebanyak 2.666 rekening dengan *Volume of Account* (VoA) sebesar Rp196 Miliar di Palembang dan 3.755 rekening dengan *Volume of Account* (VoA) sebesar Rp 70,5 Miliar di Medan.

C. Edukasi Keuangan bagi Komunitas

1. Edukasi Keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia

Sebagai bentuk upaya preventif dan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan para Pekerja Migran Indonesia, OJK melaksanakan Edukasi Keuangan kepada Pekerja Migran Indonesia di Korea Selatan dan Taiwan.

Kegiatan sosialisasi di Taiwan terselenggara berkat kerja sama dan dukungan dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Kantor Dagang dan Ekspor Impor (KDEI) Taipei serta PT Bank Negara Indonesia (persero), Tbk. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Taipei Main Station yang diikuti oleh 273 Pekerja Migran Indonesia di seluruh wilayah Taiwan. Sedangkan kegiatan sosialisasi di Korea Selatan diikuti oleh 350 Pekerja Migran Indonesia.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan materi Pengenalan OJK dan Waspada Investasi, Perencanaan Keuangan, Pengenalan Produk Perbankan, Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia, dan Kewirausahaan serta *Success Story* Mantan Pekerja Migran Indonesia. Peningkatan pemahaman peserta mengenai materi yang disampaikan berdasarkan nilai pre test dan post test sebesar 20,03%. Dalam rangkaian kegiatan edukasi keuangan tersebut, terdapat pembukaan rekening tabungan secara gratis.

2. Edukasi Keuangan Kepada Komunitas Pelajar, Karyawan, dan Pengusaha Muda

Dalam rangka meningkatkan literasi dan keuangan, khususnya mengenai investasi, OJK pada menyelenggarakan edukasi keuangan bagi komunitas pelajar, karyawan, dan pengusaha muda di Jambi dan Yogyakarta, dengan total peserta mencapai 459 orang.

Secara umum materi yang disampaikan oleh para narasumber adalah sebagai berikut:

- Pengenalan OJK dan Waspada Investasi Ilegal;
- Pengenalan Pasar;
- Perencanaan Keuangan dengan Reksa Dana; dan
- Pengenalan investasi melalui Tekfin.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan pre dan post test sebanyak 11 pertanyaan kepada para peserta sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk mengukur tingkat pengetahuan para peserta. Dari hasil pre dan post test tersebut diketahui bahwa terjadi peningkatan pengetahuan sebesar $\pm 6,93\%$.

3. Edukasi Keuangan bagi UMKM

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai lembaga jasa keuangan serta produk dan layanan keuangan untuk para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), OJK bekerja sama dengan Komunitas Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda Surabaya telah melaksanakan Edukasi Keuangan dalam bentuk rangkaian pelatihan, seminar dan *workshop* UMKM di Surabaya. Sepanjang triwulan III-2019, OJK telah melaksanakan dua kali rangkaian kegiatan dimaksud. Pada kegiatan tersebut para peserta pelaku UMKM mendapatkan materi edukasi antara lain sebagai berikut: Pengenalan OJK dan Perencanaan Keuangan, Waspada Investasi Ilegal, Penyusunan dan Analisa Laporan Keuangan bagi UMKM, Strategi Menyusun branding product, Teknik menentukan desain kemasan produk yang menarik, dan Pemasaran produk melalui pendekatan Teknologi Digital.

4. Galeri Investasi Mobile (GIM)

Dalam rangka meningkatkan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat di sektor pasar modal, (OJK bersama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali melaksanakan kegiatan Peluncuran Galeri Investasi Mobile (GIM). Peluncuran GIM dilaksanakan agar program galeri investasi yang telah ada di kampus saat ini lebih proaktif untuk menjangkau masyarakat sekitar kampus.

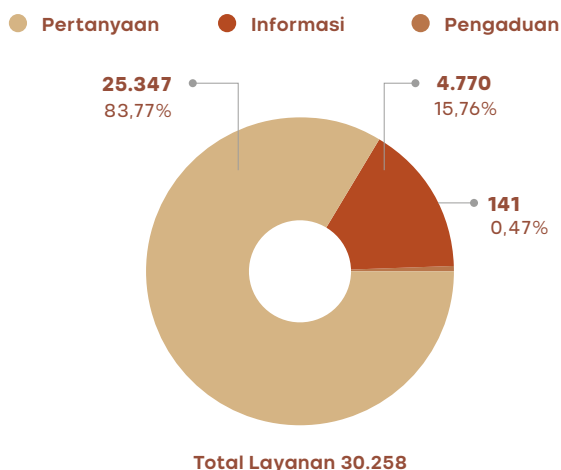
Peluncuran GIM kali ini dilaksanakan di Universitas Pembangunan Jaya (UPJ) Bintaro, Tangerang Selatan. Kegiatan ini dihadiri oleh 245 peserta dari berbagai latar belakang diantaranya perwakilan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), Aparatur Sipil Negara (ASN) dari pemerintah kota dan direktorat jenderal pajak setempat, ibu-ibu PKK, guru, pelaku UMKM, masyarakat umum, dosen, serta mahasiswa/i UPJ. Selain Peluncuran GIM, turut dilaksanakan perlombaan permainan *stocklab* yang diikuti oleh mahasiswa/i perwakilan universitas di Jabodetabek serta Seminar Pasar Modal yang dilaksanakan dalam bentuk diskusi panel. Pada Seminar Pasar Modal peserta diberikan materi tentang cara mengelola keuangan, pemanfaatan produk dan jasa di sektor pasar modal, cara membuka akses keuangan masyarakat di sektor pasar modal, serta menghimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam memilih produk investasi. Sebagai tindak lanjut dari peluncuran GIM tersebut, OJK mendorong BEI serta perusahaan sekuritas terkait untuk melakukan program edukasi dan inklusi keuangan secara berkala kepada perwakilan kelompok-kelompok masyarakat yang hadir sebagai peserta peluncuran GIM serta melakukan pemantauan/*monitoring* terhadap kinerja Galeri Investasi *Mobile*.

2.6.4 Perlindungan Konsumen

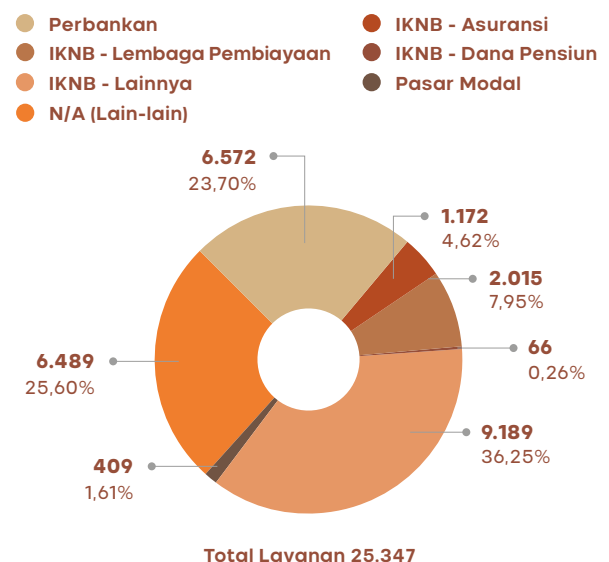
A. Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi

Pada triwulan III-2019, Layanan Konsumen OJK menerima 30.258 layanan yang terdiri dari 4.770 layanan penerimaan informasi (laporan), 25.347 layanan pemberian informasi (pertanyaan) dan 141 layanan pengaduan.

Grafik II - 16 ◇ Penerimaan Layanan



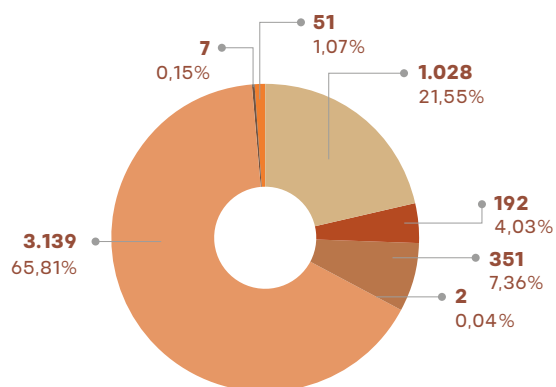
Grafik II - 17 ◇ Layanan Pertanyaan



Grafik II - 18 ◇ Layanan Informasi

Perbankan
 IKNB - Lembaga Pembiayaan
 IKNB - Lainnya
 N/A (Lain-lain)

IKNB - Asuransi
 IKNB - Dana Pensiun
 Pasar Modal



Total Layanan 4.770

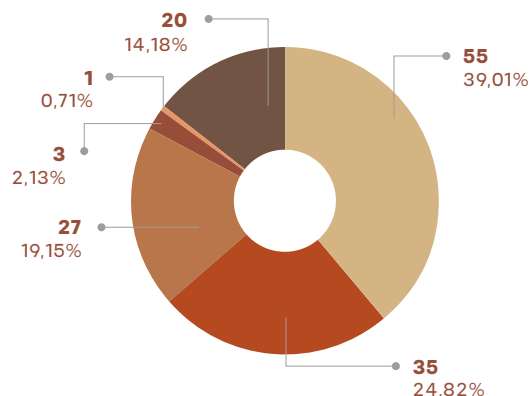
Sumber: OJK

Dari masing-masing sektor, terdapat jenis produk yang paling banyak ditanyakan oleh konsumen yaitu: produk kartu kredit pada perbankan, obligasi pada pasar modal, produk asuransi berjangka (*term life*) pada perasuransian, produk manfaat pasti pada industri

Grafik II - 19 ◇ Layanan Pengaduan

Perbankan
 IKNB - Lembaga Pembiayaan
 IKNB - Lainnya
 N/A (Lain-lain)

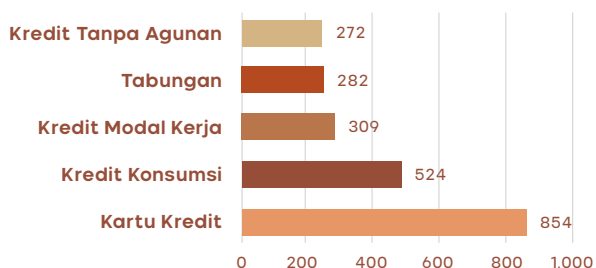
IKNB - Asuransi
 IKNB - Dana Pensiun
 Pasar Modal



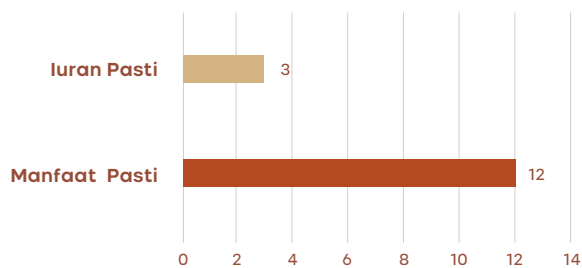
Total Layanan 141

dana pensiun, produk pembiayaan konsumen pada industri lembaga pembiayaan, dan produk penerima pinjaman dana pada IKNB-lainnya. Pada produk penerima pinjaman dana, sebagian besar berkaitan dengan industri *financial technology (fintech)*.

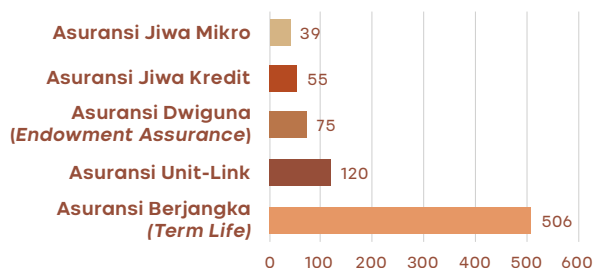
Grafik II - 20 ◇ Jenis Produk Terpopuler pada Sektor Perbankan



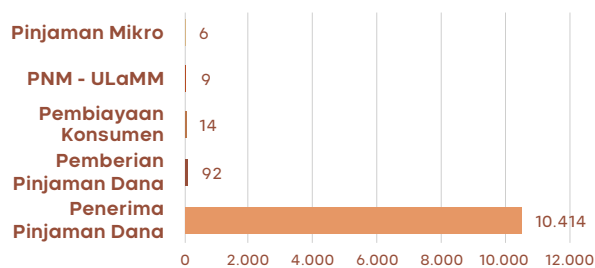
Grafik II - 21 ◇ Jenis Produk Terpopuler pada Industri Dana Pensiun



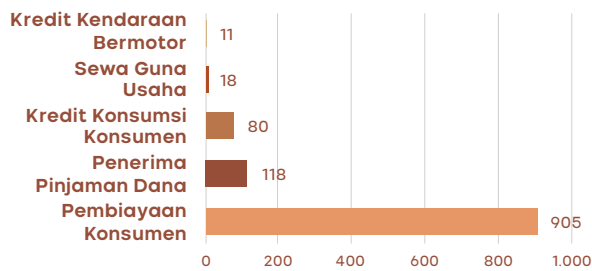
Grafik II - 22 ◇ Jenis Produk Terpopuler pada Industri Perasuransian



Grafik II - 23 ◇ Jenis Produk Terpopuler pada IKNB Lainnya



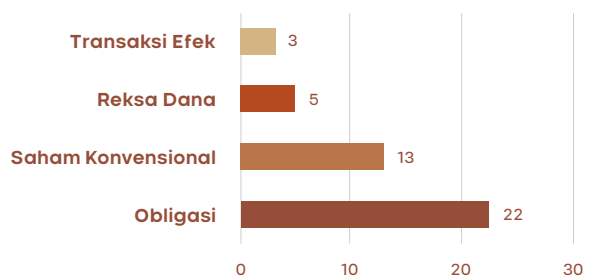
Grafik II - 24 ◇ Jenis Produk Terpopuler pada Industri Pembiayaan



Sumber: OJK

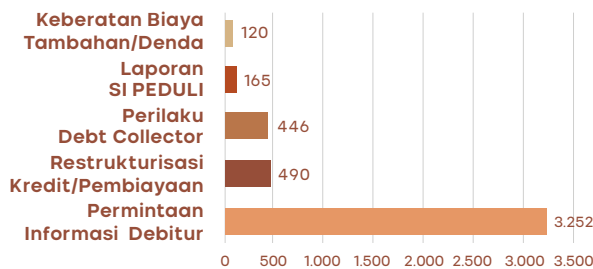
Pada triwulan III-2019, permasalahan yang paling banyak ditanyakan oleh konsumen pada masing-masing sektor yaitu: permintaan informasi debitur pada sektor perbankan, legalitas pujk dan produk pada sektor pasar modal, kesulitan klaim pada

Grafik II - 25 ◇ Jenis Produk Terpopuler pada Sektor Pasar Modal

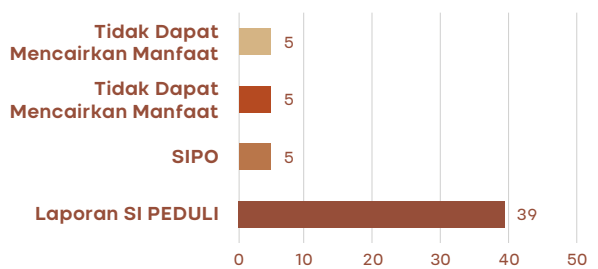


industri perasuransian, laporan SIPEDULI (Sistem Informasi Pelaporan dan Perlindungan Konsumen) pada industri dana pensiun, permintaan informasi debitur pada industri lembaga pembiayaan, dan perilaku *debt collector* pada IKNB-lainnya.

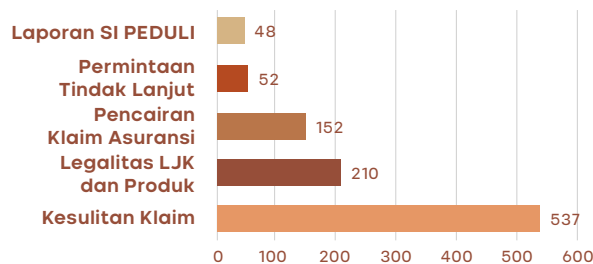
Grafik II - 26 ◇ Jenis Permasalahan Terbanyak pada Sektor Perbankan



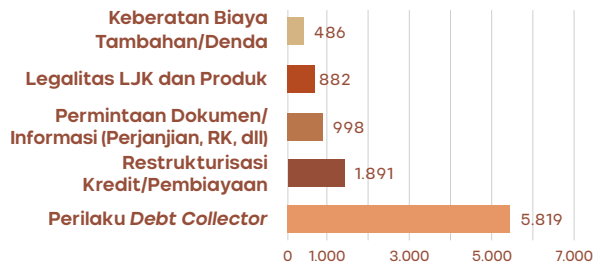
Grafik II - 27 ◇ Jenis Produk Terbanyak pada Industri Dana Pensiun



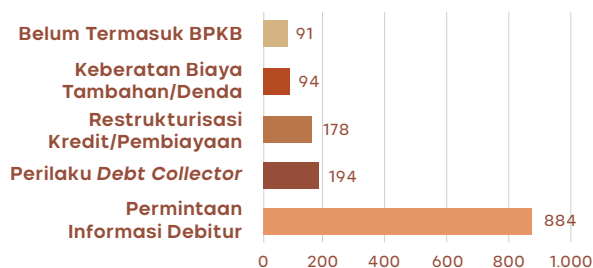
Grafik II - 28 ◇ Jenis Produk Terbanyak pada Industri Perasuransian



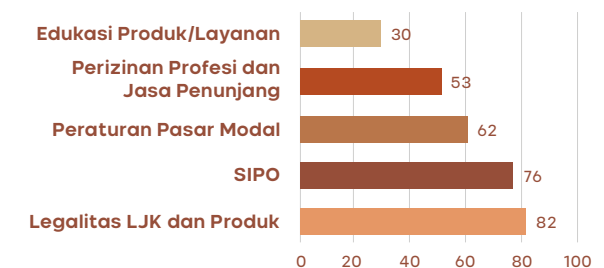
Grafik II - 29 ◇ Jenis Produk Terbanyak pada IKNB Lainnya



Grafik II - 30 ◇ Jenis Produk Terbanyak pada Industri Pembiayaan



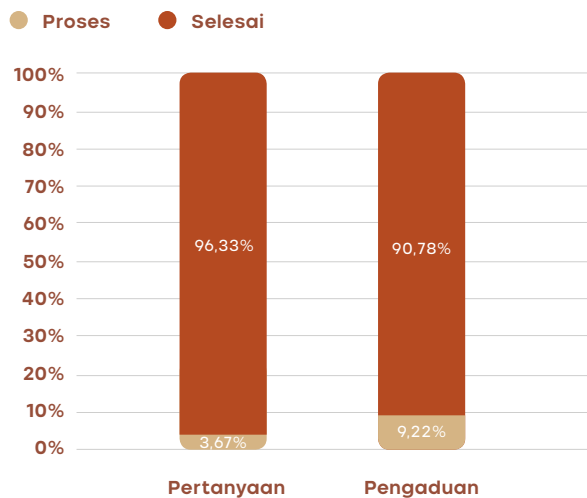
Grafik II - 31 ◇ Jenis Produk Terbanyak pada Sektor Pasar Modal



Sumber: OJK

Pada layanan yang masuk di triwulan III-2019, tingkat penyelesaian layanan pertanyaan sebesar 96,33% (24.418 layanan), sedangkan layanan pengaduan yang selesai sebanyak 90,78% (128 pengaduan).

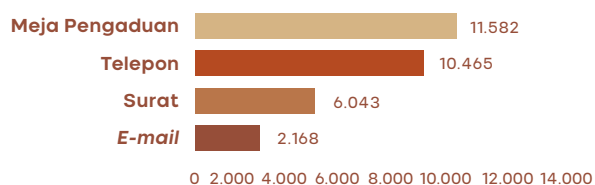
Grafik II - 32 ◇ Tingkat Penyelesaian Layanan



Sumber: OJK

Guna mempermudah konsumen dan/atau masyarakat dalam mengakses layanan konsumen, OJK menyediakan berbagai kanal penerimaan layanan antara lain melalui media email, telepon, surat dan walk in. Adapun jumlah konsumen yang mengakses layanan konsumen dimaksud, sebagai berikut:

Grafik II - 33 ◇ Kanal Layanan



Sumber: OJK

Berdasarkan grafik kanal layanan triwulan III-2019, konsumen dan/atau masyarakat paling banyak mengakses layanan konsumen OJK melalui email atau surat elektronik. Hal ini dapat menunjukkan bahwa preferensi konsumen sudah mulai bergeser ke arah digital. OJK sedang mengembangkan kanal layanan konsumen melalui *Whatsapp* dan *website* untuk memfasilitasi *digital savvy consumer*.

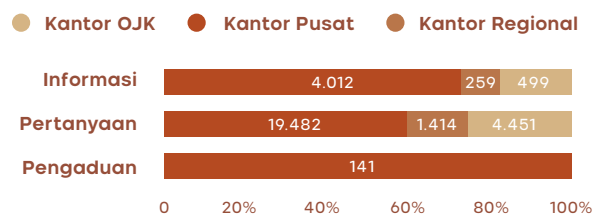
Tabel II - 38 ◇ Penerimaan Layanan OJK

Penginput	Total Layanan	Porsi
Kantor Pusat	23.635	78,11%
Kantor Regional	1.673	5,53%
Kantor OJK	4.950	16,36%
Total	30.258	100,00%

Sumber: OJK

Guna meningkatkan aksesibilitas layanan konsumen, OJK juga melayani konsumen di Kantor Regional (KR) dan Kantor OJK (KOJK) pada masing-masing wilayah untuk menerima dan menangani layanan konsumen. Berdasarkan tabel penerimaan layanan di atas, Kantor Pusat menjadi satuan kerja yang menerima layanan konsumen terbanyak yaitu sebesar 78,11% dari total penerimaan layanan pada triwulan III - 2019.

Grafik II - 34 ◇ Perbandingan Penerimaan Layanan Berdasarkan Satuan Kerja



Sumber: OJK

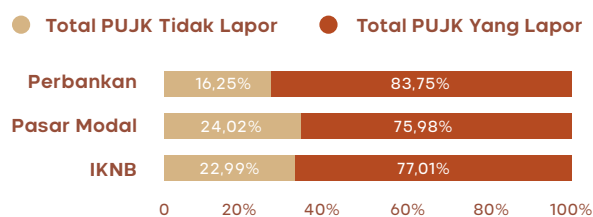
B. Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Mekanisme IDR melalui SIPEDULI (Sistem Informasi Pelaporan dan Perlindungan Konsumen)

Analisis pelayanan konsumen sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh OJK juga memperhatikan data dan informasi pelayanan pengaduan oleh PUJK yang dikirimkan secara elektronik dan berkala kepada OJK melalui SIPEDULI (Sistem Informasi Pelaporan dan Perlindungan Konsumen). Hal ini didasarkan pada POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan SEDK No.2/SEOJK.07/2014 tentang pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).

Dari hasil rekap laporan triwulan III-2019, terdapat 3.074 PUJK yang wajib melaporkan pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK. Dari total 3.074 PUJK yang wajib lapor, secara rata-rata dari tiga sektor, sebesar 81,36% (2.501 PUJK) yang patuh melakukan pelaporan dengan rincian sebagai berikut:

- Sektor Perbankan mencapai 83,75%;
- Sektor IKNB mencapai 77,01%; dan
- Sektor Pasar Modal mencapai 75,98%.

Grafik II - 35 ◇ Tingkat Penyampaian Laporan PUJK pada SIPEDULI



Sumber: OJK

Pada triwulan III-2019, sebanyak 824.906 pengaduan yang diterima dan dilaporkan oleh PUJK dan dari total pengaduan tersebut sebesar 93,76% (773.403) dilaporkan telah diselesaikan oleh PUJK.

Lembaga	Persetujuan Permohonan		
	Total Pengaduan	Selesai	% Selesai
IKNB	163.932	162.429	99,08%
Pasar Modal	500	495	99,00%
Perbankan	660.474	610.479	92,43%
Total	824.906	773.403	93,76%

C. Asistensi Layanan Konsumen OJK

Sepanjang triwulan III - 2019, OJK melakukan empat kali asistensi dan sosialisasi perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yaitu di Kupang, Surabaya, Palembang dan Pontianak. Pelaksanaan kegiatan asistensi bertujuan untuk mensosialisasikan ketentuan penanganan Layanan Konsumen OJK, meningkatkan kemampuan penanganan dan penyelesaian pengaduan bagi pegawai OJK di Kantor Regional maupun Kantor OJK, mendukung percepatan penanganan pengaduan, meningkatkan pemahaman tentang tata cara penggunaan Sistem Layanan Konsumen OJK/CRM, serta pemahaman penyelesaian sengketa konsumen melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).

Sementara itu kegiatan sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) mengenai pentingnya

aspek perlindungan konsumen bagi industri jasa keuangan, mensosialisasikan ketentuan perlindungan konsumen OJK, mensosialisasikan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta mensosialisasikan konsep pengawasan market conduct yang dilakukan oleh OJK dalam rangka pengawasan terhadap perilaku PUJK.

Beberapa hal yang menjadi concern OJK untuk dipaparkan kepada peserta kegiatan sosialisasi yaitu berkaitan dengan kepatuhan PUJK dalam menyusun perjanjian baku yang tidak bertentangan dengan ketentuan POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan serta Service Level Agreement (SLA) dalam rangka penanganan pengaduan pada tahap Internal Dispute Resolution (IDR).

2.6.5 Pembelaan Hukum Perlindungan Konsumen

A. Penyelesaian Sengketa Melalui LAPS

Terdapat 54 permohonan penyelesaian sengketa yang diterima oleh LAPS pada semester I-2019. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) menerima paling banyak permohonan yakni sebanyak 23 permohonan. Jenis sengketa diterima LAPSPI pada semester I-2019 antara lain terkait restrukturisasi atau *rescheduling* kredit, keringanan angsuran bunga, permasalahan agunan kredit, penyalahgunaan kartu kredit, sanggahan transaksi *online*, dan permasalahan penolakan pencairan deposito sedangkan jenis sengketa yang diterima BMAI pada semester I-2019 antara lain penolakan klaim dan klaim penebusan polis.

Tabel II - 39 ◇ Permohonan Penyelesaian Sengketa yang Diterima oleh LAPS pada Semester II-2018

Lembaga	Persetujuan Permohonan		Grand Total
	Disetujui	Tidak Disetujui	
Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)	23	-	23
Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPI)	-	-	-
Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP)	-	-	-
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)	12	11	23
Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPPI)	-	-	-
Badan Mediasi Pembiayaan, Pergadaian dan Ventura Indonesia (BMPPVI)	1	7	8
Total	36	18	54

Dari total 54 permohonan penyelesaian sengketa yang diterima dan diproses oleh LAPS tersebut di atas, terdapat total 18 permohonan yang ditolak karena beberapa hal yakni tidak memenuhi persyaratan administratif, sengketa akan diselesaikan melalui mekanisme *Internal Dispute Resolution* (IDR), sengketa bukan terkait hal keperdataan dan sengketa di luar sektor LAPS terkait. Dari 36 permohonan yang disetujui LAPS untuk ditindaklanjuti, sebanyak 23 permohonan ditindaklanjuti melalui layanan mediasi, satu permohonan ditindaklanjuti melalui layanan adjudikasi, dan dua permohonan ditindaklanjuti melalui layanan arbitrase. Sisanya sebanyak 10 permohonan ditindaklanjuti dengan layanan lain seperti pemberian penjelasan dan rekomendasi.

OJK telah memulai persiapan pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Terintegrasi (LAPST). Pembentukan LAPST merupakan kebijakan OJK yang tertuang dalam *roadmap* 2018-2022 dalam mendorong penyelesaian sengketa di luar pengadilan oleh satu lembaga yang saat ini dilaksanakan oleh enam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) terdaftar di OJK.

Tujuan dibentuknya LAPST adalah untuk memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa melalui satu LAPS serta mengefektifkan akses konsumen di seluruh wilayah Indonesia dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Persiapan dimulai dari *knowledge sharing* dengan ahli dan praktisi serta pembahasan dengan asosiasi sektor jasa keuangan. Pembahasan mencakup rancangan anggaran dasar, bentuk hukum, struktur organisasi, pendanaan, sumber daya manusia, remunerasi, dan peraturan LAPST. Hasil pembahasan antara lain menyepakati masa transisi pembentukan LAPST dan format struktur yang mengakomodasi keseluruhan LAPS yang terdaftar di OJK.

Selain itu, dalam rangka aksesibilitas, OJK berkolaborasi dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) melalui sosialisasi perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Selama triwulan III-2019, sosialisasi dilakukan di beberapa kota meliputi Kendari, Kupang, Surabaya, Purwokerto, dan Palembang. Di dalam sosialisasi dipaparkan mengenai materi perlindungan konsumen secara umum, penegakan disiplin pelaku pasar, penanganan pengaduan konsumen, LAPS di sektor pembiayaan, pergadaian, dan modal ventura, penjaminan, pasar modal, perasuransian, serta tugas perlindungan konsumen menurut UU Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK, dan rencana integrasi LAPS.

2.6.6 Market Conduct

A. Thematic Surveillance dan Operasi Intelijen Pasar

Hingga triwulan III-2019, OJK melaksanakan pemeriksaan *market conduct* terhadap 10 sampel PUJK yang terdiri dari tiga Bank Umum, satu Bank Umum Syariah, empat Bank Pembangunan Daerah, dan dua Perusahaan Pembiayaan. Pemeriksaan *market conduct* dilaksanakan bersama dengan jadwal pemeriksaan oleh Pengawas Prudensial masing-masing sampel. Berdasarkan hasil pemeriksaan, masih ditemukan klausula dalam perjanjian baku yang belum sesuai dengan ketentuan Pasal 22 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. Terkait hal ini, OJK meminta PUJK untuk melakukan penyesuaian, sehingga klausula perjanjian baku memenuhi prinsip keadilan, keseimbangan, dan kewajaran baik bagi Konsumen maupun PUJK.

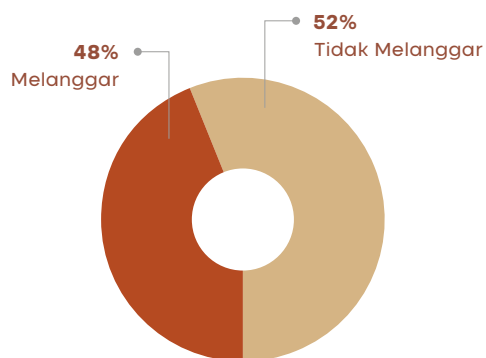
Hasil pemeriksaan *market conduct* diharapkan dapat menjadi pelengkap, sehingga PUJK tidak hanya kuat dari sisi bisnis, tapi juga menjalin hubungan yang baik dengan konsumen. Hal ini dimaksudkan agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan di Indonesia semakin meningkat.

B. Pemantauan Iklan Triwulanan

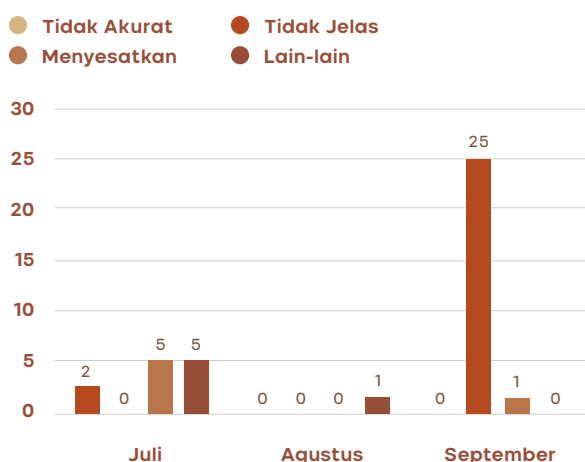
Sepanjang periode pelaporan, terdapat 73 iklan terkait jasa keuangan yang dikumpulkan OJK. Dari seluruh iklan tersebut, ditemukan 48% (35 iklan) melanggar ketentuan yang tertuang dalam POJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyampaian Informasi dalam rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan serta masih belum menyesuaikan tuntunan dalam Pedoman Iklan Jasa Keuangan. Pelanggaran ini turun dibandingkan dengan triwulan II-2019 sebesar 56% iklan melanggar.

Kategori yang paling banyak dilanggar berturut-turut adalah tidak jelas, tidak akurat dan menyesatkan. Kategori Tidak Jelas meningkat pesat di Bulan September. Hal ini disebabkan oleh banyaknya iklan Tidak Langsung oleh merchant yang mempromosikan produk dan/atau layanan multi-PUJK. Iklan Tidak Langsung biasanya tidak mencantumkan pernyataan bahwa PUJK yang bekerja sama terdaftar dan diawasi oleh OJK. Meski tidak langsung dipublikasikan oleh PUJK, Iklan Tidak Langsung tetap harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Grafik II - 36 ◇ Pelanggaran Iklan



Grafik II - 37 ◇ Tren Pelanggaran Iklan



Sehubungan dengan hasil pemantauan ini, sepanjang triwulan III-2019 OJK telah mengirimkan 24 Surat Pembinaan kepada PUJK yang melakukan pelanggaran iklan.

2.7 PENYIDIKAN SEKTOR JASA KEUANGAN

2.7.1 Penanganan Perkara

Selama triwulan III-2019, OJK menerbitkan enam Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), enam pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan, dan enam berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap (P-21) sehingga sampai dengan triwulan III-2019, OJK telah melaksanakan kegiatan penyidikan yang terdiri dari:

Tabel II - 40 ◇ Penyidikan

Penyidikan		
Perkara Perbankan	Perkara Bank Umum dan BPR/S	13
Perkara Pasar Modal	Perkara Emiten PP	4
Perkara IKNB	Perkara Asuransi	1
Total		18

Dari hasil penyidikan dan gelar perkara, OJK selanjutnya mengirimkan delapan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan RI dengan detail sebagai berikut:

Tabel II - 41 ◇ Pemberkasan Kejaksaan

Perkara	Penyidikan	P21	
Perbankan	Perkara BPR/S	9	9
Pasar Modal	Perkara Emiten / PP	3	3
IKNB	Perkara Pembiayaan	2	1
Total		8	13

Secara total, selama 2019 terdapat 13 berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan RI.

2.7.2 Kebijakan dan Dukungan Penyidikan

Dalam rangka upaya pemenuhan infrastruktur yang berupa penyempurnaan ketentuan pelaksanaan penyidikan, perumusan dan evaluasi Nota Kesepakatan, serta penyusunan kajian terkait tindak pidana sektor jasa keuangan, selama triwulan III-2019, OJK melaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

- Review Nota Kesepakatan OJK dengan Instansi penegak hukum;
- Penyusunan ketentuan terkait *Restorative Justice* di Sektor Jasa Keuangan;
- Penyusunan ketentuan pembentukan *Task Force* dalam rangka penguatan koordinasi penyelesaian perkara tindak pidana sektor jasa keuangan;
- Kajian Kewenangan Penyidik OJK dalam melakukan upaya paksa; dan
- Kajian putusan pengadilan atas perkara Perbankan dan IKNB.

2.7.3 Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi)

Dalam rangka upaya pencegahan terhadap kegiatan penawaran investasi yang diduga ilegal, Satgas Waspada Investasi memiliki program kerja melakukan kegiatan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat dan pembekalan KR/KOJK.

Kegiatan sosialisasi dan edukasi dilaksanakan di beberapa wilayah dengan skala prioritas terhadap daerah yang banyak beroperasinya penawaran kegiatan investasi yang diduga ilegal. Peserta kegiatan sosialisasi dan edukasi di masing-masing wilayah berasal dari segenap unsur masyarakat antara lain adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, TNI. Dengan narasumber dari OJK, Bareskrim Polri, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi & UKM.

Pada triwulan III-2019, Satgas Waspada Investasi mengadakan kegiatan sosialisasi dan edukasi waspada investasi kepada masyarakat, pembekalan Tim Kerja SWID dan Kuliah Umum dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 42 ◇ Tingkat Pemahaman

Sosialisasi dan Edukasi Waspada Investasi	
Kota	Riau Semarang Jember Medan Bali
Pembekalan Tim Kerja SWID	
KR/KOJK	KOJK Bengkulu KOJK Kepulauan Riau KOJK Malang KP 8 Bali KOJK Nusa Tenggara Timur
Kuliah Umum	
Universitas	Universitas Negeri Yogyakarta Universitas Udayana Bali

2.7.4 Penanganan Perkara Investasi oleh Satgas Waspada Investasi

Pada periode triwulan III-2019, OJK dan Satgas Waspada Investasi telah menghentikan 106 Entitas investasi ilegal, 406 Entitas *fintech peer to peer lending* tanpa izin OJK dan 30 usaha gadai tak berizin.

Grafik II - 38 ◇ Penghentian Entitas Investasi Ilegal oleh Satgas Waspada Investasi



2.8 PENANGANAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME



Pada tanggal 30 September 2019, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Perubahan tersebut dilatarbelakangi oleh:

1. Komitmen Indonesia untuk memenuhi standar internasional terkait APU PPT
 - a. Hasil Mutual Evaluation Review (MER) Indonesia oleh Asia Pacific Group on Money Laundering tahun 2017/2018 yang memuat beberapa key deficiencies dan rekomendasi pemenuhan deficiencies tersebut.
 - b. Hasil Second Round Review on Exchange of Information on Request for Tax Purposes (EOIR) yang memuat rekomendasi untuk memastikan bahwa informasi mengenai Beneficial Owner dari seluruh nasabah wajib diidentifikasi dan diverifikasi oleh Penyedia Jasa Keuangan.
2. Persiapan menghadapi MER Indonesia oleh Financial Action Task Force (FATF) tahun 2019/2020 sebagai syarat keanggotaan penuh Indonesia pada FATF.
3. Penerbitan Peraturan Bersama Menlu RI, Kapolri, Kepala PPATK, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pemblokiran Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.



Adapun pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam POJK perubahan tersebut mencakup (a) kewajiban bagi Penyedia Jasa Keuangan untuk melakukan langkah-langkah tindak lanjut atas Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal antara lain pemeliharaan data, identifikasi dan pemeriksaan kesesuaian identitas, dan pemblokiran secara serta merta; (b) penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang mengacu pada National Risk Assessment dan Sectoral Risk Assessment; (c) penyempurnaan ketentuan verifikasi dan penatausahaan dokumen pada kegiatan transfer dana; (d) dukungan percepatan penyampaian informasi kepada penegak hukum; serta (e) penetapan batas/threshold pengenaan sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran selain keterlambatan penyampaian laporan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam menjalankan penerapan program APU dan PPT, diharapkan seluruh Penyedia Jasa Keuangan dapat memperhatikan pula ketentuan perubahan yang diatur dalam POJK tersebut.

2.8.1 Persiapan Pelaksanaan MER FATF 2019-2020

Indonesia tengah memulai proses *Mutual Evaluation Review* (MER) untuk menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF) dengan agenda *on-site visit* pada bulan Maret 2020 dan hasilnya akan dibahas pada FATF Plenary Meeting bulan Oktober 2020. MER FATF adalah prosedur yang harus diikuti oleh suatu negara untuk dapat menjadi anggota penuh FATF. Pengajuan keanggotaan Indonesia pada FATF dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang didorong antara lain oleh kondisi Indonesia sebagai satu-satunya anggota G20 yang belum menjadi anggota FATF.

Salah satu agenda penting MER FATF pada triwulan III 2019 adalah pelaksanaan FATF Indonesia *Country Training – Pre Mutual Evaluation Workshop* tanggal 8 – 9 Agustus 2019 di Bandung yang bertujuan untuk membahas metodologi penilaian MER yang terdiri dari *technical compliance* dan *effectiveness assessment*, serta melakukan *mock-up interview*. Narasumber pada kegiatan ini adalah perwakilan FATF *Secretariat* yaitu David Lewis – FATF *Executive Secretary*, Ashish Kumar dan Ailsa Hart, serta dihadiri oleh perwakilan Kementerian/Lembaga yang berperan dalam rezim APU PPT di Indonesia.

OJK, sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur terbesar di rezim APU PPT Indonesia, memanfaatkan kegiatan FATF *Country Training* tersebut secara maksimal untuk menggali informasi dan menyusun strategi menghadapi MER FATF, serta memberikan impresi yang baik kepada perwakilan FATF *Secretariat* tentang kesiapan OJK khususnya saat *mock-up interview*. Sebelum pelaksanaan FATF *Country Training* tersebut, OJK bersama dengan tim *technical assistance* dari *International Monetary Fund* (IMF) telah terlebih dahulu melakukan *mock-up interview* pada tanggal 15-16 Juli 2019 di Jakarta yang bertujuan untuk memberikan pengalaman dan mengidentifikasi perbaikan yang perlu dilakukan saat pelaksanaan *interview* pada *on-site visit* yang sebenarnya.

Selanjutnya, selama Triwulan III 2019, upaya persiapan MER FATF yang dilakukan oleh OJK difokuskan pada penyusunan jawaban atas kuesioner efektivitas implementasi rekomendasi FATF (kuesioner *Immediate Outcomes*/IO) yang relevan dengan tugas dan fungsi OJK yaitu (a) IO2 – *International Cooperation*; (b) IO3 – *Supervision*; (c) IO4 – *Preventive Measures*; (d) IO5 – *Legal Persons and Arrangements*; (e) IO7 – *Investigations*; (f) IO10 – *Terrorist Financing*; dan (g) IO11 – *Proliferation of Weapon Mass Destruction*. Dalam menyusun jawaban kuesioner IO tersebut, OJK melibatkan dan melakukan koordinasi aktif dengan internal OJK melalui pelaksanaan 6 kegiatan (rapat, *focus group discussion* dan konsinyering) dan juga eksternal OJK (Kementerian/Lembaga dan perwakilan

Penyedia Jasa Keuangan (PJK)) melalui 3 kegiatan (rapat dan *focus group discussion*) selama triwulan III 2019.

Dengan berbagai upaya intensif di atas, OJK telah menyampaikan jawaban atas kuesioner IO tersebut kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), selaku koordinator nasional persiapan MER FATF, melalui surat resmi pada tanggal 23 September 2019. Selanjutnya, terhadap jawaban kuesioner IO dari masing-masing Kementerian/Lembaga akan dikonsolidasikan oleh PPATK menjadi jawaban nasional dan direncanakan disampaikan kepada tim *assessor* MER FATF pada akhir bulan Oktober 2019.

Selain bersiap dinilai oleh para *assessor*, OJK turut berpartisipasi dalam training persiapan menjadi *assessor* yang diselenggarakan oleh FATF dan *Asia Pacific Group on Money Laundering* (APG) pada tanggal 2-6 September 2019 di Bandung. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kewajiban Indonesia, sebagai anggota APG dan nantinya sebagai anggota FATF, untuk menjadi bagian dari tim *assessor* yang menilai kepatuhan rezim APU PPT di negara anggota lainnya.

2.8.2 Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia, baik bagi pengawas APU PPT di internal OJK maupun bagi para pelaku industri jasa keuangan, merupakan hal penting untuk penguatan dan peningkatan kualitas program APU PPT di industri jasa keuangan.

Dari sisi pengawas di internal OJK, program peningkatan dan pengembangan kapasitas dilakukan melalui program sertifikasi level 1 yang diberikan kepada seluruh pengawas, dan juga program pelatihan lanjutan yang mengangkat topik atau *current issues* tertentu. Pada triwulan III 2019, program pelatihan APU PPT kepada pengawas OJK yang telah diselenggarakan yaitu:

1. *In-House Training* Penerapan *Risk Based Approach* dalam Pengawasan Program APU PPT dan Implementasi Sistem Informasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (SIGAP) Tahap 2 pada tanggal 3-5 Juli 2019 di Jakarta.
2. Materi program APU PPT dan SIGAP pada *workshop* untuk pengawas BPR di wilayah Indonesia Timur tanggal 1-2 Agustus 2019 di Bali.
3. *Workshop Certified AML Specialist* (CAMS) tanggal 21 Agustus 2019 di Jakarta.
4. *Workshop* implementasi SIGAP untuk Pengawas OJK di wilayah Indonesia bagian Barat tanggal 22-23 Agustus 2019 di Mercure Alam Sutera.
5. *Training of Trainers* Pengawasan Program APU PPT pada tanggal 17-20 September 2019 di Jakarta dengan narasumber dari OJK, AUSTRAC, Konsultan EY, dan Talkinc.

6. Program Pendidikan Calon Staf OJK Angkatan 4 Tahun 2019 pada tanggal 25 September 2019 di LPPI Jakarta.

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia juga dilakukan untuk pelaku industri jasa keuangan. OJK secara mandiri maupun bekerja sama dengan asosiasi-asosiasi sektor jasa keuangan menyelenggarakan pelatihan topik APU PPT baik di pusat maupun di daerah-daerah. Pelatihan APU PPT untuk industri jasa keuangan yang telah diselenggarakan selama triwulan III-2019 yaitu:

1. *Keynote speaker* dan narasumber pada kegiatan sosialisasi dengan topik kesiapan industri perasuransian menghadapi MER FATF yang diselenggarakan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) pada tanggal 25 Juli 2019.
2. *Knowledge sharing session* terkait penerapan program APU PPT kepada para pelaku FinTech pada tanggal 9 Agustus 2019 di Wisma Mulia 2.
3. Penyelenggaraan *Workshop* Pendampingan Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko bagi BPR/BPRS tanggal 15-16 Agustus 2019 di Bali.
4. Narasumber pada Bank Mandiri *Anti Money Laundering Leader Forum* Tahun 2019 tanggal 9 September 2019 di Jakarta.
5. Narasumber pada Diskusi Panel "*Regulatory Landscape in Indonesia, Financial Crime Compliance Risks and Expectations for Financial Institutions*" pada Kegiatan *Correspondent Banking Academy* (CBA) tanggal 19 September 2019 di Jakarta.
6. Pelatihan Pengembangan Kompetensi *Front Officer* BPR/S yang diselenggarakan oleh Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DIY pada tanggal 5 September 2019 di Semarang.
7. Narasumber dengan materi APU PPT pada kegiatan Evaluasi Kinerja dan Sosialisasi Ketentuan BPR/S Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 pada tanggal 12 September 2019 di Batam.
8. Narasumber pada kegiatan Sosialisasi APU PPT untuk PJK Bank Umum, Pasar Modal, dan IKNB yang diselenggarakan oleh Kantor OJK Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 13 September 2019 di Batam.

Selanjutnya, selama triwulan III 2019, terdapat rangkaian kegiatan Program Mentoring Berbasis Risiko TPPU (Promensisko) kepada para aparat penegak hukum yang diselenggarakan oleh PPATK dan melibatkan OJK sebagai narasumber. Kegiatan Promensisko ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para penegak hukum terhadap risiko TPPU khususnya terkait dengan tindak pidana asal TPPU berisiko tinggi. Selama triwulan III 2019, telah dilakukan 4 kegiatan Promensisko yang melibatkan OJK sebagai narasumber yaitu pada tanggal 1-4 Juli 2019 di Banten, 8-11 Juli 2019 di Sumatera Utara, 30 Juli – 1 Agustus 2019 di Banjarmasin, dan 17 September 2019 di Jakarta. Kegiatan Promensisko di Jakarta juga

mengundang perwakilan PJK untuk mensosialisasikan hasil *National Risk Assessment TPPU Updated*.

2.8.3 Koordinasi Kelembagaan

Koordinasi kelembagaan merupakan bagian penting dalam penguatan rezim APU PPT di Indonesia. Dalam rezim APU PPT nasional telah dibentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) yang diketuai oleh Menkopolkum dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Ketua Dewan Komisiner OJK merupakan salah satu anggota pada Komite TPPU.

Koordinasi kelembagaan dalam rezim APU PPT di Indonesia dilakukan baik dalam ruang lingkup Komite TPPU atau koordinasi bilateral antar lembaga. Selama triwulan III 2019, koordinasi kelembagaan bidang APU PPT dilakukan OJK dengan beberapa Kementerian/ Lembaga seperti: (1) PPATK (*joint audit*, Perjanjian Kerja Sama (PKS), *Sectoral Risk Assessment* (SRA), pelatihan); (2) Badan Narkotika Nasional dalam pelaksanaan *Press Release* kasus TPPU; (3) Kementerian Sekretariat Negara terkait pembahasan perubahan Peraturan Pemerintah terkait pihak pelapor dalam rezim APU PPT Indonesia; (4) Direktorat Jenderal Pajak terkait pengawasan kepatuhan *due diligence* dalam rangka pemenuhan standar *automatic exchange of information for tax purposes*; (5) Pemerintah Amerika melalui program USAID Cegah; (6) *courtesy meeting* dengan *Islamic Development Bank*; dan (7) *courtesy meeting* dengan *Congressman Stephen Lynch, U.S. House of Representatives Oversight and Reform Committee*.

2.9 HUBUNGAN KELEMBAGAAN

Dalam rangka menguatkan peran OJK dalam fungsi pengaturan, pengawasan dan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, OJK memelihara hubungan kerja sama dengan instansi terkait baik dalam lingkup domestik dan internasional.

2.9.1 Kerja Sama Domestik

Selama periode triwulan III-2019, OJK telah menyelenggarakan 63 kegiatan bersama yang melibatkan beberapa lembaga negara, antara lain:

- Dewan Perwakilan Rakyat;
- Kementerian Keuangan;
- Mahkamah Agung;
- Bank Indonesia;
- Lembaga Penjamin Simpanan;
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Pemerintah Daerah; dan
- Industri Jasa Keuangan.

Kegiatan kelembagaan yang telah dilakukan antara lain Sosialisasi OJK bersama Anggota Komisi XI DPR RI antara lain terkait Peran OJK Dalam Gerakan Edukasi Dan Inklusi Keuangan Untuk Kesejahteraan Masyarakat, Waspada Investasi Bodong, Peran OJK Dalam Mendorong Pertumbuhan Persekonomian Daerah Melalui Lembaga Keuangan Mikro, Peran OJK Dalam Mewujudkan UMKM Yang Mandiri Di Era 4.0, Peran OJK Dalam Gerakan Edukasi Dan Inklusi Keuangan Untuk Kesejahteraan Masyarakat, Sosialisasi Dan Edukasi OJK Dikalangan Ibu Rumah Tangga, Simpel Cerdas Mengelola Keuangan Sejak Dini, Tantangan Dan Peluang Generasi Milenial Dalam Era Ekonomi Digital Dan Seminar Pengenalan Pasar Modal, Penyuluhan Jasa Keuangan, Sikapi Uangmu Dengan Bijak, Mengenal Secara Dekat Cara Investasi Syariah Dalam Berbisnis Melalui Perbankan Syariah, Strategi Bisnis Dan Investasi Melalui Perbankan Syariah, Deklarasi Wirausaha Muda, Peran OJK Dorong Generasi Milenial Berinvestasi, Peningkatan Literasi Keuangan Masyarakat, Memantapkan Peran Perhiptani Dalam Percepatan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani Untuk Meningkatkan Pendapatan Dan Kesejahteraan Petani, Peran Masyarakat Dalam Pengawasan *Fintech* Illegal, Mencetak Entrepreneur Muda Kreatif. OJK juga melaksanakan kunjungan kerja, diskusi kelembagaan, *Focus Group Discussion* (FGD) dan rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI dengan pembahasan asumsi makro RAPBN tahun 2020 dan pengambilan keputusan.

2.9.2 Kerja Sama Internasional

A. Kerja Sama Hubungan Bilateral dan Regional

Dalam rangka memperkuat peran OJK dalam hubungan kerja sama bilateral dan regional diperlukan penguatan peran dan posisi OJK dalam perundingan jasa keuangan. Adapun tingkat peran dan posisi OJK dinilai dari posisi/*stance* OJK yang dapat diterima menjadi posisi Indonesia dan *counterparts* dalam penyelesaian perundingan perdagangan internasional untuk sektor jasa keuangan, baik untuk bilateral dan regional (ASEAN). Adapun sampai dengan triwulan III-2019 telah dilakukan:

a. Pertemuan *Working Committee on ASEAN Banking Integration Framework* (WC-ABIF)

Topik pembahasan tim teknis terkait tindak lanjut *Letter of Intent* (LoI) ABIF OJK dan Banco Sentral ng Pilipinas (BSP) serta disepakati untuk melanjutkan negosiasi ABIF dan melakukan *high level bilateral meeting* OJK dan BSP.

b. Pertemuan *High Level Meeting OJK dan Bank of Thailand* (BoT)

Topik pembahasan *High Level Meeting* OJK dan Bank of Thailand (BoT) adalah tahap awal negosiasi *Bilateral Agreement* ABIF OJK-BoT. BoT sepakat dengan *request* OJK untuk memperlakukan *flexible*

mode of entry (contoh: melakukan *take over* bank di Thailand, dapat berbentuk *representative office* atau *multi finance*, tanpa harus pendirian bank baru).

c. Perundingan *Working Group on Services* (WGS) *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA)

Teks *Annex on Financial Services* (FS) IK-CEPA telah selesai dibahas dan disepakati kedua pihak dengan menggunakan basis substansi *Annex on FS ASEAN-Korea Free Trade Agreement* (AK-FTA). Korea dapat menerima usulan OJK untuk menambahkan teks *financial regulatory authority* dalam definisi *public entity*. Ini mempertegas peran dan kewenangan OJK dalam pengaturan sektor jasa keuangan Indonesia.

d. *Joint Committee Meeting* (JCM) *Sub Committee on Trade in Services* (SC TiS) of *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA)

Telah ditindaklanjuti *outstanding issues* terkait FS pada *joint report* IJEPA yaitu permintaan Jepang agar Indonesia menderegulasi POJK Nomor 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan, agar Bank kepemilikan Jepang di Indonesia dapat mempekerjakan tenaga kerja Jepang untuk posisi *third-level employee* (tenaga *marketing/frontliner*). Adapun Indonesia meminta Jepang agar dapat memberikan perbaikan komitmen Mode 4 (*movement of natural persons*) perbankan (saat ini *unbound*, meskipun tidak terdapat ketentuan di Jepang yang memlimitasi TKA untuk bekerja di perbankan di Jepang).

Dalam rangka penguatan hubungan kerja sama kelembagaan OJK dengan otoritas keuangan asing maupun lembaga internasional diperlukan penguatan hubungan kerja sama kelembagaan OJK dengan Otoritas Keuangan asing maupun lembaga internasional. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan pembahasan perjanjian kerja sama baik dengan pihak internal maupun eksternal OJK (*counterparts*). Selain itu realisasi kegiatan dari implementasi kerja sama kelembagaan (baik yang didasarkan pada perjanjian kerja sama formal maupun tidak) yang telah dilakukan OJK dengan otoritas keuangan negara lain dan lembaga internasional tersebut. Adapun sampai dengan triwulan III-2019 telah dilakukan:

a. Negosiasi Pembahasan Perjanjian Kerja Sama Internasional

1. *Memorandum of Understanding* (MoU) OJK - *Securities Commission Malaysia* (SECOM) on *Fintech Cooperation* telah disetujui kedua belah pihak
2. OJK dan Hong Kong Monetary Authority (HKMA)
3. OJK - *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (CSSF) Luxembourg
4. World Bank Development Policy Loan (DPL) - OJK

B. Implementasi Kerja Sama Internasional

1. *High-Level Meeting* OJK dan Bank of Thailand (BoT)

Ketua Dewan Komisiner OJK bersama dengan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan dan Kepala Eksekutif Pengawasan IKNB telah melakukan pertemuan bilateral dengan Gubernur BoT dalam rangka mendukung peningkatan kerja sama sektor jasa keuangan di masing – masing yurisdiksi. Ruang lingkup pembahasan antara lain pengawasan *peer to peer lending*, *Sustainable Finance*, dan pengawasan perbankan.

2. *High Level Meeting* OJK - Korea Financial Services Commission (Korea FSC)

Ketua Dewan Komisiner bersama dengan Kepala Eksekutif Pengawas IKNB telah melakukan pertemuan bilateral dengan *Vice Chairman* Korea FSC dalam rangka peningkatan kerja sama internasional kedua otoritas. Topik diskusi antara lain pemanfaatan *Fintech* dalam sektor jasa keuangan dan pengawasan lintas batas.

3. Indonesia – Korea Financial Cooperation Forum

OJK bekerja sama dengan Korea Financial Services Commission dan Council on International Financial Cooperation (CIFIC) menyelenggarakan Indonesia – Korea Financial Cooperation Forum. Forum ini bertujuan untuk menjadi forum di mana kedua negara dapat saling bertukar pengalaman dan memaparkan perkembangan dan pemanfaatan teknologi di sektor jasa keuangan beserta pendekatan dan kebijakan yang ditempuh.

4. Pembahasan atas *Secondment* OJK di OECD

OJK melakukan pembahasan dengan OECD guna menjajaki keikutsertaan OJK dalam program *secondment* OECD khususnya terkait *blended finance*.

5. Pertemuan Teknis OJK- Japan Financial Services Agency (Japan FSA)

OJK menerima kunjungan Japan FSA untuk memberikan penjelasan lebih lanjut atas proses pelaksanaan kandidat yang akan mengikuti program *attachment* Japan FSA yaitu Global Financial Partnership Center (GLOPAC).

C. Kerja Sama Hubungan Multilateral

Sebagai anggota G-20, Indonesia berkepentingan untuk meng-implementasi-kan berbagai reform sebagai bentuk komitmen anggota G-20, termasuk standar di bidang keuangan, atau yang lebih sering disebut sebagai *Global Financial Sector Reforms* (GFSR). Untuk mendukung hal tersebut, OJK menjadi anggota berbagai fora keuangan internasional dengan tujuan dapat memahami, memberi masukan, dan mempertimbangkan bentuk implementasi terbaik bagi Indonesia terhadap standar keuangan yang ada (sesuai dengan prinsip *best fit*.)

Saat ini OJK menjadi anggota aktif di beberapa fora keuangan internasional antara lain: *Financial Stability Board* (FSB); *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS); *Islamic Financial Service Board* (IFSB); *International Organisation of Securities Commissions* (IOSCO); *The International Financial Consumer Protection Organisation* (FinConet); *International Capital Market Association* (ICMA); *International Association of Insurance Supervisors* (IAIS); *ASEAN Insurance Training and Research Institute* (AITRI); *International Organization of Pension Supervisors* (IOPS); *International Network on Financial Education* (INFE); *International Financial Reporting Standards* (IFRS); dan *The Insurance Information and Rating Forum of Asia* (IIRFA).

Selanjutnya, sebagai sarana untuk memonitor implementasi standar keuangan oleh anggota G20, secara periodik dilakukan berbagai asesmen implementasi standar-standar yang ada. Sebagai konsekuensinya, Indonesia menjalani beberapa asesmen dari lembaga internasional diantaranya: *Financial Sector Assessment Program* (FSAP) oleh IMF dan World Bank; *Regulatory Consistency Assessment Programme* (RCAP) oleh BCBS; *Country Peer Review* dan *Thematic Peer Review* oleh FSB; *The Report on the Observance of Standards and Codes Accounting and Auditing* (ROSC AA) oleh World Bank dan *Mutual Evaluation Report* (MER) oleh *Financial Action Task Force* (FATF).

Selain asesmen di atas, terdapat OJK juga berkontribusi dalam banyak survey terkait GFSR dari fora di atas antara lain: *Annual Survey of Investment Regulation of Pension Funds* oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD); *Survey OECD Project on the Contribution of Reinsurance to Risk Management*, IFSB Survey on *Investor Protection in Islamic Capital Markets*, FSB evaluation on effects of reforms on SME financing dan Survey FSB *Thematic Peer Review on Resolution Planning*.

Untuk memfasilitasi penyampaian kepentingan OJK terkait standar jasa keuangan, OJK melakukan penyusunan rekomendasi posisi/stance umum OJK di fora internasional dalam rangka penerapan standar internasional yang *best fit*. Selain itu untuk menguatkan peran dalam hubungan kerja sama multilateral, OJK melakukan peningkatan hubungan kerja sama multilateral dalam pemanfaatan Technical Assistance (TA) dari donor asing.

Sampai saat ini OJK telah memanfaatkan program *Technical Assistance* oleh lembaga internasional Antara lain: (i) *Asian Development Bank* (ADB); (ii) *World Bank Group* (WB); (iii) *International Monetary Fund* (IMF); (iv) *Islamic Development Bank* (IDB); (v)

Australian Securities & Investment Commission (ASIC) dan Australian Prudential Regulation Authority (APRA) melalui *Australia Indonesia Partnership for Economic Development* (PROSPERA).

Adapun sampai dengan triwulan III telah dilakukan : Pemetaan Isu terkait *Global Financial Sector Reforms* (GFSR) dan implementasi standar internasional yang terdiri dari : pelaksanaan FGD atau rapat dengan satker terkait: Pembahasan FSAP recommendation dan Article IV dengan satker terkait dan penyusunan *outline* laporan *Global Financial Sector Reform* terkait keanggotaan OJK pada fora-fora internasional. Dalam rangka peningkatan efektivitas program TA, sampai dengan triwulan III telah dilakukan pemetaan kebutuhan TA di seluruh satuan kerja OJK untuk selanjutnya berkoordinasi dengan lembaga internasional dalam menyelaraskan penawaran TA dengan program kerja di OJK. Adapun hal-hal yang dilakukan antara lain penyusunan rencana, pelaksanaan, dan monitoring, evaluasi program *Technical Assistance* dari *counterpart* asing baik yang bersifat lanjutan program yang sudah ada maupun baru. Selanjutnya, koordinasi terkait substansi dilakukan oleh satuan kerja terkait dengan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan oleh DINT.

D. Investor Relation Unit

Dalam rangka menjalankan fungsinya, IRU-OJK telah menjadi fasilitator pada pertemuan OJK dengan para investor maupun *stakeholders* lainnya dalam rangka pemenuhan permintaan informasi, khususnya terkait dengan perkembangan terkini sektor jasa keuangan dan regulasi pada sektor jasa keuangan yang berlaku di Indonesia. Adapun dalam menangani pertemuan OJK dengan *rating agency* pada triwulan III-2019 terdapat kunjungan dari S&P dengan topik *Annual Surveillance and Banking System Review of Indonesia*.

IRU telah memberikan layanan dalam fungsi International Relations bagi para *stakeholders* OJK dengan memfasilitasi 44 pertemuan dan/atau melakukan korespondensi sejak awal tahun dimana 15 di antaranya dilakukan pada triwulan III-2019. Adapun beberapa kunjungan yang telah difasilitasi oleh IRU, diantaranya:

- a. Kunjungan *Fitch Credit Ratings* dalam rangka *sharing knowledge* "Kriteria Sovereign Rating *Fitch* serta Aspek Lainnya Terkait Peringkat Kredit Country Assessment". Adapun sesi *sharing* informasi ini disampaikan langsung oleh *Fitch Sovereign Analyst*, yaitu Mr. Thomas Rookmaker selaku *Primary Analyst* yang bertanggungjawab melakukan analisa terhadap *sovereign credit rating* Indonesia, dalam rangkaian kunjungannya ke Jakarta.
- b. Kunjungan *American Chamber Indonesia* (AmCham) dan U.S. Chamber of Commerce pada tanggal

19 Agustus 2019 yakni interview dalam rangka penyusunan materi US – Indonesia *Investment Report 2019* yang akan dipresentasikan dalam kegiatan U.S. – Indonesia *Investment Summit 2019*. Adapun dalam hal ini, selain memberikan pendampingan saat berlangsungnya diskusi, IRU – OJK menyiapkan bahan paparan berupa data statistik dan informasi lainnya yang dibutuhkan oleh instansi terkait, khususnya mengenai outlook investasi Indonesia di Sektor Jasa Keuangan, yaitu berupa perkembangan terkini investasi AS di Sektor Jasa Keuangan serta regulasi yang berlaku.

- c. Kunjungan S&P Global pada tanggal 24 September 2019 dalam rangka penyampaian informasi proses akuisisi Pefindo. Dalam kunjungan tersebut, perwakilan dari S&P Global menyampaikan beberapa *update* perkembangan proses akuisisi Pefindo, diantaranya proses tahap pertama akuisisi saham Pefindo sebesar 15%, saham yang akan diakuisisi adalah saham baru yang akan diterbitkan dalam portepel perseroan melalui proses *right issue* tanpa HMETD. Selain itu pula, disampaikan juga rencana pimpinan S&P Global pada akhir tahun akan datang ke Indonesia dan permohonan audiensi dengan Presiden RI yang mana OJK akan diminta untuk turut hadir.

IRU juga berperan dalam penyusunan serta penerbitan publikasi mengenai perkembangan kondisi ekonomi terkini, antara lain mendukung penyusunan buku IRU-Nasional setiap bulannya dan *Quarterly Report on Indonesia Financial Sector Development*.

E. Sustainable Finance

OJK menjalankan fungsi koordinasi dengan berbagai *stakeholder* K/L terkait baik skala nasional maupun internasional dan pemenuhan narasumber di beberapa lembaga/organisasi. Adapun materi yang disampaikan mengenai implementasi POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Pelaksanaan koordinasi telah dilakukan dengan beberapa lembaga internasional yang telah melaksanakan MOU dengan OJK antara lain: IFC dan UNDP. Terdapat beberapa lembaga yang dalam proses MOU dengan OJK antara lain: USAID, WWF, dan GIZ. Adapun lembaga internasional lainnya yang berminat kerja sama dengan OJK antara lain: WRI, AFD, IDH. Melalui upaya koordinasi tersebut dapat dipetakan dukungan lembaga internasional pada pelaksanaan kegiatan SF di OJK sesuai dengan kekhasan *project* masing-masing lembaga untuk mendukung Program SF dan penyusunan kembali *Roadmap* tahap 2 (2020 – 2024).

OJK juga melakukan koordinasi dan menghadiri FGD, *workshop*, *capacity building* dengan beberapa K/L terkait sebagai narasumber, antara lain: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kemenko Perekonomian, Bappenas, Kementerian Perhubungan dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Sebagai tindak lanjut *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap I (2015 – 2019) yang segera berakhir, OJK telah melakukan evaluasi implementasi *Roadmap* tahap I dengan mengundang satuan kerja terkait (perbankan, pasar modal dan IKNB). Evaluasi tersebut termasuk persiapan implementasi bagi LJK yang akan mulai menerapkan POJK No 51 tahun 2020. Selanjutnya, sebagai persiapan pasca *Roadmap* Tahap I, OJK juga telah melaksanakan kajian *Roadmap* Tahap 2 (2020 – 2024), dan kajian mengenai pengembangan insentif untuk Keuangan berkelanjutan di Indonesia.





03

Tinjauan Industri dan Operasional
Sektor Jasa Keuangan Syariah

Pengembangan



Penerbitan 1 POJK yang mengatur Perbankan Syariah dan 1 POJK yang mengatur IKNB Syariah



Penyusunan *Roadmap* Perbankan Syariah 2020 - 2024



Persetujuan Perluasan 2 Produk Baru Perbankan Syariah: Jasa Penagihan *Trade Finance* Antar Bank iB dan Jual Beli Mobil



Pendampingan terhadap Pihak yang Berminat Melakukan Penerbitan Sukuk Wakaf



Penyusunan Materi Pasar Modal Syariah di Perguruan Tinggi



Kajian Penerapan SPV pada penerbitan Sukuk Korporasi, Implementasi Produk Reksa Dana Syariah Berbasis Pertanian, dan Pemetaan Potensi Penerbitan Sukuk Daerah

Event



Workshop Peningkatan Kualitas Pelaku BPRS di Surabaya, Makassar, Jakarta, dan Banda Aceh



Training of Trainers IKNB Syariah di Nusa Tenggara Barat



Workshop Peningkatan *Soft Skill* Teknik Pemasaran bagi Tenaga Pemasar Produk Pembiayaan Syariah



Roadshow Seminar Asuransi Syariah dan *Multifinance* Syariah di Medan, Padang, Purwokerto, Banjarmasin, Samarinda, Surakarta, Yogyakarta, Cirebon, Ambon dan Ternate

3.1 TINJAUAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH

3.1.1 Perkembangan Perbankan Syariah

Perbankan syariah memiliki ketahanan modal yang terjaga, ditunjukkan oleh rasio CAR BUS sebesar 20,39%. Fungsi intermediasi perbankan syariah juga berjalan baik. Hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan (PYD) dan dana pihak ketiga (DPK) masing-masing sebesar 3,25% (qtq) dan 0,94% (qtq), sehingga pertumbuhan aset perbankan

syariah selama periode tersebut sebesar 0,88% (qtq).

Likuiditas perbankan syariah juga memadai, yang ditunjukkan oleh rasio FDR yang terjaga pada kisaran 80-90%. Selain itu, likuiditas memadai juga ditunjukkan oleh rasio likuiditas harian, AL/NCD dan AL/DPK, yang selama triwulan III 2019 selalu berada di atas *threshold* (*threshold* 50% untuk AL/NCD dan 10% untuk AL/DPK), yaitu masing-masing sebesar 102,64% dan 19,66%. Risiko kredit perbankan syariah terjaga di bawah *threshold* 5% pada triwulan II 2019 dengan rasio NPF Gross sebesar 3,05%.

Tabel III - 1 ◇ Indikator Perbankan Syariah

Indikator	Triwulan			Pertumbuhan (qtq) Triwulan II-2019		Pertumbuhan (qtq) Triwulan III-2019		Pertumbuhan (yoy) Triwulan III-2019	
	II-2018	II-2019	III-2019	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
BUS + UUS + BPRS									
Total Aset Perbankan Syariah (Rp Triliun)	468,82	499,34	503,73	7,12	+1,45	4,39	+0,88	34,91	+7,45
Share Aset Perbankan Syariah (BUS+UUS+BPRS) terhadap Total Perbankan Indonesia (BUS+BUK+BPRS+BPR)	5,92	5,95	5,94	-	+0,14	-	-0,01	-	+0,02
DPK (Rp Triliun)	363,19	394,72	398,44	3,85	+0,99	3,71	+0,94	35,25	+9,71
Pembiayaan (Rp Triliun)	319,20	342,81	353,94	6,42	+1,91	11,14	+3,25	34,74	+10,88
Jumlah NPF (Rp Triliun)	11,01	11,72	11,33	0,51	+4,52	-0,39	-3,32	0,32	+2,91
Jumlah Bank									
- BUS	14	14	14	0,00	+0,00	0,00	+0,00	0,00	+0,00
- UUS	20	20	20	0,00	0,00	0,00	+0,00	0,00	+0,00
- BPRS	168	164	165	-1,00	-0,61	1,00	+0,61	-3,00	-1,79
Jumlah Kantor	2.670	2.788	2.816	42,00	+1,53	28,00	+1,00	146,00	+5,47
Rasio Keuangan BUS & UUS									
NPF Gross (%)	3,22	3,26	3,05	-	+0,08	-	-0,21	-	-0,17
NPF Net (%)	1,99	2,02	1,86	-	+0,11	-	-0,16	-	-0,13
ROA (%)	1,73	1,68	1,73	-	+0,10	-	+0,05	-	+0,00
BOPO (%)	84,20	83,94	83,34	-	-1,64	-	-0,60	-	-0,86
FDR (%)	87,36	86,15	88,21	-	+0,71	-	+2,06	-	+0,85
BUS									
Total Aset BUS (Rp Triliun)	306,12	322,95	325,03	4,89	+1,54	2,08	+0,64	18,91	+6,18
DPK (Rp Triliun)	251,48	266,57	267,34	3,86	+1,47	0,78	+0,29	15,86	+6,31
Pembiayaan (Rp Triliun)	198,54	212,56	218,05	6,64	+3,22	5,49	+2,58	19,51	+9,83
Jumlah NPF (Rp Triliun)	7,59	7,14	7,24	0,05	+0,70	0,10	+1,40	-0,35	-4,64
CAR (%)	21,25	19,56	20,39	-	-0,29	-	+0,83	-	-0,86
NPF Gross (%)	3,82	3,36	3,32	-	-0,08	-	-0,04	-	-0,50
ROA (%)	1,41	1,61	1,66	-	+0,15	-	+0,05	-	+0,25
BOPO (%)	88,08	85,72	85,14	-	-2,10	-	-0,58	-	-2,95
FDR (%)	78,95	79,74	81,56	-	+1,36	-	+1,82	-	+2,62
Jumlah Kantor	1.862	1.894	1.903	8,00	+0,42	9,00	+0,48	41,00	+2,20

Indikator	Triwulan			Pertumbuhan (qtq) Triwulan II-2019		Pertumbuhan (qtq) Triwulan III-2019		Pertumbuhan (yoy) Triwulan III-2019	
	III-2018	II-2019	III-2019	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
UUS									
Total Aset UUS (Rp Triliun)	150,80	163,94	165,38	2,19	+1,35	1,44	+0,88	14,58	+9,67
DPK (Rp Triliun)	103,96	120,06	122,46	0,03	+0,03	2,40	+2,00	18,50	+17,79
Pembiayaan (Rp Triliun)	111,98	120,52	125,82	-0,55	-0,46	5,30	+4,39	13,83	+12,35
Jumlah NPF (Rp Triliun)	2,41	3,72	3,26	0,42	+12,62	-0,46	-12,44	0,85	+35,10
NPF Gross (%)	2,15	3,09	2,5	9	+0,36	-	-0,50	-	+0,44
ROA (%)	2,43	1,83	1,88	-	+0,01	-	+0,05	-	-0,55
BOPO (%)	72,88	79,54	78,97	-	-0,26	-	-0,57	-	+6,09
FDR (%)	107,71	100,39	102,74	-	-0,49	-	+2,35	-	-4,97
Jumlah Kantor	340	388	374	24,00	+6,59	-14,00	-0,04	34,00	+10,00
BPRS									
Total Aset BUS (Rp Triliun)	11,89	12,45	13,32	0,04	+0,31	0,87	+6,97	1,42	+11,94
DPK (Rp Triliun)	7,74	8,10	8,64	-0,04	-0,45	0,54	+6,61	0,90	+11,58
Pembiayaan (Rp Triliun)	8,68	9,73	10,08	0,33	+3,50	0,35	+3,62	1,40	+16,11
Jumlah NPF (Rp Triliun)	1,01	0,86	0,83	0,04	+4,94	-0,03	-2,96	-0,17	-17,24
CAR (%)	19,78	19,54	19,48	-	-0,65	-	-0,06	-	-0,30
NPF Gross (%)	11,60	8,83	8,27	-	+0,12	-	-0,56	-	-3,33
ROA (%)	2,30	2,51	2,52	-	+0,14	-	+0,01	-	+0,23
BOPO (%)	86,18	85,78	85,89	-	-1,22	-	+0,11	-	-0,29
FDR (%)	112,15	120,08	116,71	-	+4,58	-	-3,37	-	+4,56
Jumlah Kantor	468	506	539	10,00	+2,02	33,00	+6,52	71,00	+15,17

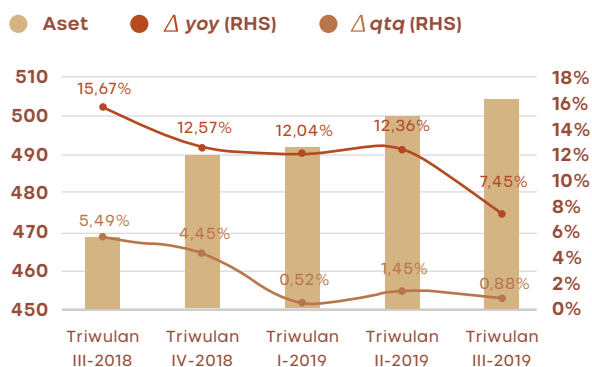
Sumber: OJK, diolah

Keterangan : Statistik Perbankan Syariah (SPS)

A. Aset

Aset perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan yang positif, meski mengalami perlambatan jika dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan aset perbankan syariah masih terjaga (7,45% yoy), dengan pangsa aset mencapai 5,94% terhadap perbankan nasional, mengalami sedikit penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,95%. BUS, UUS, dan BPRS masing-masing mengalami pertumbuhan aset yang tertahan sebesar 0,64% (qtq), 0,88% (qtq) dan 6,97% (qtq). Dari total aset perbankan syariah, BUS, UUS, dan BPRS masing-masing memiliki porsi sebesar 64,52%, 32,83%, dan 2,64%.

Grafik III - 1 ◇ Tren Aset Perbankan Syariah



Sumber: SPS, September 2019

B. Sumber Dana dan Dana Pihak Ketiga (DPK)

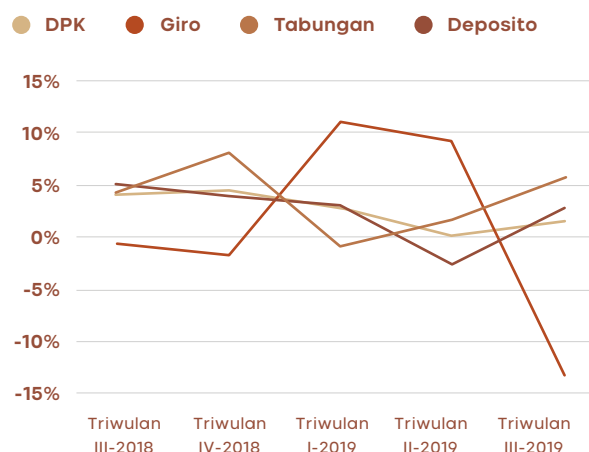
Dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber dana utama bagi perbankan syariah dengan kontribusi sebesar 87,25% dari total sumber dana perbankan syariah (selain modal), diikuti oleh komponen rupa-rupa liabilitas sebesar 8,65%, surat berharga yang diterbitkan sebesar 1,57% dan liabilitas kepada bank lain sebesar 1,59% sebagaimana tercatat dalam neraca keuangan perbankan syariah posisi triwulan III-2019.

Sumber dana perbankan syariah pada triwulan III-2019 tumbuh sebesar 1,66% (qtq) atau 9,71% (yoy). Pertumbuhan sumber dana perbankan syariah ditopang oleh DPK yang tumbuh 0,94% (qtq) atau 9,71% (yoy), tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 0,99% (qtq). Pertumbuhan DPK sangat dipengaruhi oleh Deposito yang komposisinya merupakan mayoritas dibandingkan instrumen DPK lainnya. Deposito memiliki porsi sebesar 56,92%, diikuti Tabungan yang memiliki porsi sebesar 31,52%, dan sisanya merupakan instrumen Giro yang memiliki porsi sebesar 11,56%.

Dibandingkan triwulan sebelumnya, pertumbuhan Deposito cukup terjaga. Pada periode triwulan III 2019, Deposito melambat dengan laju sebesar 2,93% (qtq), atau secara tahunan tumbuh 7,79% (yoy). Di sisi lain, Tabungan mengalami peningkatan sebesar 5,80% (qtq), meski

secara tahunan tumbuh 15,72% (yoy). Sementara giro menunjukkan perlambatan dengan sebesar 4,07% (yoy).

Grafik III - 3 ◇ Pertumbuhan DPK Bank Syariah (qtq)



Sumber: SPS, Juni 2019

C. Pembiayaan yang Disalurkan (PYD)

Secara triwulanan, penyaluran pembiayaan bank syariah pada triwulan III-2019 tumbuh 3,25% (qtq), melambat dibandingkan posisi triwulan II-2019 yang tumbuh sebesar 1,91% (qtq). Perlambatan pertumbuhan ini terjadi pada jenis penggunaan Modal Kerja dan Konsumsi masing-masing menunjukkan pertumbuhan sebesar 2,05% (qtq) dan 3,79% (qtq). Pada periode laporan, pembiayaan Modal Kerja, Investasi, dan Konsumsi masing-masing menunjukkan pertumbuhan sebesar 2,05% (qtq), 3,84% (qtq), dan 3,79% (qtq), sementara pada triwulan sebelumnya, pembiayaan Modal Kerja, Investasi, dan Konsumsi masing-masing tumbuh sebesar -0,76% (qtq), 4,10% (qtq), dan 2,72% (qtq). Berdasarkan porsinya, pembiayaan bank syariah masih didominasi untuk konsumsi sebesar 44,30% diikuti modal kerja dan investasi yang masing-masing sebesar 31,47% dan 24,23%.

Tabel III - 2 ◇ Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Penggunaan

Penyaluran Pembiayaan BUS, UUS, BPRS (Rp Miliar)	2018	2019		Porsi	qtq (%)			yoy (%)		
	Triwulan III	Triwulan II	Triwulan III		Triwulan III - 18	Triwulan II - 19	Triwulan III - 19	Triwulan III - 18	Triwulan II - 19	Triwulan III - 19
Modal Kerja	106,80	109,14	111,38	31,47%	1,39%	-0,76%	2,05%	5,47%	3,61%	4,28%
Investasi	74,12	82,6	85,78	24,23%	6,74%	4,10%	3,84%	12,73%	18,95%	15,73%
Konsumsi	138,28	151,06	156,79	44,30%	7,39%	2,72%	3,79%	15,54%	17,32%	13,39%
Total	319,20	342,8	353,94	100%	5,16%	1,91%	3,25%	11,34%	12,94%	10,88%

Sumber: SPS, Desember 2019

Pembiayaan perbankan syariah berdasarkan ekonomi yang ditunjukkan oleh tabel Pembiayaan BUS dan UUS berdasarkan Sektor Ekonomi menunjukkan 55,79% PYD perbankan syariah disalurkan pada sektor lapangan usaha (produktif) yang pada triwulan III-2019 meningkat sebesar Rp5,2 triliun (*qtq*), tumbuh sebesar 2,80% (*qtq*) atau 8,91% (*yoy*). Pertumbuhan ini dikontribusikan oleh sektor Konstruksi yang walaupun turun Rp0,28 triliun (*qtq*) tetapi tumbuh sebesar 25,10% (*yoy*). Kontributor peningkatan pembiayaan lapangan usaha terbesar berikutnya adalah Perdagangan Besar dan Eceran yang mengalami pertumbuhan sebesar Rp878 miliar, atau tumbuh sebesar 2,58% (*qtq*).

Sementara itu, sektor Rumah Tangga (non-produktif) berkontribusi sebesar 42,67% pada pembiayaan BUS dan UUS. Sektor Rumah Tangga meningkat sebesar Rp5,53 triliun (*qtq*), tumbuh sebesar 3,92% (*qtq*) atau 14,36% (*yoy*).

Pertumbuhan ini dikontribusikan oleh pembiayaan untuk Pemilikan Rumah Tinggal yang meningkat Rp2,62 triliun (*qtq*) atau tumbuh sebesar 3,44 % (*qtq*). Kontributor terbesar berikutnya adalah pembiayaan untuk Pemilikan Peralatan Rumah Tangga Lainnya (termasuk multiguna) yang meningkat Rp3,01 triliun (*qtq*) atau tumbuh sebesar 6,18% (*qtq*).

Tabel III - 3 ◇ Pembiayaan BUS dan UUS Berdasarkan Sektor Ekonomi

Penyaluran Pembiayaan BUS dan UUS (Rp Miliar)	2018	2019		Porsi	qtq (%)			yoy (%)		
	Triwulan III	Triwulan II	Triwulan III		Triwulan III - 18	Triwulan II - 19	Triwulan III - 19	Triwulan III - 18	Triwulan II - 19	Triwulan III - 19
Lapangan Usaha	176.147	186.618	191.843	55,79%	3,54%	1,16%	2,80%	10,97%	9,70%	8,91%
Pertanian, Pemburuan dan Kehutanan	11.844	12.749	13.818	4,02%	-0,68%	4,78%	8,39%	21,59%	6,91%	16,67%
Perikanan	1.187	1.135	1.209	0,35%	-0,31%	-2,93%	6,52%	-13,32%	-4,74%	1,79%
Pertambangan dan Penggalian	5.769	5.838	5.676	1,65%	3,87%	10,04%	-2,78%	-17,73%	5,11%	-1,62%
Industri Pengolahan	23.595	25.621	27.137	7,89%	2,89%	1,10%	5,92%	15,54%	11,72%	15,01%
Listrik, gas dan Air	16.430	14.694	14.538	4,23%	21,02%	-9,71%	-1,06%	112,46%	8,23%	-11,51%
Konstruksi	22.579	28.533	28.246	8,21%	2,48%	4,98%	-1,00%	4,82%	29,50%	25,10%
Perdagangan Besar dan Eceran	32.935	34.043	34.043	10,22%	1,43%	1,74%	1,74%	8,16%	3,37%	3,37%
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	4.162	4.688	4.967	1,44%	0,91%	-2,10%	5,95%	17,49%	13,66%	19,34%
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	10.221	8.985	9.410	2,74%	3,86%	-2,91%	4,73%	2,02%	-8,69%	-7,93%
Perantara Keuangan	18.217	18.321	18.693	5,44%	2,52%	-0,17%	2,03%	-6,88%	3,11%	2,61%
Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	12.662	12.852	12.998	3,78%	3,64%	-0,40%	1,13%	5,12%	5,20%	2,65%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7	23	25	0,01%	67,62%	138,02%	10,95%	-16,19	451,15%	264,82%
Jasa Pendidikan	5.147	6.026	6.289	1,83%	4,05%	4,61%	4,37%	9,68%	21,81%	22,19%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.174	5.451	6.366	1,85%	8,06%	2,04%	16,77%	14,12%	41,14%	52,51%
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	6.143	6.342	6.186	1,80%	-4,82%	5,03%	-2,46%	25,87%	-1,74%	0,70%
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	360	993	1.057	0,31%	1,84%	165,68%	6,47%	9,27%	180,74%	193,49%
Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
Kegiatan yang Belum Jelas Batasnya	391	324	308	0,09%	-2,59%	-57,25%	-5,00%	-31,90%	-19,43%	-21,41%

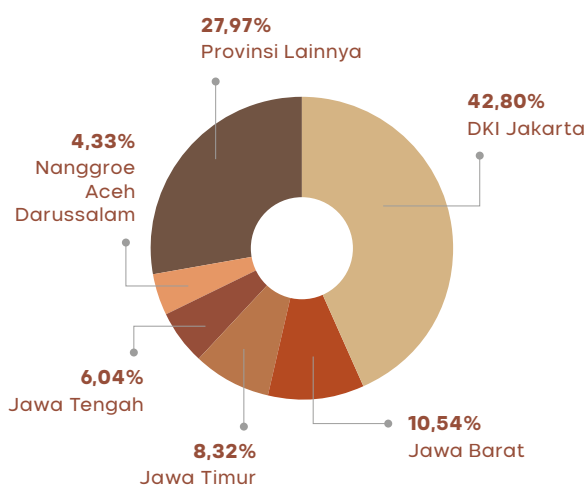
Penyaluran Pembiayaan BUS dan UUS (Rp Miliar)	2018	2019		Porsi	qtq (%)			yoy (%)		
	Triwulan III	Triwulan II	Triwulan III		Triwulan III - 18	Triwulan II - 19	Triwulan III - 19	Triwulan III - 18	Triwulan II - 19	Triwulan III - 19
Bukan Lapangan Usaha (Rumah Tangga)	122.289	141.182	146.711	42,67%	4,82%	3,05%	3,92%	16,38%	15,35%	14,36%
Untuk Pemilikan Rumah Tinggal	68.744	76.373	78.998	22,97%	5,40%	4,25%	3,44%	18,74%	17,10%	14,92%
Untuk Pemilikan Flat atau Apartemen	2.514	2.931	3.048	0,89%	12,23%	4,02%	4,00%	38,78%	30,85%	21,26%
Untuk Pemilikan Ruko atau Rukan	3.261	3.449	3.467	1,01%	4,49%	3,02%	0,52%	4,53%	10,52%	6,31%
Untuk Pemilikan Kendaraan Bermotor	10.330	9.656	9.410	2,74%	3,17%	-0,78%	-2,54%	9,66%	-3,55%	-8,90%
Untuk Pemilikan Peralatan Rumah Tangga Lainnya (Termasuk Multiguna)	43.441	48.773	51.787	15,06%	3,94%	1,92%	6,18%	14,36%	16,69%	19,21%
Bukan Lapangan Usaha Lainnya	6.082	5.281	5.310	1,54%	142,30%	-4,07%	0,55%	133,00%	110,36%	-12,71%
Total	310.519	333.080	343.864	100,00%	5,25%	1,86%	3,24%	14,34%	12,90%	10,74%

Sumber: SPS, September 2019

Kualitas pembiayaan perbankan syariah cukup terjaga yang ditunjukkan oleh rasio NPF Gross BUS dan UUS pada triwulan III-2019 di bawah *threshold* 5%, sebesar 3,05%.

Secara spasial, sebagian besar pembiayaan masih terpusat di wilayah Jawa sebesar 67,70%, khususnya DKI Jakarta (42,83%), Jawa Barat (10,48%), Jawa Timur (8,24%), dan Jawa Tengah (5,77%). Sementara provinsi di luar Pulau Jawa yang masuk 5 besar dalam hal penyaluran pembiayaan perbankan syariah adalah Nangroe Aceh Darussalam dengan kontribusi sebesar 4,43%.

Grafik III - 4 ◇ Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Lokasi Bank Penyalur



Sumber: SPS, September

D. Likuiditas

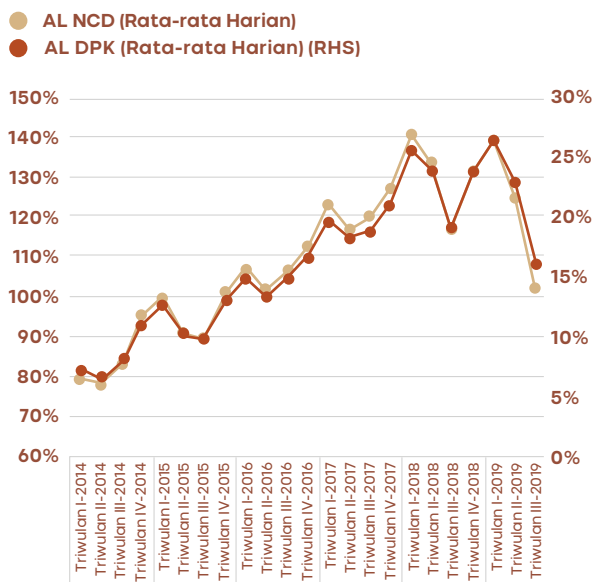
Likuiditas perbankan syariah memadai. Hal ini ditunjukkan oleh rasio FDR perbankan syariah yang selalu terjaga dalam *threshold*. Pada triwulan III-2019, FDR perbankan syariah sebesar 88,21 %, meningkat 206 bps (*qtq*) dibandingkan triwulan II-2019 yang sebesar 86,15%, dan secara tahunan mengalami peningkatan sebesar 85 bps (*yoy*) dari triwulan III-2018 yang sebesar 87,36%. Peningkatan FDR selama triwulan III-2019 didorong oleh peningkatan FDR BUS sebesar 182 bps (*qtq*) menjadi sebesar 81,56%. FDR UUS mengalami peningkatan sebesar 235 bps (*qtq*) menjadi sebesar 102,74%. FDR BPRS mengalami penurunan dari triwulan II-2019 yang sebesar 120,08% menjadi sebesar 116,71% pada triwulan III-2019.

Selain dilihat dari rasio FDR, indikator likuiditas harian BUS yaitu rasio Aset Likuid (AL) terhadap *Non-Core Deposit* (NCD) dan terhadap DPK juga menunjukkan likuiditas yang memadai. Rata-rata harian rasio AL/NCD selama triwulan III-2019 sebesar 102,64%, menurun dibandingkan pada triwulan III-2018 sebesar 116,92%. Hal yang sama juga terjadi pada rata-rata harian rasio AL/DPK yang pada triwulan III-2019 sebesar 19,66%, menurun dibandingkan triwulan III-2019 yang sebesar 21,48%.

Tabel III - 4 ◇ Rata-rata Indikator Likuiditas Harian BUS

Rata-rata Indikator Likuiditas Harian BUS	Triwulan III-2015	Triwulan III-2016	Triwulan III-2017	Triwulan III-2018	Triwulan III-2019
AL/NCD	89,73%	106,30%	120,07%	116,92%	102,64%
AL/DPK	15,98%	18,97%	21,32%	21,48%	19,66%

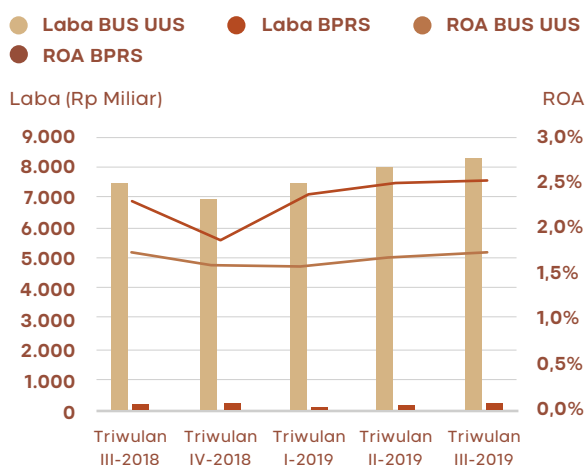
Grafik III - 5 ◇ Indikator Likuiditas Harian BUS



E. Rentabilitas

Rentabilitas BUS dan UUS meningkat, tercermin dari rasio ROA pada triwulan III-2019 sebesar 1,73%, cukup stabil jika dibandingkan triwulan III-2018 maupun triwulan II-2019 yang masing-masing sebesar 1,73% dan 1,68%. Hal tersebut dipengaruhi oleh pembiayaan dan efisiensi bank syariah yang terjaga. Sementara itu, pada BPRS, rasio ROA mengalami peningkatan 15 bps (qtq) dari 2,51% menjadi 2,52% pada triwulan III-2019.

Grafik III - 6 ◇ Laba dan ROA Perbankan Syariah



Sumber: SPS, September 2019

F. Permodalan

Pada triwulan III-2019, CAR BUS mengalami peningkatan 83 bps dari posisi triwulan sebelumnya menjadi 20,39%. Di lain pihak, rasio CAR pada BPRS mengalami penurunan, dari 19,54% pada triwulan II-2019 menjadi 19,48% pada triwulan III-2019.

3.1.2 Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah

A. Perkembangan Saham Syariah

Pada periode triwulan III-2019, OJK telah menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) periode I yang meliputi 408 Efek jenis Saham Emiten dan Perusahaan Publik serta Efek syariah lainnya. DES periode I tahun 2019 berlaku sampai dengan akhir bulan November tahun 2019. Sejak diterbitkannya DES Periode I sampai akhir triwulan III-2019, terdapat penambahan 18 saham yang masuk dalam DES yang diperoleh dari hasil penelaahan DES insidentil bersamaan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran Emiten yang melakukan penawaran umum perdana saham yaitu:

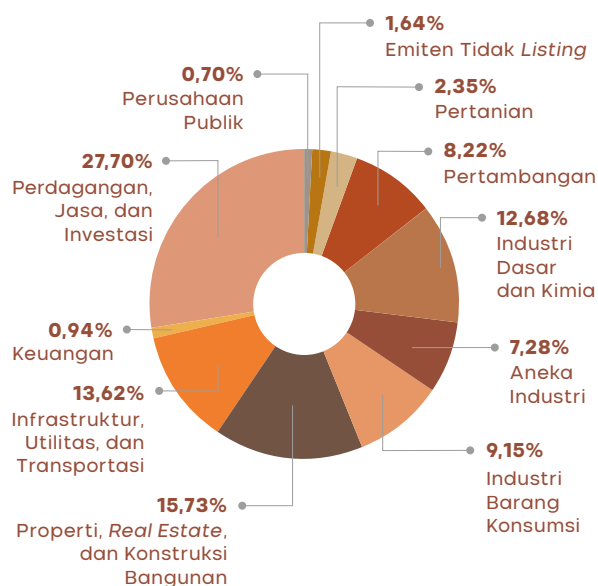
Tabel III - 5 ◇ Penambahan Emiten pada DES

No.	Emiten
1.	PT Bali Bintang Sejahtera Tbk
2.	PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk
3.	PT Golden Flower Tbk
4.	PT Krida Jaringan Nusantara Tbk
5.	PT Bima Sakti Pertiwi Tbk.
6.	PT Darmi Bersaudara Tbk
7.	PT Eastparc Hotel Tbk
8.	PT Berkah Prima Perkasa Tbk
9.	PT Envy Technologies Indonesia Tbk
10.	PT Hensel Davest Indonesia Tbk
11.	PT DMS Propertindo Tbk.
12.	PT Kencana Energi Lestari Tbk
13.	PT Bhakti Agung Propertindo Tbk
14.	PT Telefast Indonesia Tbk

15.	PT Gunung Raja Paksi Tbk.
16.	PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk.
17.	PT Nusantara Almazia Tbk
18.	PT Itama Ranoraya Tbk

Secara keseluruhan, saham yang termasuk dalam DES berjumlah 426 saham. Mayoritas Saham Syariah berasal dari sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi sebanyak 118 saham (27,70%), sektor Properti, *Real Estate* & Konstruksi sebanyak 67 saham (15,73%), sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi sebanyak 58 saham (13,62%), sektor Industri Dasar dan Kimia sebanyak 54 saham (12,68%), dan 129 saham sektor-sektor lainnya masing-masing di bawah 10%.

Grafik III - 7 ◇ Saham Syariah Berdasarkan Sektor Industri



Kinerja saham syariah mengalami peningkatan tercermin dari membaiknya Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), Jakarta Islamic Index (JII) dan Jakarta Islamic Index (JII) 70. Pada akhir triwulan III-2019, indeks saham syariah mengalami pertumbuhan tercermin dari peningkatan ISSI, JII, dan JII 70 masing-masing sebesar 1,57%, 0,48%, dan 2,52% menjadi 188,93, 685,92, dan 231,77.

Dari sisi kapitalisasi pasar saham, kapitalisasi ISSI, JII, dan JII 70 masing-masing meningkat sebesar 2,56%, 0,46%, 2,98% menjadi Rp3.794,16 triliun, Rp2.124,18 triliun, dan Rp2.788,41 triliun.

Tabel III - 6 ◇ Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah

(dalam triliun Rupiah)

Tahun	Jakarta Islamic Index	Indeks Saham Syariah Indonesia	Jakarta Islamic Index 70	Indeks Harga Saham Gabungan
2013	1.672,10	2.557,85	-	4.219,02
2014	1.944,53	2.946,90	-	5.228,04
2015	1.737,29	2.600,85	-	4.872,70
2016	2.041,07	3.175,05	-	5.759,38
2017	2.288,02	3.704,54	-	7.052,39
2018	2.239,50	3.666,70	2.715,85	7.023,50
Triwulan I-2019	2.302,45	3.798,99	2.794,25	7.356,38
Triwulan II-2019	2.114,40	3.699,47	2.707,71	7.243,04
Triwulan III-2019	2.124,18	3.794,16	2.788,41	7.090,42

Tabel III - 7 ◇ Perkembangan Indeks Saham Syariah

Tahun	Jakarta Islamic Index	Indeks Saham Syariah Indonesia	Jakarta Islamic Index 70	Indeks Harga Saham Gabungan
2013	585,11	143,71	-	4.274,18
2014	691,04	168,64	-	5.226,95
2015	603,35	145,06	-	4.593,01
2016	694,13	172,08	-	5.296,711
2017	759,07	189,86	-	6.355,65
2018	685,22	184,00	227,55	6.194,50
Triwulan I-2019	704,69	190,17	234,11	6.468,76
Triwulan II-2019	682,65	186,01	226,08	6.358,63
Triwulan III-2019	685,92	188,93	231,77	6.169,10

B. Perkembangan Sukuk Korporasi

Selama triwulan III-2019, terdapat penerbitan sebanyak 23 sukuk korporasi dengan total nilai penerbitan sebesar Rp6,29 triliun, dan terdapat dua sukuk korporasi yang jatuh tempo dengan nilai Rp 103 miliar selama periode tersebut. Dengan demikian, jumlah *outstanding* sukuk korporasi meningkat sebesar 16,54% (*qta*) menjadi sebanyak 148 seri dengan nilai *outstanding* meningkat sebesar 24,78% (*qta*) menjadi sebesar Rp31,14 triliun.

Tabel III - 8 ◇ Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi

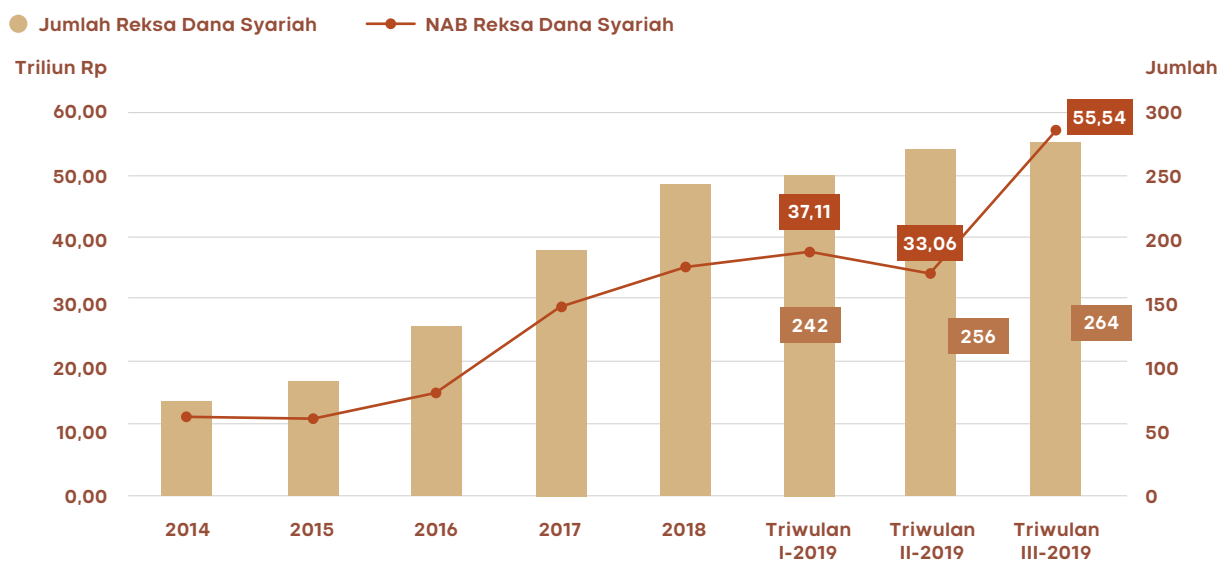
Tahun	Emisi Sukuk	
	Total Nilai (Rp miliar)	Total Jumlah
2013	7,56	36
2014	7,11	35
2015	9,90	47
2016	11,88	53
2017	15,74	79
2018	21,30	99
Triwulan I-2019	24,63	121
Triwulan II-2019	24,96	127
Triwulan III-2019	31,14	148

C. Perkembangan Reksa Dana Syariah

Selama triwulan III-2019 terdapat 17 Reksa Dana Syariah efektif terbit serta sembilan Reksa Dana Syariah bubar. Reksa Dana tersebut dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari bursa secara berturut-turut atau karena kesepakatan MI dan BK. Total Reksa Dana Syariah yang beredar meningkat 3,13% (*qta*) menjadi 264 dengan NAB meningkat 68,02% (*qta*) menjadi sebesar Rp55,54 triliun. Proporsi jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah terhadap total industri Reksa Dana masing-masing mencapai 12,07% dari total 2.188 Reksa Dana dan 10,27% dari total NAB Reksa Dana sebesar Rp540,91 triliun.

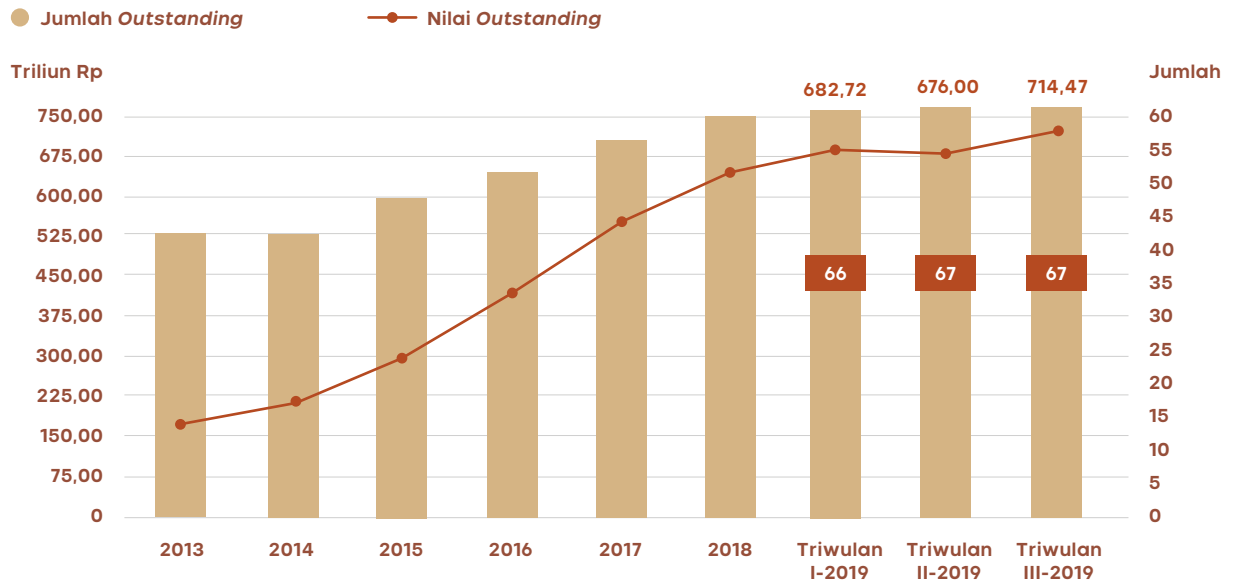
Tabel III - 9 ◇ Perkembangan Reksa Dana Syariah

Tahun	Perbandingan Jumlah Reksa Dana				Perbandingan NAB (Rp Triliun)			
	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konvensional	Reksa Dana Total	%	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konvensional	Reksa Dana Total	%
2013	65	758	823	7,90%	9,43	183,11	192,54	4,90%
2014	74	820	894	8,31%	11,16	230,23	241,46	4,65%
2015	93	998	1.091	8,52%	11,02	260,95	271,97	4,05%
2016	136	1.289	1.425	9,54%	14,91	323,84	338,75	4,40%
2017	182	1.595	1777	10,24%	28,31	429,19	457,51	6,19%
2018	224	1.875	2.099	10,67%	37,49	470,9	505,39	6,82%
Triwulan I-2019	242	1.847	2.089	11,58%	37,11	478,50	515,62	7,20%
Triwulan II-2019	256	1.837	2.093	12,23%	33,06	479,53	512,59	6,45%
Triwulan III-2019	264	1.924	2.188	12,07%	55,54	485,37	540,91	10,27%

Grafik III - 8 ◇ Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah**D. Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara**

Sampai dengan akhir triwulan III-2019, jumlah SBSN *outstanding* sebanyak 67 seri, sama dengan periode sebelumnya. Di sisi lain, nilai sukuk negara

outstanding sebesar meningkat 5,69% (*qta*) menjadi sebesar Rp 714,47 triliun.

Grafik III - 9 ◇ Perkembangan Sukuk Negara Outstanding**Tabel III - 10** ◇ Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara Outstanding

Tahun	Sukuk Outstanding	
	Nilai Outstanding (Rp Triliun)	Total Jumlah Outstanding
2013	169,29	42
2014	206,10	42
2015	297,58	48
2016	412,63	52
2017	551,56	56
2018	645,05	65
Triwulan I-2019	682,72	66
Triwulan II-2019	676,00	67
Triwulan III-2019	714,47	67

E. Perkembangan Jasa Syariah di Pasar Modal

Sampai dengan dengan triwulan III-2019, para pihak yang terlibat atau telah mempunyai jasa layanan syariah meliputi:

Tabel III - 11 ◇ Jasa Layanan Syariah

Pihak Terlibat/Mempunyai Jasa Layanan Syariah	Jumlah
Manajer Investasi Syariah	57
Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Sukuk Korporasi	28
Pihak Penerbit DES	12
Bank Kustodian yang mengelola reksadana syariah	15
Perusahaan Efek yang mengembangkan dan melaksanakan perdagangan <i>online</i> saham berdasarkan prinsip syariah	15
Wali Amanat yang terlibat perwaliamanatan penerbitan Sukuk Korporasi	8
Ahli Syariah Pasar Modal	109

3.1.3 Perkembangan IKNB Syariah

Selama triwulan III-2019, aset IKNB Syariah meningkat sebesar 2% (*qta*) menjadi Rp104,08 triliun. Aset industri

perasuransian syariah mendominasi sebesar 41% dari total aset IKNB Syariah secara keseluruhan.

Tabel III - 12 ◇ Aset IKNB Syariah

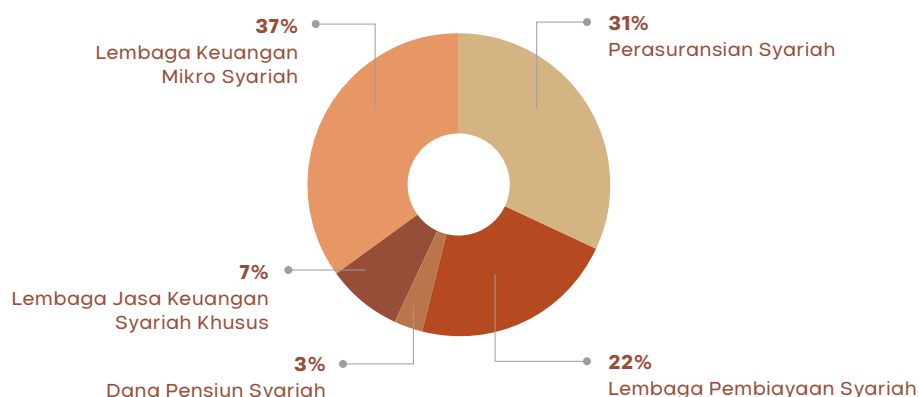
(dalam triliun Rupiah)

No.	Industri	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019
1.	Perasuransian Syariah	41,93	41,78	43,08	43,53	44,38
2.	Lembaga Pembiayaan Syariah	28,23	25,71	27,06	26,87	27,01
3.	Dana Pensiun Syariah	-	3,5	6,24	4,01	4,13
4.	Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus	26,18	25,33	26,93	27,29	28,16
5.	Lembaga Keuangan Mikro Syariah	0,24	0,24	0,27	0,35	0,40
Total		96,58	96,56	103,58	102,06	104,08

Sampai akhir triwulan III-2019, terdapat 62 Perusahaan Perasuransian Syariah, 43 Lembaga Pembiayaan Syariah, enam Dana Pensiun Syariah, 13 Lembaga Jasa

Keuangan Syariah Khusus, dan 72 Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Grafik III - 10 ◇ Jumlah Entitas IKNB Syariah



A. Industri Perasuransian Syariah

Pada triwulan III-2019, industri perasuransian Syariah mengalami peningkatan nilai aset dan investasi, masing-masing sebesar 1,93% (*qta*) dan 1,88% (*qta*) menjadi Rp44,38 triliun dan Rp 39,00 triliun. Secara

tahunan (*yoy*), kontribusi bruto dan klaim bruto masing-masing mengalami kenaikan sebesar 4,21% dan 43,51% menjadi Rp11,31 triliun dan Rp7,33 triliun.

Tabel III - 13 ◇ Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah

(dalam triliun Rupiah)

No.	Jenis Indikator	Triwulan II-2018	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019
1.	Aset						
	Asuransi Jiwa Syariah	34,36	34,38	34,47	35,90	35,89	36,67
	Asuransi Umum Syariah	5,69	5,62	5,62	5,66	5,73	5,78
	Reasuransi Syariah	1,80	1,82	1,86	1,88	1,92	1,92
Jumlah		41,85	41,82	41,96	43,44	43,54	44,38

2. Investasi						
Asuransi Jiwa Syariah	31,26	31,71	31,88	33,05	33,02	33,65
Asuransi Umum Syariah	3,81	3,70	3,78	3,81	3,86	3,91
Reasuransi Syariah	1,23	1,25	1,30	1,34	1,40	1,44
Jumlah	36,30	36,66	36,97	38,21	38,28	39,00
3. Kontribusi Bruto						
Asuransi Jiwa Syariah	6,00	8,90	12,70	3,16	6,22	9,29
Asuransi Umum Syariah	0,99	1,31	1,84	0,47	0,91	1,32
Reasuransi Syariah	0,41	0,64	0,83	0,22	0,47	0,70
Jumlah	7,40	10,85	15,37	3,85	7,60	11,31
4. Klaim Bruto						
Asuransi Jiwa Syariah	1,90	4,11	6,20	1,80	4,04	6,29
Asuransi Umum Syariah	0,37	0,57	0,79	0,19	0,38	0,56
Reasuransi Syariah	0,28	0,43	0,60	0,15	0,31	0,48
Jumlah	2,55	5,11	7,58	2,14	4,73	7,33
5. Kewajiban						
Asuransi Jiwa Syariah	4,29	4,05	4,20	4,43	4,33	4,63
Asuransi Umum Syariah	2,86	2,72	2,73	2,60	2,55	2,52
Reasuransi Syariah	0,72	0,77	0,81	0,82	0,82	0,79
Jumlah	7,86	7,53	7,73	7,86	7,70	7,94

Pengelolaan perusahaan perasuransian Syariah dilakukan dalam bentuk *full fledged* dan unit Syariah. Sampai akhir periode laporan terdapat 62 perusahaan yang terdiri dari 12 perusahaan asuransi Syariah *full fledge*, satu perusahaan reasuransi syariah *full fledge*, 47 perusahaan asuransi yang memiliki unit Syariah dan dua perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah.

B. Industri Dana Pensiun Syariah

Pengelolaan Dana Pensiun Syariah terdiri dari tiga Dana Pensiun Syariah berbentuk *full fledged* dan tiga Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Konvensional yang mengelola paket investasi syariah dengan aset total dana pensiun syariah sebesar Rp4,13 triliun.

C. Lembaga Pembiayaan Syariah

1. Perusahaan Pembiayaan

Sampai akhir triwulan III-2019, terdapat 36 Perusahaan Pembiayaan Syariah, yang terdiri atas lima perusahaan berbentuk *full fledged* dan 31 perusahaan berbentuk Unit Usaha Syariah (UUS), dengan total aset menurun sebesar 5% (*qta*) sebesar Rp20,207 miliar.

Tabel III - 14 ◇ Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah

(dalam miliar Rupiah)

No.	Industri	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019
1.	Kas dan Setara Kas	655	580	1.238	1.317	856
2.	Aset Tagihan Derivatif	49	23	15	4	-
3.	Investasi Jangka Pendek Dalam Surat Berharga	-	-	-	-	-
4.	Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah - Neto (aset Produktif)	21.751	19.297	18.008	17.197	16.625
5.	Penyertaan Modal	-	-	-	22	21
6.	Investasi Jangka Panjang Dalam Surat Berharga	8	3	3	3	2,6
7.	Aset yang Disewaoperasikan - Neto	23	17	29	36	45
8.	Aset Tetap dan Inventaris - Neto	116	109	139	151	147
9.	Aset Pajak Tangguhan	20	23	22	21	6,1
10.	Rupa-Rupa Aset	2.245	2.126	2.735	2.468	2.502
Total Aset		24.867	22.179	22.189	21.218	20.207

2. Perusahaan Modal Ventura Syariah

Sampai periode laporan terdapat enam perusahaan modal ventura syariah, yang terdiri atas empat perusahaan berbentuk *full fledged* dan dua

perusahaan berbentuk Unit Usaha Syariah (UUS), dengan total aset meningkat sebesar 3,61% (*qta*) menjadi Rp2.357,55 miliar.

Tabel III - 15 ◇ Komponen Aset Perusahaan Modal Ventura Syariah

(dalam miliar Rupiah)

No.	Industri	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019
1.	Kas dan Setara Kas	49,14	55,41	22,82	19,05	46,43
2.	Deposito	13,25	11,79	69,15	89,61	59,78
3.	Piutang	31,85	28,87	30,83	33,48	35,61
4.	Aset Lancar Lain-lain	20,28	15,76	13,99	17,12	37,14
5.	Penyertaan Saham	-	-	-	-	0,82
6.	Obligasi Konversi	0,33	0,33	0,34	0,34	0,33
7.	Pembiayaan Bagi Hasil	844,22	946,19	1.217,76	1.859,02	2.137,17
8.	Aset Tetap	19,73	19,52	18,07	17,80	21,17
9.	Aset Lain-lain	257,21	198,67	132,53	238,09	18,07
Total Aset		1.236,03	1.276,57	1.505,48	2.274,53	2.356,55

3. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Selain itu, pada lembaga pembiayaan terdapat Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Unit Syariah dengan aset mencapai sebesar Rp4,44 triliun.

D. Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus terdiri dari Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Pergadaian, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Sampai dengan akhir triwulan III-2019, jumlah perusahaan Penjaminan Syariah

adalah sebanyak tujuh perusahaan, terdiri atas dua *full fledged* dan lima UUS dengan total aset sebesar Rp1,94 triliun. Selain itu, untuk Perusahaan Pergadaian Syariah berjumlah empat perusahaan yang terdiri atas satu unit usaha syariah dari PT Pegadaian (Persero) dan tiga perusahaan pergadaian swasta, dengan total aset Rp10,20 triliun.

Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan dan LPEI masing-masing adalah unit syariah dari perusahaan dimaksud dengan total aset masing-masing sebesar Rp1,57 triliun dan Rp14,43 triliun. Sementara itu, jumlah Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah sebanyak 72 lembaga berbentuk *full fledged* dengan total aset Rp403 miliar.

Tabel III - 16 ◇ Perkembangan Aset Pada Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

(dalam triliun Rupiah)

No.	Industri	Triwulan III-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Triwulan II-2019	Triwulan III-2019
1.	Penjaminan Syariah	1,29	1,37	1,52	1,85	1,94
2.	Pergadaian Syariah	16,19	7,78	8,63	8,99	10,20
3.	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Syariah	7,11	14,66	14,13	14,91	14,43
4.	Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP) Syariah	1,89	1,91	2,01	1,53	1,57
5.	LKM Syariah	0,24	0,27	0,27	0,34	0,40

3.2 PENGATURAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

3.2.1 Pengaturan Perbankan Syariah

Selama triwulan III-2019, terkait dengan perbankan syariah, OJK menerbitkan satu POJK yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. POJK Nomor 20/POJK.03/2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

POJK ini merupakan ketentuan konversi dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/17/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (PBI Tingkat Kesehatan BPRS) yang tidak terdapat perubahan substansi. POJK ini mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan BPRS mencakup penilaian terhadap faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan manajemen. Dengan diberlakukannya POJK ini maka PBI Nomor 9/17/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah dinyatakan tidak berlaku.

3.2.2 Pengaturan IKNB Syariah

Selama triwulan III-2019 OJK menerbitkan dua peraturan terkait IKNB Syariah, yang terdiri dari satu POJK dan satu SEOJK dengan detail sebagai berikut:

1. POJK Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.

Penerbitan Peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan standar pelaporan rencana bisnis LJKNB ke OJK yang lebih terintegrasi, mendorong dan mengarahkan kegiatan operasional pelaku LJKNB sesuai dengan visi dan misinya; dan mengharmonisasi pengaturan laporan rencana bisnis dengan sektor perbankan dan pasar modal.

2. SEOJK Nomor 17/POJK.05/2019 Tentang Sertifikasi Keahlian di Bidang Manajemen Risiko dan Sertifikasi Kualifikasi Ahli di Bidang Penjaminan atau Penjaminan Syariah pada Lembaga Penjamin

Peraturan ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 POJK Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai sertifikasi keahlian manajemen risiko pada level jabatan direksi dan komisaris, serta sertifikasi kualifikasi ahli penjaminan, termasuk penjaminan syariah.

3.3 PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

3.3.1 Pengawasan Perbankan Syariah

Selama triwulan III-2019, OJK menerima 81 permohonan perizinan yang terdiri dari 23 permohonan *Fit & Proper Test*, 14 permohonan perizinan produk baru, 25 permohonan pengembangan jaringan kantor, dan 19 permohonan izin lainnya.

Service Level Agreement (SLA) proses perizinan perbankan syariah berbeda-beda di setiap jenis perizinannya, secara umum, proses perizinan dapat diselesaikan lebih cepat dari SLA yg ditetapkan. Rata-rata realisasi SLA pada triwulan III-2019 untuk proses PKK Direksi dan Komisaris Bank Syariah adalah enam hari kerja. Sedangkan untuk perizinan pengembangan jaringan kantor SLA terhitung 14 hari kerja setelah persyaratan dokumen dinyatakan lengkap. Pada triwulan III-2019 rata-rata untuk perizinan pembukaan kantor baru adalah tiga hari kerja, penutupan jaringan kantor dua hari kerja, dan pemindahan alamat kantor tiga hari kerja. Sementara itu SLA proses persetujuan izin prinsip pendirian dan izin usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah selama 40 hari kerja sejak persyaratan dokumen dinyatakan lengkap, satu proses persetujuan prinsip pendirian yang telah disetujui adalah lima hari kerja, dan satu proses persetujuan izin usaha yang disetujui adalah lima hari kerja. Sementara itu untuk proses pencabutan izin usaha BPRS selama 40 hari kerja, dengan realisasi lima hari kerja.

Tabel III - 17 ◇ Permohonan Perizinan

No.	Jenis Proses Perizinan	Total Permohonan Masuk	Dalam Proses Penyelesaian	Disetujui	Tolak	Dihentikan/ Dibatalkan	Belum Memenuhi Persyaratan Administrasi	Laporan SLA dan Realisasi	
								SLA	Realisasi
Fit and Proper Test									
1.	Pemegang Saham Kendali (PSP)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pengurus Bank Syariah (Komisaris dan Direksi)	21	18	2	-	-	1	30	6 HK
3.	Dewan Pengawasan Syariah (DPS)	2	2	-	-	-	-	30	-
Total Permohonan Proses FPT		23	20	2	-	-	1	-	-
Perizinan Produk Baru		14	11	3	-	-	-	30	5 HK
Total Permohonan Perizinan Produk Baru		14	11	3	-	-	-	-	-
Pengembangan Jaringan Kantor									
1.	Pembukaan Kantor Baru	13	7	6	-	-	-	14	3 HK
2.	Penutupan Kantor	4	3	1	-	-	-	14	3 HK
3.	Pemindahan Alamat Kantor	8	3	5	-	-	-	14	3 HK
Total Permohonan Pengembangan Jaringan Kantor		25	13	12	-	-	-	-	-
Perizinan Lainnya:									
1.	Izin Prinsip	4	3	1	-	-	-	40	5 HK
2.	Izin Usaha	2	1	1	-	-	-	40	5 HK
3.	Izin Prinsip Disetujui Namun Belum Mengajukan Izin Usaha	-	-	-	-	-	-	40	-
4.	Konversi	6	6	-	-	-	-	40	-
5.	Pemisahan <i>Spin-off</i>	1	1	-	-	-	-	40	-
6.	Kantor Bank Asing	-	-	-	-	-	-	40	-
7.	Merger & Akuisisi	3	3	-	-	-	-	40	-
8.	Konsolidasi	-	-	-	-	-	-	40	-
9.	Perubahan Nama	1	1	-	-	-	-	40	-
10.	Penutupan/ Pencabutan Izin Usaha Bank	2	1	1	-	-	-	40	5 HK
11.	Kegiatan Usaha dalam Valas	-	-	-	-	-	-	40	-
Total Proses Perizinan Lainnya		19	16	3	-	-	-	-	-

Untuk mendukung konsistensi dari percepatan proses perizinan OJK memberikan OJK mengadakan *workshop* akselerasi proses perizinan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah seluruh Indonesia. Kegiatan *workshop* ini bertujuan untuk mengurangi proses surat menyurat baik pengembalian dokumen atau permintaan kelengkapan/ perbaikan dokumen yang disampaikan oleh bank serta mendukung proses percepatan SLA Perizinan khususnya mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan, sehingga target perizinan selesai dalam 14 hari kerja dapat terlaksana dengan baik.

3.3.2 Pengawasan Pasar Modal Syariah

Sampai dengan akhir Triwulan III-2019, terdapat 12 Pihak yang telah menjadi Pihak Penerbit DES, yaitu:

1. PT CIMB Principal Asset Management,
2. PT Manulife Aset Manajemen Indonesia,
3. PT BNP Paribas Investment Partners,
4. PT Schroders Investment Management Indonesia,
5. PT Aberdeen Asset Management,
6. PT Bahana TCW Investment Management,
7. PT Mandiri Manajemen Investasi,
8. PT Maybank Asset Management,
9. PT Eastspring Investments Indonesia,
10. PT Indosurya Asset Management
11. PT RHB Management Asset Indonesia dan
12. PT Samuel Aset Manajemen

OJK juga melakukan pemeriksaan kepatuhan kepada satu Pihak Penerbit DES, laporan hasil pemeriksaan tersebut telah diselesaikan.

3.3.3 Pengawasan IKNB Syariah

A. Pengawasan

Selama periode laporan, OJK melakukan pemeriksaan langsung sebanyak lima perusahaan Perasuransian Syariah dan satu Dana Pensiun Syariah dengan pemeriksaan seluruh aspek risiko dan sebagian aspek risiko. Pemeriksaan dilakukan terhadap satu Dana Pensiun Syariah (*full fledge*), dua perusahaan Asuransi Syariah (*full fledge*) dan tiga perusahaan Asuransi Unit Syariah.

Terkait pengawasan terhadap Perasuransian Syariah (*Onsite*), pada periode triwulan III-2019, OJK telah menerbitkan lima Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Sementara (LHPLS) dan empat Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Final (LHPLF). Selain pengawasan *onsite*, OJK juga melakukan pengawasan *offsite* dalam bentuk analisis laporan-laporan yang disampaikan perusahaan kepada OJK yaitu melakukan proses *quality assurance* dengan penyelenggaraan forum panel terhadap dua perusahaan Asuransi Syariah.

Terkait dengan pengawasan terhadap Lembaga Pembiayaan dan Industri Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus secara *on-site*, OJK menerbitkan dua Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Final (LHPLF) Perusahaan Modal Ventura Syariah dan dua Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Sementara (LHPLS) untuk Perusahaan Pembiayaan serta satu LHPLS Perusahaan Modal Ventura Syariah. Selain pengawasan *on-site*, OJK melakukan rapat eksekutif dengan empat Perusahaan Pembiayaan Syariah dan satu perusahaan Pergadaian Syariah terkait permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan tersebut.

B. Kelembagaan IKNB Syariah

Berkaitan dengan layanan kelembagaan pada triwulan III-2019, OJK telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pemberian dan Pencabutan Izin Usaha

Pemberian izin satu perusahaan pembiayaan syariah PT Sharia Multifinance Astra dan satu izin unit usaha syariah PT Jamkrida Jakarta.

2. Perizinan dan Pelaporan Kantor Cabang Syariah, Kantor Cabang Unit Syariah, Kantor selain Kantor Cabang Syariah, serta Kantor di luar Kantor Pusat

Pencatatan atas perubahan alamat empat kantor di luar kantor pusat perusahaan asuransi syariah atau unit syariah perusahaan asuransi. Penerbitan izin pembukaan Kantor Cabang Unit Syariah pada satu Perusahaan Pembiayaan dan satu Perusahaan Modal Ventura.

3. Perubahan Susunan Direksi, Komisaris, DPS, Pimpinan UUS, Internal Audit serta Tenaga Ahli

Pencatatan atas perubahan susunan dua orang komisaris Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, satu orang DPS Unit Syariah Perusahaan Asuransi Jiwa, pengangkatan satu orang Tenaga Ahli Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah dan pemberhentian satu orang Tenaga Ahli Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah. Pencatatan perubahan Pimpinan Unit Usaha Syariah pada satu Perusahaan Pembiayaan.

4. Pencatatan Produk IKNB Syariah

OJK telah menerbitkan 30 surat persetujuan produk Asuransi Syariah terdiri dari 21 produk Asuransi Jiwa Syariah dan sembilan produk Asuransi Umum Syariah. Selain itu, OJK menerbitkan delapan surat pencatatan produk Asuransi Jiwa Syariah dan dua surat pencatatan produk asuransi umum syariah. OJK juga menerbitkan surat persetujuan dan pencatatan produk Asuransi Syariah, OJK juga menerbitkan dua surat persetujuan kerja sama pemasaran *Bancassurance* produk Asuransi Syariah. Selanjutnya, OJK juga telah melakukan pencatatan satu produk Perusahaan Pembiayaan Syariah.

5. Pengujian Kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama

No.	Jenis Industri	Jumlah Pihak Utama	
		Lulus	Tidak Lulus
1.	Perasuransian Syariah	3	1
2.	Dana Pensiun Syariah	1	1
3.	Lembaga Pembiayaan Syariah	1	-
4.	Lembaga Keuangan Syariah Khusus	-	-
Jumlah		5	2

6. Pemenuhan Syarat Keberlanjutan

OJK telah melakukan pencatatan atas pemenuhan syarat keberlanjutan pada satu pihak utama Perusahaan Asuransi Syariah.

3.4 PENGEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

3.4.1 Pengembangan Perbankan Syariah

Selama triwulan III-2019, OJK melaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

1. Penyusunan Roadmap Perbankan Syariah 2020-2024

Tahun 2019 merupakan batas waktu berlakunya Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015 – 2019, maka dari itu perlu disusun arah kebijakan selanjutnya sebagai pedoman pengembangan perbankan syariah ke depan. OJK tengah menyusun Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2020-2024 yang telah diawali dengan disusunnya Kajian Tranformasi Perbankan Syariah Indonesia. Berdasarkan kajian tersebut, telah dibentuk Tim Transformasi Perbankan Syariah. Selain itu telah dilakukan serangkaian FGD dalam rangka menginventarisasi berbagai pandangan serta diskusi lebih mendalam yang melibatkan pemerintah/regulator, serta kementerian terkait, asosiasi terkait keuangan syariah yang mencakup asosiasi perbankan syariah, pasar modal syariah, dan IKNB syariah, serta akademisi dan organisasi masyarakat.

Selain FGD, akan dilakukan diskusi lebih mendalam, khususnya terkait *quick wins* pengembangan perbankan syariah yang terkait dengan kementerian/lembaga lain. Setelah itu, Tim Transformasi Perbankan Syariah akan melakukan diskusi internal untuk merumuskan program kerja yang konkret dan implementatif yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang akan diterbitkan oleh Bappenas, *Master Plan* Ekonomi Syariah Indonesia yang merupakan produk dari Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), dan *Master Plan* Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) yang merupakan arah kebijakan Sektor Jasa Keuangan secara keseluruhan.

2. Implementasi Produk Baru Perbankan Syariah

OJK mendukung perluasan produk baru Bank Syariah. Selama triwulan III-2019 produk yang telah mendapatkan persetujuan, antara lain BNI Syariah - Jasa Penagihan *Trade Finance* Antar Bank iB Hasanah yang merupakan produk jasa penagihan transaksi *trade finance* dengan akad wakalah bil ujah dan qardh dan UUS CIMB Niaga Syariah – MobilAku yang merupakan produk jual beli mobil dengan akad murabahah menggunakan tiga skema, yaitu *Pre Order*, *Blocking Unit*, dan *Inventory Fully Stock*.

3. Edukasi dan Sosialisasi Perbankan Syariah

a. Workshop Peningkatan Kualitas Pelaku BPRS

Sampai triwulan III-2019, OJK telah melaksanakan *Workshop* Peningkatan Kualitas Pelaku Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebanyak empat kali, yaitu di Surabaya, Makassar, Jakarta, dan Banda Aceh. Materi yang disampaikan antara lain mencakup mengenai transaksi pembiayaan istishna' dan salam.

b. Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI)

LPKSI merupakan salah satu wujud komitmen OJK untuk terus mendorong perkembangan industri keuangan syariah melalui penyusunan informasi yang lengkap dan menyeluruh tentang perkembangan industri keuangan syariah serta faktor-faktor yang mempengaruhinya sepanjang tahun. Buku LPKSI 2018 dipublikasikan pada Agustus 2019 dan telah disampaikan kepada *stakeholder* OJK. Publikasi dimaksud dapat juga diakses melalui *website* OJK.

3.4.2 Pengembangan Pasar Modal Syariah

1. Penyusunan Materi Pasar Modal Syariah di Perguruan Tinggi

OJK terus berupaya dalam mengembangkan materi edukasi terkait Pasar Modal Syariah agar terdapat *link and match* antara materi pengajaran di perguruan tinggi dengan kebutuhan industri. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lulusan yang siap pakai di industri pasar modal syariah. Pada periode laporan, OJK melakukan penyempurnaan atas modul tersebut. Penyempurnaan modul pasar modal syariah melibatkan beberapa perguruan tinggi dalam bentuk tim untuk memperoleh masukan terkait isi modul dimaksud. Selain itu agar

tujuan program ini tercapai, diperlukan komitmen dari perguruan tinggi yang terlibat untuk dapat menerapkan materi pasar modal syariah dalam kurikulum pengajaran di perguruan tinggi masing-masing.

2. Kajian Penerapan SPV pada penerbitan Sukuk Korporasi

Salah satu upaya pengembangan sukuk korporasi Indonesia adalah mendorong perkembangan sukuk korporasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri melalui diversifikasi skema penerbitan menggunakan *Special Purpose Vehicle* (SPV), yang merupakan praktik yang umum digunakan di dunia internasional. Praktik penerbitan sukuk dengan SPV telah diterapkan di Indonesia, yaitu pada penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) Indonesia melalui Perusahaan Penerbit SBSN. Sedangkan penerbitan sukuk korporasi di Indonesia hingga saat ini dilakukan tanpa menggunakan SPV dan langsung diterbitkan oleh Emiten. Berdasarkan kajian OJK sebelumnya, penerbitan sukuk korporasi menggunakan SPV berbadan hukum Perseroan Terbatas berpotensi menghadapi hambatan berupa kompleksitas dan biaya. Sejalan dengan hal tersebut, terdapat rencana pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang Pasar Modal, terkait pembentukan badan hukum khusus yang didirikan untuk pengembangan Pasar Modal yang tunduk terhadap Undang-Undang Pasar Modal. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian SPV pada Penerbitan Sukuk Korporasi, dengan tujuan antara lain untuk menganalisis peluang berdasarkan aspek syariah, aspek hukum, dan aspek bisnis penerapan SPV pada penerbitan sukuk. Selain itu, diperlukan pembahasan lebih lanjut mengenai struktur entitas SPV yang dapat digunakan pada penerbitan sukuk korporasi berdasarkan sistem hukum dan perundang-undangan di Indonesia, serta mengidentifikasi hal-hal yang perlu diatur terkait penerapan tersebut.

3. Kajian Implementasi Produk Reksa Dana Syariah Berbasis Pertanian

Dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan memberikan alternatif sumber permodalan petani di Indonesia, OJK pada 2017 melakukan kajian dengan judul "Kajian Produk Investasi Syariah Berbasis Pertanian". Tujuan kajian tersebut ialah untuk mengidentifikasi produk investasi syariah di pasar modal yang dapat digunakan sebagai sumber permodalan baru di sektor pertanian sekaligus menjadi sarana investasi baru bagi investor. Salah satu rekomendasi kajian tersebut adalah penerbitan *pilot project* produk investasi syariah di pasar modal dengan menggunakan sukuk dan/atau Reksa Dana Syariah berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas

(RDPT syariah) dengan *underlying asset* berupa beberapa portofolio subsektor pertanian. Selain itu, dapat juga menggunakan Reksa Dana Syariah berbasis sukuk (RDSBS) dengan aset yang mendasarinya berupa *Medium Term Notes* (MTN) syariah yang diterbitkan perusahaan/anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor pertanian. Dalam rangka mewujudkan *pilot project* tersebut, OJK melakukan kajian yang mengidentifikasi pihak yang berminat dan mendukung penerbitan produk reksa dana syariah berbasis pertanian ini.

4. Kajian Pemetaan Potensi Penerbitan Sukuk Daerah

Kajian ini merupakan lanjutan dari Kajian Pengembangan Sukuk Daerah yang disusun 2016. Kajian ini memuat perkembangan sukuk daerah baik dari sisi regulasi hingga perkembangan kebutuhan pendanaan daerah. Selain itu, kajian ini juga berfokus pada pemetaan potensi daerah yang dinilai berdasarkan beberapa indikator seperti kapasitas fiskal, kemampuan finansial daerah serta dukungan dari pemerintah daerah itu sendiri. Dalam penyusunan kajian ini, OJK melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah yang memiliki potensi untuk menerbitkan sukuk daerah. Salah satunya pemerintah Aceh yang telah menyatakan minatnya untuk menerbitkan sukuk daerah. Harapannya, melalui kajian ini dapat menjadi stimulus bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendukung penerbitan sukuk daerah.

5. Pendampingan terhadap Pihak yang Berminat Melakukan Penerbitan Sukuk Wakaf

Berdasarkan rekomendasi hasil kajian produk investasi berbasis wakaf pada 2018, didapatkan beberapa kesimpulan yang di antaranya adalah *pilot project* penerbitan sukuk wakaf di 2019. Pendampingan ini bekerja sama dengan konsultan dari pihak ketiga yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang wakaf dan pasar modal. Hingga triwulan III-2019, terdapat satu perusahaan pembiayaan yang telah menyatakan minatnya untuk menerbitkan sukuk wakaf. Sampai dengan saat ini telah dilakukan penyusunan skema terkait penerbitan sukuk wakaf tersebut. Selain itu, juga telah dilakukan penyusunan fatwa oleh DSN-MUI terkait penerbitan sukuk wakaf.

3.4.3 Pengembangan IKNB Syariah

A. Penelitian IKNB Syariah

Pada periode laporan, OJK melakukan penelitian mengenai Optimalisasi *Branding* Produk Asuransi Syariah di. Penelitian pada periode ini difokuskan pada pelaksanaan FGD dan *in depth interview* dengan responden.

B. Pengembangan IKNB Syariah

Dalam triwulan III-2019, OJK melakukan kegiatan pengembangan IKNB Syariah di beberapa kota di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai keuangan syariah, khususnya IKNB Syariah. Adapun kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Roadshow Seminar Asuransi Syariah dan Multifinance Syariah*

OJK bekerja sama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah mengadakan *Roadshow Seminar Asuransi Syariah dan Multifinance Syariah* kepada masyarakat dan komunitas ekonomi syariah di berbagai kota. Selama triwulan III-2019, *Roadshow Asuransi Syariah* diadakan di 10 kota yaitu kota Medan, Padang, Purwokerto, Banjarmasin, Samarinda, Surakarta, Yogyakarta, Cirebon, Ambon dan Ternate. Tema *roadshow* asuransi syariah ini adalah Hidup Penuh Berkah dengan Asuransi Syariah.

2. *Workshop Peningkatan Soft Skill Teknik Pemasaran bagi Tenaga Pemasar Produk Pembiayaan Syariah*

Dalam rangka pelaksanaan strategi pengembangan IKNB Syariah pada *Roadmap IKNB Syariah* yaitu meningkatkan dukungan sumber daya manusia, infrastruktur dan teknologi informasi, OJK menyelenggarakan *Workshop Peningkatan Soft Skill Teknik Pemasaran bagi Tenaga Pemasar Produk Pembiayaan Syariah* dengan narasumber perwakilan dari *Young Muslim Entrepreneurs*.

3. *Training of Trainers IKNB Syariah*

OJK menyelenggarakan kegiatan *Training of Trainers* bagi para dosen dan akademisi di perguruan tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan materi khusus mengenai IKNB Syariah di Universitas Muhammadiyah Mataram. Adapun kegiatan ini diselenggarakan bekerja sama dengan Kantor OJK Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai *counterpart* dalam penyelenggaraan kegiatan ToT IKNB Syariah. Kegiatan tersebut diikuti oleh 83 dosen perguruan tinggi yang berasal dari 14 universitas.





04

Manajemen Strategis
dan Tata Kelola Organisasi



4.1 Manajemen Strategi dan Kinerja OJK

4.1.1 Pelaksanaan Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja

OJK merumuskan strategi, rencana dan evaluasi kinerja organisasi dengan mengacu pada Sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK). Siklus MSAK OJK terdiri dari empat tahap dan pada triwulan III-2019, serta memasuki fase pelaksanaan dan *monitoring* strategi 2019 OJK memasuki tahap pertama siklus 2020, yaitu penyusunan dan penyesuaian strategi OJK. Tahapan yang telah dilaksanakan antara lain penyusunan dan penyesuaian arah strategi organisasi dalam *Board Retreat* 2019.

Grafik IV - 1 ◇ Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)



4.1.2 Pelaksanaan Sasaran Strategis OJK

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, OJK mengacu pada Peta Strategi 2019 yang merupakan kelanjutan hasil evaluasi dari strategi tahun sebelumnya. Di dalamnya terdapat enam Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Lembaga Pengawas SJK yang Independen dan Kredibel

2. Terwujudnya Sektor Jasa Keuangan yang Tangguh dan Tumbuh Berkelanjutan
3. Terwujudnya SJK yang Tangguh, Stabil dan Berdaya Saing
4. Terwujudnya SJK yang Kontributif terhadap Pemerataan Kesejahteraan
5. Terwujudnya Keuangan Inklusif bagi Masyarakat melalui Perlindungan Konsumen yang Kredibel
6. Terwujudnya Ekonomi Syariah Melalui Peningkatan Keuangan Syariah

Sebagai bentuk akuntabilitas lembaga, OJK menerbitkan Laporan Triwulan II-2019 sebagai pertanggungjawaban atas kinerja dan pencapaian OJK kepada publik.

4.1.3 Pelaksanaan Inisiatif Strategis dan Program Khusus OJK

Sehubungan dengan pelaksanaan IS dan PK OJK 2019 sampai dengan triwulan III-2019 telah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. IS-1 Inovasi Keuangan Digital Untuk Peningkatan Efisiensi Dan Inklusi Sektor Jasa Keuangan

Inisiatif Strategis ini bertujuan untuk mendorong inklusi, efisiensi dan pertumbuhan industri jasa keuangan sehingga dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Sampai dengan triwulan III-2019, OJK melakukan pemetaan 15 bisnis model dari 48 Inovasi Keuangan Digital yang diberikan status tercatat, menyelenggarakan Indonesia *Fintech Summit & Expo* 2019 dan menyusun kerangka kajian pengembangan dan panduan *Supervisory Technology* (*SupTech*) dan *Regulatory Technology* (*RegTech*).

2. IS-2 Penguatan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan Berbasis Teknologi Informasi

Inisiatif Strategis ini bertujuan untuk mewujudkan pengawasan SJK yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi permasalahan SJK secara dini, memberikan respons pengawasan yang cepat, dan pemanfaatan sumber daya yang efisien melalui penyediaan sistem informasi pengawasan sektor jasa keuangan (SJK) berbasis teknologi informasi (TI) yang handal dan aman. Sampai dengan triwulan III-2019, telah diimplementasikan OBOX dan APOLO pada 10 bank *pilot project* dan 113 Bank Umum lain telah menyiapkan infrastruktur untuk mendukung implementasi.

3. IS-3 Pendalaman Pasar Keuangan

Inisiatif Strategis ini merupakan serangkaian kegiatan pemetaan isu, potensi dan tantangan terkait regulasi kebijakan, proses bisnis, dan infrastruktur pasar yang dihadapi dalam upaya pendalaman pasar keuangan serta menyusun rekomendasi dan upaya konkret yang perlu dilakukan dalam mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut. Untuk

mendukung upaya pendalaman pasar keuangan, telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang memberikan kepastian hukum pajak penghasilan atas bunga obligasi terhadap Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA). Selain itu, OJK juga menerbitkan POJK Nomor 18/POJK.04/2019 tentang Perusahaan Efek Daerah (PED). Selama periode laporan, OJK menginisiasi *high level meeting* (HLM) Pendalaman Pasar Keuangan dengan Pimpinan Daerah yaitu dengan Gubernur Makassar, Gubernur Bali, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Aceh, Wakil Gubernur Jawa Timur, dan Walikota Bogor. Dalam rangka peningkatan kualitas pemahaman manfaat penerbitan Perusahaan Efek Daerah, dilaksanakan program peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah di Jawa Barat, Bali, Jawa Tengah, Bogor dan Aceh serta Program Pendampingan Teknis di Jawa tengah, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. Selain itu dilaksanakan sosialisasi dan promosi Pendirian Perusahaan Efek Daerah di Sumatera Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Sumatera Utara.

4. IS-4 Reformasi Industri Keuangan Non-Bank

Inisiatif Strategis ini terdiri dari penyusunan pengaturan terhadap manajemen, kelembagaan, produk dan layanan serta meningkatkan kompetensi pengawasan dalam rangka pengembangan IKNB. Sampai dengan triwulan III-2019, hasil *draft* Naskah Akademik, revisi Undang-undang Dana Pensiun, dan matriks substansi diusulkan masuk ke dalam Prolegnas jangka menengah. Selain itu, telah dilaksanakan *pilot project* sistem pengawasan berbasis risiko LJKNB terhadap dua perusahaan asuransi, dua perusahaan asuransi syariah, satu perusahaan pembiayaan, dan tiga dana pensiun dengan memberikan pemahaman dan asistensi terkait *Risk Based Non Bank Rating* (RBNBR). Untuk mendukung hal tersebut OJK telah menyusun *Handbook Know Your Non Bank Financial Institution* (KYNBFI), *handbook* Tingkat Kesehatan (RBNBR), Pedoman *Early Warning System* (EWS) Asuransi, Dana Pensiun dan Perusahaan Pembiayaan.

5. IS-5 Penyempurnaan Manajemen Sistem Keuangan

Inisiatif strategis ini bertujuan untuk memastikan sistem aplikasi keuangan OJK dapat diandalkan untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu serta tersedianya infrastruktur dan kebijakan dalam penerapan anggaran berbasis kinerja. Sampai dengan triwulan III-2019, OJK telah mengimplementasi penanganan layanan SIAUTO melalui *helpdesk*.

6. IS-6 Penyederhanaan dan Otomasi Proses Bisnis

Inisiatif Strategis ini bertujuan terciptanya proses bisnis yang standar, efektif dan efisien guna

memenuhi kebutuhan *stakeholders* utama OJK. Beberapa kegiatan utama pada IS-6 yang telah dilaksanakan sampai dengan triwulan III-2019 antara lain pengembangan modul penilaian kemampuan dan kepatutan (PKK) Perizinan Terintegrasi interkoneksi dalam SPRINT untuk Bank Umum Konvensional, bimbingan teknis *Database Track Record* Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) Terintegrasi, pendampingan penyusunan Standar Prosedur Operasional (SPO) internal dan penetapan ketentuan terkait *digital signature* dan naskah dinas elektronik.

7. IS-7 Implementasi Rancang Bangun Sistem Informasi (RBSI) OJK 2018-2022

Inisiatif Strategis ini bertujuan untuk mengembangkan Sistem Informasi OJK yang terintegrasi, andal, aman, berkualitas, mendukung pencapaian visi dan misi OJK, serta memberikan nilai tambah bagi *stakeholders*. Selama triwulan III-2019, kegiatan terkait IS-7 antara lain pengembangan dan penyiapan infrastruktur *Mobile Apps Executive Information System Dashboard* SJK Terintegrasi (EXIST), pengembangan dan penyiapan infrastruktur Aplikasi *Enterprise Data Warehouse* (EDW), penyusunan arsitektur *middleware* dan menentukan aplikasi/*service middleware* tahap I serta pengujian dan *deployment* Portal Bersama Integrasi Pelaporan.

8. IS-8 Percepatan Akses Keuangan

Inisiatif Strategis ini mempunyai misi untuk melakukan percepatan peningkatan tingkat inklusi dan literasi keuangan melalui program yang menasar kelompok tertentu. Sampai dengan triwulan III-2019, OJK melaksanakan kajian potensi ekonomi dan akses keuangan daerah serta kegiatan *business matching* di 20 wilayah KR/KOJK. Selain itu OJK mengembangkan aplikasi sistem pelaporan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Terintegrasi serta melaksanakan tabulasi data dan laporan Survei Nasional Literasi Keuangan Tahun 2019.

Selain pelaksanaan delapan IS tersebut, OJK juga melaksanakan serangkaian kajian dalam Proyek Khusus (PK) OJK. Sampai triwulan III-2019, progress pelaksanaan PK adalah sebagai berikut:

1. PK-1 Efektivitas Penyaluran KUR untuk UMKM

OJK telah mengumpulkan data terkait melalui survei lapangan ke UMKM di empat Dati II di Provinsi Sumatera Utara: Kota Medan, Kab. Langkat, Kab. Deli Serdang, dan Kab. Karo dan melaksanakan FGD dengan Universitas Sumatera Utara, bank dan lembaga pembiayaan penyalur KUR, serta instansi pemerintah daerah terkait. Langkah selanjutnya akan dilaksanakan pengolahan data dan analisis hasil penelitian serta publikasi hasil penelitian dalam bentuk infografis.

2. PK-2 Penguatan Riset Untuk Dasar Kebijakan Sektor Jasa Keuangan (*Research Based Policy*)

OJK telah menyelenggarakan Seminar Riset dan FGD Topik Riset Tahun 2019 di Yogyakarta. Selain itu OJK juga meluncurkan laman riset di situs OJK guna mempublikasikan hasil riset terkait.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi peneliti di lingkungan sektor jasa keuangan OJK menyelenggarakan *workshop* analisis statistik dengan aplikasi "R" dan Mini Seminar Volatilitas Saham dan Modelling Panel VAR.

3. PK-3 Digital Economy

OJK melaksanakan pengumpulan data UMKM *e-commerce* melalui survei *online* OJK dan survei lapangan UMKM dan *e-commerce* di 10 Provinsi di Indonesia. Selain itu OJK juga melaksanakan FGD dengan penyelenggara *e-commerce*, universitas, industri perbankan dan perasuransian.

4. Bank Wakaf Mikro (BWM) dan Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

OJK memfasilitasi pendirian 53 Bank Wakaf Mikro dan 24 BUMDesa Center. Dalam rangka memastikan operasional BWM berjalan sesuai ketentuan OJK melaksanakan tiga pendampingan dan pengawasan BWM.

Sebagai upaya pengembangan BWM, OJK melakukan audiensi pendapat dan pandangan terkait akad model bisnis BWM ke DSN MUI dan menyusun *prototype dashboard* program BWM.

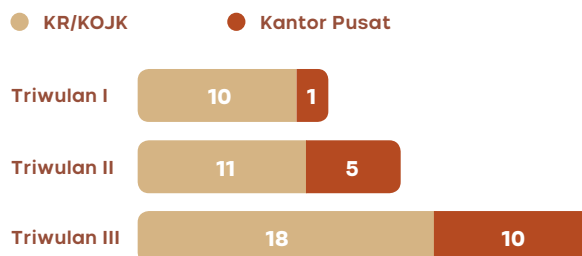
4.2 Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas

4.2.1 Audit Internal

OJK melaksanakan audit internal guna memberikan konsultasi atas hasil audit yang bersifat independen dan obyektif pada Satuan Kerja di lingkungan OJK. Sampai dengan periode pelaporan, OJK menyelesaikan 28 penugasan audit yaitu sebanyak

18 penugasan audit dilakukan di Kantor Regional dan Kantor OJK, dan 10 penugasan audit dilakukan di Kantor Pusat. Dari 28 pelaksanaan audit internal, 21 LHA telah diterbitkan dan tujuh LHA lainnya masih dalam tahap finalisasi.

Grafik IV - 2 ♦ Pelaksanaan Audit per Triwulan



Selama periode pelaporan audit internal melakukan monitoring rekomendasi audit. Atas kegiatan tersebut, terdapat 398 rekomendasi yang telah diselesaikan dari 397 yang jatuh tempo di triwulan III-2019 dan satu rekomendasi belum jatuh tempo di periode pelaporan.

4.2.2 Pengelolaan Risiko

Sampai dengan triwulan III-2019 terdapat 155 mitigasi risiko yang dilaksanakan. Rincian mitigasi yang sudah dilaksanakan dikelompokkan menjadi tiga bagian yakni sebanyak 71 terkait proses bisnis (70,3%), 27 terkait sumber daya manusia (26,73%) dan tiga terkait teknologi informasi (2,97%).

Dalam rangka mendukung peningkatan pengelolaan risiko agar lebih efektif dan efisien, OJK mengembangkan *tools* Indikator Risiko Utama (IRU). IRU adalah sebuah parameter yang digunakan untuk memprediksi tentang perubahan dalam profil risiko OJK. Dengan deteksi lebih dini, diharapkan OJK dapat mengambil tindakan secara tepat waktu untuk menangani masalah yang akan terjadi. Penyusunan IRU mempertimbangkan identifikasi urutan sebab akibat dari rantai peristiwa, akar dari suatu permasalahan, skala prioritas dalam penetapan IRU, manfaat informasi yang lebih tinggi, dan dilakukan pemantauan secara berkala.

4.2.3 Indeks Integritas

Selama periode pelaporan OJK menyelenggarakan survei penilaian integritas kepada responden internal dan eksternal. Responden internal terdiri dari pegawai OJK sedangkan responden eksternal merupakan pengguna layanan OJK. Dari pelaksanaan tersebut terbentuk penilaian dalam bentuk Indeks Integritas menggambarkan sejauh mana OJK sebagai lembaga yang berwenang mengatur, mengawasi dan melindungi konsumen sektor jasa keuangan menjunjung tinggi nilai integritas dalam pelaksanaan tugasnya. Hasil survei tersebut menunjukkan indeks integritas OJK pada tahun 2018 yang cukup baik, yaitu sebesar 78,84%.

4.2.4 Sistem Pengendalian Kualitas

Pendampingan Sistem Pengendalian Kualitas (SPK) dilaksanakan untuk menilai efektifitas atas pelaksanaan proses bisnis di OJK, memberikan konsultasi kepada Satuan Kerja, dan menyampaikan *point of improvement* (POI) kepada Satuan Kerja dalam penerapan SPK OJK. SPK dilakukan dengan melakukan diskusi bersama Satuan Kerja dan analisis atas dokumen-dokumen seperti:

- Standar Operasional Prosedur/Pedoman Pelaksanaan Proses Bisnis
- Kebijakan Kualitas Satuan Kerja
- Rencana Kerja Tahunan
- Kesepakatan Kinerja Satuan Kerja
- Dokumen terkait Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja
- Profil Risiko Satuan Kerja
- Manual Risiko Satuan Kerja (jika ada)
- Daftar Mitigasi Risiko OJK (jika ada)
- Risalah Rapat yang berhubungan dengan SPO yang dipilih

Hasil diskusi dan analisis dokumen-dokumen sumber tersebut menjadi dasar dalam penyusunan POI yang perlu ditindaklanjuti oleh Satuan kerja. Selama periode pelaporan telah dilakukan pendampingan *on-site* ke 7 satuan kerja dengan hasil rata-rata menunjukkan kinerja yang efektif.

4.2.5 Program Pengendalian Gratifikasi

Unit Pengendalian Gratifikasi Otoritas Jasa Keuangan (UPG OJK), pada triwulan III-2019 menerima dan mengelola 88 laporan gratifikasi sehingga akumulasi laporan tahun 2019 sejumlah 216 laporan.

Berdasarkan jenis gratifikasi, 67 laporan dalam bentuk uang, 17 laporan dalam bentuk barang, dan empat laporan dalam bentuk uang dan barang sehingga total nilai laporan triwulan III-2019 yaitu senilai Rp ±487 juta.

UPG secara aktif melakukan sosialisasi fakta gratifikasi, salah satunya yaitu terkait rambu-rambu

perlakuan untuk jenis gratifikasi yang dianggap suap, maupun hadiah yang diperbolehkan untuk diterima.

4.2.6 Whistle Blowing System

WBS OJK merupakan sarana pelaporan yang digunakan untuk melaporkan dugaan *fraud* yang dilakukan Insan OJK. Laporan *Whistle Blowing System* yang diterima selama triwulan III-2019 sebanyak 438 laporan dengan laporan yang sedang ditindaklanjuti (laporan yang berindikasi pelanggaran oleh jajaran OJK dan didukung bukti yang memadai sejumlah 65 laporan. Laporan yang telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 29 laporan.

OJK secara berkesinambungan melaksanakan kegiatan sosialisasi Program Penguatan Integritas OJK. Pada triwulan III-2019, OJK melaksanakan 26 kegiatan sosialisasi baik kepada internal OJK maupun peserta eksternal dengan materi yang disampaikan yaitu nilai-nilai integritas, OJK WBS, gratifikasi, e-LHKPN, dan *Fraud Risk Assessment*.

4.3 Rapat Dewan Komisiner

Selama triwulan III-2019, Dewan Komisiner telah menyelenggarakan 15 kali RDK yang membahas 56 materi yang terdiri dari 21 RDK Laporan dan 35 RDK Topik.

Dalam RDK Laporan, selain menerima laporan hasil asesmen dan *surveillance* terhadap kondisi perekonomian dan industri jasa keuangan, Dewan Komisiner juga menerima laporan atas beberapa kebijakan strategis OJK.

Sementara itu, dalam RDK topik, Dewan Komisiner memutuskan beberapa kebijakan strategis terkait pelaksanaan fungsi dan tugas OJK, di antaranya persetujuan atas penerbitan sejumlah peraturan dalam rangka mengatur dan mengawasi Sektor Jasa Keuangan. Selama triwulan III-2019, sebanyak delapan Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) telah mendapatkan persetujuan RDK.

Dewan Komisiner menyetujui empat RPOJK di industri Perbankan. Pertama adalah RPOJK tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang merupakan konversi terhadap Peraturan Bank Indonesia. Kedua, RPOJK tentang Pelaporan Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra Atau Yurisdiksi Mitra. Di 2015, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 25/POJK.03/2015 untuk mendukung pemerintah dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam proses penyampaian informasi nasabah LJK yang merupakan wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra agar tetap mematuhi peraturan

perundang-undangan. Sejalan dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2017 (UU 9/2017) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang dimaksud, maka diperlukan harmonisasi antara POJK tahun 2015 dengan UU 9/2017 dan PMK dimaksud.

Selanjutnya adalah RPOJK tentang Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan Untuk Pengembangan Perbankan Syariah. Ketentuan ini diharapkan dapat mendorong pengembangan perbankan syariah melalui sinergi Bank Umum Syariah dengan Bank Umum dalam satu kepemilikan. RPOJK berikutnya adalah RPOJK tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit (*leverage*) Bagi Bank Umum. Penetapan rasio *leverage* merupakan pelengkap bagi kerangka permodalan berbasis risiko.

Di industri Pasar Modal, Dewan Komisiner menyetujui dua RPOJK yang merupakan penyempurnaan atas POJK yang telah diterbitkan. RPOJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas merupakan penyempurnaan dari POJK yang diterbitkan pada 2014. Selanjutnya adalah RPOJK tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah yang merupakan penyempurnaan POJK dalam rangka mengakomodir jenis produk reksa dana baru dan mengatur pemotongan zakat atas kekayaan Reksa Dana Syariah.

Di Industri Keuangan Non Bank, Dewan Komisiner menyetujui RPOJK tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank. Perkembangan industri Lembaga Jasa Keuangan Non Bank yang semakin kompleks dan bersifat dinamis berpengaruh terhadap risiko yang akan dihadapi. Untuk itu diperlukan metodologi penilaian Tingkat Kesehatan yang dapat mencerminkan kondisi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank saat ini dan pada waktu yang akan datang.

Pada triwulan ini Dewan Komisiner menyetujui perubahan ketentuan yang mengatur penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Perubahan ketentuan ini diantaranya pada aspek pengaturan mengenai pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pencegahan proliferasi senjata pemusnah massal.

Setelah mendapatkan persetujuan di RDK, beberapa RPOJK tersebut akan dilanjutkan ke proses berikutnya sebelum diterbitkan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan di OJK.

Selain RDK, Dewan Komisiner juga menyelenggarakan

forum Board Seminar (BS) yang ditujukan untuk memberikan arahan atas pelaksanaan fungsi dan tugas OJK serta membahas substansi ketentuan yang akan diterbitkan oleh OJK. Sepanjang triwulan III-2019, BS diselenggarakan sebanyak 11 kali dengan jumlah materi yang dibahas sebanyak 23 materi. Sebagian besar materi yang dibahas dalam BS di triwulan ini adalah mengenai RPOJK.



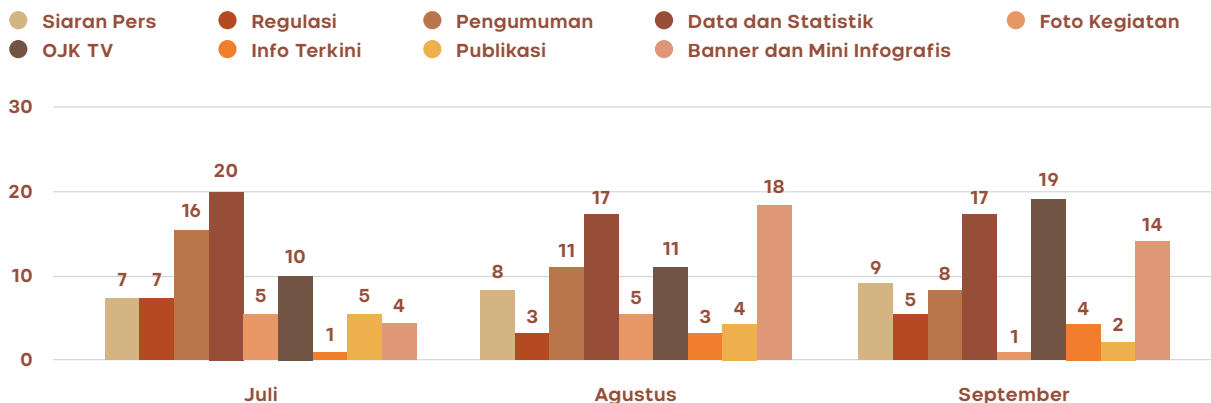
4.4 Komunikasi

4.4.1 Komunikasi Terintegrasi

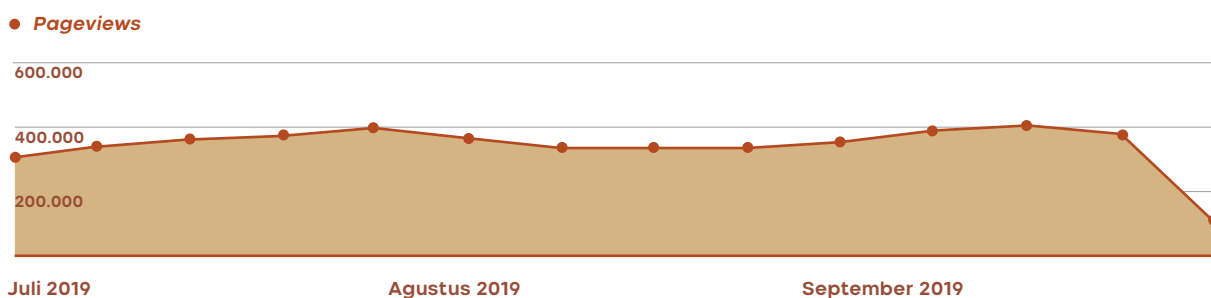
OJK melakukan serangkaian kegiatan komunikasi terintegrasi dan berkesinambungan melalui berbagai media, baik cetak, elektronik dan digital, termasuk

media milik OJK antara lain *website* OJK dan media jejaring sosial seperti *Twitter*, *Facebook*, *Instagram* dan *Youtube*.

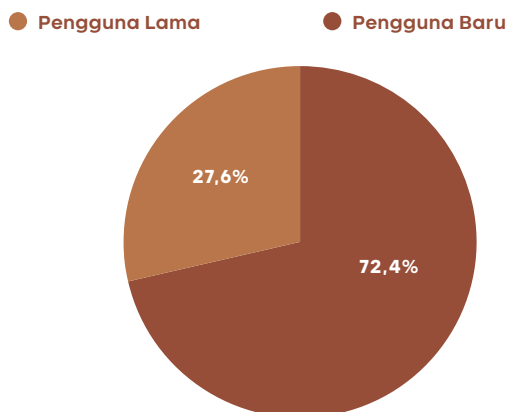
Grafik IV - 3 ◇ Jumlah Publikasi di *Website* OJK



Grafik IV - 4 ◇ Statistik Pengunjung *Website* OJK



Pengguna	Pengguna Baru	Sesi
918.240	817.129	1.634.910
Jumlah Sesi per Pengguna	Pageviews	Halaman per Sesi
1,78	4.771.849	2,92
Durasi Rata-rata	Bounce Rate	
00:03:05	58,45%	



Selama periode triwulan III-2019, *website* OJK mengunggah 258 materi yang meliputi siaran pers, regulasi, data & statistik, pengumuman, foto kegiatan, info terkini dan sebagainya. Berdasarkan data statistik, jumlah pengunjung *website* pada periode ini sebanyak 918.240 users, dengan rata-rata 9.980 pengunjung setiap harinya. Sementara itu, jumlah halaman yang diakses sebanyak 4.771.849 *pageviews*.

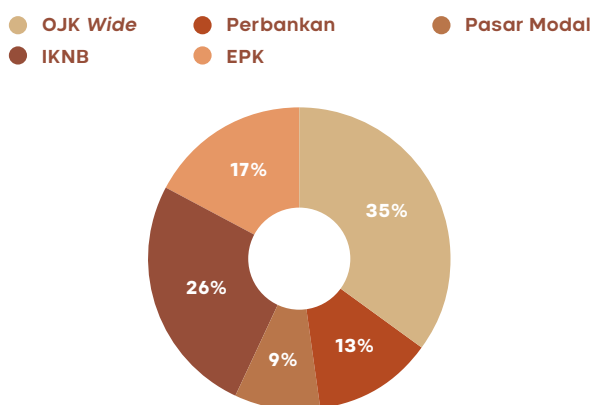
Terkait diseminasi informasi melalui media sosial OJK (*Twitter*, *Facebook* dan *Instagram*) publikasi OJK meningkat sebesar 35,9 persen, yang sebelumnya pada triwulan II-2019 sebanyak 432 konten menjadi 587 konten pada periode triwulan III-2019. Publikasi tersebut meliputi infografis, motion grafis, kultwit, foto dan video kegiatan serta kebijakan OJK. Sampai akhir periode triwulan III-2019, media sosial *Twitter*

OJK memiliki lebih dari 53.300 *followers*, Facebook OJK lebih dari 52.070 *followers* dan instagram OJK lebih dari 260.000 *followers*.

Mengenai pengelolaan opini publik, OJK memiliki program analisis kuantitatif dan kualitatif untuk setiap pemberitaan OJK di media massa dan media sosial. Analisis ini dilakukan melalui monitoring berita mengenai OJK dan Industri Jasa Keuangan secara umum pada 18 media cetak, 1.175 media online, 14 stasiun televisi nasional dan media sosial.

Terkait dengan relasi media, selama triwulan III-2019 OJK telah menerbitkan 23 siaran pers yang didominasi oleh topik OJK *Wide* sebanyak delapan siaran pers. Penerbitan siaran pers bertujuan untuk mengumumkan program atau kegiatan OJK, peraturan terbaru OJK atau isu lainnya terkait dengan Industri Jasa Keuangan yang memiliki nilai berita agar dapat dipublikasikan di media massa.

Grafik IV - 5 ◇ Topik Siaran Pers



Adapun judul siaran pers yang diterbitkan oleh OJK dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV - 1 ◇ Judul Siaran Pers

No.	Judul Siaran Pers	Bidang
1.	Satgas Waspada Investasi Kembali Hentikan 140 <i>Fintech Peer-To-Peer Lending</i> Tanpa Izin, Satgas Juga Hentikan 43 Entitas Penawaran Investasi Tanpa Izin	EPK
2.	OJK Cabut Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Efita Dana Sejahtera Depok	Perbankan
3.	<i>Bilateral Meeting</i> OJK dan Bank Of Thailand	OJK Wide
4.	OJK Pantau Teknologi Informasi Perbankan	Perbankan
5.	Semester I 2019, Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Tetap	Pasar Modal

6.	OJK Fokus Tingkatkan Literasi Dan Inklusi Keuangan Pemuda - Gelar Aksimuda 2019 "Menabung Untuk Semua"	EPK
7.	OJK dan Kementerian Kelautan Luncurkan Asuransi Perikanan Lele dan Budidaya Udang	IKNB
8.	OJK dan Bareskrim Polri Sepakat Berantas <i>Fintech Peer-To-Peer Lending</i> Ilegal Dan Investasi Ilegal	EPK
9.	Strategi OJK Dalam Pengawasan Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital - Tunjuk Asosiasi Fintech Indonesia Sebagai Asosiasi Penyelenggara IKD	IKNB
10.	Pencabutan Izin Usaha PT BPR Calliste Bestari Badung Bali	Perbankan
11.	Pasar Modal Tingkatkan Kontribusi Bagi Pertumbuhan Ekonomi - Gelar <i>Capital Market Summit & Expo</i> 2019	Pasar Modal
12.	Wimboh Santoso Dikukuhkan Sebagai Guru Besar UNS Surakarta	OJK Wide
13.	Investor Inggris Tertarik Perbanyak Investasi di Sektor Jasa Keuangan	OJK Wide
14.	Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Tetap Terjaga di Tengah <i>Downside Risk</i> Perekonomian Global yang Tinggi	OJK Wide
15.	OJK Terapkan <i>Supervisory Technology</i> Awasi <i>Fintech</i>	IKNB
16.	Pahami Manfaat <i>Fintech Lending</i> dan Risikonya OJK Gelar <i>Fintech Days</i> di Samarinda	IKNB
17.	Satgas Temukan 123 <i>Fintech Lending Ilegal</i> , 30 Gadai Swasta dan 49 Entitas Penawaran Investasi Tanpa Izin	EPK
18.	Tingkatkan Ekonomi Rakyat Melalui Bank Wakaf Mikro Peresmian BWM APIK Kendal Jateng	IKNB
19.	OJK Perkuat Kerja Sama Dengan FSC Korea Hadapi Era Transformasi Keuangan Digital	OJK Wide
20.	<i>Indonesia Fintech Summit & Expo</i> 2019 - Komitmen Regulator dan Industri Fintech Terhadap Inklusi Keuangan di Indonesia	IKNB
21.	OJK Keluarkan Izin Penyelenggara Layanan Urus Dana Berbasis Teknologi Informasi (<i>Equity Crowd Funding</i>)	Pasar Modal
22.	Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Tetap Terjaga Di Tengah Tingginya Ketidakpastian Perekonomian Global	OJK Wide
23.	Penjelasan Mengenai Gugatan Pegawai Terhadap Anggota Dewan Komisiner OJK	OJK Wide

Selanjutnya, OJK menyelenggarakan jumpa pers dan Media Briefing sebanyak sembilan kali. Adapun topik jumpa pers dan media briefing pada triwulan III-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel IV - 2 ◇ Jumpa Pers dan Media Briefing

No.	Tema Kegiatan	Narasumber
1.	Perkembangan Pengaturan dan Pengawasan <i>Fintech</i>	Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital OJK
2.	Perkembangan Industri Jasa Keuangan Semester I/2019	Anggota Dewan Komisiner OJK
3.	Peresmian Penunjukan Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD)	Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK
4.	Pasar Modal Tingkatkan Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi-Gelar <i>Capital Market Summit & Expo 2019</i>	Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK
5.	Launching <i>Minisite OJK Infinity</i>	Ketua Dewan Komisiner OJK
6.	Transaksi Efek dalam Portfolio	Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal II OJK
7.	Pembukaan <i>Fintech Summit & Expo 2019</i>	Ketua Dewan Komisiner OJK
8.	Perlindungan & Pengaduan Konsumen dalam <i>Fintech</i>	Ketua Satgas Waspada Investasi dan Direktur Pelayanan Konsumen OJK
9.	<i>Equity Crowd Funding</i>	Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal II OJK

Selain itu, sebagai upaya untuk menjaga relasi dan meningkatkan pemahaman media terhadap program dan kebijakan OJK, perkembangan industri jasa keuangan serta membangun opini positif OJK di masyarakat, OJK mengadakan kegiatan pelatihan wartawan media massa dan *Focus Group Discussion* (FGD) Redaktur Pelaksana Media Massa dengan Anggota Dewan Komisiner (ADK) di Bandung, Jawa Barat.

OJK bekerja sama dengan IDX Channel memproduksi program bernama '*Decision Maker - OJK Update*'. Sebuah program *talkshow* yang disiarkan secara langsung oleh IDX Channel setiap hari Kamis pukul

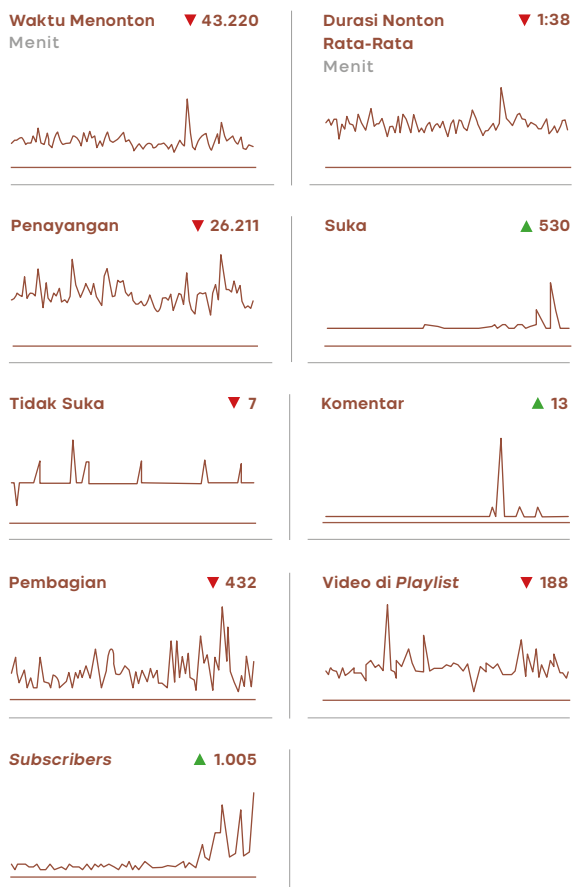
08.00 – 08.30 WIB yang menyajikan data dan informasi dengan tema yang aktual mengenai kebijakan OJK dan perkembangan sektor jasa keuangan yang ditujukan bagi para pengambil kebijakan di industri jasa keuangan. Acara tersebut dapat disaksikan melalui link <https://www.idxchannel.tv/idxc-live>. Adapun tema program *Decision Maker - OJK update* pada triwulan III-2019 sebagai berikut:

Tabel IV - 3 ◇ Tema *Decision Maker - OJK Update*

No.	Tema Kegiatan
1.	Sanksi OJK ke PT Garuda Indonesia Tbk Atas Kasus Penyajian Laporan Keuangan Tahunan
2.	Izin Usaha Pergadaian Swasta
3.	Mencari Format <i>Fintech</i> Yang Ramah Konsumen
4.	Perkembangan Sektor Jasa Keuangan Semester I-2019 (Hasil RDK Bulanan 24 Juli 2019)
5.	Perlindungan Konsumen Nasabah <i>Fintech Lending</i>
6.	Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Melalui Tabungan SiMuda
7.	Asuransi Usaha Budidaya Udang (AUBU) Komersial dan Asuransi Perikanan Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK)
8.	Perkembangan BPR dan Arah Kebijakan Pengembangannya
9.	Perkembangan Sektor Jasa Keuangan Periode Juli 2019
10.	Pendirian Perusahaan Efek Daerah Untuk Memperluas Basis Investor Daerah
11.	Kepemilikan Reksa Dana oleh Investor Tunggal
12.	Satgas Waspada Investasi Tindak Tegas 123 <i>Fintech Lending</i> Ilegal, 30 Gadai Swasta Tanpa Izin dan 49 Entitas Penawaran Investasi Tanpa Izin
13.	Perkembangan Sektor Jasa Keuangan Periode Agustus 2019

4.4.2 OJK TV

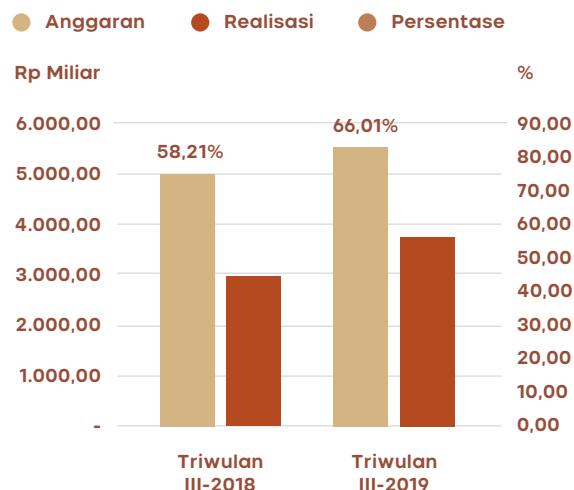
OJK TV merupakan salah satu medium komunikasi untuk menyiarkan kebijakan, program, dan kegiatan OJK yang ditayangkan melalui kanal Youtube dengan akun Jasa Keuangan. Selama triwulan III-2019, OJK TV telah memproduksi 67 liputan.

Grafik IV - 6 ◇ Statistik OJK TV

4.5 Keuangan

4.5.1 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran OJK sampai dengan triwulan III-2019 adalah Rp3.650,24 miliar atau 66,01% dari pagu anggaran Rp5.529,74 miliar. Persentase realisasi tersebut mengalami peningkatan dibandingkan triwulan III-2018 sebesar 58,21%. Peningkatan realisasi merupakan indikator bahwa terdapat peningkatan kualitas OJK dalam penyusunan anggaran dan eksekusi program kerja. Sebagaimana tahun sebelumnya, anggaran OJK 2019 dibiayai sepenuhnya oleh penerimaan pungutan OJK.

Grafik IV - 7 ◇ Realisasi Anggaran

4.5.2 Implementasi *International Organization for Standardization* (ISO) 9001: 2015

Dalam rangka meningkatkan standar mutu pada proses bisnis terkait pengelolaan keuangan, OJK mengimplementasikan Standar Internasional Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015. Penerapan ISO 9001:2015 tersebut bertujuan untuk memperbaiki proses bisnis, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, serta meningkatkan reputasi lembaga.

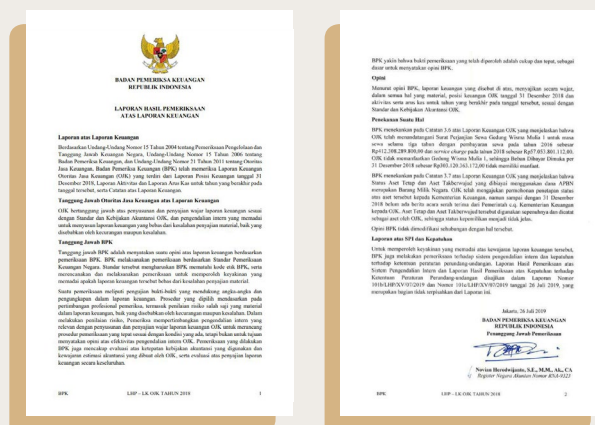
Adapun kegiatan implementasi ISO 9001:2015 yang dilaksanakan pada triwulan III-2019 adalah *pre-assessment* ISO 9001:2015, Internal Audit Kualitas, Tinjauan Manajemen serta Audit Sertifikasi ISO 9001:2015 *stage* I dan II. Berdasarkan hasil audit sertifikasi ISO 9001:2015 yang dilakukan oleh pihak eksternal, OJK direkomendasikan memperoleh Sertifikat ISO 9001:2015 dengan Nomor: FS 716957. Penyerahan sertifikat dilaksanakan pada 12 September 2019.

Laporan Keuangan OJK Tahun 2018: Wajar Tanpa Pengecualian



Laporan Keuangan 2018

Laporan Keuangan OJK Tahun 2018 kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) ke enam kalinya. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan *Audited* OJK Tahun 2018 diserahkan pada tanggal 9 Agustus 2019.



Opini Wajar Tanpa Pengecualian

4.6 Sistem Informasi

4.6.1 Rancang Bangun Sistem Informasi (RBSI) 2018-2022

Implementasi RBSI OJK tahun 2018 – 2022 dilakukan secara bertahap sesuai dengan *roadmap* yang disusun. Salah satu program strategis yang dilaksanakan pada 2019 adalah pemanfaatan teknologi *Big Data Analytics* untuk mendukung pengambilan keputusan terkait perlindungan konsumen, khususnya pemantauan investasi ilegal dan pemantauan iklan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).

Hingga triwulan III-2019 OJK telah menggunakan teknologi *Big Data Analytics* untuk pemantauan investasi ilegal. Saat ini, OJK terus mengumpulkan informasi aduan dari masyarakat dan informasi pendukung lainnya yang berasal dari data media *online*, sosial media, forum, dan blog. Selanjutnya, data tersebut akan diolah menggunakan *Machine Learning* dan ditampilkan dalam bentuk *dashboard*. Layanan *Big Data Analytics* untuk Waspada Investasi telah selesai dikembangkan dan telah digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan Satuan Tugas Waspada Investasi terkait legalitas suatu entitas yang melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin.

Selain untuk memantau investasi ilegal, OJK akan memanfaatkan teknologi *Big Data Analytics* dalam membantu menilai kepatuhan iklan produk dan layanan jasa keuangan pada sosial media terhadap Pedoman Iklan Jasa Keuangan yang dikeluarkan oleh OJK. Dengan teknologi ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memperoleh informasi yang jelas, akurat, jujur, dan tidak menyesatkan dari iklan yang dipublikasikan oleh PUJK. Hingga triwulan III-2019, layanan tersebut untuk pemantauan iklan PUJK masih dalam tahap pengembangan.

4.6.2 Penguatan Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, OJK didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pada triwulan III-2019, OJK melakukan beberapa penguatan infrastruktur jaringan TI antara lain:

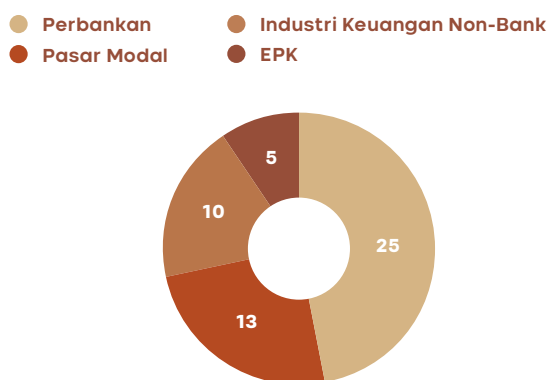
- Penyediaan redundansi jaringan di empat Kantor Regional OJK (Medan, Makassar, Bandung, Semarang) untuk peningkatan SLA.
- Implementasi pengamanan jaringan TI menggunakan IPS di *Data Center Colocation*.
- Penyediaan redundansi *Router Key Server* di *Data Center Colocation* untuk enkripsi jaringan Kantor Pusat – Kantor Regional – Kantor OJK.

- Implementasi *Bandwidth Management* untuk memastikan ketersediaan jaringan aplikasi dan user di OJK.
- Penambahan *Access Point* (WiFi) di Kantor Pusat.

4.6.3 Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi

Pengembangan Sistem Informasi yang berkelanjutan terus dilakukan OJK untuk mengoptimalkan fungsi pengaturan, pengawasan dan perlindungan terhadap Industri Jasa Keuangan yang terintegrasi, baik di sektor Perbankan, Pasar Modal, maupun IKNB. Sampai dengan triwulan III-2019, OJK telah mengimplementasikan 83 Aplikasi yang terbagi menjadi beberapa fungsi.

Grafik IV - 8 ◇ Sebaran Kelompok Aplikasi di OJK (Fungsi Utama)



Grafik IV - 9 ◇ Sebaran Kelompok Aplikasi di OJK (Fungsi Pendukung)

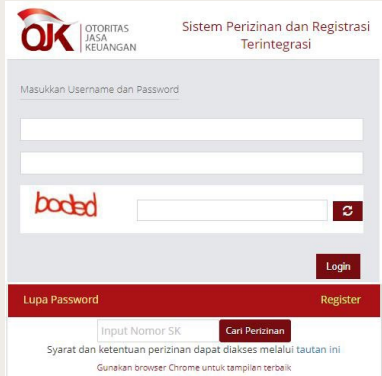


Menuju OJK *Digital Office*

A. SISTEM PERIZINAN DAN REGISTRASI TERINTEGRASI (SPRINT)

Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) merupakan portal *online* yang kedepannya diharapkan menjadi gerbang utama bagi industri keuangan untuk mengajukan berbagai perizinan kepada OJK. SPRINT telah dikembangkan sejak 2015. Fitur utama yang saat ini terdapat pada SPRINT mencakup penyampaian dokumen secara *online*, *tracking* perizinan secara *real-time*, pengecekan keabsahan Surat Tanda Terdaftar (STTD)/Surat Keputusan (SK) pelaku jasa keuangan, pendistribusian tugas dalam hal penerbitan izin pada internal OJK, pengelompokan jenis dokumen secara otomatis, verifikasi/permintaan kelengkapan dokumen secara *online*, serta monitor pekerjaan secara *online*. Kehadiran SPRINT telah banyak memberikan percepatan dalam hal pemrosesan izin di OJK. Hal ini telah dibuktikan pada perizinan *bancassurance*, yang semula membutuhkan waktu 101 hari kerja menjadi 19 hari kerja, serta perizinan Penerbitan Obligasi dan Sukuk Untuk Emiten Bank, yang semula membutuhkan waktu 105 hari menjadi 22 hari kerja.

Sistem Informasi yang memfasilitasi proses perizinan produk dan jasa keuangan lintas bidang dilakukan melalui satu pintu sehingga mempersingkat proses.

Bancassurance	APERD	
101 hari menjadi 19 hari kerja	105 hari menjadi 19 hari kerja	
AP & KAP	Sukuk Obligasi	
20 hari kerja	105 hari menjadi 22 hari kerja	

Dengan terus berkembangnya proses bisnis dan pergerakan organisasi di OJK, SPRINT dituntut untuk dapat lebih dinamis mengakomodir kebutuhan industri dan internal OJK dalam pemrosesan perizinan yang diajukan. Oleh karena itu, OJK melakukan penambahan lingkup perizinan serta *enhancement* pada aplikasi SPRINT dengan detail sebagai berikut:

1. Penambahan Modul Izin Penyampaian Pernyataan Pendaftaran/Aksi Korporasi (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) untuk perizinan di Pasar Modal.
2. Penambahan Modul Perizinan untuk kelembagaan Dana Pensiun Syariah di IKNB.
3. Penambahan Modul *Bancassurance* untuk kompartemen Syariah/Unit Usaha Syariah, serta penyederhanaan proses bisnis *Bancassurance* yang saat ini sudah ada di SPRINT.
4. Penambahan dan *enhancement* pada modul perizinan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang meliputi Ahli Syariah Pasar Modal, Penilai, Notaris, Konsultan Hukum, dan Pemeringkat Efek.
5. *Enhancement* modul WPE dan WAPERD serta penambahan fitur perizinan untuk asosiasi dan penyelenggara PPL dalam rangka pemrosesan perizinan.
6. *Enhancement* Modul Lembaga dan Produk investasi untuk dapat lebih fleksibel.

Menuju OJK *Digital Office*

B. APLIKASI PORTAL INTEGRASI PELAPORAN

Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, OJK memperkuat koordinasi dan sinergi antar lembaga melalui pertukaran informasi, seperti dengan Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Kementerian Dalam Negeri - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil). OJK berkoordinasi dengan BI sejak 2013 melalui Forum Koordinasi Makroprudensial-Mikroprudensial (FKMM) dan Forum Koordinasi Pertukaran Informasi dan Sistem Pelaporan (FKPISP). Salah satu fokus pembahasan dalam forum tersebut adalah terkait mekanisme dan koordinasi pertukaran informasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi kedua lembaga. Sampai saat ini, OJK melakukan pertukaran data Perbankan dengan BI secara berkala melalui Sarana Pertukaran Informasi Terintegrasi (SAPIT) OJK-BI.

Secara trilateral, OJK juga bekerja sama dengan BI dan LPS melalui pembangunan Integrasi Pelaporan. Integrasi Pelaporan merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang OJK Pasal 43. Pembangunan Integrasi Pelaporan bertujuan untuk mewujudkan sistem pelaporan yang efisien, menghindari redundansi, serta fleksibel, baik bagi industri dan otoritas terkait, guna mendapatkan informasi yang selaras untuk kegiatan perumusan kebijakan dan pengawasan industri jasa keuangan.

Portal Integrasi Pelaporan merupakan situs web yang menyediakan akses secara terintegrasi untuk penyampaian laporan Bank melalui sistem pelaporan milik Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Portal Integrasi Pelaporan dapat diakses melalui alamat <http://pelaporan.id>.

Dengan adanya Portal Integrasi Pelaporan, Bank dapat mengakses aplikasi-aplikasi pelaporan milik BI, OJK, dan LPS melalui mekanisme satu pintu. Satu akun yang terdaftar pada Portal Integrasi Pelaporan dapat digunakan untuk mengakses aplikasi-aplikasi pelaporan yang tersedia di Portal Integrasi Pelaporan. Di samping hal tersebut, Portal Integrasi Pelaporan digunakan pula oleh BI, OJK, dan LPS untuk saling bertukar informasi terkait dengan pelaporan Bank. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK Pasal 43 yang mengamanatkan bahwa OJK, BI, dan LPS wajib membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi.



Menuju OJK *Digital Office*

C. APLIKASI PELAPORAN LAPORAN BULANAN BPRS

Aplikasi Pelaporan Laporan Bulanan BPRS merupakan aplikasi yang dapat diakses secara online baik oleh BPRS maupun pihak internal OJK yang berkepentingan dalam rangka penyampaian dan monitoring Laporan Bulanan BPRS. Penyampaian Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan secara *online* melalui APOLO sesuai dengan POJK Nomor 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Melalui Sistem Pelaporan OJK dan SEOJK Nomor 18/SEOJK.03/2019 tentang Laporan Bulanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mulai diberlakukan untuk penyampaian laporan data posisi Oktober 2019. Laporan Berkala dan koreksi Laporan Berkala sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/9/PBI/2005 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat Syariah tetap disampaikan melalui Aplikasi Laporan Berkala BPRS (LB-BPRS) sampai dengan laporan data posisi November 2019.

Aplikasi Pelaporan Laporan Bulanan BPRS terdiri dari dua aplikasi, yaitu:

1. Aplikasi *Client*

Aplikasi *client* adalah aplikasi yang dipasang pada masing-masing komputer BPRS. Aplikasi *client* berfungsi untuk melakukan validasi file laporan, membentuk file kirim yang telah dienkripsi dan kompresi, dan mengirim file kirim tersebut ke server Aplikasi Pelaporan *Online* OJK (APOLO) melalui koneksi internet.

2. Aplikasi *Web*

Aplikasi *web* adalah aplikasi yang diakses melalui *browser* dengan alamat tautan <https://apolo.ojk.go.id>. Aplikasi *web* digunakan untuk mengirim file kirim (alternatif dari aplikasi *client*), memantau absensi laporan, menampilkan hasil laporan, dan mengunduh file instalasi aplikasi *client* dan dokumen.

● Pembahasan Ruang Lingkup ● Pengadaan ● Desain ● Pemrograman ● Pengujian ● Implementasi

Triwulan III-2019

	Nama Aplikasi	Tahapan Pekerjaan
Pengelolaan Sumber Daya Pendukung	Mobile App Financial Locator	
	Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO)	
	Sistem Informasi Remunerasi (OJK SAR)	
	Sistem Informasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	
	Sistem Informasi Ketentuan Perbankan Online (SIKEPO)	
	Sistem Informasi Administrasi dan Manajemen Penyidikan (SIANDIK)	
Integrasi	Aplikasi Database <i>Track Record</i> Terintegrasi untuk Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK)	
	Aplikasi <i>Single Sign On</i> (SSO) IKNB	
	Enterprise Data Warehouse (EDW) dan Business Intelligence (BI) SJK Terintegrasi Tahap 1	
	Dashboard QPR User Interface (UI)	
	Dashboard Pendalaman Pasar Keuangan	
	Data Warehouse Pasar Modal (Integrasi SPE-IDXNET)	
	Data Warehouse Pasar Modal (Pemantauan, Validasi dan Perbaikan Data)	
	Aplikasi Mobile EIS (termasuk Bank Wakaf Mikro)	
	Integrasi Bertahap Sistem Informasi Tahap 1 (Middleware)	
	Master Data Management (MDM) dan Data Referensi Sektor Jasa Keuangan (SJK) Terintegrasi	

4.7 Logistik

4.7.1 Penyediaan Gedung Kantor Pusat

OJK telah menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada 2 April 2019 dengan Kementerian Keuangan tentang Penggunaan Barang Milik Kementerian Keuangan. PKS itu berupa penggunaan tanah yang terletak di Lot 1 Sudirman Center Business District (SCBD). Tujuan dari PKS ini adalah untuk mewujudkan

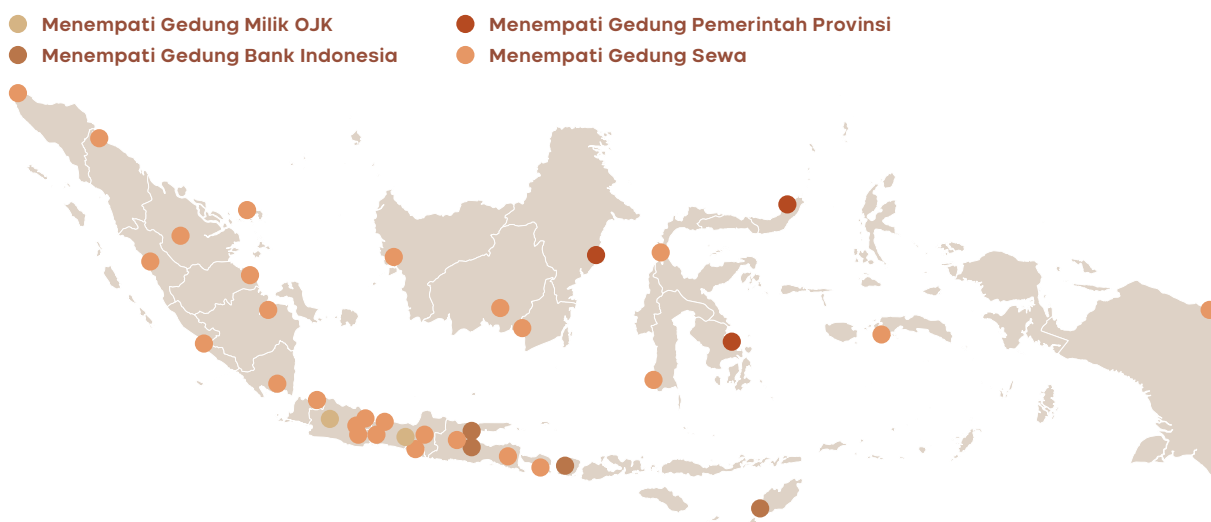
penyediaan gedung kantor bagi OJK dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan. Progres saat ini adalah pada tahapan pemilihan penyedia untuk manajemen konstruksi dalam Rangka Pembangunan Gedung Indonesia Financial Center (IdFC) di Lot.1 SCBD.

4.7.2 Penyediaan Gedung Kantor Regional/OJK

Terkait penyediaan gedung Kantor Regional dan Kantor OJK di daerah, saat ini terdapat dua kantor yang merupakan milik OJK, empat Kantor OJK yang merupakan pinjam pakai aset milik pemerintah daerah, dan tiga Kantor OJK yang menempati Gedung BI. OJK

sedang dalam proses pembangunan KOJK Solo, KOJK Daerah Istimewa Yogyakarta, KOJK Nusa Tenggara Barat. Selain itu terdapat juga gedung sewa sebanyak 26 gedung kantor. Untuk detail perinciannya adalah sebagai berikut:

Grafik IV - 10 ◇ Lokasi KR/KOJK



4.7.3 Pengembangan Pengaturan dan Sistem Logistik

Terkait dengan pengaturan kelogistikan, selama periode laporan OJK sedang menyusun beberapa ketentuan yaitu PDK tentang Kearsipan, PDK Barang Milik OJK, PDK tentang Pengamanan, SEDK tentang Sistem Pengelolaan Naskah Dinas dan Arsip, dan SEDK Asuransi Barang Milik OJK.

Terkait dengan sistem pengadaan mandiri, OJK sedang melakukan verifikasi terhadap penyedia yang melakukan pendaftaran pada SIPROJEK. Beberapa paket pengadaan pun telah dilakukan dengan menggunakan sistem ini. Sampai triwulan III-2019 terdapat 36 paket pengadaan telah dilakukan dengan menggunakan sistem ini, dengan total nilai pengadaan sebesar Rp464 juta.

Di samping itu OJK telah melakukan *pilot project* perihal penggunaan Sistem Naskah Dinas dan Arsip (SIPENA) ke beberapa Satuan Kerja. Dilanjutkan sosialisasi *training of trainer* kepada seluruh satuan kerja yang ada di kantor pusat dan daerah terkait penggunaan SIPENA. Tujuan dari sosialisasi dimaksud adalah peserta dapat melakukan sosialisasi di satuan kerja masing-masing sehingga seluruh insan OJK dapat menggunakan sistem ini.

Tabel IV - 5 ◇ Pemberian Izin Definitif Tugas Belajar Pegawai OJK

SKIM	Jenjang	Keberangkatan / Mulai Program Studi (2019)		
		Juli	Agustus	September
SKIM 1	S2 (Master)	-	4 orang	3 orang
SKIM 2	S2 (Master)	-	1 orang	2 orang
SKIM 3	S2 (Master)	2 orang	-	-

4.8 SDM dan Tata Kelola Organisasi

4.8.1 Pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM)

Menindaklanjuti proses penerimaan pegawai melalui jalur umum dengan metode penelusuran bakat (*talent scouting*). Pada triwulan III-2019, setelah melewati proses rekrutmen dengan metode/format *talent scouting*, OJK secara resmi telah menerima 112 orang calon pegawai baru angkatan 4 (PCS 4). Kepada calon pegawai tersebut dilakukan Program Pembekalan PCS 4 yang dibuka secara resmi oleh Ketua Dewan Komisioner OJK pada 1 Agustus 2019 di Wisma Mulia 2. Adapun program pembekalan yang dilaksanakan antara lain meliputi pendidikan klasikal, kesamaptaaan, *On The Job Training*, dan orientasi kerja.

4.8.2 Peningkatan Kompetensi Pegawai

1. Seleksi Izin Prinsip Tugas Belajar

Selama periode laporan, dilakukan proses pemberian izin program pendidikan formal dalam rangka mengembangkan kompetensi Pegawai melalui peningkatan basis pengetahuan akademis sesuai kebutuhan. Pada triwulan III-2019 terdapat 13 pegawai yang telah mendapat izin tugas belajar yaitu:

2. Program Pendidikan Formal

Program Pendidikan Formal merupakan bentuk pengembangan SDM pada jenjang pendidikan formal yang diberikan kepada pegawai OJK potensial yang telah memenuhi kriteria, baik untuk jenjang pendidikan Strata-2 maupun Strata-3. Selama triwulan III-2019, telah diterbitkan 13 surat tugas dengan memberangkatkan tujuh orang pegawai untuk SKIM 1 (beasiswa penuh dari OJK), empat orang pegawai untuk SKIM 2 (beasiswa dari pihak lain dengan *top up* fasilitas dari OJK), dua orang pegawai untuk SKIM 3 (beasiswa dari pihak lain dengan remunerasi dari OJK).

3. Program Pengembangan Kompetensi

Program Pengembangan Kompetensi pegawai baik untuk kompetensi teknis (*hard skill*) maupun perilaku (*soft skill*) yang telah dilaksanakan pada triwulan ke III-2019 sebagai berikut:

a. Program Sertifikasi Pengawas Sektor Jasa Keuangan (SJK)

Pada triwulan III-2019 telah dilaksanakan 4 *batch* program Sertifikasi Pengawas Sektor Jasa Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Sertifikasi Pengawas SJK Level 2 sebanyak 2 *batch* dengan total 64 peserta.
- 2) Sertifikasi Pengawas SJK Level 3 sebanyak 2 *batch* dengan total 55 peserta

b. PPK Non In House Dalam Negeri

PPK Non In House Dalam Negeri tercatat selama triwulan ke III-2019 telah mengirimkan sebanyak 131 orang pegawai

c. PPK Non In House Luar Negeri

PPK Non In House Luar Negeri tercatat selama triwulan ke III-2019 telah mengirimkan sebanyak 24 orang pegawai mengikuti program pengembangan kompetensi teknis dan non teknis, dalam 8 judul program.

d. PPK In House Dalam Negeri

PPK In House Dalam Negeri selama triwulan ke III-2019 telah melaksanakan 18 judul IHT untuk kompetensi Teknis dan Kompetensi Perilaku dengan jumlah peserta sejumlah 634 orang.

4.8.3 Program Asesmen

Selama triwulan III-2019, OJK melaksanakan asesmen terhadap 87 pegawai. Tujuan dari penyelenggaraan asesmen adalah untuk melengkapi data profil pegawai dalam rangka pengembangan SDM di masa yang akan datang. Kompetensi yang di ases adalah kompetensi perilaku yang terdiri dari kompetensi inti, kompetensi kepemimpinan dan kompetensi fungsi.

4.8.4 Learning Management System

Learning Management System (LMS-OJK) mulai dimanfaatkan sebagai *platform* belajar bagi calon pegawai yang sedang melaksanakan pendidikan

serta dalam penyelenggaraan sertifikasi pengawas jasa keuangan. Adapun modul-modul yang telah tersedia di dalam LMS antara lain, Modul Bisnis & Produk IKNB, Tata Kelola & Manajemen Risiko IKNB, Produk & Aktifitas Bank, Siklus RBS dalam Perbankan, Struktur dan Produk Pasar Modal Indonesia dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia. Saat ini LMS-OJK dapat diakses melalui situs web www.lms.ojk.go.id

Hingga triwulan III-2019, LMS OJK sudah diakses sebanyak 17.281 kali oleh 498 pengguna dengan jumlah Modul *E-learning* Interkatif yang tersedia adalah tujuh Modul di samping Modul Klasikal Pendidikan Calon Staf, Bank Soal dan bacaan lainnya.

Tabel IV - 6 ◇ Modul *E-learning* yang Tersedia

Bidang IKNB	
1.	Produk IKNB
2.	Tata Kelola dan Manrisk IKNB
Bidang Perbankan	
1.	Produk dan Aktivitas Bank
2.	RBS Perbankan
Bidang Pasar Modal	
1.	Struktur dan Produk Pasar Modal
2.	Pengawasan Pasar Modal
Bidang Manajemen Strategis	
1.	<i>Coaching Skill</i>

4.9 OJK Institute

4.9.1 Pengembangan SDM SJK

Program Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan (SJK) ini merupakan bentuk kontribusi OJK kepada sektor jasa keuangan dalam membentuk SDM SJK yang

kompeten dan profesional. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyusunan Program Pengembangan SDM SJK yang telah dilakukan sebagai berikut:

Tabel IV - 7 ◇ Program Pengembangan SDM SJK

No.	Program Pengembangan SDM SJK	Jumlah Peserta
1.	Workshop Bank Wakaf Mikro Batch II	41 orang
2.	Workshop ISMS Awareness Based On ISO 27001	106 orang
3.	Workshop Pemanfaatan Informasi Debitur dari SLIK dalam Analisis Kredit (BPR/BPRS)	85 orang
4.	Training Analisis Lingkungan Hidup Tingkat Dasar Batch I	41 orang
5.	Workshop ToT Pendampingan Penerapan Program APU-PPT Berbasis Risiko Bagi Sektor Jasa Keuangan Batch 3	77 orang
6.	Workshop Penilaian Emiten Pertambangan bagi Profesi Penunjang Pasar Modal	150 orang
7.	Training Analisis Lingkungan Hidup Tingkat Menengah Batch I	40 orang
8.	Workshop Digital Business Transformation	150 orang
9.	Seminar Membedah Insurtech	300 orang
10.	Sustainable Finance - IDH Workshop	32 orang
11.	Supervisory Technology and Regulatory Technology Workshop	40 orang
12.	Seminar Cyber Risk dan Cyber Security (Indonesia Fintech Summit & Expo 2019)	200 orang
13.	Seminar Fintech Innovation in Capital Market (Indonesia Fintech Summit & Expo 2019)	200 orang
14.	Workshop Bank Wakaf Mikro Batch II	41 orang

4.9.2 Kaji Ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

Dalam rangka mengembangkan kompetensi SDM di sektor jasa keuangan, perlu disusun suatu standar kompetensi untuk penyetaraan kompetensi SDM SJK menghadapi persaingan global. OJK sebagai instansi teknis yang berwenang menetapkan jenjang kualifikasi di sektor jasa keuangan, telah melaksanakan beberapa tahapan kegiatan dalam rangka penyusunan/kaji ulang Rancangan SKKNI (RSKKNI) dan Rancangan KKNi (RKKNi) bidang sektor jasa keuangan. Berikut adalah realisasi penyusunan dan kaji Ulang RSKKNI dan RKKNi selama triwulan III-2019:

- FGD Pembahasan RSKKNI Bidang Penjaminan Tahap III
- Konsinyering Pembahasan RSKKNI Bidang Manajemen Risiko
- Verifikasi Internal RSKKNI Bidang Penjaminan
- Prakonvensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Penjaminan
- FGD Penyusunan Rancangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pasar Modal.

- FGD Rancangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Perasuransian.
- Verifikasi Eksternal Rancangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pasar Modal.

4.9.3 Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian di OJK

Program praktek kerja di lingkungan OJK bagi pelajar SMA/SMK dan Mahasiswa guna mengembangkan kompetensi dan memberikan pengalaman kerja serta wawasan baru dalam dunia kerja. Realisasi pada triwulan III-2019 yaitu sejumlah 93 Mahasiswa.

OJK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan kesempatan kepada para peneliti/ mahasiswa yang berasal dari lembaga pendidikan dalam rangka memperoleh informasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi OJK. Selama periode triwulan III-2019 terdapat 18 penelitian dalam rangka skripsi/tesis/disertasi.

Grafik IV - 11 ◇ Peserta Praktek Kerja Lapangan



4.9.4 Program Visit OJK

Program Kunjungan atau *Visit OJK* adalah program pengenalan organisasi, tugas dan fungsi OJK dan diseminasi mengenai kebijakan OJK yang ditujukan kepada masyarakat khususnya pelajar/mahasiswa atau instansi/lembaga lain yang melakukan kegiatan studi banding ke OJK. Jumlah kunjungan untuk triwulan III-2019 yaitu sejumlah 11 kunjungan dengan total 745 orang.



4.9.5 OJK Mengajar

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kontribusi OJK kepada masyarakat, khususnya mahasiswa dan pihak lain yang terkait dalam sektor jasa keuangan dalam rangka peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia. Tujuan program ini adalah meningkatkan pemahaman kepada sektor jasa keuangan terhadap tugas dan fungsi OJK, mengenalkan produk dan jasa sektor jasa keuangan kepada masyarakat. Pada triwulan III-2019 telah dilaksanakan kegiatan OJK Mengajar di Universitas Halu Oleo Kendari, pada tanggal 29 Agustus 2019 sejumlah 250 orang.

4.9.6 Penelitian OJK Institute dan e-library

Salah satu tugas OJK Institute adalah melaksanakan penelitian yang bersifat akademis di sektor jasa keuangan maupun tema lain yang terkait. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dimaksud, OJK Institute bekerja sama dengan lembaga/institusi pendidikan. Adapun topik penelitian tahun ini adalah (1) *digital*

banking, (2) pengembangan kompetensi SDM SJK menghadapi Industri 4.0, (3) kolaborasi fintech, UMKM, bank dan sektor jasa keuangan lainnya. Kegiatan selama triwulan III-2019 yang dilaksanakan dalam rangka penelitian dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data Riset Pengembangan UMKM dan Inklusi Keuangan melalui Kolaborasi Lembaga Keuangan, *Financial Technology*, Lembaga Keuangan Mikro dan Community Agent (Universitas Trisakti);
2. Riset Strategi dan Langkah-Langkah Transformasi Digital di Industri Perbankan (Universitas Negeri Solo);
3. Riset Kerangka Kompetensi Sektor Jasa Keuangan dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0 (Universitas Telkom)

Selanjutnya, OJK Institute juga mengembangkan *e-library* dalam rangka memberikan fasilitas pembelajaran untuk pegawai OJK maupun masyarakat khususnya SDM sektor jasa keuangan, pelajar dan mahasiswa.

4.10 Manajemen Perubahan

OJK mengusung tema "Insan OJK Andal" yang difokuskan pada penguatan budaya belajar berkelanjutan, antara lain guna menguatkan kompetensi dan konsistensi Insan OJK dalam bekerja. Secara umum, Indeks Budaya OJK-wide mencapai nilai 5,84 dari skala 6. Sepanjang 2019, seluruh Insan OJK berpartisipasi dalam menjalankan program budaya yang terdiri dari:

1. OJK Cerdas

Program pengembangan perilaku belajar berkelanjutan untuk memperkuat kompetensi dan memperluas wawasan Insan OJK yang dibutuhkan dalam melayani *stakeholders*. Sepanjang triwulan III-2019, Insan OJK telah menjalankan rangkaian program 558 program *knowledge sharing* tatap muka, dan sejumlah program non-tatap muka lainnya seperti *mini library*, bedah buku, kuis, dll.

Hasil survei OJK Cerdas menunjukkan nilai manfaat implementasi 5,51 dari skala 6.

2. OJK Ringkas

Program yang ditujukan untuk menyederhanakan proses kerja dan melakukan *update* informasi secara lebih efektif dan efisien atau yang memberikan nilai tambah kepada *stakeholder*, terdiri dari:

- a. Pengembangan sistem atau aplikasi baru
- b. Optimalisasi sistem atau aplikasi yang sudah ada
- c. Perubahan proses bisnis guna percepatan kinerja

Berdasarkan hasil survei, *stakeholder* menilai program OJK Ringkas berada pada posisi 5,42 dari skala 6.

3. OJK Tangkas

Program pengembangan perilaku Insan OJK yang mendukung gaya hidup *work-life balance* melalui kegiatan peningkatan kesehatan jasmani dan rohani dengan mengutamakan nilai sinergi. Selama triwulan III-2019, Insan OJK telah melaksanakan 447 program tatap muka yang ditujukan untuk mendukung *work-life balance*.

4.10.1 Program Manajemen Perubahan

OJK menyelenggarakan sejumlah aktivitas guna mengakselerasi proses internalisasi kultur dan nilai-nilai strategis melalui:

1. Change Agent Forum

Change Agent Forum diselenggarakan dengan tujuan untuk mempersiapkan *Change Agent*, para penggerak program budaya, dalam menjalankan dan memonitor program perubahan guna mendukung tema Program perubahan.

Secara garis besar kegiatan terdiri dari *Townhall Meeting* bersama Anggota Dewan Komisiner bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, pemaparan hasil evaluasi program budaya Triwulan I dan II tahun 2019, pembekalan *soft skill Change Agent* dalam mengkomunikasikan program budaya di masing-masing Satuan Kerja, *brainstorming* program budaya OJK Way 2019 & 2020, serta sesi konsultasi dan tanya jawab *Change Agent*.

2. Insiasi program budaya OJK Way untuk pegawai baru (PCS 4)

Program ini disusun guna menanamkan dan mendorong penerapan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai strategis kepada para pegawai baru OJK.

Dalam suasana kelas yang sangat dinamis, seluruh pegawai baru menerima materi dan melakukan serangkaian aktivitas terkait 5 nilai strategis OJK, 15 perilaku utama, dan program budaya OJK Way.

3. Pendampingan Manajemen Perubahan dalam Transformasi Digital

Industri Jasa Keuangan memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terkait layanan OJK. Untuk itu, OJK melakukan perubahan digital untuk mendorong transformasi proses operasional menjadi lebih cepat, fleksibel dan modern dengan dukungan sistem informasi yang handal, yakni:

- Penyusunan pedoman manajemen perubahan dalam mendukung transformasi digital
- Penyelenggaraan IT *Security Awareness Festival* bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran insan OJK akan pentingnya berperilaku sadar keamanan informasi menuju *digital office*. Event ini dikemas menarik dalam bentuk *talkshow*

serta pameran IT dan *digital transformation* oleh beberapa instansi yang tergabung dalam *Change Management Forum* Indonesia dan penyedia jasa IT.

- Serial kampanye terkait IT *security awareness*.
- Sosialisasi penggunaan Sistem Pengelolaan Naskah Dinas dan Arsip (SIPENA)
- Penggunaan fitur *virtual meeting* untuk koordinasi lintas Satuan Kerja

4.10.2 Media Komunikasi Budaya dan Perubahan

1. Penerbitan Majalah Integrasi

Majalah internal bulanan OJK ini berisikan informasi tentang implementasi program perubahan, budaya, dan kinerja Satuan Kerja yang bertajuk:

- Wujud Nyata Inklusif OJK
- SDM Unggul Indonesia Maju
- 3S Wujudkan Pelayanan Prima

2. Penyampaian Pesan Anggota Dewan Komisiner

Pesan Anggota Dewan Komisiner merupakan salah satu media komunikasi antara Anggota Dewan Komisiner dengan Insan OJK. Pesan berkala ini disampaikan melalui *e-mail blast*, akun *Instagram @ojkway*, dan *e-magazine website* budaya internal OJK Way.

Tradisi ini diharapkan mampu menginspirasi dan memotivasi Insan OJK untuk selalu semangat berkarya dalam mengimplementasikan nilai-nilai strategis OJK. Adapun pesan yang telah disampaikan adalah:

- Pesan Ketua Dewan Komisiner "SDM OJK Unggul, Sektor Jasa Keuangan maju"
- Pesan Wakil Ketua Dewan Komisiner "Paham Teknologi, Cerdas Melayani"
- Pesan Ketua Dewan Audit "Cerdas Berintegritas"

3. Pengkinian Konten Media Kampanye

Secara berkala, OJK melakukan pengkinian konten program perubahan dan budaya pada *screensaver* komputer/laptop pegawai, OJK Way TV, *booklet*, dan akun *Instagram @ojkway* agar seluruh Insan OJK lebih memahami, mendukung, dan menjalankan program perubahan dengan sepenuh hati. Pengkinian materi komunikasi meliputi:

- Kampanye program budaya kerja OJK Way, informasi terkini terkait kinerja OJK dan pesan *work-life balance* untuk memacu semangat kerja Insan OJK,
- Penerbitan *Booklet* Pedoman Contoh Perilaku Nilai-nilai strategis, serta
- Serial kampanye terkait contoh pedoman perilaku Insan OJK dan *Change Leaders*, serta *Grit*.

Singkatan dan Akronim

ADK	Anggota Dewan Komisioner
AIMRPK	Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas
APERD	Agen Penjual Efek Reksa Dana
ASEAN	<i>Association of Southeast Asian Nations</i>
ATM	<i>Automatic Teller Machine</i>
ATMR	Aset Tertimbang Menurut Risiko
AUTP	Asuransi Usaha Tani Padi
BAE	Biro Administrasi Efek
BAMPPPI	Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia
BAPMI	Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia
BEI	Bursa Efek Indonesia
BI	Bank Indonesia
BMAI	Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia
BMDP	Badan Mediasi Dana Pensiun
BOPO	Beban Operasional Pendapatan Operasional
BPD	Bank Pembangunan Daerah
BPR	Bank Perkreditan Rakyat
BS	<i>Board Seminar</i>
BSA	<i>Basic Saving Account</i>
BUK	Bank Umum Konvensional
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUS	Bank Umum Syariah
CRM	<i>Costumer Relationship Management</i>
DES	Daftar Efek Syariah
DPK	Dana Pihak Ketiga
DPLK	Dana Pensiun Lembaga Keuangan
DPPK PPIP	Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti
DPPK PPMP	Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
EBA-SP	Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi
ETP	<i>Electronic Trading Platform</i>
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>
FKMM	Forum Koordinasi Makroprudensial-Mikroprudensial
FKSSK	Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan
FREKS	Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah
FSA	<i>Financial Services Agency</i>
FSAP	<i>Financial Sector Assessment Program</i>
FSS	<i>Financial Supervisory Service</i>
GCG	<i>Good Corporate Governance</i>
HMETD	Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
IFAR	Investasi Terhadap Total Aset
IFC	<i>International Finance Corporation</i>
IFSB	<i>Islamic Financial Services Board</i>
IGBF	<i>Indonesia Government Bond Futures</i>
IHSG	Indeks Harga Saham Gabungan
IJK	Industri Jasa Keuangan
IKI	Indikator Kinerja Pegawai
IKNB/NBFI	Industri Keuangan Non Bank/ <i>Non Bank Financial Industry</i>
IKU/KPI	Indikator Kerja Utama/ <i>Key Performance Indicators</i>
IMF	<i>International Monetary Fund</i>

IOSCO	<i>International Organization of Securities Commission</i>
IS	Inisiatif Strategis
JARING	Jangkauan, Sinergi, dan <i>Guideline</i>
JII	<i>Jakarta Islamic Index</i>
KDK	Keputusan Dewan Komisiner
KI	Kredit Investasi
KIK	Kontrak Investasi Kolektif
KK	Kredit Konsumsi
KKB	Kredit Kendaraan Bermotor
KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KMK	Kredit Modal Kerja
KOJK	Kantor OJK
KPD	Kontrak Pengelolaan Dana
KPMM/CAR	Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum/ <i>Capital Adequacy Ratio</i>
KPR	Kredit Pemilikan Rumah
KR	Kantor Regional
KSEI	Kustodian Sentral Efek Indonesia
KYC	<i>Know Your Customer</i>
LAPS	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
LAPSPI	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia
LDR	<i>Loan to Deposit Ratio</i>
LJK	Lembaga Jasa Keuangan
LJKNB	Lembaga Jasa Keuangan Non Bank
LKM	Lembaga Keuangan Mikro
LoI	<i>Letter of Intent</i>
LPHE	Lembaga Penilaian Harga Efek
LPS	Lembaga Penjamin Simpanan
MEA/AEC	Masyarakat Ekonomi Asean/ <i>Asean Economic Community</i>
MI	Manajer Investasi
MIA	Manajer IKU dan Anggaran
MoU	<i>Memorandum Of Understanding/Nota Kesepahaman</i>
MSAK	Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja
NAB	Nilai Aktiva Bersih
NIM	<i>Net Interest Margin</i>
NPF	<i>Non Performing Finance</i>
NPL	<i>Non-Performing Loan</i>
OECD	<i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
PDB	Produk Domestik Bruto
PDK	Peraturan Dewan Komisiner
PDN	Posisi Devisa Neto
PE	Perusahaan Efek
PMK	Protokol Manajemen Krisis
POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
POKTAN	Kelompok Tani
PPKB	Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang
PSP	Pemegang Saham Pengendali
PUB	Penawaran Umum Berkelanjutan
PUJK	Pelaku Usaha Jasa Keuangan
Rakerstra	Rapat Kerja Strategis
RBS	<i>Risk Based Supervisory</i>
RDK	Rapat Dewan Komisiner
REPO	<i>Repurchase Agreement</i>
RKA	Rencana Kerja Anggaran
ROA	<i>Return on Assets</i>
ROE	<i>Return on Equity</i>
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Satgas	Satuan Tugas
SBN	Surat Berharga Negara



SBSN	Surat Berharga Syariah Negara
SDM	Sumber Daya Manusia
SEDK	Surat Edaran Dewan Komisioner
SEOJK	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
SIAI	Sistem Informasi Audit Internal
SID/DIS	Sistem Informasi Debitur/ <i>Debtor Information System</i>
SIMARIO	Sistem Informasi Manajemen Risiko
SiMOLEK	Mobil Literasi Keuangan
SimPel	Simpanan Pelajar
SIMPEL	Sistem Pengelolaan Kinerja
SIPMI	Sistem Informasi Pelaporan Market Intelijen
SISPANDI	Sistem Informasi Pengelolaan Kendaraan Dinas
SJK	Sektor Jasa Keuangan
SLA	<i>Service Level Agreement</i>
SMES	Sederhana, Mudah, Ekonomis, dan Segera
SMF	Sarana Multi Finance
SNKI	Strategis Nasional Keuangan Inklusif
SNLKI	Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia
SPE	Sistem Pelaporan Emiten
SPP/WBS OJK	Sistem Pelaporan Pelanggaran OJK/ <i>Whistle Blowing System</i> OJK
SRO	<i>Self Regulatory Organization</i>
STP	<i>Straight Through Processing</i>
STTD	Surat Tanda Terdaftar
SUN	Surat Utang Negara
TKI	Tenaga Kerja Indonesia
TOT	<i>Training of Trainers</i>
UMKM/MSME	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah/ <i>Micro, Small, and Medium Enterprises</i>
UU	Undang-Undang
UU OJK	Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan
UUS	Unit Usaha Syariah
WAPERD	Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana
WBS	<i>Whistle Blowing System</i>
WMI	Wakil Manajer Investasi
WPEE	Wakil Penjamin Emisi Efek
WPPE	Wakil Perantara Pedagang Efek
yoy	<i>year over year</i>
ytd	<i>year to date</i>





Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
Tel. 62 21 296 00000
www.ojk.go.id

 [official.ojk](https://www.facebook.com/official.ojk)
 [@ojkindonesia](https://twitter.com/ojkindonesia)
 [ojkindonesia](https://www.instagram.com/ojkindonesia)
 [Jasa Keuangan](https://www.youtube.com/JasaKeuangan)